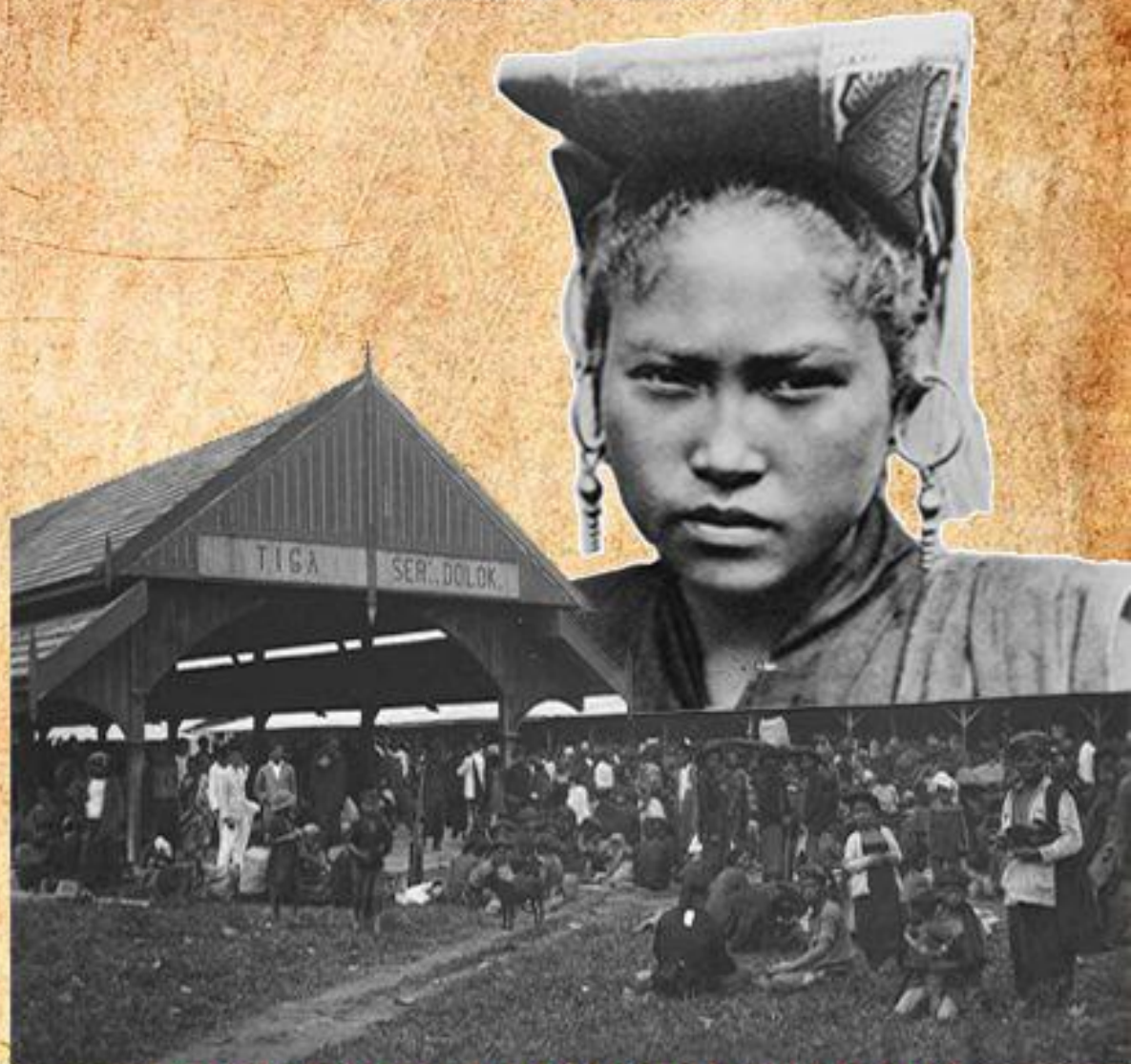


EROND L. DAMANIK

EROND L. DAMANIK

POTRET SIMALUNGUN TEMPOE DOELOE



POTRET SIMALUNGUN TEMPOE DOELOE

Menafsir Kebudayaan Lewat Foto





POTRET SIMALUNGUN TEMPOE DOELOE

Menafsir Kebudayaan Lewat Foto

THE
Character Building
UNIVERSITY



Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

POTRET SIMALUNGUN TEMPOE DOELOE

Menafsir Kebudayaan Lewat Foto

Eron L. Damanik

THE
Character Building
UNIVERSITY

Simetri Institute
Medan
2018



DAMANIK, Erond L. *penulis*
Potret Simalungun Tempoe Doeloe:
Menafsir Kebudayaan Lewat Foto

Cetakan pertama
Medan-Simetri Institute, Mei, 2018

Georgia, size 11, halaman 6 + viii + 353

ISBN: 978-602-50158-5-4

1. Potret
2. Simalungun
3. Tempoe Doeleo
4. Kebudayaan
5. Foto

Hak cipta 2018 pada penulis @ Erond L. Damanik
Dilarang mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini dengan cara
apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi tanpa
seizin sah dari penerbit.

Gambar sampul:

*Perempuan Simalungun tahun 1945 dan Pasar Saribudolog tahun
1925. Sumber: Collectie Tropenmuseum dan kitlv.nl*

Cetakan pertama : Mei 2018
Desain sampul : Tim Simetri Institute
Layout : Tim Simetri Institute

Diterbitkan oleh:
Simetri Institute
Medan-20225-Sumatera Utara
simetriinstitute@gmail.com

dicetak oleh:
Sigma Printshop, Yogyakarta
Isi diluar tanggungjawab percetakan



***Untuk mereka penerus bangsa:
Fany, Getha, Glen, Elo, Geby,
Rara, Ila, Eti dan Tesya***

PENGANTAR PENERBIT

Buku dengan judul *Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir Kebudayaan Lewat Foto* ini adalah hasil pemikiran dan interpretasi penulisnya terhadap koleksi foto arsip kolonial tentang Simalungun yang tersedia pada lembaga arsip di Belanda. Sebagai hasil pemikiran penulis yang menjadi bagian dari etnik Simalungun ini, maka buku ini memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang kebudayaan Simalungun yang tergambar lewat foto-foto arsip kolonial itu. Penulisnya memiliki pengetahuan yang cukup guna menafsir foto-foto itu yang kemudian dideskripsikan melalui narasi sejarah sosial etniknya.

Sebagaimana disebut penulisnya, foto arsip kolonial tentang Simalungun memiliki fungsi seperti: i) perekam objek dan subjek pada eranya, ii) media ekspresi subjek, iii) mengkomunikasikan ide dan gagasan, iv) kesenangan, dan v) dokumen pribadi (arsip pribadi). Sebagai alat bantu analisis sejarah tekstual dan kontekstual, maka foto arsip Simalungun membantu analisis kesejarahan tentang: *pertama* desain dan tata ruang di era kolonial di Simalungun, *kedua* memahami teks dan kontekstual historis masyarakat dan kebudayaan Simalungun di era lampau, *ketiga* jejak (bukti) digital peradaban manusia dan lingkungan Simalungun di masa lampau, *keempat* lukisan atau gambaran tentang situasi, keadaan, dan peristiwa di Simalungun pada era lampau serta *kelima* refleksi konstruksi kesadaran Simalungun sebagai bagian dari bangsa Indonesia guna memperkokoh identitas nasional dan kolektif Simalungun.

Dalam hal ini, arsip foto tentang Simalungun selama era dan pasca kolonialisme hingga tahun 1960 adalah catatan sejarah (*history record*) yang terekam dalam bentuk visual. Catatan dan rekaman visual ini merupakan hubungan singkat antara fotografer dan objek Simalungun. Foto-foto tersebut adalah bukti riil tentang kejadian ataupun peristiwa Simalungun di masa lampau yang dapat dilihat pada masa kini (*real object can be seen*).

Arsip foto berguna untuk melihat kebudayaan materil untuk dapat dipahami (*to present material culture to be viewed*). Foto baik yang *by design* maupun natural (alamiah), ataupun di studio foto maupun *in situ* harus melibatkan analisis tekstual dan kontekstual sehingga dapat berbicara dengan mata (*speak to the eyes*). Karena itu, foto bukanlah sekedar kenangan terhadap masa lalu, tetapi yang

lebih penting adalah bahwa foto dapat menjadi alat bantu analisis kebudayaan di masa silam. Dari pemahaman terhadap tekstual dan kontekstual foto, maka kebudayaan (*culture*) maupun peradaban (*civilization*) dapat didefenisikan.

Medan, akhir April 2018
Penerbit



THE
Character Building
UNIVERSITY

KATA PENGANTAR

Apabila memasukkan kata kunci (*keyword*) ‘Simalungun’ di <http://media-kitlv.library.leiden.edu/> diperoleh sebanyak 454 lembar foto arsip. Sedangkan memasukkan kata kunci ‘siantar’ misalnya, diperoleh sebanyak 295 lembar foto arsip. Di laman <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/> diperoleh koleksi foto sebanyak 553 foto arsip dan kata kunci ‘siantar’ diperoleh sebanyak 291 foto arsip. Di laman lain <https://collectie.wereldculturen.nl/> dengan memasukkan kata kunci ‘Simalungun’ ditemukan sebanyak 419 foto arsip, sedangkan dengan kata kunci ‘Siantar’ terdapat 122 foto arsip.

Foto-foto dengan memasukkan kata kunci ‘Simalungun’ dan ‘Siantar’ pada ketiga situs dimaksud menunjukkan adanya foto yang sama (*double*). Karena itu, dibutuhkan klasifikasi dan penghitungan satu per satu foto dimaksud sehingga diperoleh jumlah foto riel tentang Simalungun. Namun demikian, diperkirakan sebanyak 450 hingga 700 foto arsip tentang Simalungun tersedia di lembaga penyedia arsip kolonial di Belanda. Beberapa foto yang dimasukkan dalam naskah ini diambil dari kedua situs penyelia koleksi dimaksud tanpa membayar (*free*). Karena itu, foto-foto yang di unduh (*download*) ini cenderung berukuran kecil (kapasitasnya rendah). Oleh sebab itu, beberapa foto tampak kurang cerah karena resolusinya rendah. Namun demikian, foto-foto dimaksud paling tidak sangat penting dijelaskan guna menafsirkan dan memahami kebudayaan Simalungun sewaktu perjumpaannya dengan pemerintah kolonial sejak 1906.

Foto-foto tersebut menyuguhkan koleksi seperti peta, atribut kultural seperti *laklak* (tulisan di kulit kayu), rumah adat, topeng, arca batu pemujaan, alat musik, dan lain-lain maupun performa kultural seperti *dihar* dan tari (*tortor*), keadaan geografi, topografi, perkampungan, anak-anak, perempuan, lelaki Simalungun ataupun aktifitas sehari-hari yang menunjukkan *hasimalungunon*. Demikian pula tersaji koleksi foto tentang pengaruh kehadiran kolonial seperti *municipality* dan seluruh infrastruktur, pertemuan atau rapat pejabat kolonial dan pejabat lokal (*zelfbestuur*) Simalungun.

Sedangkan arsip foto dari lembaga *zending* yang di insert dan dibahas dalam naskah ini berasal dari reproduksi (hasil scan) karena lembaga arsip *zending* di Wupertal Jerman tidak dapat diakses secara *online* (situs berbayar). Sejumlah foto tokoh-tokoh

Simalungun yang turut dibahas dari periode pasca kemerdekaan diambil repro foto dari beberapa referensi yang tersedia pada penulis naskah ini.

Pada awalnya, manakala melihat foto-foto yang tersedia itu pada *website* penyedia foto di Belanda ini, terbersit di benak kepala penulis tentang apa yang harus dilakukan dengan foto itu. Kemudian, beberapa referensi telah penulis baca dimana referensi itu menjadi alat bantu analisis pada berbagai tema kajian. Sebut saja seperti Jean Gelman Taylor (tentang kehidupan sosial di Jakarta), Jean Gelman Taylor (narasi foto tentang Aceh), Abidin Kusno (tentang memori kolektif dan identitas Jakarta), Purnomo Basundoro (tentang Malang dan Surabaya), Adhisakti, (tentang wisata sejarah di Yogyakarta), Loderics, (tentang bangunan kolonial di Medan), Dirk A. Buiskool (tentang wisata sejarah bangunan kolonial di Medan), Wijanarka (tentang desain kawasan bersejarah kota Semarang). Sejumlah referensi ini mendasari penulis guna menganalisis foto dalam rangka menafsirkan kebudayaan Simalungun masa kini berdasarkan arsip foto kolonial.

Sebagai arsip sejarah Simalungun, foto arsip kolonial memiliki fungsi seperti: i) perekam objek dan subjek pada eranya, ii) media ekspresi subjek, iii) mengkomunikasikan ide dan gagasan, iv) kesenangan, dan v) dokumen pribadi (arsip pribadi). Sebagai alat bantu analisis sejarah tekstual dan kontekstual, maka foto arsip Simalungun membantu analisis kesejarahan tentang: *pertama* design dan tata ruang di era kolonial di Simalungun, *kedua* memahami teks dan kontekstual historis masyarakat dan kebudayaan Simalungun di era lampau, *ketiga* jejak (bukti) digital peradaban manusia dan lingkungan Simalungun di masa lampau, *keempat* lukisan atau gambaran tentang situasi, keadaan, dan peristiwa di Simalungun pada era lampau serta *kelima* refleksi konstruksi kesadaran Simalungun sebagai bagian dari bangsa Indonesia guna memperkokoh identitas nasional dan kolektif Simalungun.

Foto (*beeld* atau *picture*) adalah catatan yang direkayasa secara canggih dan merupakan hasil hubungan sekilas antara orang yang difoto dengan juru foto (fotografer). Karena itu, foto memperkaya kisah sejarah sosial dan etnohistori (sejarah etnik) yang menawarkan topik-topik kajian. Dalam hal ini, arsip foto tentang Simalungun selama era dan pasca kolonialisme hingga tahun 1960 adalah catatan sejarah (*history record*) yang terekam dalam bentuk visual. Catatan dan rekaman visual ini merupakan hubungan singkat antara fotografer dan objek Simalungun.

Foto adalah bukti riil tentang kejadian ataupun peristiwa di masa lampau yang dapat dilihat pada masa kini (*real object can be seen*). Arsip foto berguna untuk melihat kebudayaan materil untuk dapat dipahami (*to present material culture to be viewed*). Foto baik yang *by design* maupun natural (alamiah), ataupun di studio foto maupun *in situ* harus melibatkan analisis tekstual dan kontekstual sehingga dapat berbicara dengan mata (*speak to the eyes*). Karena itu, foto bukanlah sekedar kenangan terhadap masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah bahwa foto dapat menjadi alat bantu analisis kebudayaan di masa silam. Dari pemahaman terhadap tekstual dan kontekstual foto, maka kebudayaan (*culture*) maupun peradaban (*civilization*) dapat didefenisikan.

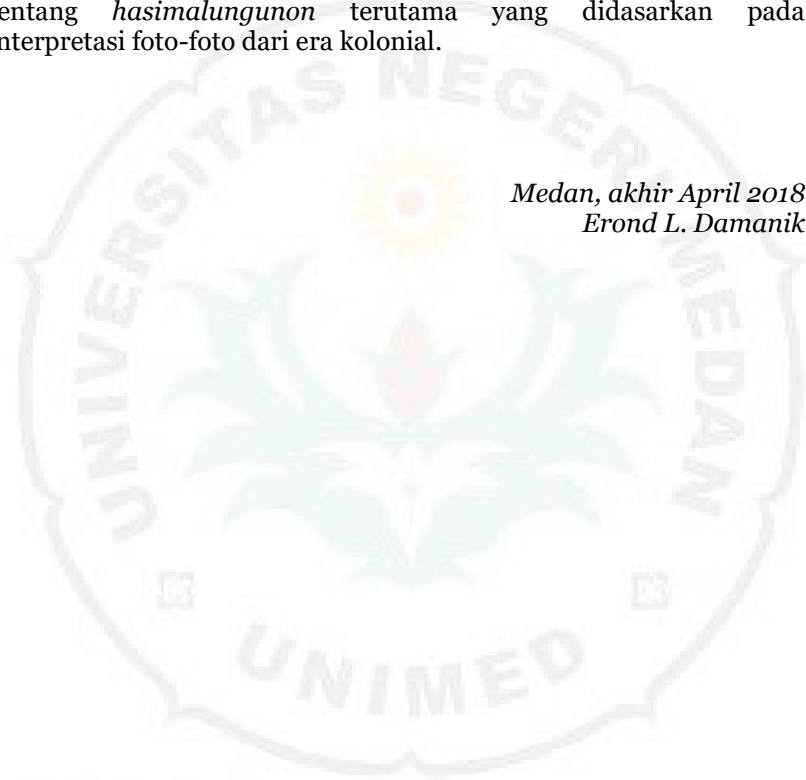
Arsip foto tentang Simalungun pada periode 1907 hingga 1950 lebih memfokuskan diri pada sudut pandang kolonial. Itulah sebabnya, sebagian besar foto-foto tentang Simalungun lebih menunjukkan aktifitas pemerintahan maupun perkebunan. Bilapun terdapat foto-foto pemerintah swapraja, maka foto-foto tersebut lebih menonjolkan diri pejabat lokal sebagai *underbouw* kolonialisme. Juru foto (fotografer) kolonial lebih memilih orang-orang Eropa dan aktifitasnya sebagai perlambang keberhasilan dalam menata 'Negeri Terjajah Simalungun', yang oleh mereka maka masyarakat Simalungun dihantarkan menjadi masyarakat terbarukan lewat pemerintahan modern, kesehatan modern, pendidikan modern, infrastruktur modern, perumahan modern, keuangan modern maupun administrasi modern, termasuk cara mengisi waktu luang, membaca buku maupun membaca koran.

Naskah analisis foto tentang peradaban Simalungun ini memperlihatkan kemampuan dan pengalaman orang Simalungun bergaul dengan orang (etnik) lain. Dari sebuah peradaban yang disebut *natives*, karena sentuhan peradaban modern ala Barat (Belanda dan Jerman) akhirnya menggiring dan melahirkan perubahan *natives* pada kehidupan modern. Modernisasi itu mencakup segala hal tentang kehidupan sosial, kebudayaan dan peradaban Simalungun.

Naskah ini telah menyampaikan bahwa identitas kolektif *hasimalungunon* dapat dipahami lewat pemahaman perjalanan memori kolektif sebagai sejarah sosial yang memperlihatkan penerimaan dan penolakan untuk merajut momen-momen yang dapat diingat bersama. Keberadaan memori kolektif Simalungun tidak hanya tergantung pada kemampuan warga Simalungun untuk merajut momen yang dapat diingat bersama, tapi juga pada keinginan warga Simalungun untuk melupakan bagian-bagian

tertentu dari memori pribadi atau komunitas khususnya yang berdampak buruk bagi kemajuannya. Pada akhirnya kata, semoga buku ini bermanfaat guna menambah khasanah pengetahuan tentang *hasimalungunon* terutama yang didasarkan pada interpretasi foto-foto dari era kolonial.

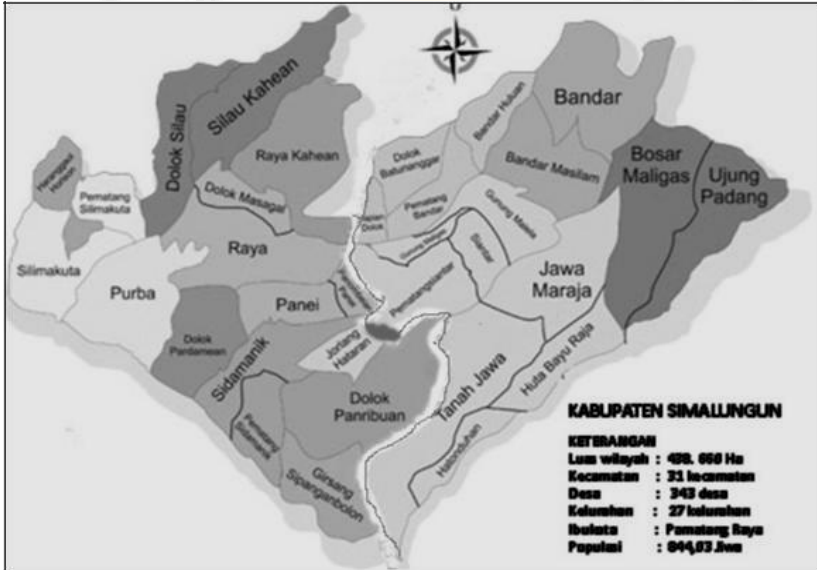
Medan, akhir April 2018
Eron L. Damanik



THE
Character Building
UNIVERSITY

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Kata pengantar	iii
Daftar isi.....	vii
Bab I Prawacana.....	1
Bab II Wilayah kultural dan administratif Simalungun	27
Bab III <i>Siantar na Lihou</i> : Sebuah kota di Simalungun.....	67
Bab IV Alam, kampung dan pasar di Simalungun.....	127
Bab V Perubahan sosial di Simalungun.....	167
Bab VI Masyarakat dan artefak kultural di Simalungun	209
Bab VII Tokoh yang berkontribusi bagi Simalungun	233
Bab VIII Elite di Simalungun, 1920-1970	289
Bab IX Penutup.....	329
Daftar pustaka	333
Lampiran foto	341
Tentang penulis	353



PETA KABUPATEN SIMALUNGUN

Skala 1: 400.000



BAB I PRAWACANA

A. Pendahuluan

Menurut Taylor (2008)¹ arsip visual seperti foto atau *beeld* (bahasa Belanda) atau *picture* (bahasa Inggris) dapat dijadikan alat penting memahami kedudukan masyarakat (baca Simalungun) dalam sejarah Indonesia; arsip foto menawarkan ide-ide untuk menulis sejarah sosial mengimbangi sejarah politik yang sudah ada. Senada dengan Taylor, penulis Breman (1992)², menyebut bahwa foto merupakan sarana pendukung yang penting untuk memperoleh transparansi hubungan sosial. Namun, Breman (1992) mengakui bahwa foto dapat memberi gambaran yang keliru atau bahkan memalsukan kebenaran. Dalam jumlah terbatas, foto yang pengambilannya diatur (*by design*) dan hampir semuanya dibuat oleh tukang potret (fotografer) komersial menurut pesanan. Karena itu, foto seringkali terlihat serba kaku dan sangat sukar membayangkan segala yang tersembunyi dibalik foto itu.

Penulis lain seperti Nordholt, Purwanto dan Saptari (2008)³ dalam bukunya *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, menyebut bahwa sumber-sumber sejarah seperti film, foto, sejarah lisan, karya sastra maupun lukisan sangat penting membuat dan membentuk narasi sejarah. Keyakinan seperti ini menurut Purwanto (2006)⁴ didasarkan pada kegagalan historiografi Indonesia, baik yang disebut '*Historiografi Kolonial*' (era kolonial), '*Historiografi Indonesia Sentris*' (Orde Lama) maupun '*Historiografi Negara Sentris*' (Orde Baru).

Sebagaimana menurut Nordholt (2004) pada era Otonomi Daerah di Indonesia dewasa ini, muncul '*Historiografi Reflektif*' sebagai dasar konstruksi kesadaran berbangsa yang berfungsi

¹Lihat Jean Gelman Taylor. 2008. Aceh: Narasi foto, 1873-1930, dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (eds). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV-Jakarta.

²Lihat Jan Breman. 1992. *Menjajarkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: Grafiti.

³Lihat Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari. 2008. *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor Indonesia.

⁴Lihat Bambang Purwanto. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*. Yogyakarta: Ombak.

memperkokoh identitas nasional dan kolektif. Dalam hal ini, foto menjadi salah satu sumber dan alat bantu analisis kesejarahannya.

Foto menjadi bukti riil terhadap sesuatu peristiwa di masa lampau yang dapat di lihat pada masa kini (*real object can be seen*). Foto itu berguna menghadirkan kebudayaan materil untuk dipahami (*to present material culture to be viewed*). Hal ini karena foto pada dasarnya dapat berbicara dengan mata (*speak to the eyes*). Dalam hal ini, foto bukan saja sebagai sumber penulisan tetapi juga sekaligus sebagai alat analisis dalam mengkaji suatu peristiwa di masa lampau. Karena itu, foto bukan saja melukiskan kenangan terhadap masa lalu tetapi daripadanya kebudayaan dapat didefensikan. Selain dapat memperkaya kisah-kisah sejarah, foto dapat membuka dan menawarkan topik-topik penulisan. Lebih lanjut, Taylor (2008) mengemukakan bahwa foto adalah catatan yang direkayasa secara canggih, hasil hubungan sekilas antara orang yang difoto dengan fotografer.

Pada era kolonial, fotografi adalah perlambang status sosial karena biayanya yang mahal. Fotografi dilakukan di studio foto (*by design*) dengan cara mendatangi studio foto, ataupun memanggil objek foto ke studio. Fotografi dapat pula dihasilkan *in situ* karena fotografer sedang mengunjungi atau dipanggil ke tempat dimaksud. Dengan demikian teks dan kontekstual foto memerlukan analisis yang cermat untuk menjelaskan dan menafsirkannya.

Foto tidaklah semata-mata kenangan terhadap masa lalu. Foto bukanlah sekedar gambar diam (tidak bergerak) yang dihasilkan melalui teknologi cahaya lewat kamera. Namun, foto baik karena di sengaja (*by design*) maupun *in situ* atau alamiah (*natural*) adalah potret (*potrait*) mewakili masanya yang berfungsi sebagai sumber dan alat bantu analisis kesejarahan. Hal ini disebabkan bahwa foto memiliki nilai tekstual dan kontekstual yang didalamnya tersirat situasi, kondisi, keadaan, artefaktual ataupun peristiwa di masa lalu.

Seorang penulis Belanda bernama Loderics menulis buku tentang Kota Medan dengan judul *Medan: Beeld van een stad* (2008)⁵. Buku ini bercerita tentang Kota Medan antara tahun 1860-1942 yang didasarkan pada foto (*beeld*) yakni koleksi yang tersedia di Belanda. Secara khusus buku ini menjelaskan tentang topografi yang berdampak pada lahirnya perkebunan (*cultuurgebied*) serta berdirinya bangunan-bangunan kolonial dengan ragam arsitektur di kota perkebunan itu. Sangat jelas, Loderics mengakui bahwa

⁵Lihat E.A. Loderics. 2008. *Medan: Beeld van een Stad: Pictures of a city*. Purmerend: Asia Maior.

perkembangan Kota Medan yang pesat di era kolonial ialah sebagai dampak keemasan perkebunan yang dikembangkan pengusaha kolonial bernama Jacobus Nienhuys⁶.

Penulis seperti Buiskool (2005)⁷ seorang Belanda yang bermukim di Namorambe Deliserdang, menulis buku panduan wisata sejarah (*historical tours*) Kota Medan dengan mencantumkan unit bangunan yang masih berdiri serta posisinya di tengah-tengah Kota Medan. Walaupun bersifat *historical travels guide*, setidaknya buku telah mengingatkan bahwa *historical citytour* sangat potensial di Medan mengingat banyak bangunan bersejarah terdapat di kota itu. Hal menarik dari kedua buku ini bukan saja menyoal unit-unit bangunan di Medan dalam rangka pemanfaatan ruang, desain kota maupun tujuannya pada masa kini sebagai destinasi *citytour*, tetapi juga dalam hal terciptanya pemukiman-pemukiman elitis yang dibedakan berdasarkan kebangsaannya.

Secara jelas, ketiga penulis itu menyebut adanya kawasan pemukiman orang Eropa (*Europeanwijk*) yang disebut dengan Polonia. Di *Batavia* (Jakarta) misalnya, disebut dengan *Weltreveden* yakni kawasan Depok saat ini, ataupun di Pematangsiantar berada di sekitar Jalan Simbolon atau lokasi *Simalungun Central Hospital* (Rumah Sakit Tentara). Demikian pula pemukiman elit bagi orang Asia Timur yakni China yang disebut dengan *Chinessewijk* di Kesawan Medan ataupun Kampung Madras. Selebihnya adalah pemukiman bagi *inlanders* Deli yang berada di Kotamaksuam yakni disekitar Istana Maimoon Medan. Persoalan pemukiman seperti di Kota Medan pada era kolonial ini meminjam bahasa Pelly (2015)⁸ disebut dengan 'kampung etnik'.

Merujuk Loderics (2008) dan Buiskool (2005) dikemukakan bahwa gaya arsitektur bangunan kolonial di Medan adalah seperti

⁶Lihat Ann Laura Stoler. 2006. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Deli, 1860-1940*. Yogyakarta: Karsa. Lihat juga Karl J. Pelzer. 1988. *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur (1863-1947)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, lihat juga Jan Breman. 1992. *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial pada awal Abad 20*. Jakarta: Grafiti. Lihat juga Erond L. Damanik. 2016. *Kisah Dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas, Kota Medan 1863-1942 (Jilid-D)*. Medan: Simetri Institute.

⁷Lihat Dirk A. Buiskool. 2005. *Medan Historical Tours and its Surrounding*. Medan. Trijaya Travel and Agency.

⁸Lihat Usman Pelly. 2015. *Urbanisasi dan Adaptasi: Misi Budaya Mandailing dan Minangkabau di Kota Medan*. Medan: Casa Mesra Publisher.

art deco, empire style, moghul, European transition maupun *modern* dan lain-lain. Beragam gaya ini menggambarkan mahakarya arsitektur guna menopang keindahan Kota Medan saat itu yang disebut dengan *Parijs van Sumatra*. Demikian pula sejumlah perancang bangunan (arsitek) kenamaan tidak lupa menggoreskan kemampuan arsiteknya di Medan. Tersebut diantara para arsitek kenamaan itu adalah seperti Van Erp (arsitek pertama yang memugar Candi Borobudur), Hans Groenowegen, Thomas Karsten, Snuyf, Hulswitt, Fermost dan Cuypers dan lain-lain. Hal unik dari kedua penulis tentang Kota Medan itu ialah dijadikannya foto sebagai salah satu alat analisis guna menjelaskan perkembangan Kota Medan pada era kolonial. Foto dari era kolonial itu menjadi sumber dan alat bantu kajian terhadap pemanfaatan tata ruang, desain kota maupun *citytour* di Kota Medan. Keadaan ini adalah hal menarik dalam mengkaji sejarah pertumbuhan kota-kota di Tanah Air yang tidak lepas dari peranan kolonial Belanda.

Penulis lain seperti van Anrooij (2014)⁹, menyebut bahwa foto-foto dan peta-peta memperlihatkan gambaran tentang bagaimana *Deli Maatschappij* (Perusahaan Deli) berfungsi dan memberikan kontribusi dalam membuka dan membangun Pantai Timur Sumatera. Di kota lain seperti Semarang, Wijanarka (2007)¹⁰ menulis tentang desain arsitektur kawasan bersejarah yang banyak merujuk pada foto-foto dari era kolonial. Menurut Wijanarka (2007) berdasarkan foto arsip kolonial ditemukan tentang desain atau tata ruang kota Semarang sehingga dapat ditentukan kawasan bersejarah di kota itu. Demikian pula Adishakti (1997)¹¹ di Yogyakarta tentang konservasi bangunan bersejarah sebagai *Historic-tourist City*. Demikian halnya Basundoro (2009)¹² pada kajiannya tentang Malang dan Surabaya yang tidak bisa lepas dari foto sebagai unit analisis. Bahkan, sejarah kota-kota di Indonesia sebelum dan

⁹Lihat Francien van Anrooij. 2014. *De koloniale Staat, 1854-1942: Archief van het Ministerie van Koloniën*. (Panduan Penelitian Negara Kolonial: penerjemah: Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam). Leiden: Nationaal Archief.

¹⁰Lihat Wijanarka. 2007. *Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah*. Yogyakarta: Ombak.

¹¹Lihat L. T. Adishakti. 1997. *A Study on the Conservation Planning of Yogyakarta Historic-tourist City Based on Urban Space Heritage Conception*. Disertasi. Graduate School of Global Environmental Engineering, Kyoto University, Japan.

¹²Lihat Purnomo Basundoro. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.

sesudah kemerdekaan telah ditulis dengan baik oleh Colombijn, *et al* (2005)¹³. Buku inipun tidak bisa melepaskan diri dari foto sebagai salah satu unit analisisnya guna melihat dan memahami aspek kelampauan dan kekinian kota-kota yang dikaji.

Dalam kajian sejarah sosial menyangkut kehidupan sosial, sebuah buku ditulis dengan mengangkat *setting* di *Batavia* (Jakarta). Buku dengan judul: *The Social World of Batavia* ditulis Taylor (2003)¹⁴ guna mendeskripsikan kehidupan sosial di *Batavia*. Salah satu alat bantu analisis yang digunakan Taylor guna mendeskripsikan kehidupan sosial di *Batavia* itu adalah mengikutsertakan foto-foto dari era kolonial. Secara khusus, buku ini menggambarkan kehidupan sosial dengan fokus kajian pada aspek domestik keluarga pembesar *Hindia Timur* di abad 18.

Dijelaskan bahwa, keluarga dan koneksi sangat berpengaruh pada pencapaian kedudukan penting pada strata pemerintahan kolonial. Demikian pula perkembangan budaya campuran, pola pengasuhan, pelayan dan budak Asia (*Hindia*) dimana perempuan memegang kendali yang tidak bisa diabaikan pada terbentuknya budaya campuran di *Batavia*. Apabila membolak balik buku Taylor (2003) itu, jelas terlihat bahwa salah satu alat analisisnya didasarkan pada foto-foto keluarga-keluarga pembesar di *Batavia*. Foto-foto keluarga-keluarga pembesar itu memperlihatkan peran perempuan pada pembauran kebudayaan seperti bahasa Betawi, pemakaian kebaya, sarung, serta atribut lainnya.

Analisis Taylor (2008) tentang Aceh berdasarkan foto-foto arsip kolonial Belanda. Menurut Taylor (2008), orang Aceh tidak berpengalaman bergaul dengan orang-orang Indonesia dari tempat lain, sama seperti halnya banyak dari mereka yang merasa sulit hidup dalam negara Belanda. Pada intinya, Taylor (2003;2008) hendak menunjukkan peran penting foto sebagai alat analisis kajian.

Penulis lain seperti Kusno (2009)¹⁵ pada bukunya: *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif* tidak lupa meng-*insert* foto sebagai unit analisisnya tentang Kota Jakarta. Menurut Kusno (2009) ruang

¹³Lihat Freek Colombijn, M. Berwegen, P. Basundoro, dan J. A. Khusyairi. 2005. *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.

¹⁴Lihat Jean Gelman Taylor. 2003. *The Social World of Batavia: Kehidupan Sosial di Batavia, Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*, (diterjemahkan Tim Komunitas Bambu). Jakarta: Komunitas Bambu.

¹⁵Lihat Abidin Kusno. 2009. *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif*. Yogyakarta: Ombak.

publik sangat penting guna membangun kebersamaan komunitas, karena memberi tempat bagi sesama warga untuk merajut momen-momen yang dapat diingat bersama. Kehadiran memori kolektif sangat tergantung pada keberadaan ruang publik yang memberi tempat pada masyarakat guna merajut ingatan bersama. Ruang publik dengan segala artefak yang dihadirkan membantu guna mengingat momen-momen yang dapat diingat kembali. Jika ruang publik berikut benda-bendanya hilang, maka manusia kehilangan tempat merajut memori kolektif.

Selanjutnya, Kusno (2009) memaparkan bahwa meskipun keberadaan memori tergantung pada ruang publik dan lingkungan fisiknya, ruang publik tidak mampu membawa atau menyimpan memori dengan sendiri. Sebaliknya, ruang publik ini adalah arena tempat negara dan masyarakat menunjukkan kekuasaan melalui pemaknaan sosial dan legal. Karena itu, ruang publik tidak pernah bebas berdiri sendiri dan bukan wadah yang pasif. Dengan kata lain ruang publik tidak akan menjadi ruang publik tanpa suatu perjuangan dan pertarungan makna. Menyoal pertarungan makna, Kusno (2009) mengemukakan bahwa pertarungan makna di ruang publik bukan hanya melibatkan pembentukan memori kolektif, namun juga pelupaan kolektif yang sifatnya bisa positif atau negatif tergantung pada kondisi ruang publik itu berada.

Intinya, Kusno (2009) ingin menyampaikan bahwa identitas kolektif dapat dipahami lewat pemahaman perjalanan memori kolektif sebagai sejarah pertarungan pelupaan untuk merajut kembali momen-momen yang dapat diingat bersama. Pelupaan bukanlah suatu manipulasi tapi pelupaan merupakan kondisi kehidupan dan dasar terbentuknya memori kolektif. Keberadaan memori kolektif tidak hanya tergantung pada kemampuan warga untuk merajut momen yang dapat diingat bersama, tapi juga pada keinginan warga untuk melupakan bagian-bagian tertentu dari memori pribadi atau komunitas.

Pendek kata, foto bukan saja menggambarkan situasi masa lalu, tetapi juga menjadi alat analisis guna membenteng persoalan kekinian sesuai dengan bidang kajian yang digeluti para sarjana. Terhadap foto itu, para sarjana bukan hanya sekedar mengamati dan memahaminya, tetapi yang paling penting adalah menemukan kontekstual foto serta memberikan narasi dan deskripsi guna menemukan makna (*meaning*) pada masa kini. Karena itu, foto adalah *real object can be seen, to present material culture to be viewed* dan *speak to the eyes*.

B. Sumber-sumber penulisan sejarah

Beranjak dari uraian diatas, guna memahami masyarakat dan kebudayaannya pada masa lalu dapat dilakukan dengan membaca sumber tulisan dan lisan ataupun memahami artefaktual yang sezaman dengan masyarakat dan kebudayaan itu. Tulisan dimaksud adalah catatan seperti tertera pada naskah-naskah kuno pada media batu, tulang, kulit kayu ataupun lontar. Sedangkan sumber lisan adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari cerita rakyat (*folklore*), *babad*, *carita*, hikayat, legenda ataupun mitos. Kemudian, sumber artefaktual adalah keterangan-keterangan dari benda materil kebudayaan manusia termasuk di dalamnya peralatan hidup. Dari artefaktual ini, sejumlah keterangan dan informasi dapat dibentuk menyoal tentang tingkat peradaban masyarakatnya.

Perlunya sumber-sumber ataupun keterangan sejaman dalam upaya penggambaran masyarakat dan kebudayaan didasarkan pada pandangan bahwa sumber sejaman lebih dekat dengan peristiwa (kejadian) masyarakat dan kebudayaan yang digambarkan. Itulah sebabnya, dalam tradisi ilmiah penulisan *ethnohistory* (sejarah etnik), Arkeologi maupun Sejarah selalu berupaya mencari dan menemukan sumber-sumber yang sejaman. Kemampuan seorang penulis untuk menyebut dan merujuk sumber-sumber sejaman menyiratkan kesahihan (*validity*), realibilitas (*reability*) dan keterpercayaan data yang dimiliki penulis. Keterangan-keterangan yang terdapat pada sumber itu kemudian diuji dengan keadaan masa kini sehingga diperoleh substansi dari keterangan yang terdapat di dalamnya.

Namun demikian, tidak serta merta seluruh sumber-sumber itu dinyatakan sah karena ada kalanya keterangan di dalamnya membutuhkan penafsiran mendalam (*thick* atau *deep interpretation*). Fenomena seperti ini sering terjadi pada saat menganalisis *folklore* ataupun sastra tradisi seperti hikayat, *carita*, *babad*, legenda ataupun mitos. Justru, kemampuan menemukan makna-makna (*meaning* atau *sense*) di balik keterangan itulah sebenarnya kompetensi seorang penulis diukur.

Seorang ahli arkeologi (*arkeologist*) disamping melakukan penelitian (*research*) pada situs arkeologi (*archaeological sites*) seperti adanya temuan permukaan (*surface finding*) ataupun ekskavasi (*excavation*) di kota-kotak gali, tetap harus merujuk pada sumber-sumber sejaman untuk membentuk narasi arkeologinya. Bukti-bukti arkeologi (*archaeological evidence*) berupa temuan-temuan arkeologis (*archaeological remains*) adalah data-data yang

masih minim keterangan (deskripsi). Temuan-temuan permukaan dan ekskavasi itu kemudian diberi narasi arkeologi dengan mengikutsertakan sumber-sumber sejamannya¹⁶. Guna memperkuat validitas data arkeologi, maka seringkali hasil-hasil temuan permukaan dan ekskavasi masuk laboratorium untuk analisis bentuk, rupa, pewarnaan, dan lain-lain. Demikian pula alat bantu seperti *potasium argon* atau C-14 dipergunakan untuk menentukan usia artefak ataupun penggunaan analisis DNA terhadap fosil-fosil (kerangka) manusia.

Berbeda dengan seorang penulis Etnohistori ataupun Sejarah yang lebih mendasarkan diri pada sumber-sumber sejaman seperti tulisan, *folklore* ataupun laporan perjalanan etnograf (*ethnographer* ataupun *travellers*) bahkan notulensi rapat. Sumber-sumber ini diperlukan karena asumsi kedekatannya terhadap situasi yang digambarkan. Namun, ada kalanya sumber-sumber itu bias, sulit dimengerti dan sulit dipahami. Hal ini karena dapat saja pertulisan yang ada menyajikan keterangan dengan bahasa-bahasa simbolik atau banyaknya kata-kata yang sudah tidak dimengerti sama sekali. Namun demikian, betapapun sulitnya di pahami, di mengerti atau di baca, tetapi sumber itu sangat penting sebagai pendukung penulisan. Sebaliknya, laporan perjalanan dianggap sebagai representasi keadaan sejaman yang ditulis sesuai dengan situasi, kejadian dan peristiwa pada masa itu. Apalagi misalnya berkeinginan mencoba menulis tentang keadaan atau peristiwa berabad-abad silam.

Namun, sumber-sumber inipun seringkali bias dan kurang akurat ketika menggambarkan masyarakat dan kebudayaan. Sebut saja misalnya, beberapa laporan menyebutkan adanya masyarakat kanibal (*eat human flesh*) di Aceh dan Sumatera Utara¹⁷. Demikian

¹⁶Lihat misalnya Erond L. Damanik dan E.E. McKinnon. 2012. 'Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Putri Hijau, Namurambe, Northeast Sumatera', in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. edited by Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz., Singapore: NUS Press.

¹⁷Lihat Masashi Hirouse. 2009. The Role of Local Informants in the Making of the Image of "Cannibalism" in North Sumatera, in *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatera.*, Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Lihat juga Marco Polo. 1995. *Cannibals and Kings: Northern Sumatera in 1290s*, in *Witnesses to Sumatera: A Travellers Anthology*. (Anthony Reid, Ed). Kuala Lumpur: Oxford University Press.

halnya terdapat kekurangan tentang siapa sebenarnya yang disebut dengan *Melayu* atau *Bata*, *Battas*, *Battack*, *Batak*, *Panda* dan dimanakah teritori masyarakat yang digambarkan ini¹⁸. Deskripsi atau keterangan pada laporan perjalanan seringkali kurang dipahami karena kesulitan menunjukkan lokasi (wilayah) masyarakat yang digambarkan, ataupun karena tidak ditemukannya lagi kata-kata (konsepsi) yang digunakan pada saat menulis risalah perjalanannya. Sumber dari Geograf Yunani pada abad ke-2 seperti Claudy Ptolemy yang menggambarkan wilayah '*Barousai*' misalnya, tidak jelas daerah mana yang dimaksud. Apakah *Barousai* yang dimaksud Ptolemy adalah Barus yang ada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara? Demikian pula masyarakat '*Panda*' yang dimaksudkan sumber Tiongkok pada abad ke-6 Masehi adalah '*Batak*' yang berada di Sumatera Utara atau Aceh?. Singkatnya, laporan-laporan perjalanan yang berasal dari abad permulaan atau pertengahan masehi membutuhkan kecermatan guna merangkai narasi sejarah. Namun, terlepas dari kesulitan memahami naskah berupa risalah perjalanan itu, laporan perjalanan tetap dipandang sangat berguna mendeskripsikan situasi saat ini.

Penulis seperti Reid (1995)¹⁹ misalnya menulis antologi Sumatera berdasarkan catatan-catatan yang ditulis etnograf yang pernah mengunjungi pulau Sumatera. Sejumlah tulisan dalam karya antologi ini berasal dari penulis dan penjelajah sejak abad 12 hingga 19 masehi. Demikian halnya Groenoveldt (1959)²⁰ yang menulis tentang Indonesia dan Malaya berdasarkan catatan-catatan pengelana China. Pada catatan ini diperoleh kata '*Nagur*', '*Nagore*' atau '*Jakur*' yang oleh Groenoveldt diidentifikasi sebagai '*kerajaan Batak*' di pesisir timur Sumatera Utara. Dari sumber ini, sejumlah penulis menyebut bahwa kerajaan dimaksud berada di Simalungun karena kosa kata '*Nagur*' lebih dikenal di Simalungun. Dari kata inilah kemudian asal

¹⁸Lihat Daniel Perret. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG dan EFEO Prancis. Lihat juga Anthony Reid. 2009. Is there Batak History. In *From Distant Tale: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatera*. Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Lihat juga Erond L. Damanik. 2017. *Rumor Kanibal, Menolak Batak dan Jejak Perdagangan: Etnohistori Sumatra bagian Utara*. Medan: Simetri institut.

¹⁹Lihat Anthony Reid. 1995. *Witnesses to Sumatra: A Travellers Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

²⁰Lihat W.P. Groeneveldt, 1959. *Historical Notes on Indonesian and Malay: Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bharata.

muasal etimologis konsep 'Nagori' yakni kesatuan beberapa kampung dalam sistem ketatanegaraan tradisional Simalungun.

Pada tahun 1778, seorang Inggris seperti Marsden (2008)²¹ misalnya, menulis *Sejarah Sumatera* berdasarkan amatan yang dilakukannya mulai dari Aceh hingga Lampung. Penulis ini menjadi penulis pertama yang menolak homogenitas masyarakat di Sumatera karena dikenalnya sejumlah entitas politis berupa *ethnic group* seperti *Tubba* (Toba), *Mandiling* (Mandailing), *Ankola* (Angkola), *Padambola* (Padangbolak) ataupun *Papak Deira* (Pakpak Dairi) yang berada di pesisir barat Sumatera Utara. Senada dengan itu, pada tahun 1823, seorang Inggris lainnya yakni Anderson (1971)²² catatan perjalanannya berdasarkan amatan serta wawancara yang ia lakukan pada saat mengunjungi pesisir timur Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dari catatan Anderson ini di temukan lagi entitas politik bernama 'Karau-karau' (Karo) dan 'Semilongan' atau 'Semalongan' (Simalungun) yang berada di pesisir timur Sumatera Utara.

Demikian halnya, pada tahun 1935, arkeolog Schnitger (1989)²³ menulis tentang *Kerajaan Tak Bernama* di Padanglawas, Sumatera Utara. Tulisan itu didasarkan pada reruntuhan (*ruins*) candi yang ditemukan di wilayah Padangbolak. Tulisan itu menjadi referensi paling awal tentang candi-candi yang terdapat di Sumatera Utara serta hubungannya dengan India maupun China. Bahkan sosok R.A. Kartini yang dikenal sebagai *Tokoh Emansipasi Wanita* sekarang ini, lebih banyak di ketahui dari surat-surat yang ditulis dan dikirimkan kepada teman-temannya di *Batavia* (Jakarta) maupun Belanda. Surat-surat sebanyak 137 itu dikirim kepada J.H. Abendanon (Menteri Urusan Agama dan Pendidikan Tanah Jajahan) maupun Stella di Belanda dan lain-lain. Kebanyakan surat-surat itu memuat pergulatan hidup Kartini terhadap budaya Jawa yang sangat patriarkis sebagai sumber marjinalisasi perempuan²⁴.

²¹Lihat William Marsden. 2008. *Sejarah Sumatera*. Jakarta: Komunitas Bambu.

²²Lihat John Anderson. 1971. *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

²³Lihat F.M. Schnitger. 1989. *Forgotten Kingdoms in Sumatera*. Singapore: Oxford University Press.

²⁴Lihat J.H. Abendanon. 2005. *Door Duisternis tot Licht: Habis Gelap Terbitlah Terang* (Armijn Pane, penerjemah). Jakarta: Balai Pustaka. Lihat juga Pramoedyana Ananta Toer. 2005. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Lentera.

Sumber-sumber tertulis berupa laporan perjalanan dan benda-benda artefaktual diatas, berbeda dengan Buiskool yang menulis tentang perkembangan Sumatera Utara sebagai impak perkebunan. Disamping menggunakan foto yang berasal dari era kolonial, banyak diantara tulisan Buiskool mendeskripsikan Kota Medan merujuk pada koran (suratkabar) seperti *de Sumatra Post* dan *Pewartar Deli* yang terbit di Medan sejak permulaan tahun 1900-an²⁵. Sumber-sumber penulisan seperti dijelaskan diatas, *entah* itu tulisan, lisan, dan artefaktual sah-sah saja dalam tradisi ilmiah sepanjang dapat mengemukakan validitas, reabilitas dan keterpercayaan sumber. Demikian pula terhadap surat kabar dan foto, dapat dijadikan sebagai alat analisis guna menganalisis peristiwa masa lalu guna membentuk narasi dan korelasi pada masa kini. Sumber-sumber ini sangat penting dalam penulisan terutama menyangkut penggambaran aspek historisnya.

Sumber sejarah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa di masa lalu. Dalam tradisi ilmiah, sumber sejarah menurut Kuntowijoyo (1999)²⁶ dibedakan menjadi empat yakni: *pertama* sumber tertulis atau sumber pertama yakni keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu, kertas, lontar, tulang dan lain-lain. Sumber-sumber seperti ini misalnya adalah prasasti, babad, hikayat, manuskrip, surat menyurat, laporan, notulensi, piagam, naskah, ataupun koran (surat kabar), *kedua* sumber lisan yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah.

Kemudian *ketiga* adalah sumber benda atau sumber *corporal* yakni sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan seperti candi, rumah istiadat, pakaian, peralatan hidup, fosil dan lain-lain dan *keempat* sumber kuantitatif. Sumber-sumber sejarah diatas, berdasarkan kronologi penyampaiannya dibedakan menjadi: *pertama* sumber primer yakni sumber pertama yang berasal dari saksi mata, *kedua* sumber sekunder keterangan yang disampaikan bukan oleh saksi mata.

²⁵Lihat Dirk A. Buiskool.2007. Orang-orang yang membawa kontribusi positif terhadap Sumatera Timur masa 1860-1942.Makalah. Dipresentasikan di Seminar Nasional: *Tokoh, Pejuang dan Pahlawan Sumatera Utara*, oleh Pussis-Unimed, Medan 10 November 2007.

²⁶Lihat Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

Sumber-sumber sejarah itu menjadi salah satu bukti (*evidence*) yang dipergunakan untuk memperkuat kebenaran suatu argumen (pendapat) ataupun kesimpulan. Dalam tradisi sejarah misalnya, bukti menjadi jejak peninggalan dari perbuatan di masa lalu. Bukti-bukti itu adalah keterangan saksi sejarah ataupun pelaku sejarah berupa dokumen tertulis, lisan maupun artefaktual. Namun, penting dipahami antara kenyataan sejarah dan fakta sejarah. Kenyataan sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau sedangkan fakta sejarah adalah pernyataan tentang peristiwa itu sendiri. Fakta sejarah lebih bersifat subjektif karena berasal dari penulisnya (sejarahwan). Karena itu, untuk mendapatkan bukti dan fakta sejarah yang benar maka penulis harus berhati-hati sewaktu mengumpulkan sumber sejarahnya. Kehati-hatian memilih sumber menyangkut keterpercayaan, validitas (kesahihan) dan rehabilitas.

Lantas, apa gunanya menulis sejarah?. Sebagaimana disebut di atas, sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dari sebuah peristiwa yang benar (bagus) sangat potensial ditiru untuk kehidupan masa kini, sedangkan dari sejarah kelam ialah untuk menghindari agar peristiwa itu tidak terulang. Dengan demikian, catatan sejarah menjadi sebuah referensi terpercaya untuk mendukung data dan fakta. Dari catatan ini, generasi dapat menggunakannya memperkuat jati diri serta menangkal hal-hal berbau negatif.

C. Foto sebagai alat bantu analisis

Analisis foto sebagai sumber sejarah, maka foto-foto arsip dari era kolonial harus dicermati dengan seksama. Terdapat perbedaan foto yang menonjol antara orang Eropa (*European*) dan pribumi (*natives*). *European* yang difoto selalu menonjolkan sifat individualis sementara *natives* digambarkan kollegial (kolektif). *Natives* selalu dilukiskan statis sementara *European* dilukiskan dinamis. *European* yang ditonjolkan adalah gubernur jenderal, menteri negara, asisten residen, bibi, nyonya, anaka-anak Eropa, *planter* (*toean keboen*), *controleur*, jamuan makan, upacara, karnaval budaya, dan lain-lain. Sementara *natives* yang digambarkan adalah jongos, pelayan rumah, penjaga anak-anak, kuli, tukang masak, penjaja makanan, maupun gadis penari. Bahagian ini adalah generalisasi mengenai atau tentang: '*siapa kita*' dan '*siapa mereka*'.

Foto-foto *natives* dari kalangan *ningrat* (bangsawan) sering ditampilkan mengenakan kostum adat ataupun kostum *binnenland bestuur* (pejabat pemerintah di era kolonial). Para ningrat ini digambarkan hadir pada upacara, atau sedang menjamu *European*

guna melukiskan kedekatan orang Eropa di tanah jajahan. Pada konteks ini penting dilihat makna yang terbentuk yakni adanya *'keberhasilan negosiasi'* tentang tanah jajahan. Karenanya, foto sebagai bahan sejarah dapat dimanipulasi melalui seleksi seperti halnya sumber-sumber yang lain.

Pada dasarnya foto memiliki fungsi sebagai: i) perekam objek dan subjek pada eranya, ii) media ekspresi subjek, iii) mengkomunikasikan ide dan gagasan, iv) kesenangan, dan v) dokumen pribadi (arsip pribadi). Dari arsip foto, seorang analis foto dapat menilai dan memahami kontekstual foto. Jadi, foto merupakan jejak digital masa lampau yang membutuhkan penafsiran (interpretasi) yang dari padanya dapat menemukan tekstual dan kontekstualnya. Karena itu, setidaknya foto sangat berguna sebagai sumber dan alat bantu analisis kesejarahan tentang: *pertama* desain dan tata ruang di era kolonial, *kedua* memahami teks dan kontekstual historis masyarakat dan kebudayaan di era lampau, *ketiga* jejak (bukti) digital peradaban manusia dan lingkungannya di masa lampau, *keempat* lukisan atau gambaran tentang situasi, keadaan, dan peristiwa di era lampau serta *kelima* refleksi konstruksi kesadaran berbangsa guna memperkokoh identitas nasional dan kolektif (masyarakat).

Pendokumentasi momen berupa foto di Indonesia baru terjadi tahun 1841 yang dilakukan Juriann Munich di *Batavia* (Jakarta). Foto-foto yang diminati pada saat itu adalah foto tentang Candi Borobudur dan bangunan purba lainnya. Pada saat itu, gambar dihasilkan lewat teknologi cahaya (foto) melalui kamera yang disebut *Daguerreotype*. Pada tahun itu, gambar atau foto yang dihasilkan kamera masih berwarna hitam dan putih. Karena itu, tidak mengherankan apabila foto Indonesia yang tersimpan di sejumlah kantor arsip dan perpustakaan di Belanda maupun Jerman pada periode sesudah tahun 1841 masih berwarna hitam dan putih.

Teknologi cahaya kamera berwarna baru terjadi sejak tahun 1907 yang disebut dengan *Autochrome process*. Warna yang dihasilkan lewat teknologi sudah tergolong sangat baik pada zamannya walaupun belum menghasilkan warna yang sempurna sesuai objek foto. Walaupun teknologi kamera berwarna sudah ditemukan sejak tahun 1907, namun sebagian besar foto Indonesia yang tersimpan di kantor arsip Belanda maupun Jerman masih tetap berwarna hitam dan putih. Di Sumatera Utara, penggunaan kamera foto berwarna baru terjadi mendekati tahun 1930 terbukti adanya foto berwarna dengan objek orang Karo. Foto-foto berwarna dimaksud adalah

karya fotografer A.V. Novak maupun Roberth Moore²⁷. Pada intinya, sejak penemuan kamera tahun 1841, dokumentasi terhadap setiap momen di Indonesia bukan lagi semata-mata dilakukan lewat tulisan, tetapi juga melalui gambar atau foto.

Sebagai sumber sejarah, tentulah foto dalam hal ini dimaksudkan sebagai alat bantu analisis permasalahan yang dikaji. Namun demikian, foto tidak seluruhnya mewakili atau menunjukkan peristiwa atau lakon sebenar-benarnya pada masa lalu. Pemikiran seperti ini di dasari pada adanya kecenderungan adanya manipulasi berupa reka adegan atau lakon atau foto sebagai '*by design*'. Manipulasi adegan atau lakon dilakukan menambah kewibawaan subjek foto seperti kesenangan, keanehan, keusilan, kemewahan, kesahajaan atau bahkan mendramatisir dan hiperbolik keadaan masa lalu. Foto-foto seperti ini misalnya adalah foto bersama, potret diri (*pasfoto*), pertemuan atau rapat (*meeting*) maupun jamuan makan (*dinner*) ataupun kejadian lain yang sengaja diperbuat subjek untuk di foto. Foto seluruh badan (potret diri) dengan cara berdiri dengan latar tertentu, atau dengan pakaian kebesaran tertentu atau dengan akting tertentu adalah foto yang sengaja diperbuat untuk menunjukkan kewibawaan dari subjek foto.

Demikian halnya setiap foto yang diambil dari depan subjek foto, dimana subjek mengetahui dirinya akan difoto maka dipastikan terdapat manipulasi subjek terhadap keadaan dan situasinya. Namun demikian, tidak seluruhnya foto memperlihatkan manipulasi adegan karena sebagian foto memang diperbuat tanpa adanya manipulasi adegan atau lakon. Foto berupa objek tidak bergerak ataupun foto subjek yang tidak diketahui subjek adalah contoh foto yang dilakukan tanpa manipulasi. Demikian pula foto yang dipetik tanpa diketahui subjek foto, maka foto itu dapat disebut mewakili keadaan dan situasi pada saat di foto. Karena itu, guna mengalisis foto sebagai sumber sejarah dibutuhkan keahlian (kepakaran) khusus untuk melihat dan mencermati apakah foto dimaksud berasal dari peristiwa tanpa manipulasi atau justru karena manipulasi.

Hal lainnya ialah peran dari fotografer sewaktu memfoto (fotografi). Seringkali sebuah foto lebih menarik dilihat karena di petik dari sudut-sudut tertentu. Di sini, sudut pandang fotografer harus dipertimbangkan. Dapat saja, dari suatu sudut fotografer maka sebuah kejadian cenderung memperlihatkan keceriaan atau sedang rapat atau sedang berbicara santai. Namun dari sudut lainnya, sedang memerlihatkan subjek foto justru sebaliknya yakni sedang

²⁷ Lihat <http://www.karosiadi.blogspot.com>

emosi, bukan rapat atau marah-marah. Karena itu, pengalisis foto harus benar-benar piawai guna melihat dan memahami situasi foto dimaksud.

Sebagaimana disebut Taylor (2008), sumber-sumber penulisan dari foto perlu dilakukan dengan sangat hati-hati terutama foto yang diambil orang Eropa dan rakyat jajahannya. Menurut Taylor (2008), kumpulan foto di era kolonial dapat menimbulkan kesan dalam pikiran orang yang melihatnya bahwa Orang Timur itu tidak ada kaitan dengan zaman dan kerjanya terbatas pada pekerjaan statis membuat kerajinan tangan, dibandingkan Orang Eropa yang dinamis dan menguasai seluk beluk mesin bertenaga uap.

Biasanya, para fotografer kolonial lebih mencurahkan perhatian pada simbol-simbol status dalam foto-foto pribumi (*natives*) yang diambil di studio dengan jarak yang terbentang antara orang yang melihat foto dan orang yang dilihat dan pada proses membedakan (*othering*). Penduduk sering ditampilkan sebagai tipe penduduk asli (*natives types*), jongos, pelayan rumah, tukang masak, pengasuh anak, kuli, penjaja makanan, dan gadis penari, yang semuanya di foto tanpa nama masing-masing. Kecuali nama-nama *zelfbestuur* (pemerintah swapraja) yang terkadang dicantumkan namanya. Sebaliknya, orang Eropa seperti jenderal, gubernur, bibi dan anak-anak, catatan foto biasanya menyebutkan namanya satu per satu, dan mereka dilihat sebagai individu dan bukan sebagai 'tipe' tertentu. Sebagai bahan dan alat bantu analisis sejarah, semua foto memerlukan konteks untuk menjelaskan dan menafsirkannya.

Di era teknologi digital sekarang ini, sebuah foto maupun dokumen dapat dengan mudah dipalsukan. Foto dan dokumen diedit menggunakan *software* komputer sehingga hasil editan sulit dibedakan dengan aslinya. Manipulasi atau rekayasa foto (editan) seperti ini pernah menghebohkan Indonesia pada saat beredarnya foto presiden yang katanya menjadi target pembunuhan teroris. Kecuali itu, kecanggihan teknologi digital sekarang ini, juga mampu mengedit wajah melalui kamera khusus di perangkat *Android* guna menghilangkan bintik-bintik hitam atau jerawat di wajah sehingga tampak indah, cantik dan menawan. Trik kamera seperti ini sangat digandrungi perempuan guna membentuk citra diri dengan paras cantik nan menawan.

Tidak hanya itu, situs-situs berita *media online* dapat dipalsukan menjadi *media abal-abal* sebagai kontra *media online* resmi. Tujuannya adalah untuk mengkaunter berita yang diwartakan media resmi. Kontruksi dan penggiringan opini lewat *media abal-abal* sebagai kaunter terhadap *media online* resmi bertujuan membentuk

opini baru dari opini sebelumnya. Pencatutan media *online* oleh media *abal-abal* seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada saat Pemilu Presiden tahun 2014 silam. Kenyataan seperti ini berupa editan foto, dokumen ataupun pencatutan nama media untuk kepentingan tertentu dan berupaya merusak tatanan sosial yang ada adalah predator telematika (*predatory telematique*).

Seorang pakar *telematika* (telekomunikasi dan informatika) memiliki keahlian khusus menilai apakah sebuah *images, picture*, gambar atau foto adalah asli atau editan. Terdapat *software* khusus untuk menilai keaslian foto yang disebut dengan *Image forensic*. Di beberapa negara maju, teknologi ini sudah dipakai terutama penanganan kasus di pengadilan. Demikian pula *Forensic digital* atau *Forensic tool* untuk memeriksa keaslian video, *hardware* atau *hardisk*. Di lingkungan perguruan tinggi, guna mendeteksi keaslian naskah akademik dilakukan dengan *software* seperti *Unplag, Writecheck, Copyspace, Duplichecker, PlagScan, Viper anti-plagiarsm scanner* ataupun *PlagTracker* dan lain-lain. *Software* ini mendeteksi tingkat plagiarisme yang terdapat pada naskah serta menunjukkan kemiripan rujukan naskah yang di *copy and paste*.

Foto adalah sarana manusia untuk berfikir secara kongkrit maupun abstrak. Dengan foto, logika, rasa, imajinasi, kreatifitas dan keterampilan berpadu menjadi sebuah kekuatan berfikir untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemenuhan penunjang kehidupan. Itulah sebabnya, manusia gemar berfoto (*gilpot*) dengan reka lakon (peristiwa), latar belakang (*background*) ataupun situasi seperti di pantai, sekolah, *shopping centre*, rapat, seminar, mobil dan lain-lain. Itninya, setiap saat dan momen tidak lepas dari swafoto.

Generasi millenial dewasa ini, hampir tidak bisa dilepaskan dari aktifitas *Selfie (self photography)* ataupun swafoto. Foto-foto itu tersimpan di *Android* kemudian di *upload* pada akun serta di sebar (*publish*) lewat *Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter* dan lain-lain. Ironisnya, banyak diantara foto-foto tersebut telah melewati trik kamera ataupun di edit menggunakan *PhotoShop* pada perangkat komputer ataupun *PhotoEditor* di perangkat *Android*.

Proses memfoto (fotografi) adalah kegiatan menghasilkan karya berupa foto melalui media cahaya dan alat berupa kamera yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana disebut diatas bahwa teknologi pengambilan gambar melalui kamera di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1841 melalui Juriann Munich di Jakarta. Penggunaan teknologi berupa kamera untuk merekam setiap momen, peristiwa, lakon dan sosok di *Netherland India* ini

melengkapi tradisi tulisan para peneliti maupun pejabat kolonial. Itulah sebabnya, keseluruhan foto yang tersedia pada kantor arsip di Negeri Belanda baru ada sejak tahun 1841. Sebelum tahun itu, jikapun laporan VOC ataupun pejabat kolonial memiliki gambar pada laporan mereka, maka gambar dimaksud adalah sketsa (gambar tulisan tangan).

Sejak saat itu, fotografi menjadi salah satu media utama pemerintah kolonial serta menjadi bagian integral dari pekerja administratif kolonial, pegawai perkebunan, pertambangan, pelabuhan, pengadilan, opsir militer dan bahkan misionaris. Karena itu, tidak mengherankan apabila sejumlah momen seperti di medan perang, rumah, kantor, toko, ataupun di lokasi perkebunan, di rumah sakit, di lokasi tambang, sedang memetik teh, kopi, kelapa sawit, sisal atau bahkan sejumlah dermaga, pabrik, kereta api bahkan menghisap opium maupun kunjungan gubernur jenderal, menteri negara atau pejabat kolonial ke daerah, sedang karnaval atau sedang rapat dan lain-lain di era kolonial memiliki jejak digital dalam bentuk foto.

Sebagaimana diketahui bahwa, sejak pendudukan VOC (Persekutuan Dagang Hindia Belanda) di Indonesia pada permulaan tahun 1700, pendokumentasian '*Negeri Tajahan*' (Indonesia) dilakukan dengan tradisi tulis. Namun, sejak tahun 1841, tradisi tulis dilengkapi dengan teknologi baru yakni kamera yang masih menghasilkan gambar atau foto hitam dan putih (*black and white color*). Setiap momentum di Indonesia pada era kolonialisme Belanda sejak tahun 1841 tidak lepas dari foto. Lebih dari 100.000 ribu foto tentang Indonesia hingga kini masih berada di Belanda. Foto-foto itu, sebagian diantaranya telah di *upload* ke jaringan pengelola seperti *kitlv*, *Leiden University* maupun *Tropen Museum* yang berada di Belanda. Beberapa foto yang di *upload* dapat di unduh secara gratis (*free*) dengan resolusi foto yang rendah dan kecil. Namun, foto kualitas baik dengan resolusi tinggi dan ukuran lebih besar dapat diambil secara berbayar.

Tidak berlebihan jika Belanda dikenal sebagai negara yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap arsip. Mereka bukan saja mengumpulkan artefaktual dan pertulisan dari Nusantara, tetapi juga mengarsipkannya dengan baik. Sejumlah pengelola arsip (arsiparis) Belanda di Indonesia adalah bergelar doktor dan profesor. Karena itu, wajar saja apabila sejumlah besar artefak kebudayaan yang materil dan tulisan dari sejumlah besar wilayah Indonesia masih tersimpan dengan baik di Belanda. Sebagian besar dari koleksi

Indonesia terutama naskah-naskah yang tersimpan di Negeri Belanda kini sedang dalam proses digitalisasi berupa *microfilm*.

Naskah-naskah kuno berupa manuskrip dan pertulisan lainnya seperti surat kabar, laporan-laporan pejabat kolonial dan lain-lain yang sudah di digitalisasi dikembalikan ke Pemerintah Indonesia guna di simpan kembali di Museum Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ataupun Perpustakaan Nasional (Pusnas) Republik Indonesia. Agak berbeda dengan kebudayaan materil berupa artefaktual dari penjuru Indonesia yang dikuasai selama pendudukan Belanda, jarang sekali dikembalikan ke Indonesia. Hal ini boleh jadi karena menjadi bahan pameran tetap di Belanda ataupun karena alasan orisinalitas koleksi guna dipajang di museum.

Bukan hanya pejabat kolonial yang melakukan pengumpulan benda-benda artefaktual ataupun melakukan fotografi terhadap aktifitasnya di Indonesia. Missionaris Protestan seperti *Rheinische Missiongesellschaft (RMG Jerman)* dan *Netherland Zendinggenotschap (NZG Belanda)*, *Zending* Methodis dan *Zending* Katolik-pun melakukan hal yang sama. Karena itu, catatan-catatan tertulis serta foto-foto pekerjaan misionaris di Indonesia juga tersimpan di negara-negara asal *zending* itu seperti di Jerman, Belanda bahkan Amerika dan Italia. Namun, arsip foto dari RMG atau sekarang disebut *VEM (Vereinte Evangelical Mission)* misalnya, tidak tersedia secara *online* melainkan harus mengunjungi kantor pusat VEM di Wuppertal Jerman. Tidak hanya itu, sejumlah penjelajah setelah tahun 1841 seringkali meninggalkan foto kunjungan ke daerah tertentu. Sebut saja seperti A.V. Novak dari Cekoslovakia mengunjungi Brastagi antara tahun 1926-1927. Demikian pula foto berwarna tentang Karo yang diperbuat W. Roberth Moore sebagaimana terdapat pada *National Geographic* pada bulan Februari 1930. Foto-foto berwarna tentang masyarakat dan alam Karo ini menjadi petunjuk berharga guna menemukali kebudayaan dan masyarakat Karo pada masa lampau. Pada intinya, foto menjadi jejak digital yang pada masa lampau untuk dipahami dewasa ini. Berbagai teks dan kontekstual dari foto itu dapat dibentuk guna membaca masyarakat dan kebudayaanya.

D. Koleksi foto Simalungun

Dengan memasukkan *keyword* 'Simalungun' di <http://media-kitlv.library.leiden.edu/> diperoleh sebanyak 454 lembar foto arsip. Sedangkan melalui kata kunci 'siantar', diperoleh sebanyak 295 lembar foto. Dengan mengakses situs penyelia arsip foto lainnya

seperti <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/> diperoleh koleksi sebanyak 553 foto arsip dan kata kunci 'siantar' diperoleh sebanyak 291 foto arsip. Di situs penyedia foto arsip lainnya seperti <https://collectie.wereldculturen.nl/> dengan memasukkan kata kunci 'Simalungun' ditemukan sebanyak 419 foto arsip, sedangkan dengan kata kunci 'Siantar' terdapat 122 foto arsip. Tentulah, foto-foto dimaksud dengan menggunakan kata kunci 'Simalungun' ataupun 'siantar' bisa memunculkan koleksi yang sama. Demikian halnya dengan memasukkan kata kunci seperti 'Dolog Silou', 'Tanoh Djawa', 'Sipolha', 'Sidamanik', 'Dolog Ilir', 'Parapat', 'Haranggaol' misalnya memperlihatkan foto yang sama.

Sebagian besar gambar mengenai Simalungun berbentuk foto, sketsa, peta dan lukisan. Semua gambar itu diambil antara tahun 1885-1975. Setiap foto yang tersedia di sumber arsip Belanda, diberi nomor. Foto dan ilustrasi tidak dikelompokkan menurut tema, lokasi geografi, atau subkategori lainnya, tetapi diberi nomor menurut waktu diterima dan dimasukkan dalam katalog. Pada setiap foto terdapat keterangan singkat. Asal usul foto seperti dibeli atau hibah juga dicantumkan. Demikian halnya jika asal usulnya tidak diketahui. Pada setiap foto, dicantumkan ukurannya, pun tentang tanggal atau perkiraan pembuatan foto. Hal lainnya, terkadang terdapat pula catatan tentang juru foto atau pelukis atau bahkan arsitek, dan lain-lain. Catatan lain adalah apakah foto berasal dari album atau koleksi yang dimiliki. Setiap foto diberi judul bahasa Belanda, sedangkan kata kunci (*keyword*) untuk mencari lokasi foto dalam bahasa Inggris.

Berbagai tipe orang Simalungun tanpa nama yang terdapat pada arsip foto di Belanda seperti laki-laki ataupun perempuan berpakaian tradisional yang rumit, orang sedang pergi ke pasar, berjualan di pinggir sungai atau dipinggir danau, suasana kerumunan di pasar, anak-anak, orang desa di depan rumah, di ladang atau di pantai, perempuan yang hanya mengenakan lilitan kain sebagai penutup tubuhnya dan lain-lain. Penggambaran foto yang lain adalah seperti gunung, hutan, lembah, pantai, rumah tradisional berpanggung, kampung yang kumuh, upacara kematian, ataupun rupa-rupa arca (patung) batu di Simalungun.

Foto lainnya di Simalungun adalah seperti pembangunan jalan, rel kereta api, pembukaan lahan oleh *natives* yang diawasi *planter* Eropa, pembibitan, pemanenan, jaringan irigasi, jembatan, sarana transportasi seperti mobil, truk, kereta api, sado, *solu* (sampan) dan lain-lain. Dunia pendidikan terutama zending dan pemerintah kolonial (*Ambachtschool*, *Normalschool*, *HIS*, *HBS*, *MOSVIA*,

Lafargeschool, boarding (internat) school, Volksschool, Volgeschool, dan lain-lain). Arsitektur gedung dan bangunan pemerintah, bioskop, gedung perkumpulan, hotel, taman, tugu (monumen), lapangan (*esplanade*), gereja, ataupun hasil bumi seperti teh, kopi, sisal, kelapa sawit, karet maupun pabriknya di Simalungun.

Foto lainnya adalah seperti keluarga kolonial sedang di hotel, pantai, berenang, belajar, pertemuan, rapat, perayaan, karnaval budaya dan lain-lain. Demikian halnya laki-laki atau perempuan Simalungun berfoto dengan orang Eropa tetapi *natives* Simalungun itu mengenakan jas (laki-laki) atau kebaya Jawa (perempuan). Banyak diantara foto itu memperlihatkan tentang kuli kontrak (*coelie contract*) yang sedang bekerja di perkebunan, pabrik pengolahan, maupun pengangkutan.

Apabila mencermati arsip foto tentang Simalungun pada era kolonial itu, maka kebanyakan foto lebih menyuguhkan tentang perkebunan berupa kopi, sisal, kelapa sawit, teh dan karet. Ataupun unit-unit bangunan dan perkantoran ataupun selebrasi dan pertemuan antara pejabat kolonial dan penguasa lokal. Dapat dipahami bahwa, tujuan foto-foto seperti itu adalah guna melengkapi laporan-laporan pejabat kolonial di Simalungun kepada residen Sumatra Timur di Medan maupun kepada gubernur jenderal di *Batavia* (Jakarta) dan bahkan kepada ratu dan raja di Belanda. Jadi, sebenarnya foto-foto tersebut bukan dipetik sembarang saja, tetapi justru '*fotografi atas perintah*' guna menunjukkan progres pekerjaan pejabat kolonial kepada atasannya. Kenyataan ini perlu dipahami bahwa fotografer adalah profesi dan biaya fotografi adalah sangat mahal.

Di wilayah Simalungun yang minus perkebunannya, maka daerah itu nyaris luput dari dokumentasi foto. Jikapun ada, maka foto-foto yang ada cenderung memperlihatkan keunikan seperti rumah-rumah masyarakat, kerumunan di pasar (*market*), anak-anak atau aktifitas yang bagi orang Eropa menunjuk pada suatu kelucuan (kalau bukan keanehan). Tidak mengherankan apabila wilayah-wilayah seperti Silimahuta, Saribudolog, Tigarunggu, Raya, Silou Kahean, Nagori Dolog dan lain-lain sangat kurang foto dokumentasinya. Berbeda dengan daerah lain seperti Dolog Silou, Siantar, Panei dan Tanoh Djawa dimana daerah ini menjadi basis perkebunan, maka dokumentasi fotonya relatif sangat banyak. Demikian pula foto wilayah Simalungun yang berbatas langsung dengan Danau Toba seperti Tongging, Haranggaol (*tiga Langgiung*), Tigaras, Sipolha dan Parapat (*tuktuk Sipiak*) maka dokumentasi foto relatif banyak ditemukan.

Secara khusus wilayah Simalungun seperti Siantar sangat berbeda dengan wilayah Simalungun lainnya. Perbedaan itu disebabkan pemisahan Siantar dari wilayah Simalungun sejak tahun 1917. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1906, subkultur Simalungun yaitu 7 (tujuh) kerajaannya, dibentuk menjadi satu kabupaten (*afdeeling*) yang terintegrasi dengan Karo dengan ibukotanya di Saribudolog. Kemudian, sejak tahun 1917, Siantar dipisahkan dari *afdeeling* Simalungun sehubungan dengan penetapannya menjadi *Gemeente* (Kotapraja).

Sejalan dengan penetapan Siantar sebagai Kotapraja, maka Siantar yang pada awalnya merupakan kampung yang disebut dengan '*Siantar na Lihou*' berpacu menjadi sebuah kota yang disebut dengan *plantation city* (kota perkebunan). Guna mendukung perkembangan kota, maka sejumlah infrastruktur turut dibangun seperti jalan dan jembatan, kantor pemerintah, pertokoan, hotel, bank, bioskop, lapangan olahraga, sekolah, rumah sakit, air minum, kantor telepon dan telegrap, kantor dan barak polisi, kantor dan barak militer, kantor pengadilan, kereta api dan transportasi darat, rumah ibadah dan lain-lain.

Koleksi foto dari setiap unit-unit bangunan ini tersedia di arsip Belanda. Apabila melihat foto-foto dimaksud, maka banyak diantara unit bangunan yang ada itu tersedia dari berbagai sudut pengambilan foto seperti *Siantar Townhall*, Rumah Dinas Walikota, *Board of Siantar*, *Siantar DSM Station*, *Siantar Grand Hotel*, *Simalungun International Club*, Kerapatan Simalungun, *Javasche Bang*, *Rex Bioscoop*, *alun-alun* (taman bunga) dan lain-lain. Bahkan, beberapa foto memperlihatkan proses pembangunan *Javasche Bank* (sekarang BRI jalan Sutomo), ataupun pembangunan jaringan air minum serta pengerjaan lahan perkebunan dan pengolahan komoditas perkebunan terdokumentasi dengan baik.

Memasuki tahun 1940, instansi militer Belanda membuat foto udara (*luchfoto*) kota Pematangsiantar. Foto tersebut dipotret dari pesawat guna memperlihatkan kemajuan kota Siantar yang berkembang pesat karena pengaruh perkebunan. Foto itu menjadi penting bagi Belanda guna menunjukkan keberhasilan pejabat-pejabat kolonial yang pernah memerintah di kota perkebunan itu. Pada intinya, perkembangan pesat kota Siantar yang dimulai sejak tahun 1907 hingga tahun 1942 meninggalkan jejak digital berupa foto yang tersimpan di Belanda.

Singkatnya, foto-foto yang tersedia di arsip kolonial tentang Simalungun ingin melukiskan tentang alam dan lingkungan yang dipenuhi hutan dan rimba belantara namun statis karena

masyarakatnya tidak memiliki kemampuan. Kemudian hutan-hutan itu dikelola orang Eropa semaksimal mungkin menjadi perkebunan yang menguntungkan. Dari perkebunan tersebut, masyarakatnya dirubah menjadi modern lewat teknologi perkebunan, mekanisasi atau pabrik, kesehatan, pendidikan serta bangunan kumuh menjadi modern. Seluruh foto ini hendak menyampaikan dinamisnya orang Eropa untuk membawa masyarakat yang tidak beradab menjadi beradab. Setidaknya, foto-foto itu memperlihatkan beberapa hal tentang Simalungun yang dirangkum sebagai berikut: i) keadaan alam dan lingkungan, ii) masyarakat dan kebudayaan, iii) modernisasi kewilayahan (*municipality*), iv) pejabat kolonial maupun penguasa lokal (*zelfbestuur*), maupun v) ragam aktifitas seperti rapat, pertemuan, upacara, serah terima jabatan maupun karnaval budaya.

Potret Simalungun yang ditampilkan pada naskah ini adalah foto-foto yang berasal dari *Tanoh* (Tanah) Simalungun terutama yang tersimpan di Belanda. Foto-foto tersebut memperlihatkan berbagai hal tentang modernisasi, pertemuan pejabat kolonial dengan pemerintah lokal, kunjungan gubernur jenderal ataupun residen Sumatera Timur di Simalungun ataupun berbagai aktifitas kolonial di Simalungun. Tentu saja, ketersediaan foto-foto Simalungun di Belanda ini dapat menjadi suatu alat analisis tentang *Hasimalungunon* (ke-Simalungun-an) sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Analisis terhadap foto ini dilakukan guna melihat masyarakat dan kebudayaan Simalungun pada awal dan selama pendudukan Belanda. Karena itu, salah satu keutamaan foto disamping sebagai arsip ini, sekaligus berfungsi melihat, merasa dan memahami masa lalu orang Simalungun dari sudut waktu. Penting dicatat sebagaimana disebut Taylor (2008) banyak diantara foto arsip kolonial itu adalah rekayasa canggih yang memperlihatkan hubungan sekilas tentang objek dan juru foto. Namun demikian, terlepas dari rekayasa (*by design*) ataupun *in situ*, tetapi foto ini sangat penting guna mendeskripsikan Simalungun selama era kolonialisme. Karenanya, foto-foto yang tersedia di arsip kolonial ini dipandang sebagai keaslian kultural, sivilisasi maupun masyarakat Simalungun pada eranya.

Sumber foto yang dijadikan sebagai alat analisis pada naskah ini terutama berasal dari Belanda yaitu *KITLV*, *Tropen Museum*, maupun *Leiden University*. Sumber foto dari negara lain seperti RMG (VEM) Jerman kurang dilakukan karena keterbatasan akses foto pada laman mereka. Namun, beberapa foto menyangkut perkembangan Simalungun selama misi *zending* Jerman di

Simalungun turut ditampilkan pada naskah ini. Foto-foto itu berasal referensi seperti Dasuha dan Sinaga (2003) dalam bukunya: *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun, 2 September 1903-2003*²⁸. Sumber lain yang menyediakan foto adalah seperti Damanik dan Sinaga (2013)²⁹. Demikian halnya foto-foto yang di scan ulang dari berbagai buku lokal tentang Sumatera Utara yang dimiliki penulis. Sebagai catatan bahwa, foto-foto yang dicantumkan pada naskah ini adalah foto-foto yang berkontribusi terhadap perkembangan Simalungun secara kolektif dan bukan secara individual.



Gedung KITLV di Leiden, Belanda

Sumber: <http://www.kitlv.nl>

Sumber utama jejak digital yaitu foto tentang Simalungun ini berasal dari laman KITLV atau *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* atau Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda. Dalam bahasa Inggris, KITLV disebut dengan *Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies*. Lembaga ini didirikan pertama sekali pada tahun

²⁸Lihat Juandaha Raya P. Dasuha dan Martin Lukito Sinaga. 2003. *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun, 2 September 1903-2003*. Pematangsiantar: Kolportase GKPS.

²⁹Lihat Jan Jahaman Damanik dan Salmon Sinaga. 2013. *Parmahan Ulang Gabe Iparmahani: Mengenang dan Belajar dari Pelayanan Pdt A. Wilmar Saragih, 1916-1962*. Medan: Tanpa penerbit.

1851 di Belanda. Adapun tujuan utama pendirian *KITLV* ialah untuk penelitian antropologi, sejarah, bahasa, dan sosial di wilayah Asia Tenggara, Oseania dan Karibia yang menjadi wilayah jajahan Kerajaan Belanda. *KITLV* memiliki lebih kurang 600 ribu koleksi buku, manuskrip dan karya dokumentatif seperti foto dan artefak lainnya. Dewasa ini, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka sebagian besar koleksi tertulis (buku dan manuskrip) telah di selamatkan dalam bentuk *microfilm* atau *microfiche* dan digitalisasi terkecuali koran dan lontar. Upaya ini dilakukan mengingat wadah penulisan yakni kertas yang digunakan sangat rentan terhadap kerusakan.

Jurnal atau tepatnya majalah yang sangat populer terbitan *KITLV* adalah *Bijdragen Koninklijk Instituut (BKI)*. Majalah dengan titel *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* menjadi referensi utama pada disiplin ilmu bahasa, sejarah, antropologi dan geografi. Majalah yang sudah lebih berusia 160 tahun ini, menerbitkan tulisan bukan hanya dalam bahasa Belanda tetapi juga dalam bahasa Inggris. Sebelum Indonesia merdeka, lembaga arsip Belanda turut dibentuk di *Batavia* (Jakarta). Pada saat itu, Jacob Anne van der Chijs adalah orang pertama yang diberi tanggungjawab guna mengelola arsip. Ia adalah *Landsarchivaris* (Arsiparis Negara) pertama yang memfokuskan diri pada penerbitan karya-karya arsip yang terlihat pada karyanya: *Realia en Nedelansch Indisch Plakaaatboek 1602-1811*. Dari upaya Jacob Anne van der Chijs diketahui bahwa arsip dapat digunakan sebagai sumber penulisan. Sesudah Indonesia merdeka khususnya sejak tahun 1947 lembaga kearsipan di *Batavia* ini dikepalai W. Ph. Coolhas. Kemudian, sejak Penyerahan Kedaulatan 1949, lembaga kearsipan diserahkan kepada Indonesia di bawah kendali Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada saat ini, lembaga dimaksud lebih dikenal dengan *Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)* di Jakarta.

Jadi, dengan arsip foto maka narasi sejarah dapat dibentuk. Hanya saja, menjadikan foto sebagai sumber penulisan dan alat bantu analisis kesejarahan membutuhkan kehati-hatian kontekstual guna pendeskripsian dan interpretasinya. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa foto sebagai catatan arsip dihasilkan melalui rekayasa canggih lewat hubungan singkat antara objek foto dan juru foto. Situasi ini berdampak pada adanya foto yang dihasilkan lewat kesengajaan berfoto (*by design*) seperti di studio foto ataupun memanggil juru foto. Demikian pula adanya foto yang disebut *in situ* yakni foto yang berada di lokasi foto. Pada kenyataannya, foto-foto *in situ* inipun tidak seluruhnya menunjukkan kealamiahannya foto

karena seringnya dilakukan dengan *by design*. Karenanya, seorang analis membutuhkan kecermatan, keakuratan dan kemampuan membaca foto sesuai teks dan kontekstual foto. Kemampuan memahami dan menafsir foto itu sangat berguna dalam penulisan yang bermutu, komprehensif (menyeluruh) dan beralasan sesuai dengan situasi, kenyataan atau bahkan peristiwa di kelampauan.



THE
Character Building
UNIVERSITY



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB II

WILAYAH KULTURAL DAN ADMINISTRATIF SIMALUNGUN

A. Pendahuluan

Wilayah budaya (*culture area*) berbeda dengan wilayah administratif (*administrative area*). Istilah-istilah yang kurang lebih sama dengan sebutan wilayah adalah: daerah, kawasan, zona, area bahkan terdapat konsep lain seperti region maupun teritori. Wilayah (*area*) sebagaimana dijelaskan Budiharsono (2005)³⁰ adalah unit geografi yang dibatasi kriteria tertentu yang bagian-bagiannya bergantung secara internal. Karena itu, wilayah diartikan sebagai permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu.

Dalam ilmu kewilayahan misalnya, penulis seperti Bintarto dan Hadisumarno (1982)³¹ membedakan wilayah menjadi; i) wilayah homogen (*uniform region*), ii) wilayah nodus (*nodal region*), iii) wilayah khusus (*specific region*) dan iv) wilayah menurut jenis (*generic region*). Pada naskah ini, wilayah yang menjadi pokok pembahasan adalah wilayah budaya dan wilayah administratif. Kedua konsep itu (wilayah budaya atau wilayah administratif) dapat dimasukkan pada salah satu kategori wilayah dari empat kategori itu, yakni wilayah homogen.

Konsep yang disebut dengan wilayah administratif adalah pembagian wilayah yang batas-batasnya didasarkan pada kepentingan pemerintah maupun kepentingan politik seperti RT/RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi atau bahkan negara. Jadi, wilayah administratif sangat terkait dengan aspek yuridis berikut batas-batas wilayahnya. Kenyataan seperti ini berbeda dengan wilayah kultural yang mengabaikan aspek yuridis tetapi sangat tergantung pada kemiripan budaya materil dan non materil. Karena itu, wilayah kultural ini dapat saja melintasi batas administratif, sedangkan wilayah administratif dapat saja merupakan wilayah kultural. Harus dipahami bahwa wilayah budaya

³⁰Lihat S. Budiharsono. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

³¹Lihat R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarno. 1982. *Metode Analisis Geografi*. Jakarta: LP3ES.

dan wilayah administratif menunjuk pada area geografi yang dibatasi secara kultural (budaya) maupun administratif (politik). Suatu wilayah budaya tidak serta merta menunjuk pada suatu wilayah administratif karena dapat saja wilayah budaya melintasi wilayah administratif. Sebaliknya, suatu wilayah administratif dapat saja merupakan suatu kesatuan wilayah budaya.

Pembentukan wilayah administratif seperti yang dikenal dewasa ini adalah warisan kolonial. Era sebelum pendudukan Belanda, maka yang ada adalah wilayah kultural sedangkan wilayah administratif belum dikenal sama sekali. Dalam arti bahwa, pembentukan wilayah seperti desa (kampung), kecamatan (*onderafdeeling*), kabupaten (*afdeeling*) maupun provinsi (*residentie*) baru terjadi setelah pendudukan Belanda. Demikian halnya pembentukan wilayah setingkat *gemeente* (kota praja) ataupun dikenalnya *stad gemeente* (kota besar) baru dikenal semenjak pendudukan atau kolonialisme Belanda. Jadi, jikapun sekarang ini dikenal dengan wilayah administratif seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kotamadya, provinsi ataupun negara maka semuanya merujuk pada era kolonial. Dalam arti bahwa, pemerintah kolonial Belanda-lah yang menetapkan batas-batas administratif guna pengelolaan wilayah dan masyarakatnya. Pembentukan wilayah administratif itu seringkali mengangangi wilayah kultural masyarakat tertentu.

Sebagaimana disebut Perret (2010)³², kolonialisme berperan besar menciptakan polarisasi masyarakat kedalam wilayah-wilayah koloninya. Wilayah koloni ini sekaligus menjadi embrio wilayah administratif dewasa ini yang terus dipakai pemerintah Indonesia sebelum adanya pemekaran wilayah. Arkeolog Perret (2010) menyebut bahwa pembentukan daerah koloni dilakukan secara bertahap. Tahap *pertama* yakni menetapkan dan menegaskan wilayah koloni berdasarkan *topografi* (alam), *sejarah* (gagasan tersingkirnya masyarakat ke pedalaman) dan *politik* (daerah-daerah merdeka yang belum terpengaruh). Tahap *kedua* adalah pemberian isi pada tipologi masyarakat yang sedang dibentuk dan menjadi dasar kebersatuan masyarakat yang dibentuk. Pada tahap ini, secara tekun dicari ciri-ciri yang sama pada masing-masing area, kemudian secara implisit di pandang sebagai ekspresi kesadaran pemersatu yang mendasar.

³²Lihat Daniel Perret. 2010. 2010 *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. (alih bahasa: Saraswati Wardhany). Jakarta: KPG, EFEO, Forum Jakarta-Paris dan Puslit Arkenas.

Berdasar pada dua tahap ini, maka terbentuklah daerah-daerah koloni berdasarkan entitas etnik dan kultural yang disebut dengan *onderafdeeling* (kecamatan) maupun *afdeeling* (kabupaten) pada era kolonial Belanda. Sejumlah wilayah dimaksud adalah seperti *afdeeling Bataklanden* (1887), *afdeeling Simalungun en Karolanden* (1907), *afdeeling Deli en Serdang* (1886), *afdeeling Batubara* (1897), *afdeeling Labuhanbatu* (1926), *onderafdeeling Pakpaklanden* (1906) dan lain-lain. Sedangkan wilayah yang disebut dengan *gemeente* (kota praja) tidak didasarkan pada pertimbangan etnik dan kultural, tetapi cenderung kepada entitas ekonomi politik. Daerah dimaksud adalah seperti *Gemeente Medan* (1909) dan *Gemeente Siantar* (1917) dan lain-lain seperti Sibolga, Binjai dan Kisaran.

Terhadap wilayah-wilayah yang dibentuk ini, pemerintah kolonial menunjuk pejabat kolonial guna mengepalari daerah dimaksud seperti *controleur* (camat), *burgermeister* (walikota), asisten residen (bupati), maupun *gouvernemen* (gubernur). Meskipun pejabat-pejabat kolonial ditunjuk sebagai 'kepala daerah' pada wilayah yang dibentuk itu, namun 'penguasa lokal' yang disebut dengan *zelfbestuur* (pemerintah swapraja) tetap dijalankan. Kenyataan seperti ini diberlakukan pada wilayah bercorak monarki (kerajaan) seperti Melayu dan Simalungun. Jadi dapat dipahami bahwa penggunaan batas-batas administratif yang memisah etnisitas ini baru terjadi ketika era kolonialisme berlangsung di Sumatera Utara dan terus dipakai hingga hari ini.

Pembentukan wilayah berdasarkan kesatuan etnisitas ini dipandang menjadi awal munculnya kesadaran-kesadaran etnik dan kultural. Apabila merujuk Castels (2001)³³ misalnya, disebut bahwa kesadaran sebagai '*keluarga besar Batak*', baru terjadi pada era kolonialisme. Artinya bahwa, menjadi bagian '*Keluarga Besar Batak*' baru terjadi di era kolonial yang berupa mengisolasi masyarakat itu dari Melayu. Senada dengan Castels (2001) itu, Perret (2010) juga menyebut bahwa '*perasaan menjadi bagian dari*' baru terjadi pada saat masyarakat Eropa (Belanda) bertemu dengan masyarakat lokal (*native people*). Pernyataan Perret ini mengindikasikan bahwa adanya perasaan bahwa dirinya menjadi bagian dari kelompok masyarakat tertentu baru tercipta di era kolonial Belanda.

³³Lihat Lance Castels. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*. (Alih bahasa: Maurits Simatupang). Jakarta: KPG.

Hal sama turut dikemukakan Reid (1997)³⁴ bahwa kolonialisme sangat berperan memecah masyarakat lokal dengan membentuk wilayah-wilayah koloni yang tunduk pada pemerintah kolonial. Pernyataan Reid ini menegaskan bahwa wilayah-wilayah yang dibentuk sebagai koloni Belanda dilakukan dengan cara 'mengangkangi' wilayah kultural menjadi wilayah administratif yang tunduk pada pemerintah kolonial. Karena itulah, pada satuan wilayah administratif yang dibentuk Belanda ditunjuk kepala-kepala wilayah guna mengontrol masyarakatnya.

Sebagaimana disebut Geertz (1967)³⁵, kelompok etnik *memang* sudah ada sebelum era kolonialisme tetapi '*kesadaran dan perasaan*' sebagai bagian dari suatu etnik belum mengalami penguatan seperti pada saat kolonialisme. Pernyataan ini menegaskan masyarakat pra-kolonialisme baru memiliki kesadaran dan perasaan sebagai bagian dari kelompok etnik dan kultural tertentu pada era kolonial. Pada era kolonialisme ini, konsepsi tentang '*kita*' dan '*mereka*' dikonstruksi guna memudahkan kontrol terhadap masyarakat. Itulah sebabnya, '*kita*' diperhadapkan kepada '*mereka*' yang seringkali dilakukan melalui proses penaklukan (perang). Pasca perang, maka masyarakat itu diciptakan kembali sesuai keinginan penguasa kolonial.

Pada akhirnya, kolonialisme bukan saja berperan membentuk kesatuan administratif berdasarkan etnisitas dan dipakai hingga dewasa ini, tetapi juga berperan menciptakan '*kesadaran dan perasaan*' sebagai etnik. Menguatnya *kesadaran dan perasaan* terhadap etnik ini sangat disadari pemerintah kolonial, sehingga kota-kota yang dibentuk di Sumatera Utara seperti Medan dan Siantar selalu dibentuk perkampungan berbasis etnik dan agama. Itulah sebabnya, di Kota Medan seperti dijelaskan Pelly (2015) tidak terlepas dari hadirnya pemukiman-pemukiman yang didasarkan pada ikatan etnik seperti *Europeanwijk*, *Chinessewijk* dan *Inlanderswijk*. Hal sama terjadi di Siantar sebagaimana dijelaskan

³⁴Lihat Anthony Reid. 1997. Inside out: The Colonial Displacement of Sumatera's Population. In *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental History of Indonesia*. (Peter Boomgaard, Freek Colombijn and David Henley, Eds)). Leiden: KITLV Press.

³⁵Lihat Clifford Geertz (ed). 1967. The Integrative Revolution: Primordial Sentiment and Civil Politics in the New States, in *Old Societies and New States* (Clifford Geertz, Ed). New York: The Free Press.

Damanik (2017)³⁶ berupa hadirnya pemukiman *Europeanwijk*, *Chinessewijk*, ataupun Kampung Karo, Kampung Toba, Kampung Islam, Kampung Kristen, Kampung Jawa dan lain-lain.

Konsep wilayah budaya (*culture area*) diperkenalkan pertama sekali oleh penulis Wissler dalam tiga buku yang diterbitkannya tahun 1917, 1923 dan 1926³⁷. Konsep *culture area* sebagaimana dijelaskan Wissler itu merujuk pada ruang persebaran fenomena budaya (*the space distribution of culture phenomena*) berdasarkan kesamaan budaya. Persebaran budaya ini tidak saja didasarkan pada ciri budaya materil tetapi juga ciri budaya abstrak. *Culture phenomena* baik yang materil maupun abstrak ini merujuk pada ciri-ciri budaya (*culture traits*) yang berada pada suatu lingkungan tertentu. Jadi, bila merujuk pada pengertian Wissler ini, maka suatu wilayah budaya (*culture area*) dapat melintasi batas wilayah administratif suatu wilayah seperti kota ataupun kabupaten atau bahkan provinsi.

Sementara itu, menurut Wiradyana (2015)³⁸ sebuah wilayah budaya mengacu pada suatu area yang memiliki konsep budaya yang sama dengan ciri-ciri budaya yang sama. Menurutnya, wilayah budaya ini dapat saja terdiri dari beberapa kelompok masyarakat tetapi masih memiliki ciri budaya yang sama dan berasal dari satu sumber asal usul budaya yang sama. Dengan pengertian ini, suatu kebudayaan yang berasal dari satu sumber memiliki konsep yang sama dalam pelbagai kelompok hunian. Selanjutnya, kebudayaan yang berkembang pada suatu wilayah budaya itu dianggap sejalan dengan antara masing-masing kelompok masyarakat yang ada pada wilayah itu.

Hanya saja, sebagaimana dijelaskan Wiradyana (2015), semakin menjauh persebaran budaya dari pusat budayanya, maka semakin banyak unsur-unsur perbedaan budaya. Karenanya, dapat dipahami apabila dalam suatu wilayah budaya dapat saja terjadi perbedaan-perbedaan budaya baik menyangkut unsur materil maupun non

³⁶Lihat Erond L. Damanik. 2017. *Agama, Perubahan Sosial dan Identitas Etnik: Moralitas agama dan kultural di Simalungun*. Medan: Simetri Institut.

³⁷Lihat Clark Wissler. 1917. *The American Indian* (1st ed). New York: McMurtie. Lihat juga Clark Wissler. 1923. *Man and Culture*. New York: Thomas Y Crowell Co; lihat juga Clark Wissler. 1926. *The Relation of Nature to Man in Aboriginal America*. New York: Oxford University Press.

³⁸Lihat Ketut Wiradyana. 2015. Paradigma Perubahan Evolusi pada Budaya Megalitik di Wilayah Budaya Nias. *Jurnal Kapata Arkeologi*, Volume 11 Nomor 2, November 2015, hal 87-96

materilnya. Demikian pula suatu wilayah budaya dapat saja melintasi wilayah administratif karena adanya karakteristik budaya yang sama secara materil maupun non materil.

Lebih lanjut, Wiradyana (2015) menguraikan bahwa wilayah budaya menggambarkan adanya sumber budaya yang sama sehingga memiliki unsur-unsur budaya yang sama. Wilayah budaya ini mencerminkan entitas politik bernama etnik (*ethnic*). Etnis dapat mengalami perbedaan unsur-unsur kebudayaan sebagaimana disebut Barth (1969)³⁹ yang disebabkan perbedaan peran struktur dan fungsinya. Menurut Parson (1966)⁴⁰, perubahan evolusioner kebudayaan dapat terjadi karena peran struktur dan fungsi sebuah kebudayaan pada setiap etnik.

Diferensiasi (perbedaan) kebudayaan pada suatu entitas etnik dapat terjadi karena masyarakat tersusun atas sekumpulan subsistem yang berbeda berdasar pada struktur maupun makna fungsionalnya. Karena itu, seperti dijelaskan Sztompka (2010)⁴¹, manakala kebudayaan kelompok etnik berkembang maka terdapat subsistem yang terdiferensiasi menjadi subkultur-subkultur etnik. Subkultur sebagai bagian dari subsistem ini terbentuk sebagai cara mengadaptasi diri dengan kelompok lainnya. Semakin lama, subkultur ini semakin berkembang sejalan dengan perubahan sosial dan kultural yang terjadi di sekitarnya. Semakin subsistem berkembang maka subkultur kebudayaan masyarakat berhadapan dengan masalah baru guna mengakomodasi perubahan yang terjadi. Penulis seperti Ritzer dan Goodman (2004)⁴², menyebut bahwa perubahan subsistem itu berdampak pada perubahan sistem nilai sejalan dengan perubahan struktur dan fungsi sosial yang terdiferensiasi.

Atas dasar itu, dapat dipahami apabila suatu kelompok etnik yang memiliki ciri-ciri kebudayaan tertentu dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan walaupun berasal dari asal usul budaya yang sama. Perbedaan itu adalah subkultur dari kultur asal yang terbentuk guna mengakomodasi dan mengadaptasi diri dengan perubahan

³⁹Lihat Fredrik Barth. 1969. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia. Press

⁴⁰Lihat Talcott Parson. 1966. *Societies*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

⁴¹Lihat Piotr Sztompka. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.

⁴²Lihat George Ritzer and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

sosial dan kultural yang terjadi di sekitar kebudayaan. Fenomena seperti ini sangat lajim terjadi pada setiap kelompok etnik karena tereduksinya praktek isolasi kultural.

Pada orang Simalungun misalnya, terdapat perbedaan-perbedaan kultur di tujuh subkulturnya. Bahasa Simalungun misalnya, melahirkan dialek (*logat*) tersendiri seperti dialek Silimahuta, Purba, Raya, Siantar, Silou, *Topi Pasir* dan lain-lain. Demikian halnya dalam performansi aspek kultural seperti adat istiadat pada setiap wilayah subkultur itu, pengetahuan, mata pencaharian hidup, sistem religi, upacara ritus peralihan dan lain-lain. Akan tetapi seluruh perbedaan-perbedaan subkultur itu berasal dari suatu nafas kultural yang menjadi embrio perbedaannya yakni kultur Simalungun. Perbedaan-perbedaan kultural pada setiap wilayah subkultural itu adalah bagian dari upaya adaptasi dan akomodasi terhadap perubahan sosial dan kultural yang terjadi pada setiap wilayah subkulturnya.

Pada wilayah yang berbatas dengan Selat Malaka terutama di Serdang, Bedagei, Tebingtinggi, Batubara dan Asahan, orang Simalungun melakukan akomodasi dan adaptasi terhadap kebudayaan islam, *wet cultivation*, maupun kultur perkebunan. Sedangkan di wilayah yang berbatas dengan Danau Toba, orang Simalungun harus melakukan akomodasi dan adaptasi guna menaklukkan alam yang liar, kebudayaan Toba Kristen ataupun sistem pertanian lahan kering (*dry cultivation*). Pada wilayah-wilayah yang berbatas dengan Karo misalnya, orang Simalungun harus melakukan adaptasi dan akomodasi terhadap aspek kultural guna dapat bekerjasama menaklukkan lembah-lembah dalam rangka membangun kerjasama pertanian hortikultura.

Pada wilayah lain seperti Siantar, Tanoh Jawa, Panei dan Raya misalnya, orang Simalungun harus mengakomodasi dan mengadaptasi perubahan lewat perkebunan kolonial, sistem pemerintahan kolonial, *zending* dan lain-lain. Jadi, walaupun mereka yang berada di tujuh subkultur Simalungun ini menampakkan perbedaan sosiokultural, tetapi mereka tetap menginduk pada kebudayaan Simalungun. Sebagaimana disebutkan di atas, semakin perubahan sosial dan kultural kompleks, maka semakin menimbulkan perbedaan pada sub-subkulturnya.

Demikian pula semakin jauh sebuah masyarakat dari pusat-pusat kultural (*pamatang*) maka semakin pula setiap unsur kulturalnya menunjukkan perubahan. Dalam hal lain, semakin kompleks masyarakat dan kultural yang mengelilingi suatu kelompok masyarakat maka semakin kompleks pula perubahan-perubahan

soial dan kultural yaitu hadirnya sub-subkultur masyarakatnya. Karena itu, diferensiasi berupa hadirnya sub-subkultur pada suatu kebudayaan adalah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri.

B. Wilayah administratif Simalungun

Wilayah administratif yang disebut dengan Kabupaten Simalungun dewasa ini adalah pekerjaan Westenbergh yakni *Asisten Residen* pertama di *Afdeling Simalungun en Karolanden* sejak 1906. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1891 hingga 1897, pasca pembentukan *Residentie* Pesisir Timur Sumatra (1887), Westenbergh ditunjuk melakukan penelitian etnografi guna mempelajari geografi dan masyarakat Simalungun dan Karo⁴³. Penunjukan Westenbergh itu sehubungan dengan rencana perluasan wilayah *Residentie* Pesisir Timur Sumatra maupun ekspansi wilayah perkebunan kolonial. Karena itu, sejak tahun 1892, Simalungun dan Karo menjadi perhatian khusus pemerintah kolonial, etnograf dan misionaris.

Sebagaimana disebut Perret (2010), Westenbergh adalah pelopor penelitian etnografi di Karo dan Simalungun hingga daerah di timur dan utara Danau Toba. Westenbergh sering turun ke lapangan sehingga dijadikan sebagai penggerak utama pemisahan antara dataran tinggi dan '*Dusun*' (Deli Dusun dan Serdang Dusun). Pemisahan itu tampak jelas pada tindakan pribadi Westenbergh di '*Deli Dusun*' (Sibolangit) tahun 1892.

Westenbergh adalah rujukan pertama dalam hal pembagian geografi di Simalungun dan Karo. Ia menekankan pentingnya peran benteng pemisah alamiah berupa rantai pegunungan yang terletak antara *residentie* Pesisir Timur Sumatera dan '*Tanah Batak*' (Toba) independen. Menurut Westenbergh, adapun suku-suku '*Batak*' dibedakan berdasarkan bahasa, aksara, bentuk pemerintahan, busana dan wajah. Mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, Westenbergh menyebut perbatasan antara suku *Timur* (Simalungun) dan Karo terletak di Sungai Batugingging. Selain itu, wilayah *urung* di dataran rendah yang dinamakan '*sinuan bunga*' dan '*sinuan*

⁴³Hasil penelitian etnografi guna penentuan batas-batas administratif di Karo dan Simalungun dapat dilihat pada tulisan C.J. Westenbergh. 1891. Nota over de onafhankelijke Bataklanden, *TBG XXXIV*, hlm. 105-116, lihat juga C.J. Westenbergh. 1892. Aanteekeningen omtrent de godsdientige berippen der Karo-Bataks, *BKI 5*, hlm. 208-253, lihat juga C.J. Westenbergh. 1897. Verslag van eener reis naar de onafhankelijke Bataklanden ten noorden van het Tobameer, *TNAG XIV*, hlm.1-112, lihat juga C.J. Westenbergh. 1905. Bataksche rijkes Dolog en Poerba, *TNAG XXII*, hlm.576-603.

gambir' menurut Westenberg adalah wilayah 'Batak'. Rujukan lain adalah Joustra (1910)⁴⁴ yang menyebut bahwa perbatasan permukiman 'Batak' di Pesisir Timur Laut adalah sebuah garis melalui Delitua, Bangunpurba, dan sejajar dengan pegunungan selatan.

Intervensi pasukan pemerintah kolonial di Tapanuli Utara hingga tahun 1904 (memburu Sisingamangaradja) menjadi langkah percepatan pembentukan *afdeeling Simalungun en Karolanden*. Upaya itu dipercepat oleh penandatanganan *Korte Verklaring* tahun 1907. Berdasarkan kenyataan itu, perlu dibuat perbatasan yang terperinci di Simalungun dan Karo dengan wilayah yang disebut 'Melayu'. Guna menetapkan wilayah administratif Simalungun, Westenberg juga merujuk pandangan Joustra.

Sebagaimana disebut Perret (2010), tahun 1904-1905, daerah-daerah yang disebut *Timur, Dolog* (Silou), dan Karo digabung ke dalam *residentie* Pesisir Timur. *Residentie* ini kemudian mengalami penataan ulang tahun 1908 dengan pembentukan *afdeeling Deli en Serdang* yang terdiri dari empat *onderafdeeling* yakni *Beneden Deli, Boven Deli, Serdang, Padang* (Tebingtinggi) dan *Bedagei*; pembentukan *afdeeling Langkat* yang terdiri dari dua *onderafdeeling* yakni *Beneden Langkat* dan *Boven Langkat*; dan *afdeeling Simalungun en Karolanden* yang terdiri dari dua *onderafdeeling* yakni Simalungun dan Karo.

Afdeeling Simalungun en Karolanden dibentuk tahun 1906 yang batas-batas wilayahnya terhadap Deli, Serdang, Bedagai, Batubara dan Asahan serta Danau Toba dilakukan Westenberg. Untuk menyederhanakan pemerintahan di Simalungun, Pemerintah Kolonial bertumpu pada 4 Kerajaan Simalungun (Tanoh Djawa, Siantar, Panei dan Dologsilou) dengan menambahkan tiga kerajaan lainnya (Raya, Purba dan Silimahuta). Pemimpin di Simalungun disebut 'Tuan' sesuai dengan tradisi kepemimpinan lokalnya sebagaimana disebut Westenberg. Satu wilayah Simalungun yakni *Sipituhuta* digabung ke Karo dengan pemimpinnya disebut 'Tuan' dan bukan 'Sibayak' seperti di Karo.

Pasca dibentuk sebagai *afdeeling Simalungun en Karolanden* tahun 1906, maka sejak tahun itu *Asisten Residen* ditempatkan di Saribudolog sebagai ibukotanya. Kemudian, pada tahun 1912 dipindahkan ke Pematangsiantar. Pada waktu itu, Westenberg ditunjuk sebagai *Asisten Residen afdeeling Simalungun en*

⁴⁴Lihat M. Joustra. 1910. *Batakspiegel*. Leiden: Uitgrave van het Bataksch Instituut no. 3

Karolanden karena dianggap telah memahami geografi dan etnografi masyarakat di wilayah itu. Demikian pula, adat pengadilan yang disusun Westenberg mulai berlaku di Karo dan Simalungun sejak 1910 yang disebut dengan *Kerapatan Balei*, *Kerapatan Urung* dan *Kerapatan Na Bolon*.

Kabupaten Simalungun dewasa ini adalah penggabungan dari 7 (tujuh) Kerajaan Simalungun yang disebut dengan subkultur Simalungun. Bila merujuk Tideman (1922)⁴⁵ adapun luas wilayah *onderafdeeling* Simalungun tahun 1921 adalah 441.380 hektar yang terdiri dari penggabungan 7 (tujuh) wilayah kerajaan yang disebut *landschap* sebagai berikut: Siantar (93.510 ha), Tanoh Djawa (158.140 ha), Panei (47.400 ha), Raya (58.900 ha), Dolog Silou (35.160 ha), Purba (23.270 ha) dan Silimahuta (25.000 ha). Sebelum pendudukan Belanda di Sumatera Timur terutama sejak era perkebunan (*Cultuurgeied van Sumatra Ooskust*) tahun 1863, pembagian wilayah Sumatera Utara hanya dibedakan berdasarkan topografis yakni pesisir (*coastal*) dan pegunungan (*hinterland*). Berdasar pada tipologi ini, kategori masyarakatpun dibedakan menjadi masyarakat pesisir (*coastal society*) dan masyarakat pegunungan atau pedalaman (*hinterland* atau *inland society*). Kategorisasi wilayah dan masyarakat seperti ini berasal dari catatan atau referensi etnograf yang pernah berkunjung ke Sumatera bagian utara sejak abad ke-11 masehi.

Penulis seperti Marsden (2008) yang mengunjungi pesisir barat Sumatera bagian utara tahun 1778 misalnya menyebut adanya kesatuan masyarakat bernama *Mandiling* [Mandailing], *Ankola* [Angkola], *Padambola* [Padangbolak], *Tubba* [Toba] dan *Papak Deira* [Pakpak Dairi]. Demikian halnya Anderson (1967) yang mengunjungi pesisir timur Sumatra bagian utara tahun 1823 menemukan kesatuan masyarakat bernama *Semilongan* atau *Semalongan* [Simalungun], *Carow-carow* [Karo] dan Melayu. Pada saat itu, tidak terdapat catatan yang menyebut adanya batasan-batasan administratif dari masing-masing kesatuan masyarakat yang dijumpai kedua etnograf ini.

Sejak masuknya perkebunan asing ke Sumatera Timur pada 7 Juli 1863 yang ditandai ujicoba budidaya tembakau oleh Jacobus Nienhuys di Tanjung Sepasai, daerah Titi Papan Martubung di

⁴⁵Lihat J. Tideman. 1922. *Simeloengen: Het Land der Timoer Bataks in Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot Een Deel van het Cultuurgebied van de Ooskust van Sumatera*. Leiden: Louis H. Becherer.

sebelah baratdaya Labuhandeli (Damanik, 2016)⁴⁶. Sejalan dengan itu, pada tanggal 8 Agustus 1863, Residen Riau dan dua kapal perang menjelajahi Deli. Selanjutnya, atas keinginan Nienhuys, maka berdasarkan *Besluit* (Keputusan) 27 Maret 1864 No 16 yang dituangkan pada *Staadblads* (Lembaran Negara) No. 48 menyusun formasi pemerintahan yang baru. Pada keputusan itu ditetapkan bahwa *Asisten Residen* berkedudukan di Bengkalis, sedang 4 *Controleur* (baca *Kontelir*) ditempatkan di Siak, Panai, Bilah, Batubara dan Deli. Pada bulan April 1864, JAM van Cats Baron de Raet ditetapkan sebagai *Controleur* Deli, L. De Scheemaker menjadi *Controleur* Batubara dan J.C.F. Figelius sebagai *Controleur* di Panai dan Bilah.

Berdasar *Staadblads* 1881 No. 31 dan No.216, susunan wilayah pemerintahan *afdeeling* Deli dirombak yang terdiri dari 6 *onderafdeeling* yakni Medan, Labuhandeli, Serdang, Langkat, Timbanglangkat dan Tamiang. Kedudukan *Asisten Residen* Sumatera Timur pada saat itu berdasarkan *Staadblad* 1879 No 205 dipindahkan dari Bengkalis ke Labuhandeli. Selanjutnya pada tahun 1887, ibukota *Residen Sumatera Timur* dipindahkan ke Medan sejalan dengan faktor ekonomi dan keamanan di daerah yang baru di buka itu. Penetapan itu tertuang pada *Staatsblad* 1887 No 21 dimana *Karasidenan Sumatera Timur* terdiri dari *afdeeling* Deli, *afdeeling* Batubara, *afdeeling* Asahan, *afdeeling* Labuhanbatu dan *afdeeling* Bengkalis (Tim Penyusun, 1987)⁴⁷.

Simalungun menjadi bagian *Karasidenan Sumatera Timur (Residentie Ooskust van Sumatra)* yang beribukota di Medan. Secara resmi, Simalungun menjadi tanah jajahan Belanda sejak tanggal 16 Oktober 1907. Kenyataan ini sejalan dengan pembuangan Sangma Damanik gelar Sang Naualuh Damanik, Raja Siantar ke Bengkalis sesuai *Besluit Gubernemen* No. 1 tanggal 24 April 1906. Raja ini merupakan penguasa lokal terakhir dari Simalungun termasuk Sumatera Utara yang melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Pasca pembuangannya ke Bengkalis, berdasarkan *Besluit Dewan Kerajaan Siantar* tanggal 29 Juli 1907, No. 254 yang diketahui *Controleur*, akhirnya Siantar menyatakan tunduk (takluk) kepada pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya, *verklaring* 1907 ini adalah *verklaring* kedua kalinya setelah yang pertama pada 16

⁴⁶Lihat Erond L. Damanik. 2016. *Kisah dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas, Kota Medan 1863-1942 (Jilid-I)*. Medan: Simetri Institute.

⁴⁷Lihat Tim Penyusun. 1987. *Sejarah Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Kodiklat Provsu.

September 1888. Namun, *verklaring* 1888 ini ditolak Sang Nauluh Damanik yang baru dinobatkan menjadi raja menggantikan pemangku raja sebelumnya yakni Itam Damanik dari Bah Bolak.

Penolakan *verklaring* tahun 1888 itu dilakukan Sang Nauluh Damanik karena hilangnya kedaulatan Siantar dihadapan Belanda. Demikian pula ada kekhawatiran Sang Nauluh Damanik bahwa *verklaring* itu berdampak buruk bagi wilayah dan masyarakatnya. Penolakan terhadap *verklaring* menjadi awal disusunnya 17 fitnah kepada Sang Nauluh Damanik. Pada akhirnya, penolakan dan tidak koperatifnya Sang Nauluh Damanik terhadap Belanda berdampak pada penangkapan, pemakzulan dan pembuangan dirinya ke Bengkalis.

Sebagaimana diketahui, Siantar adalah wilayah terakhir yang mengaku takluk kepada Belanda setelah wilayah-wilayah lain di Simalungun telah lebih dahulu mengakui kedaulatan Belanda. Sebagaimana tertulis pada *Mededelingen van Bestuur* halaman 549-564⁴⁸ dicatat sebagai berikut:

Verklaring 7 Kerajaan Simalungun

Kerajaan	Tanggal	Ditandatangani oleh
Tanoh Djawa	20 Juli 1888	Raja Maligas
Siantar	16 Sep 1888	Ditolak Sang Nauluh Damanik
	29 Juli 1907	Dewan Kerajaan Siantar
Raya	9 Nov 1902	Hapoltakan Saragih
Panei	21 Sep 1903	Jadiamat Dasuha
Dolog Silou	26 Apr 1904	Jaramahi Tambak
Purba	4 Mei 1904	Rahalim Pakpak
Silimahuta	4 Sep 1907	Tuan Nagasaribu dan Tuan Siturituri.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 1907, seluruh pemimpin Simalungun berupa 7 Raja dan 26 *Parbapaan* yakni pemimpin di *Partuanon* (desa induk) disaksikan *Controleur* I.L.O. Brien menandatangani *Korte Verklaring*. Sejak saat itu, seluruh *zeflbestuur landschappen* menjadi bagian dari negara jajahan *Netherland India*. Simalungun dibentuk menjadi *afdeeling* yang disebut dengan *Afdeeling Simalungun en Karolanden* pada tahun 1906. Penetapan ini tertuang pada *Besluit Gubernemen* tanggal 12

⁴⁸Lihat *Mededelingen van Bestuur, Binnen Bestuur Seri A No. 3* Hal 549-564.

Desember 1906 serta dicatat pada *Staadsblad* No 531 dengan ibukota di Saribudolog. Asisten Residen pertama *Afdeeling Simalungun en Karolanden* adalah V.J.C. Westenberg. Pada tahun 1909, Tanah Karo dibentuk menjadi satu *onderafdeeling* dengan ibukota di Kabanjahe dan *onderafdeeling* Simalungun dengan ibukota di Pematangsiantar. Daerah yang disebut dengan *onderafdeeling* ini dikepalai *Controleur*.

Pada tahun 1912, ibukota *afdeeling* Simalungun dipindahkan dari Saribudolog ke Pematangsiantar berdasarkan *Besluit Gubernemen* tertanggal 27 Desember 1913 No. 4. Berdasarkan *besluit Gubernemen* tanggal 27 Juni 1917 No. 14 dan *Staadsblad* No. 285, Pematangsiantar dikeluarkan dari *afdeeling* Simalungun dan dibentuk menjadi *Gemeente* (Kotapraja). Untuk melaksanakan pemerintahan *Gemeente* Siantar, maka dibentuk *Gemeenteraad* (Dewan Kota) yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 5 orang Eropa, 3 orang pribumi dan 1 orang Timur Asing (China).

Berdasarkan *Besluit Gubernemen* tanggal 16 Agustus 1915 No. 3, Karasidenan Sumatera Timur terdiri dari 5 *afdeeling* dan 1 *Gemeente*. Sebagai catatan bahwa, sejak tanggal 1 Januari 1941 *afdeeling* Bengkalis dikeluarkan dari Karasidenan Sumatera Timur dan digabung ke Keresidenan Riau. Kelima *afdeeling* di Sumatera Timur pada tahun 1915 adalah sebagai berikut di bawah ini:

Karasidenan Sumatera Timur 1915

No	Nama <i>afdeeling</i> dan <i>Gemeente</i>	Ibukota
1	<i>Gemeente</i> Medan	Medan
2	<i>afdeeling</i> Deli en Serdang	Medan
3	<i>afdeeling</i> Langkat	Binjai
4	<i>afdeeling</i> Simalungun en Karolanden	Siantar
5	<i>afdeeling</i> Asahan	Tanjungbalai
6	<i>afdeeling</i> Bengkalis	Bengkalis

Pasca penandatanganan *Korte Verklaring* tahun 1907, secara resmi kerajaan-kerajaan Simalungun menjadi wilayah negeri jajahan Hindia Belanda. Demikian pula status kerajaan bukan lagi bersifat otonom tetapi justru menjadi *zelfbestuur* (swapraja) yang kedaulatannya sudah terbatas (dibatasi). Mereka tidak lagi memiliki kuasa otonom tetapi tunduk kepada pejabat kolonial. Pada awal *Korte Verklaring*, kuasa 7 (tujuh) raja Simalungun tunduk kepada pejabat wilayah administrasi yakni *Controleur*. Pada saat itu, *afdeeling* Simalungun terdiri dari 7 wilayah kerajaan yang dibagi

atas 16 distrik dan setiap distrik terdiri dari beberapa *partuanon* (desa induk) yang membawahi beberapa *nagori* (kampung). Adapun wilayah administratif Simalungun pasca penandatanganan *Korte Verklaring* ialah sebagai berikut di bawah ini:

Wilayah *afdeling* Simalungun tahun 1907

Kerajaan	Batas wilayah	Distrik
Siantar	Batubara dan Asahan (timur), Panei (barat), Panei dan Raya (utara) dan Tanah Jawa (Selatan)	Siantar, Bandar dan Sidamanik
Tanoh Jawa	Asahan (timur), Siantar (barat dan utara), Tapanuli utara (selatan)	Tanoh Jawa, Bosar Maligas, Jorlang Hataran, Dolog Panribuan dan Girsang Sipanganbolon
Panei	Siantar (timur), Raya (barat), Deli Serdang (utara) Sidamanik dan Danau Toba (selatan)	Panei, Dolog Batunanggar
Raya	Panei (timur), Purba (barat), Deliserdang (utara), dan Siantar dan Panei (Selatan)	Raya, Raya Kahean
Dolog Silou	Raya (timur), Karo (barat), Deliserdang (Utara) dan Silimahuta (selatan)	Dolog Silou, Dolog Kahean
Purba	Raya (timur), Silimahuta (barat), Dolog Silou (utara) dan Danau Toba (selatan)	Purba
Silimahuta	Purba (timur), Tanah Karo (barat), Dolog Silou (utara) dan Danau Toba (selatan)	Silimahuta

Dari wilayah administratif Simalungun sejak tahun 1907 ini, tampak sesungguhnya telah terjadi pengerdilan wilayah budaya Simalungun. Beberapa daerah yang seharusnya menjadi wilayah Simalungun tahun 1907 itu ternyata dikeluarkan dan digabung ke daerah lain adalah seperti: Tanjungkasau dan Tanjungbolon (Tanjungbalai) ke Asahan, Padang dan Bedagei ke *afdeeling* Deli en

Serdang, serta Sipituhuta ke *onderafdeeling* Karo. Pada saat Indonesia merdeka 1945, wilayah administratif di Sumatera Timur tidak jauh berbeda pada saat Indonesia belum merdeka. Wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Sumatera Timur pada awal proklamasi Indonesia adalah wilayah-wilayah yang ditinggalkan pemerintah Kolonial Belanda maupun pemerintah kolonial Jepang.

Pasca Revolusi 1946, maka pada tanggal 9 April 1946, Gubernur Sumatra yakni Mohammad Hasan mengeluarkan keputusan berupa penghapusan pemerintah militer di Sumatera Timur serta mengembalikannya menjadi pemerintahan sipil. Keputusan lain adalah dihapuskannya sistem pemerintahan swapraja (kerajaan) dan sebagaimana gantinya disusun sistem pemerintahan yang baru seperti yang berlaku di pulau Jawa. Pada saat itu, Keresidenan Sumatera Timur dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten dengan masing-masing kepala daerah yakni:

Wilayah dan Kepala Daerah Sumatra Timur, 1946

No	Daerah administratif	Kepala daerah
1	Kabupaten Simalungun	Madja Purba
2	Kabupaten Langkat	Adnan Nur Lubis
3	Kabupaten Deli Serdang	Munar S. Hamidjojo
4	Kabupaten Karo	Ngeradjai Meliala
5	Kabupaten Asahan	Abdullah Eteng
6	Kabupaten Labuhanbatu	Gouse Gautama

Selanjutnya, Mohammad Hasan selaku Gubernur Sumatera menerbitkan Ketetapan No 103 tanggal 17 Mei 1946 tentang pembentukan kota otonom. Kota otonom ini dibagi dua yakni: i) kota dibawah pengawasan gubernur sedang DPRD kota dipimpin seorang walikota, dan ii) kota dibawah pengawasan Residen sedang DPRD dipimpin bupati disamping tugasnya sebagai pegawai pamongpraja. Di Sumatera Utara, kota-kota otonom yang dibentuk adalah Medan (kota kategori pertama), sedangkan Binjai, Siantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebingtinggi dan *Kutaraja* (Banda Aceh) menjadi kota kategori kedua. Kota Pematangsiantar pada tahun 1946 tersebut dikepalai Madja Purba sekaligus sebagai bupati Simalungun.

Pada tanggal 15 April 1948, Pemerintah Pusat di Jakarta menetapkan berlakunya Undang-undang no 10 tahun 1948 tentang pembagian Sumatera atas 3 provinsi, yaitu: i) provinsi Sumatera Utara, ii) provinsi Sumatera Tengah dan iii) provinsi Sumatera Selatan. Tiap provinsi dikepalai seorang Gubernur yaitu: M. Isa

sebagai Gubernur Sumatra Selatan, SM. Amin sebagai gubernur Sumatra Utara dan M. Nasroen sebagai gubernur Sumatra Tengah. Sedangkan instansi pemerintahan yang disebut dengan *Komisariat Pemerintah Pusat* (Kompempus) yang meliputi seluruh Pulau Sumatra di tiga provinsi, ditetapkan Mohammad Hasan. Kemudian, pada tanggal 19 Juni 1948, S.M. Amin dilantik Sukarno sebagai Gubernur Provinsi Sumatra Utara (Tim Penyusun, 1987).

Salah satu dampak perjanjian Konperensi Meja Bundar pada akhir tahun 1949 adalah beralihnya sisten negara kesatuan menjadi republik serikat yang disebut RIS. Tetapi sistem ketatanegaraan ini tidak berlangsung lama karena sejak dibentuk pada 27 Desember 1949, kemudian sejak Maret 1950 terjadi penggabungan wilayah ke Republik Indonesia. Sistem ketatanegaraan RIS secara resmi dibubarkan pada 15 Agustus 1950 yang disebut Piagam Pernyataan Terbentuknya NKRI dan ditandatangani Presiden Sukarno.

Di Sumatera Utara, dibentuk negara federal yakni *Negara Sumatera Timur (NST)*. Walinegaranya adalah Mansyur dari Asahan dan wakil walinegara adalah Kaliamsjah Sinaga dari Simalungun. Sedangkan komandan kepolisian yang disebut *blue pippier* adalah Djomat Purba. Pada saat itu, Djaidin Purba adalah walikota Medan di era NST. Mereka bertiga ini disamping tokoh-tokoh lainnya adalah pentolan Negara Sumatera Timur yang hanya berumur singkat. Sewaktu pembubaran NST pada 13 Agustus 1950, maka komposisi pemerintah di Sumatera Timur adalah sebagai berikut:

Wilayah Sumatera Timur pasca NST

No	Wilayah	Kepala daerah
1	Kabupaten Deliserdang dan Kota Tebingtinggi	Sampoerna Kolopaking
2	Kabupaten Langkat dan Kota Binjai	O.K. Salamuddin
3	Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar	Madja Purba
4	Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai	Abdullah Eteng
5	Kabupaten Tanah Karo	Rakuta Sembiring
6	Kabupaten Labuhanbatu	Djamaluddin Tambunan
7	Kota Medan	Djaidin Purba

Sedangkan, Gubernur Sumatera Utara pasca pembubaran NST adalah Sarimin Reksomadiprojo (14 Agustus 1950-25 Januari 1951).

Gubernur ini digantikan oleh Abdul Hakim yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 25 Januari 1951 hingga 23 Oktober 1953. Sebagai catatan, pasca pembubaran NST pada 13 Agustus 1950, wilayah Provinsi Sumatera Utara masih bergabung dengan Aceh dan Tapanuli. Karena itu, Provinsi Sumatera Utara sejak September 1950 terdiri dari 12 Kabupaten, 1 Kota Besar dan 4 kota kategori B sebagaimana disebut sebelumnya. Adapun wilayah dimaksud adalah sebagai berikut dibawah ini:

Provinsi Sumatera Utara sejak September 1950

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Aceh Barat
2	Kabupaten Aceh Besar
3	Kabupaten Aceh Selatan
4	Kabupaten Aceh Tengah
5	Kabupaten Aceh Timur
6	Kabupaten Aceh Utara
7	Kabupaten Aceh Pidie
8	Kabupaten Langkat
9	Kabupaten Nias
10	Kabupaten Tapanuli Selatan
11	Kabupaten Tapanuli Utara
12	Kabupaten Tapanuli Tengah
13	Kabupaten Karo
14	Kabupaten Simalungun
15	Kabupaten Deli Serdang
16	Kabupaten Asahan
17	Kabupaten Labuhanbatu
18	Kota Besar Medan
19	Kota Besar Kutaraja (Banda Aceh)
20	Kota Pematangsiantar
21	Kota Tanjungbalai
22	Kota Tebingtinggi
23	Kota Sibolga
24	Kota Binjai

Pembubaran RIS merupakan kemufakatan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Pada saat itu Mohammad Hatta (Perdana Menteri RIS) dan Abdul Halim (Perdana Menteri RI) bermufakat kembali ke NKRI atas dasar: i) penghidupan dan persatuan Bangsa Indonesia, dan ii) memelihara hubungan baik

dengan negara-negara lain. Provinsi Sumatera Utara pasca pembekuan NST pada Agustus 1950 adalah penggabungan 3 eks keresidenan yakni Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh. Untuk mengukuhkan daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara, maka Presiden Indonesia mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1956 tertanggal 14 November 1956 tentang *Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara*.

Daerah otonom yang dibentuk adalah sejumlah 17 kabupaten. Demikian pula dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1956 tertanggal 14 November 1956 tentang *Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar di Provinsi Sumatera Utara* yang menetapkan 4 Kota Besar yakni Medan, Siantar, Sibolga dan Kutaraja. Kedua undang-undang itu mulai berlaku sejak tanggal 24 Desember 1956 (Tim Penyusun, 1987). Penggabungan Aceh ke Sumatera Utara menimbulkan gejolak berupa penolakan Aceh bergabung dengan Sumatera Utara.

Gejolak ini terus mengemuka hingga tahun 1956. Pada tahun ini, dikeluarkan Undang-undang No 24 tahun 1956 tertanggal 7 Desember 1956 yang membentuk Aceh sebagai provinsi sendiri yang dilepaskan dari Provinsi Sumatera Utara. Sejak penerbitan UU No. 24 tahun 1956, maka wilayah yang disebut dengan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari eks Keresiden Tapanuli dan eks Keresidenan Sumatera Timur yakni 10 kabupaten, 3 Kota Besar dan 3 Kota Kecil (Tim Penyusun, 1987). Adapun wilayah Provinsi Sumatera Utara pasca UU No 24 Tahun 1956 adalah sebagai berikut:

Provinsi Sumatera Utara sejak UU No 24 tahun 1956

Kota Besar	Kota Kecil	Kabupaten
Medan	Tanjungbalai	Simalungun
Pematangsiantar	Binjai	Asahan
Sibolga	Tebingtinggi	Labuhanbatu
		Deliserdang
		Karo
		Langkat
		Nias
		Tapanuli Utara
		Tapanuli Tengah
		Tapanuli Selatan

Pada waktu itu, Kabupaten Simalungun terdiri dari empat Kewedanaan sebagaimana disebut di bawah ini:

Kewedanaan di Kabupaten Simalungun Sejak UU No 24 Tahun 1956

No	Kewedanaan	Kecamatan
1	Pematangsiantar	Siantar, Balata, Sidamanik, Dolog Pardamean, Raya dan Panei
2	Tanah Jawa	Tanah Jawa, Parapat, Dolog Panribuan, Bosar Maligas
3	Sarbelawan	Dolog Batunanggar, Bandar, Raya Kahean, Silou Kahean
4	Saribudolog	Silimahuta, Purba dan Dolog Silou.

Wilayah administratif diatas menjadi patokan administratif Kabupaten Simalungun hingga tahun 1998. Hal mana ingin ditegaskan bahwa, sejak tahun 1998 terjadi perubahan fundamental tentang ketatanegaraan Indonesia dari sistem sentralisme ke desentralisasi. Penerbitan UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* maupun UU No 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah* menjadi penanda kuat penyelenggaraan desentralisasi yang disebut dengan Otonomi Daerah. Suatu hal nyata yang ditegaskan melalui Otonomi Daerah ini adalah adanya *Pemekaran Daerah*.

Di Kabupaten Simalungun, meskipun Simalungun sebagai suatu daerah administratif belum terjadi pemekaran tetapi beberapa kecamatan dan nagori telah dimekarkan. Itulah sebabnya, jumlah kecamatan di Kabupaten Simalungun telah bertambah hingga menjadi 31 kecamatan. Adanya keinginan memekarkan daerah Kabupaten Simalungun telah mencuat sejak tahun 1999, tetapi hingga tahun 2018 masih saja kandas.

Adanya sikap pro dan kontra terhadap pemekaran Kabupaten Simalungun ini muncul dari internal elit Simalungun. Hal ini karena, para penggagas pemekaran Kabupaten Simalungun bukan muncul dari elit Simalungun tetapi dari elit luar yang didominasi etnik Toba. Jadi, kandasnya pemekaran kabupaten Simalungun ini ialah karena sikap pemrakarsa yakni para imigran di Simalungun yang berkeinginan mengutak atik Kabupaten Simalungun sebagai upaya memisahkan masyarakat berbasis etnik dan agama. Hal mana yang ingin dikejar adalah, apabila pemekaran Kabupaten Simalungun dapat terlaksana maka terjadi perebutan kekuasaan sebagai kepala daerah yang didominasi etnik Toba dan Jawa di wilayah pemekaran yang disebut dengan *Simalungun Hataran* itu. Hingga tahun 2018, agenda pemekaran Kabupaten Simalungun tidak terlaksana sehubungan dengan moratorium pemekaran ditingkat nasional.



Peta Kabupaten Simalungun, 2018

Sumber: Damanik, 2017

Kenyataan inilah yang menjadi dorongan bagi elit internal Simalungun untuk tidak mendukung gagasan pemekaran itu sendiri. Kemudian, sejak tahun 1959 hingga 1960, Bupati Simalungun dipegang Djamaluddin Tambunan (1960-1973) dan Radjamin Purba (1960-1973). Sedangkan Sekretaris Daerah di pegang S.W. Parinduri (1958-1966) dan G. Silaen (1966-1971). Berikut di bawah ini adalah daftar bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Simalungun, yaitu:

Nama dan periode Bupati Simalungun 1945-2018

No	Nama	Periode
1	Madja Purba	Aug 1945-Mar 1946
2	Urbanus Pardede (<i>Meng kudeta Madja Purba pasca pembunuhan bangsawan 3 Mar 1946</i>)	5 Mar 1946-9 Apr 1946
3	Madja Purba	9 Apr-1946-1947
4	Muhammad Kasim	1947
5	Baja Purba	1947-1950
6	Madja Purba	1950-1954
7	Farel Pasaribu	1954-1956

8	O.K.H. Salamuddin	1956-1958
9	M.S. Sitompul	1958-1959
10	Djamaludin Tambunan	1959-1960
11	Radjamin Purba	1960-1973
12	T.P.R. Sinaga	1973-1975
13	S. Sagala	1975
14	Bonifacius F. Silalahi	1975-1980
15	J.P. Silitonga	1980-1990
16	Djabanten Damanik	1990-2000
17	John Hugo Silalahi	2000-2005
18	Dzulkarnain Damanik	2005-2010
19	J.R. Saragih	2010-2015
20	Binsar Situmorang (<i>plt</i>)	2016
21	J.R. Saragih	2016-sekarang

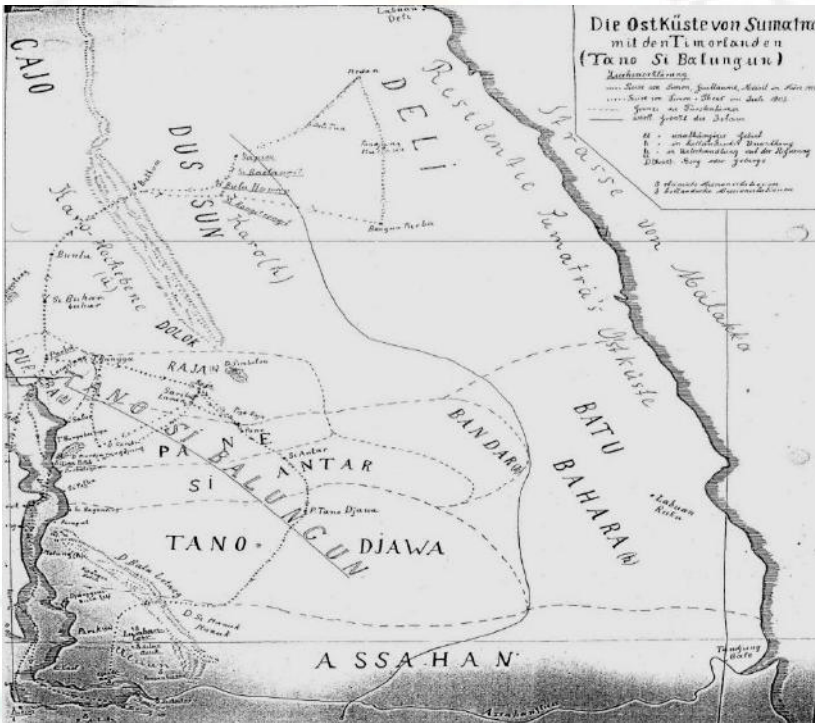
Berikut di bawah ini adalah berbagai peta wilayah Simalungun yang dihimpun dari berbagai sumber. Penulis berupa membuat deskripsi ringkas dari peta dimaksud.



Peta Simalungun, 1883
 Sumber: D.B. Hagen, 1883a

Peta lukisan tangan diperbuat D.B. Hagen tentang keletakan Simalungun tahun 1883 dengan skala 1: 200.000. Pada peta yang

disebutnya 'Nordlichen Battalander' atau *Sebelah Utara Tanah Batak* tersebut, tidak terdapat nama 'Simalungun', tetapi dipastikan bahwa peta ini menggambarkan wilayah Simalungun yang disebutnya 'Orang Timor'. Beberapa nama dikenali sebagai bagian dari wilayah Simalungun adalah seperti 'Gebiet der orang Rajah' (kediaman orang Raya) dan beberapa nama yang ditulisnya lengkap terhadap nama-nama desa di Purba dan Silimahuta yang berbatasan dengan Danau Toba dan Tanah Karo. Danau Toba disebutnya sesuai penyebutan orang Simalungun pada tahun 1883 yakni *Laut Daur* (Laut Tawar). Peta ini mungkin saja menjadi peta pertama yang melukiskan keberadaan wilayah kultural Simalungun.



Peta Tanoh Simalungun, 1900

Sumber: BRMG, 1900

Peta berjudul: *die Ooskuste van Sumatra mit den Timorlanden (Tano Si Balungun)* atau Pantai Timur Sumatera dengan 'Negeri Timur' atau Simalungun. Diperbuat tahun 1900 oleh *Berichte*

Rheinische Missionsgesellschaft. Peta yang sudah lebih sempurna ini menuliskan wilayah seperti Silimahuta, Sipituhuta, Purba, Dolog (Silou), Raya, Panei, Siantar, Tanoh Jawa, Bandar, Batubahara (Batubara) dan Deli. Peta ini diperbuat untuk pengembangan Kristen mula-mula oleh RMG Jerman pada saat berkeinginan mengembangkan agama itu di Simalungun dan wilayah sekitarnya.



Peta Simalungun, 1912

Sumber: Barned, 1912⁴⁹

Peta bertahun 1912 ini diperbuat Missionaris Barned dalam bukunya berjudul '*50 Jahre Batafmission in Sumatra*' atau 50 tahun *Missi Batak* (RMG) di Sumatera. Pada peta ini, wilayah Simalungun sangat jelas mengacu pada 7 (tujuh) subkultur Simalungun yakni Silimahuta, Purba, Raya, Panei, Siantar, Tanoh Jawa, Dolog Silou dan menyebar hingga Asahan. Pada peta itu, tertulis konsep Simalungun dengan ejaan *Sibalungun*. Pada peta itu jelas sekali tertulis pos-pos penginjilan serta rumah ibadah (gereja) yang sudah dibangun RMG Jerman.

Peta ini diperbuat sejak 8 tahun Misi RMG Jerman di Simalungun yang dikembangkan August Theis sejak 1903. Kesalahan terbesar pada saat pengembangan Kristen di Simalungun ini adalah penyebutan Simalungun sebagai orang Batak, sehingga disebut *Batafmission* atau Misi Batak. Hal lainnya adalah sebutan *Timorlanden* mengacu pada posisi geografi Simalungun dipandang dari Danau Toba yang tepat berada di sebelah timur. Cara pandang demikian, tidak mengherankan apabila dalam laporan kolonial dan *zending* pernah menyebut wilayah Simalungun dengan sebutan *Timorlanden*. Karena itu, seruan penyebaran agama inipun ke

⁴⁹Lihat D. Joh. Barned. 1912. *50 Jahre Batafmission in Sumatra*. Berlin: Verlag von Martin Warneck

Simalungun adalah: *Tole den Timorlanden das Evangelium* atau *Segera Wartakan Injil di Tanah Timur*.



Peta Simalungun, 1930

Sumber: kitlv.nl

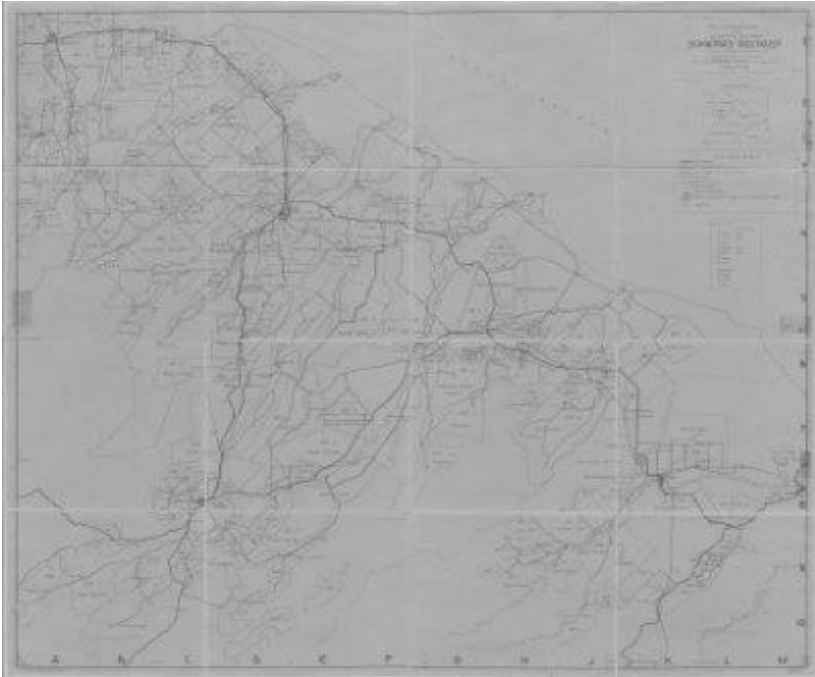
Peta Simalungun bertahun 1930 ini lebih terfokus pada wilayah perkebunan milik kolonial. Karena itu, peta ini memperlihatkan wilayah-wilayah Simalungun yang menjadi basis perkebunan serta pemilik perkebunan dimaksud. Pada peta itu, jelas terlihat komoditas perkebunan hingga tahun 1930 dari Simalungun adalah Teh, Kelapa Sawit, Kopi, Karet dan Serat (Sisal). Demikian pula disebut bahwa terdapat 27 perusahaan perkebunan yang menginvestasikan modalnya di Simalungun. Perusahaan terbesar dan terluas adalah *Handels-Vereniging Amsterdam (HVA)*, *Nijkerk*, *London Sumatera (Londsum)*, dan lain-lain. Sedangkan di daerah seperti Raya, Purba dan Silimahuta tidak terdapat perkebunan kecuali sayur mayur (hortikultura). Kehadiran 27 perusahaan di Simalungun menjadi salah satu faktor di samping *zending* sebagai pengubah teritorial dan orang Simalungun dewasa ini. Saat itu, Simalungun disebut sebagai bagian dari *Dollarland* di Indonesia.



Peta Simalungun, 1935

Sumber: kitlv.nl

Peta bertahun 1935 ini menunjuk pada wilayah administratif *afdeeling* Simalungun. Pada peta dituliskan 7 (tujuh) subkultur yang mengacu pada 7 (tujuh) Kerajaan Simalungun yang disebut dengan *zelfbestuur* (swapraja). Jelas sekali peta ini diperbuat setelah mengerdilkan wilayah Simalungun dengan melepaskan beberapa wilayahnya ke Karo, Deliserdang, Batubara dan Asahan. Daerah dari tujuh kerajaan di Simalungun menjadi dasar bagi Belanda terutama Westenberg guna menetapkan wilayah administratifnya.

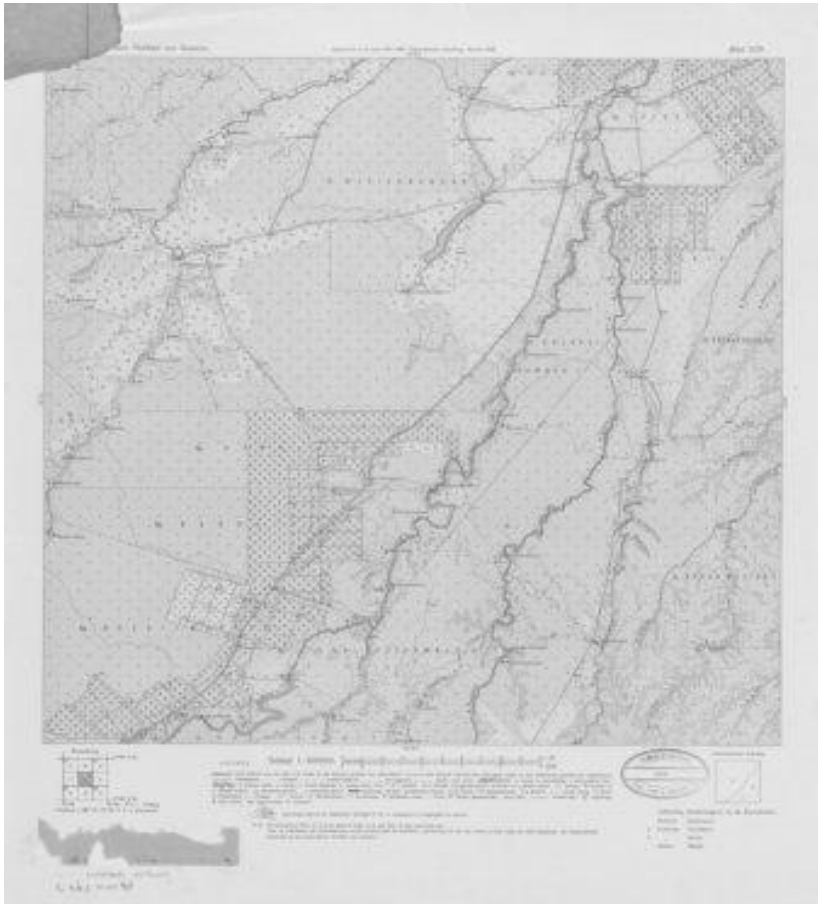


Peta Simalungun, 1947

Sumber: kitlv.nl

Peta bertahun 1947 ini memperlihatkan pesisir timur Sumatera bagian utara (*Ooskust van Sumatera*) terutama dari Medan hingga ke Asahan dan Pematangsiantar. Peta ini memperlihatkan infrastruktur jalan yang terkoneksi ke beberapa kota di pesisir timur Sumatera bagian utara. Pada peta jelas terlihat jalan darat dari Medan menuju Tebingtinggi (Kota Padang). Dari kota ini, jalan menyimpang menuju Asahan dan Pematangsiantar.

Beberapa wilayah perkebunan yang terhubung dengan infrastruktur jalan darat itu jelas disebutkan. Karena itu, foto ini diperbuat sewaktu ketegangan Indonesia *versus* Belanda pasca Agresi Militer I dan memasuki Agresi Militer II. Peta ini menunjukkan '*Daerah Modal*' di sepanjang jalan Medan-Siantar. Peta ini menjadi dokumentasi bagi Belanda menyoal keletakan perkebunan-perkebunan kolonial yang tersebar di Siantar-Simalungun hingga tahun 1947.



Peta Mariahbandar Simalungun, 1915-1916

Sumber: kitlv.nl

Peta ini adalah keadaan topografis Mariahbandar Simalungun serta perkebunan yang menjadi pasokan utama dari wilayah ini terutama Karet dan Kelapa Sawit. Beberapa wilayah ditandai kosong yakni sebagai pemukiman dan perladangan masyarakat di kawasan itu.



Peta Saribudolog, Simalungun 1919

Sumber: kitlv.nl

Peta ini adalah kawasan Saribudolog, Silimahuta Simalungun tahun 1919. Keadaan topografis berupa bergunung dan berlembah berada di wilayah yang berbatas dengan Danau Toba. Wilayah lain cenderung datar terutama mengarah ke Nagasaribu, Sipituhuta hingga ke Saranpadang, Paribuan hingga Gunung Mariah. Pada era kolonial Belanda, Saribudolog sekitarnya menjadi salah satu

pemasok sayur mayur (hortikultura) di Simalungun. Itulah sebabnya, Saribudolog pernah menjadi ibukota *Afdeeling Simalungun en Karolanden* pada tahun 1912. Pertanian sayur mayur di daerah ini mulai dikembangkan sejak tahun 1912 pada saat hortikultura di Tanah Karo sudah berhasil. Hortikultura itu dikembangkan Ir. Botje yang bekerja di Cingkes, Brastagi atas petunjuk dari *Bataks Institut* yang dibentuk di Leiden tahun 1906.

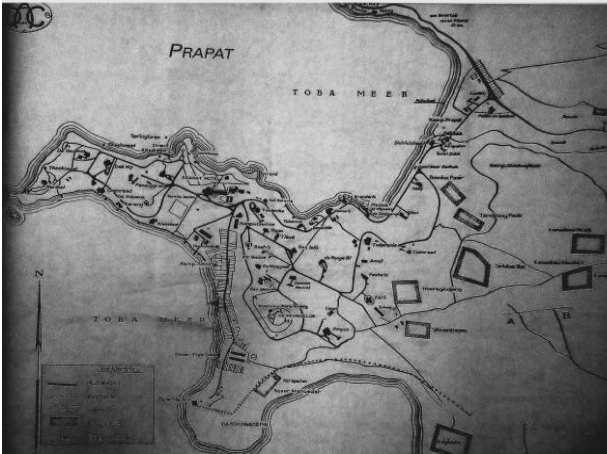


Peta Siantar diperbuat J.H. Bussy tahun 1920

Sumber: kitlv.nl

Peta diatas adalah wilayah Kerajaan Siantar, klan Damanik yang dibentuk menjadi Kotamadya sejak tahun 1917. Wilayah subkultur Simalungun di Kerajan Siantar ini memanjang dari Danau Toba hingga Selat Malaka. Terdapat enam wilayah *partuanon* (desa induk) Kerajaan Siantar dimana Siantar adalah ibukota (*pamatang*) dari 6 *partuanon* (desa induk).Walaupun demikian, foto ini memperlihatkan wilayah kerajaan Siantar yang menjadi basis perkebunan seperti Siantar Estate, Martoba, sebagian Nagahuta yang terletak di timur Kota Siantar.

MAP OF THE HOLIDAY RESORT OF PARAPAT, SIMALUNGUN



Parapat (tuktuk Sipiak), dikembangkan menjadi objek destinasi wisata (holiday resort) selain Gundaling di Sumatera Utara. Dikembangkan sejak tahun 1920 sejalan dengan pembangunan jalan mobil (automobile) sejak tahun 1909 dari Siantar ke Parapat dan Tarutung. Di Parapat terdapat vila dan hotel milik pengusaha perkebunan yang beroperasi di Siantar-Simalungun. Selain itu, terdapat vila milik Kerajaan Siantar, Dolog Silau, Panei dan Tanoh Djawa. Adapun perbatasan yang memisahkan Simalungun dengan Tapanuli Utara ialah Sungai di Ajibata. Saat ini, Semenanjung Parapat tetap menjadi bagian Kabupaten Simalungun

Source: Grote Atlas van Nederlands Oost-Indie, 2004

Peta Tuktuk Sipiak (Parapat), Simalungun 1935

Sumber: Grote Atlas van Nederland Oost-Indie, 2004

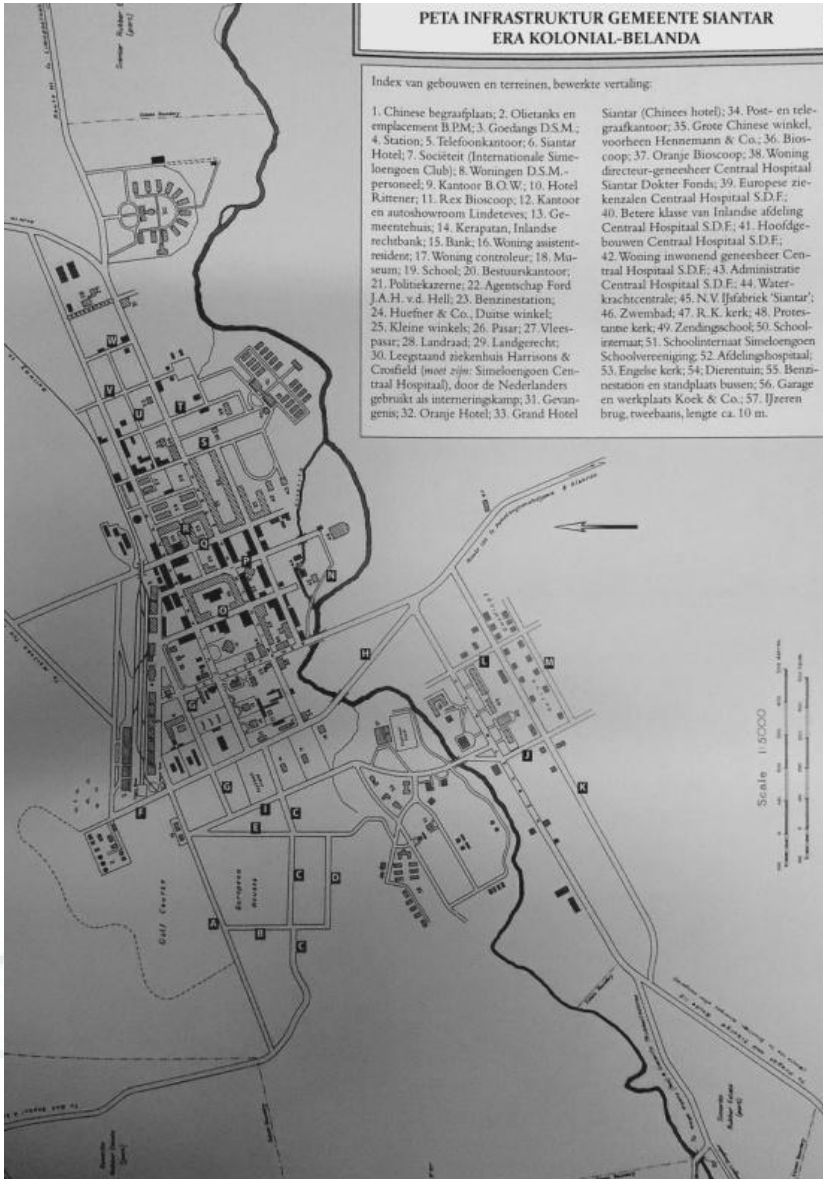
Peta di atas adalah kawasan *Tuktuk* (Tanjung) Sipiak atau kini dikenal dengan nama Parapat. Kawasan Simalungun yang berbatasan dengan Danau Toba ini menjadi area pariwisata sejak era kolonial Belanda. Bermula sejak tahun 1914 dan mulai agresif di populerkan ke Eropa sejak tahun 1922. Di kawasan ini terdapat berbagai hotel, villa dan *dienshotel* (Pesanggerahan) yang dimiliki sejumlah pengusaha perkebunan di Simalungun. Raja Siantar sewaktu dipangku Sawadim Damanik, juga memiliki Pasanggaerahan di Pulo Tao yang berada di tengah Danau Toba antara Samosir dan Tigaras.

Hotel pertama di Parapat adalah *Grand Parapat Hotel* yang sekarang dikuasai Pemerintah Indonesia yang di Nasionalisasi tahun 1958. Jalan menuju Parapat mulai diperbuat sejak tahun 1909 dan sejak tahun 1912 sudah dapat dilewati kendaraan roda empat. Sejak tahun 1920, kawasan Parapat sudah maju dan selalu ramai dikunjungi sewaktu akhir pekan. Sejumlah *planters* menghabiskan akhir pekan dengan cara berlibur di villa atau hotel yang mereka bangun di daerah itu. Hingga kini, Parapat menjadi destinasi wisata di Sumatera Utara.

terkonsentrasi di sekitar Siantar. Peta ini tampaknya diperbuat oleh Belanda untuk memperlihatkan keadaan perkebunan HVA pasca di Nasionalisasi tahun 1958. Hal ini jelas terlihat dari adanya lokasi perkebunan yang dikuasai Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun adanya lokasi perkebunan yang dilarang dikuasai individu (*Verboden voor Men*). Peta ini menunjukkan wilayah Simalungun yang di selatan Kota Siantar seperti Dolog Malela, Bangun, Bah Jambi hingga Pardagangan. Wilayah-wilayah itu menjadi daerah Simalungun yang paling banyak menjadi areal perkebunan karena kondisi tanah yang memungkinkan untuk komoditas seperti karet dan kelapa sawit. Keadaan ini kontras berbeda dengan wilayah Simalungun di bagian atas yang sangat minim dari perkebunan dan selanjutnya lebih cocok menjadi areal sayur mayur.

Peta ini jelas memperlihatkan kawasan Batunanggar, Dolog Ilir, Bukit Maradja, Bah Kapul, Mayang, Mariah Bandar, hingga Bah Tongguran, Bah Kasindir maupun Siantar. Jelas sekali bahwa lokasi-lokasi dimaksud merupakan areal perkebunan yang menjadi budidaya perusahaan HVA. Di Siantar, perusahaan HVA membangun sekolah berasrama (*Boarding school* atau *Internat School*) yang kini disebut dengan sekolah Taman Asuhan. Demikian pula perkebunan ini memiliki pabrik teh di Bah Butong, Mardjandi, Sidamanik maupun di Balimbingan. Rumah sakit juga dimiliki perusahaan ini yang berada di Balimbingan.

Proyek Nasionalisasi atau Indonesianisasi tahun 1958 adalah pengambilan 'paksa' aset-aset seperti perkebunan, tambang minyak, gula, semen, hotel, perbankan, bangunan dan lain-lain yang dimiliki pengusaha dan pemerintah Belanda. Terkecuali perusahaan yang dimiliki swasta asing (non-Belanda) seperti London Sumatera dan lain-lain tidak di Nasionalisasi. Karena itu, perkebunan milik kolonial seperti HVA maupun Nijkerk di Siantar dan Simalungun diambilalih (Nasionalisasi). Kini perusahaan milik Belanda di Simalungun menjadi bagian dari Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) yakni PTPN 3 dan 4. Adapun komoditas utama dari perkebunan HVA di Simalungun ini adalah teh, karet, kopi, kelapa sawit dan serat. Namun kini, komoditas yang dikembangkan PTPN di Simalungun adalah kelapa sawit, karet dan sebagian kecil adalah teh terutama di Bah Butong, Tobasari dan Sidamanik.

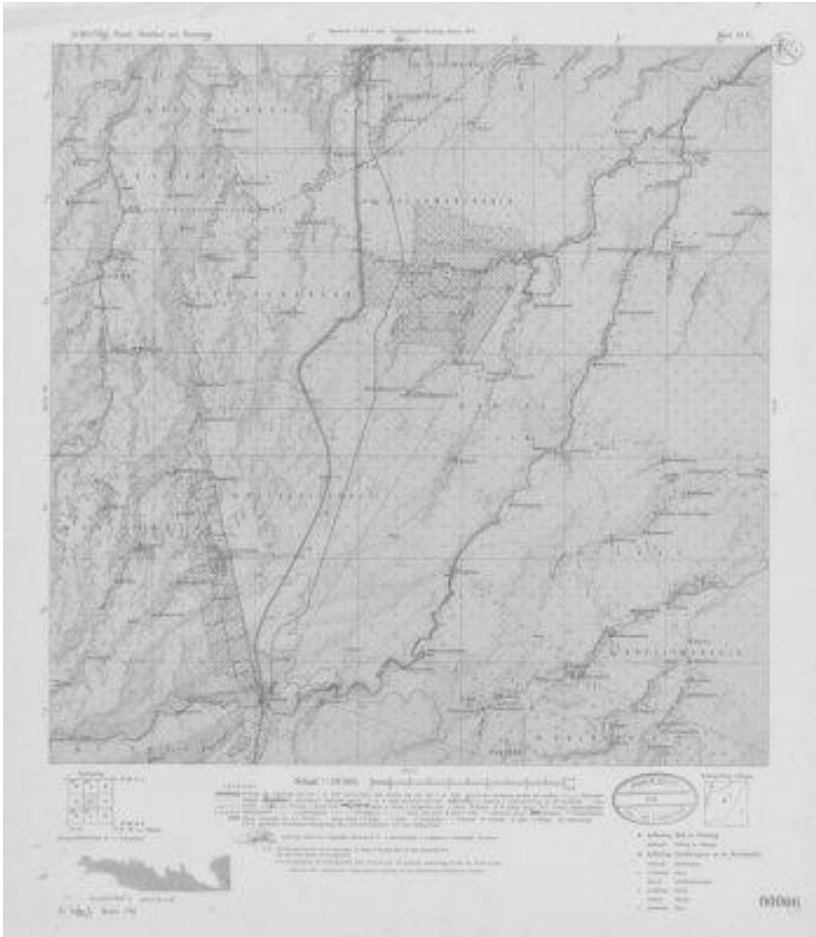


Peta Infrastruktur Kota Siantar, 1926
Sumber: Grote Atlas van Nederland Oost-Indie, 2004

Peta Infrastruktur Gemeente Siantar tahun 1926 diatas, memperlihatkan unit bangunan, kantor, pemukiman, dan keletakannya di inti kota Pematangsiantar. Tersebut pada peta dimaksud adalah sebagai berikut: 1) pemukiman orang Tionghoa, 2) tangki minyak *Batafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*, 3) Gudang *Deli Spoorweg Maatschappij (DSM)*, 4) Stasiun DSM, 5) Kantor Telepon, 6) Siantar Hotel, 7) *Societeit (International Simalungun Club)*, 8) Kediaman pejabat DSM, 9) Kantor Dinas Pekerjaan Umum (B.O.W), 10) *Hotel Rittener*, 11) *Rex Bioskop*, 12) kantor *showroom mobil Lindeteves*, 13) Kantor Walikota, 14) Kantor *Kerapatan* dan Bank Pribumi, 15) Bank, 16) kediaman Asisten Residen, 17) kediaman Kontrolleur, 18) Museum Simalungun, 19) sekolah, 20) kantor pejabat pemerintah.

Selanjutnya terdapat 21) kantor polisi, 22) kantor agen mobil Ford, 23) stasiun bensin, 24) kantor *Hufner and co*, 25) kantor dan bengkel, 26) pusat pasar, 27) kantor dinas pasar, 28) pengadilan Siantar, 29, pengadilan tinggi, 30) rumah direktur *Harison and Crosfield* berdekatan dengan *Simalungun Central Hospital*, 31) *Gevangenis*, 32) Hotel Orange, 33) Grand Hotel Siantar, 34) Kantor Pos dan Telegraf, 35) *Grote Chines Winkel*, 36) bioskop, 37) Orange Bioskop, 38) kediaman direktur *Central Hospital Siantar*, 39) rumah direktur sekolah *Central Hospital SDF*, 40) sekolah perawat pribumi *Central Hospital SDF*, 41) Kantor Kepala *Central Hospital SDF*, 42) kediaman Kepala *Central Hospital SDF*, 43) administrasi *Central Hospital SDF*, 44) Perusahaan airminum, 45) pabrik es Siantar, 46) Kolam Renang, 47) Gereja Katolik, 48) gereja Protestan, 49) Sekolah Zending, 50) sekolah perkebunan berasrama, 51) sekolah berasrama persatuan pribumi Simalungun, 52) rumah sakit perkebunan, 53) Gereja Engels, 54) *Dierentuin*, 55) stasiun pengisian bensin untuk Bus, 56) garasi dan bengkel *Koek and Co*, 57) Jembatan Diponegoro.

Sebagian besar dari unit bangunan yang berada di Siantar ini masih berdiri kokoh. Sebagian kecil diantara sudah dirobohkan atau diganti dengan unit bangunan lain. Sebagian kecil bangunan yang masih berdiri di Siantar itu menjadi kantor pemerintah, swasta ataupun dimiliki individu. Bangunan-bangunan itu menjadi objek wisata *heritage* yang dapat dikemas dalam bagian *citytour* di Pematangsiantar.



Peta Dolog Hataran, Simalungun 1915

Sumber: kitlv.nl

C. Wilayah kultural Simalungun

Merujuk pendapat Perret (2010), masyarakat Melayu yang bermukim di Serdang adalah Orang Simalungun dan Karo yang memeluk agama Islam. Sedangkan masyarakat Melayu yang berada di Bedagei, Tebingtinggi dan Batubara termasuk di Asahan adalah 'orang Simalungun' yang memeluk agama Islam. Karena itu, wilayah yang disebutkan itu termasuk dalam kategori wilayah kultural (*culture area*) Simalungun. Wilayah kultural lainnya adalah

Sipituhuta atau tujuh kampung yang kini menjadi bagian dari administratif Kabupaten Karo.

Sebagaimana dijelaskan di atas, wilayah kultural berbeda dengan wilayah administratif. Karena itu, wilayah budaya dan wilayah kultural etnik Simalungun sangat berbeda. Wilayah kultural Simalungun tidak serta merta menunjuk pada wilayah administratif yang disebut dengan Kabupaten Simalungun dewasa ini. Sesungguhnya, wilayah kultural Simalungun jauh lebih luas dari wilayah administratif Kabupaten Simalungun dewasa ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa wilayah budaya Simalungun dikeluarkan dari Kabupaten Simalungun dan digabungkan ke wilayah lain.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan wilayah administratif di Sumatera Utara baru terjadi sejak pendudukan Belanda. Pada saat itu, Sumatera Utara dewasa ini dibedakan menjadi dua yakni pantai barat dan pantai timur. Hal mana perlu dijelaskan bahwa pesisir barat disatukan dalam suatu wilayah administratif setingkat provinsi yang disebut dengan Karasidenan Tapanuli (*Residentie Tapanoeli*) sedangkan pantai timur dibentuk menjadi satu provinsi yang disebut Karasidenan Sumatera Timur (*Residentie van Ooskust Sumatera*).

Kedua wilayah ini dipisahkan pegunungan Bukit Barisan (*Wilhelmina mountain*) yang memanjang dari utara hingga selatan pulau Sumatera. Diantara Bukit Barisan itu, terdapat lembah-lembah curam (*rift zone*) dan sebuah kaldera indah terdapat diantara patahan Bukit Barisan yang disebut dengan Danau Toba. Danau ini sebagaimana disebut Damanik (2016)⁵⁰ adalah: *'Permata Mahkota Pulau Sumatera'* yang terbentuk melalui tiga kali letusan sebagaimana disebut Chesner (2001). Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa wilayah administratif Simalungun dewasa ini jauh mengecil dari wilayah kultural Simalungun sebelum periode kolonialisme Belanda. Pengerdilan wilayah kultural menjadi wilayah administratif Simalungun dewasa ini memiliki berbagai alasan terutama karena politik ekonomi maupun politik agama.

Penulis seperti Dasuha dan Sinaga (2003)⁵¹ menjelaskan bahwa dalam perkembangannya sejarahnya terutama sejak abad XV sampai

⁵⁰Lihat Erond L. Damanik. 2016. *Danau Toba: Permata Mahkota Pulau Sumatera*. Medan: Simetri Institute.

⁵¹Lihat Juandaha Raya Dasuha dan Martin Lukito Sinaga. 2003. *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun, 2 September 1903-2003*. Pematangsiantar: Kolportase GKPS.

XX, satu demi satu daerah kultural Simalungun makin menciut hingga menyisakan wilayah seluas Kabupaten Simalungun dewasa ini. Demikian pula disebutkan bahwa *Traktat Siak* tahun 1858 menjadi langkah awal Belanda guna menguasai daerah-daerah merdeka di Sumatera Timur yang berdampak pada pengecilan wilayah kultural Simalungun.

Hal nyata ialah sejak masuknya era perkebunan kolonial sejak 1863 di Deli, kesultanan-kesultanan Melayu seperti Deli dan Serdang melakukan perebutan tanah di lokasi budaya Simalungun dan digadaikan kepada pemerintah kolonial. Atas penggadaian tanah-tanah tersebut para sultan mendapatkan sewa tanah dari pemerintah kolonial Belanda.

Kesultanan Deli adalah kesultanan Melayu yang paling banyak mengklaim tanah-tanah di Sumatera Timur dan menggadaikannya kepada Belanda. Hal ini terjadi karena Kesultanan Deli adalah kesultanan Melayu yang paling awal menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kesultanan ini merupakan sekutu dekat pemerintah kolonial sehingga dengan kedekatan itu, banyak tanah-tanah di Sumatera Timur diserahkan kepada Belanda melalui tangan Sultan Melayu Deli.

Pada tahun 1865 misalnya, berdasarkan tulisan Sinar (1976)⁵² di catat bahwa Sultan Basyarudin Syaiful Alamsyah dari Serdang dipaksa Belanda menyerahkan Denai, Padang dan Bedagei yakni wilayah kultural Simalungun kepada Deli dan selanjutnya digadaikan kepada Belanda. Demikian pula berdasarkan catatan Purba (1977)⁵³ bahwa pada tahun 1901, Belanda mencaplok wilayah *Partuanon* (desa induk) Bajalinggei dan Dolog Marawan yakni wilayah Kerajaan Panei menjadi wilayah Kesultanan Deli. Raja Panei yakni Djontama Dasuha melakukan protes hingga ke Medan guna menghadap Residen Pantai Timur Sumatera. Namun, raja Panei tersebut ditangkap pada perjalanan pulang ke Panei, dipenjarakan dan hingga kini tidak ditemukan rimbanya.

Demikian pula menurut Damanik (2017) bahwa pengerdilan wilayah juga terjadi di wilayah Kerajaan Siantar. Pengerdilan itu mulai terjadi pada era Mapir Damanik (ayah Sang Naualuh Damanik) dan terus terjadi hingga era Sang Naualuh Damanik. Sebagaimana disebut Damanik (2017) pengerdilan wilayah Kerajaan

⁵²Lihat T. Lukman Sinar. 1976. *Sari Sedjarah Serdang (Jilid I)*. Medan: Ikatan Keluarga Serdang.

⁵³Lihat M.D. Purba. 1977. *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*. Medan: Penerbit M. D. Purba.

Siantar pada era Mapir Damanik mendapat protes dari Raja Siantar itu dengan cara mendatangi *Controleur* Kroesen di Batubara. Namun, protes tersebut tidak ditanggapi oleh Kroesen dan justru menyebut bahwa wilayah-wilayah yang diambil paksa seperti Tebingtinggi dan tanjung Kasau itu merupakan wilayah Melayu Deli dan Melayu Asahan.

Pengerdilan wilayah Simalungun terjadi dengan wilayah-wilayah yang berbatas langsung dengan wilayah perkebunan seperti di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagei, Kabupaten Asahan maupun Kabupaten Karo. Pendeknya, pengerdilan wilayah kultural Simalungun hampir terjadi dari berbagai penjuru kecuali yang berbatas langsung dengan Danau Toba.

Walaupun wilayah administratif Simalungun dewasa ini lebih kecil daripada wilayah kultural Simalungun sebelum periode kolonialisme, tetapi di daerah seperti Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagei, Karo dan Asahan terdapat wilayah kultural Simalungun. Kenyataan ini ditandai dengan beberapa hal: *pertama*, dominannya kultur Simalungun di daerah-daerah dimaksud, *kedua* tingginya populasi Simalungun di daerah dimaksud, maupun *ketiga* nama-nama daerah (desa) yang menunjukkan asal muasalnya dari Bahasa Simalungun.

Beberapa wilayah kultural Simalungun di berbagai Kabupaten di sekeliling Simalungun diidentifikasi sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Sebagai catatan perlu diingat bahwa Pematangsiantar yang dikenal sebagai wilayah kota dewasa ini adalah ulayat (*homeland*) Simalungun yang ditetapkan menjadi kota sejak tahun 1917. Dengan demikian, satu dari tujuh subkultur Simalungun yakni Kerajaan Siantar merupakan wilayah kultural Simalungun.

Wilayah Kultural Simalungun di luar Kabupaten Simalungun, 2018

No	Nama Wilayah	Kecamatan	Desa/ kelurahan
1	Kabupaten Deliserdang	Bangun Purba	Bah Balua, Bah Perak, Bandar Gunung, Bandar Kuala, Bandar Mariah, Marombun, Tanjung Purba, Bangun Purba, Damak Maliho dan Batu Ginging.
		Gunung Meriah	Bintang Mariah, Dolog (gunung) Mariah, Dolog Paribuan, Gunung Saribu,

			Marjanji, dan Ujung Mariah.
2	Kabupaten Serdang Bedagei	Bintang Bayu	Bandar Nagodang, Bintang Bayu, Damak Tolong, Marihat Dolog dan Panombeian.
		Dolog Masihol	Dolog Masihul, Dolog Manampang, Kota Tengah, Malasori, Silau Merawan, Ujung Silau, Kerapuh dan Bah Kerapuh.
		Dolog Merawan	Bah Damar, Bandarawan, Dolog Merawan, Nagaraja, Paritokan, dan Pabatu.
		Kotarih	Bandar Bayu, Kotarih, Sialtong, Banjaran Godang, dan Rubun Dunia
		Sipispis	Nagori Serbananti, Nagaraja, Nagur Pane, Marubun, Mariah Nagur, Marjanji, Rimbun, Tinokkah, Pispis, Sibarau, Silau Padang, Simalas, Parlambean, dan Damak Urat.
3	Kabupaten Karo	Merek	Bandar Tongging, Garingging, Merek, Sikodon-kodon, Nagalingga, Pangambatan, Situnggaling, dan Pertibi.
		Munthe	Bandar Mariah, Gunung Manumpak, Gunung Saribu, Sarimunte.
4	Kota Pematang siantar	Keseluruhan Kota Pematangsiantar dewasa ini adalah wilayah kultural Simalungun yang dipisahkan dari Simalungun tahun 1917. Pemisahan ini terkait dengan penetapan Siantar sebagai kota (<i>gemeente</i>) di Sumatera Utara di era kolonial.	
5	Kabupaten Batubara	Limapuluh, Medang Deras, dan Tanjung Kasau (Kecamatan Sei Suka).	
6	Kabupaten Asahan	Pasir Mandogei, Silou Jawa, Bandar Pulou, Buntu Maraja, Airjoman, Huta Padang, Sei Silou, Ambalotu, dan Silau Laut.	

Harus diingat bahwa Merek Situnggaling pada awalnya dikenal dengan nama *Sipituhuta* (Tujuh Kampung) yaitu: Tongging Parbatuan, Pangambatan, Passurbatu (Nagalingga), Nagara (Nagabosar) dan Portibi. Tetapi saat ini, wilayah *Sipituhuta* ini dimasukkan menjadi wilayah Kabupaten Karo. Sedangkan daerah yang disebut dengan *Silimahuta* (lima kampung) terdiri dari Mardinding, Purbatua, Saribudolog, Nagasaribu, dan Ujung Mariah dan wilayah ini tetap berada di Kabupaten Simalungun.

Pengerdilan-pengerdilan wilayah ini dipahami sebagai cara: i) mendapatkan tanah-tanah di Simalungun guna perluasan lahan perkebunan, ii) mengisolasi perkembangan agama (terutama Islam) dari daerah-daerah yang berbatasan dengan islam seperti di Batubara dan Asahan, iii) mempersempit wilayah kerajaan-kerajaan Simalungun seperti di Panei, Siantar, maupun Silimahuta sehingga ruang gerak kerajaan menjadi lebih kecil.

Atas dasar itu, wilayah kultural Simalungun melintasi wilayah adminisratif yaitu daerah-daerah dimana orang Simalungun menjadi dominan seperti disebutkan pada wilayah yang dikeluarkan dari wilayah Simalungun. Sungguhpun wilayah ini berada di luar wilayah Kabupaten Simalungun dewasa ini, tetapi merujuk pada catatan historis sebelum era kolonialisme, wilayah tersebut merupakan wilayah kultural orang Simalungun.

Demikian pula bahwa walaupun wilayah kultural ini bukan lagi menjadi bagian dari wilayah administratif Simalungun, tetapi mereka yang berada di wilayah kultural itu tetap menjadi bagian integral kebudayaan Simalungun. Persebaran kultural seperti itu tidak bisa dibatasi secara administratif sebagaimana diungkap Westenbergetapi hanya sebagai cara untuk mengelola masyarakat dengan menentukan batas-batasnya. Demikian pula seperti disebut Perret bahwa pembagian daerah administratif berikut batas-batasnya itu adalah dalam rangka memecah masyarakat berdasarkan etnisitas sehingga lebih mudah dalam mengawasinya. Karena itu, tidak menjadi soal bahwa jikapun orang Simalungun berada di luar administrasi Simalungun tetapi mereka tetap menjadi bagian dari kebudayaan Simalungun. Setidaknya, kenyataan sosial dan budaya seperti itu terekam pada ungkapan *Sin Raya sini Purba, sin Dolog sini Panei*. Ungkapan ini muncul sebagai upaya mengakomodasi dan mengadaptasi terhadap kultur yang ada di sekitarnya.

BAB III

SIANTAR NA LIHOU: SEBUAH KOTA DI SIMALUNGUN

Judul bab ketiga pada naskah ini adalah: *Siantar na Lihou: Sebuah Kota di Simalungun*. Judul ini menegaskan bahwa sesungguhnya Siantar pada awalnya adalah sebuah kampung dan menjadi kota di wilayah Simalungun. Peralihan itu terjadi terutama sejak tahun 1917 dengan penetapannya sebagai ‘Kota Praja’ atau ‘Kotamadya’ di era kolonial Belanda.

Siantar Na Lihou adalah konsepsi yang berasal dari Bahasa Simalungun yang berarti ‘*wilayah datar diantara*’ yakni dua perairan luas yaitu Danau Toba dan Selat Malaka. Disebut bahwa kedua perairan ini sangat bersih (*lihou*) sehingga menambah panorama (keindahan) Siantar. Jadi konsepsi yang sering di sebut ‘*Matio*’ adalah kesalahan besar karena sesungguhnya adalah ‘*Na Lihou*’. Namun, masuknya pengaruh bahasa lain mengakibatkan pergeseran konsep itu menjadi *Matio* yang juga berarti bersih.

Pada bab II sebelumnya telah diuraikan bahwa Pematangsiantar dewasa ini adalah wilayah kultural Simalungun. Penyebutan ini disebabkan pemisahan Siantar sejak tahun 1917 sebagai ‘kota’ atau *Gemeente*. Kota Siantar yang disebut dengan *Gemeente* sejak 1917 itu adalah *pamatang* (ibukota) Kerajaan Siantar yang terdiri dari 6 *partuanon* (desa induk). Penguasa lokal di Siantar adalah klan Damanik yang berpusat di Pulau Holang, di Kota Pematangsiantar dewasa ini.

Etnik Simalungun di kota ini merupakan ‘tuan rumah’ (*host population*) yang berbeda dengan masyarakat lainnya sebagai masyarakat pendatang (*imigrant society*). Karena itu, Kota Pematangsiantar ini adalah *homeland* (ulayat) orang Simalungun dari subkultur Damanik, yakni suatu klan asli etnik Simalungun. Kecuali orang Simalungun, maka lainnya adalah kelompok migran (*imigrant society*) seperti Toba, Jawa, Mandailing, Minangkabau, Nias, Karo, Tionghoa, India dan lain-lain. Mereka ini masuk ke Siantar karena alasan perkebunan seperti menjadi kuli kebun, alasan perdagangan ataupun mencari penghidupan.

A. Asal usul nama Siantar

Pertanyaan yang mesti di jawab adalah, darimanakah asal muasal nama ‘Siantar’ itu?. Referensi pertama yang menyebut nama ‘Siantar’

yang ditulis dengan 'Seantar' berasal dari catatan Anderson tahun 1823. Sebelum tahun itu, tidak ditemukan naskah-naskah ataupun laporan yang mencatat nama daerah yang saat ini menjadi sebuah kota di wilayah Simalungun.

Penjelajahan dalam rangka *political of economy* ke pesisir timur Sumatera itu terbit dalam memoar perjalanan Anderson: '*Mission to the East Coast of Sumatera*'⁵⁴. Pada bukunya itu, Anderson melaporkan tentang sebuah wilayah yang berdampingan dengan Bedagei dan Asahan yang bernama '*Seantar*' atau tepatnya '*Siantar*'. Wilayah *Siantar* adalah salah satu dari wilayah *Principal State* (negara induk) Simalungun.

Catatan Anderson menjadi petunjuk bahwa daerah dimaksud adalah '*Siantar*'. Dengan demikian, dipastikan bahwa, *Siantar* adalah *homeland* atau ulayat sukubangsa (*ethnic group*) Simalungun. Menurut catatan Anderson, *Principal State* Simalungun memiliki kekuasaan yang besar dan mutlak (*most powerful principian state*). Salah satu dari *principal state* dimaksud adalah Kerajaan Siantar. Sepanjang penyelidikan kepustakaan, catatan Anderson ini menjadi referensi pertama yang menulis dan mencatat nama wilayah bernama *Siantar*. Wilayah *Siantar* sebagaimana dikunjungi Anderson pada tahun 1823 itu terletak berdampingan dengan *Padang* (Tebingtinggi) dan Asahan. Anderson (1971) mencatat sebagai berikut:

Semalongan [Simalungun] the principal states are Seantar [Siantar], Silow [Silou], Tannah Jawa [Tanoh Jawa], Purba, Rajah [Raya], Nagasaribu, Muntopanei [Panei], Pagar Tengah [Pagar Tongah], Ria Mahriat [Marihat], Bundar [Bandar], Krian Usang [kemungkinan Raya Usang]...All independent states under separate rajahs, many of them speaking different dialects and of various habits and manners. All these states are inland of Delli, Sirdang, Bedagei, and Assahan. The country throughout is represented to very populous.

Bila merujuk catatan Anderson, ditemukan bahwa wilayah *Siantar* masih merupakan hutan belantara. Aneka jenis kayu tumbuh di hutan-hutan Siantar dengan berdiameter lebih dari 1 meter dengan tinggi mencapai 40 meter. Aneka hewan-pun terdapat di wilayah ini. Salah satunya adalah burung Enggang (*Onggang*). Nama burung ini masuk menjadi salah satu tarian orang Simalungun

⁵⁴Lihat John Anderson. 1967. *Mission to the Eastcost of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia.

yang disebut dengan *Tortor Topping Huda-huda* (Tari Topeng Kuda-kuda). Jenis tarian ini adalah hiburan pada saat meninggal tetapi dipercaya memiliki kekuatan magis. Burung Enggang adalah kendaraan pembawa arwah (roh) orang meninggal ke nirwana sebagaimana tercatat dalam tradisi Hindu (Holt, 1969)⁵⁵.

Wilayah Siantar pada tahun 1823 dilaporkan Anderson (1971) telah menjual getah lilin (*wax*), gading (*ivory*), kapas (*cotton*), tembakau (*tobacco*), kuda (*horse*) maupun budak (*slaves*). Anderson (1971) mencatat sebagai berikut:

there are principal Batta states (the rajahs of which are the most powerful), with which there is a communication from Delli. Seantar, the first, is in the interior of Padang; Tanah Jawa, five days journey from Delli; Sillow in the interior of Bedagei, three days journey from the borders of the territory of Delli. From Seantar comes wax, ivory, cotton, pulse, tobacco, slaves and horses. From Tanah Jawa and Sillow comes gold, wax, ivory, cotton, tobacco and slaves.

Adapun penduduk Siantar sebagaimana di catat Anderson mencapai 2.000 jiwa (*inhabitant*). Tentulah angka ini merupakan estimasi Anderson semata berdasarkan informasi yang diterimanya. Hal ini karena pada saat itu, pencacahan penduduk belum pernah dilakukan. Penduduk Siantar disebut Anderson berinteraksi dengan masyarakat lainnya seperti di Bedagei, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Kampung (Tanjung) Balei dan Kisaran. Komoditas perdagangan mereka ialah hasil hutan seperti rotan, kapas, kayu, bambu, maupun hasil kerajinan tangan berupa kriya tradisional (*hiou*) maupun jenis anyaman lainnya. Disamping itu, terdapat hasil pertanian seperti padi maupun hasil tangkapan seperti ikan, ayam, kuda, dan lain-lain yang berhasil di demostikasi.

Masyarakat Simalungun di Siantar menjadi penghubung (*broker*) perdagangan yang menghubungkan masyarakat *Tubba* (Toba) di sekitar Danau Toba dengan para pedagang asing (*foreigner trader*) di pesisir timur yakni Selat Malaka. Masyarakat dari wilayah ini berdagang dan membentuk pasar-pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam bahasa Simalungun, tempat berkumpulnya pembeli dan penjual itu disebut dengan '*Bandar*'. Orang Melayu menyebutnya '*Kota*' sedangkan orang Karo menyebutnya '*Pertumbukan*' (Perret, 2010).

⁵⁵Lihat Claire Holt. 1968. *Art in Indonesia: Continuities and Change*. Ithaca: Naw York: Cornell University Press.

Istilah *bandar* pada bahasa Simalungun adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli pada setiap hari. Karena itu, *bandar* berbeda dengan *tiga* yang cenderung bersifat mingguan. Tiga *bandar* di Simalungun yang terkenal sebelum era kedatangan Anderson tahun 1823 maupun kedatangan Belanda tahun 1885 ialah Pamatang Bandar, Bandar Pulou yang berdekatan dengan Kampung (Tanjung) Balei, dan Bandar Pardagangan. Di tempat-tempat ini, masyarakat selalu ramai berinteraksi terutama untuk membeli dan menjual barang, barter dan berinteraksi.

Istilah *'siantar'* telah dipergunakan sebagai kata penunjuk lokasi (daerah) jauh sebelum era kolonial Belanda tahun 1885. Istilah *'siantar'* berasal dari bahasa Simalungun yang bermakna *'terletak diantara'*, yaitu dua perairan luas yakni *'laut daur'* (Danau Toba) di sebelah selatan dan Selat Malaka di sebelah timur. Sebagaimana diketahui, wilayah Siantar berada di tengah-tengah Desa Induk (*partuanon*) Kerajaan Siantar yaitu Sipolha dan Sidamanik di arah selatan, Marihat di sebelah timur, Nagahuta di sebelah barat dan Dolog Marlawan, Bandar, Kota Padang dan Tanjungkasau di sebelah utara.

Dalam catatan Anderson tahun 1823 nama Siantar dicatat dengan *'Seantar'*. Selanjutnya, dalam catatan kolonial, ejaan Siantar sering ditulis dengan *'Si Antar'*. Sesungguhnya penulisan ini adalah salah. Konsep *'Si'* bukanlah kata depan, dan konsep *'Antar'* bukanlah nomina atau adjektiva. Kedua kata itu harus di tulis rangkai (menyatu) yaitu *'Siantar'*.

Dalam beberapa tulisan, nama *Siantar* sering ditulis dengan nama *'Siantar Matio'*. Penulisan ini sesungguhnya salah kaprah. Menurut cerita rakyat (*folkore*) Simalungun nama yang benar adalah *'Siantar na Lihou'* atau 'Siantar nan Indah'. Penyebutan ini merujuk pada keadaan wilayah Siantar yang relatif datar, hutan ditumbuhi aneka jenis kayu nan rindang, diapit dua perairan besar (Danau Toba dan Selat Malaka), terdapat kicauan aneka jenis burung, terdapat padang savana, dan dialiri sungai (*Bah*) Bolon.

Berangkat dari uraian ini, jelas sekali bahwa nama *Siantar* berasal dari bahasa Simalungun yang berarti *'berada atau terletak diantara'*. Nama sebagaimana dicatat Anderson yakni *'Seantar'*, ataupun sumber kolonial yang menulis *'Si Antar'* adalah merupakan kelaziman yang sering terjadi oleh seorang pengamat yang bukan menulis dirinya sendiri. Demikian pula bahwa penyebutan *'Siantar Matio'* tidaklah tepat melainkan *'Siantar na Lihou'* (Siantar nan Indah).



Peta Siantar tahun 1920 diperbuat J.H. de Bussy

Sumber: kitlv.nl

Istilah ini merujuk pada keadaan geografis Siantar yang berada di wilayah datar, beriklim sejuk, terdapat animalia dan flora, serta dibelah sungai Bah Bolon dan tepat berada diantara dua perairan besar yakni Danau Toba (*Laut Daur*) di sebelah selatan dan Selat Malaka di sebelah timur. Jika merujuk pada pengertian ini, maka tidak mengherankan apabila posisi geografis Kota Pematangsiantar dewasa ini menjadi daerah transit yang berasal dari pantai barat Sumatera ke arah pantai timur maupun dari pantai timur ke arah pantai barat.

Salah satu karakter Pematangsiantar dewasa ini adalah posisinya yang berada di gerbang (*gate*) menuju *Tuktuk Sipiak* (Parapat) yang

berdampingan dengan Danau Toba. Pada masa sekarang ini, Kepemimpinan Nasional melalui Presiden Joko Widodo sedang menggiatkan pertumbuhan Danau Toba menjadi destinasi wisata unggulan bertaraf nasional di Indonesia.

B. Kerajaan Siantar

Sebelum tahun 1885, adapun wilayah Siantar meliputi teritorial mulai dari perbatasan Danau Toba di selatan hingga Selat Malaka. Teritori ini dikenal dengan nama 'Kerajaan Siantar'. Pemimpin tertinggi yaitu Raja Siantar tinggal di *Rumah Bolon* (istana) yang terletak di *Kampung Holang*, (sekarang disebut dengan Kampung Pamatang) yang terletak di sisi kiri *Bah* (sungai) Bolon yang membelah Kota Siantar. Kerajaan ini terdiri dari 8 (delapan) wilayah *partuanon* (desa induk) yakni: i) Bandar, ii) Sidamanik, iii) Marihat, iv) Sipolha, v) Dolog Malela, vi) Dolog Marlawan, vii) Tanjung Kasau dan viii) Padang (Tebing Tinggi).

Tiga wilayah disebut terakhir: *Padang* (Tebing Tinggi), Dolog Marlawan dan Tanjung Kasau dikeluarkan Belanda dari teritorial Siantar. Teritorial *Padang* (Tebing Tinggi) dibuka pertama kali oleh Bandar Kajum Damanik dilepaskan dari Siantar tahun 1880 dimasukkan ke wilayah Deli Serdang dan kini menjadi Kota Tebing Tinggi. Sedangkan Dolog Marlawan dikeluarkan tahun 1883 dan digabung ke Deli Serdang dan kini menjadi Serdang Bedagei, dan Tanjung Kasau dikeluarkan tahun 1885 dan dilebur ke Asahan dan kini menjadi wilayah Batubara. Alasan pengerdilan wilayah teritorial Siantar ini disamping karena alasan agama Islam yang dominan dianut masyarakat di ketiga wilayah itu, juga sebagai strategi mengerdilkan kekuasaan dan wilayah Siantar. *Lagi pula*, seperti disebut Kroesen (1881) bahwa bilamana ketiga wilayah itu dikeluarkan dari Siantar dan digabung ke Melayu maka lebih mudah mendapatkan tanahnya guna ekspansi perkebunan.

Tindakan pencaplokan ketiga wilayah itu dilakukan sendiri oleh Belanda tanpa mendapat persetujuan Mampir Damanik sebagai penguasa lokal di Siantar. Walaupun mendapat protes dari pemimpin Siantar itu, tetapi tetap saja tidak berhasil mengembalikan ketiga wilayah dimaksud dalam genggaman Kerajaan Siantar. Protes Mampir Damanik terhadap pencaplokan itu dilakukan Mampir Damanik dengan menyerang pos Belanda di Batubara tahun 1886.

Pasca wafatnya Mampir Damanik tahun 1887, maka seharusnya tahta Siantar dipegang Sang Nauluh Damanik. Namun, karena belum akil baliq, maka sementara waktu tahta itu dipegang Itam Damanik dari wilayah Bah Bolag, yakni *pakcik* Sang Nauluh

Damanik. Kemudian, pada tahun 1889, Sang Nauluh Damanik dinobatkan menjadi pemimpin (raja) di Siantar. Ia adalah garis keturunan langsung (putra mahkota) atau *parana* yang berhak meneruskan tahta ayahnya.

Di Siantar, *partuanon* Bandar, Sidamanik, Sipolha dan Marihat memiliki status istimewa jika dibandingkan daerah lainnya. Keistimewaan itu tampak pada kedudukannya sebagai pemangku raja (*dewan harajaan*) di Siantar bilamana raja meninggal dunia, atau karena putra mahkota (*parana*) belum *akil baliq* (dewasa) atau dewasa secara hukum ataupun karena kondisi lainnya.

Desa Induk (*partuanon*) Kerajaan Siantar seperti Sipolha, Sidamanik, Marihat, Siantar, Dolog Malela (Gunung Malela), Tanjung Kasau, Sarbelawan, Dolog Marlawan hingga Padang (Tebing Tinggi) di kepalai seorang Raja Kecil (*Tuan*) yang masih memiliki kekerabatan dengan Raja Siantar. Seluruh wilayah ini menjadi satu kesatuan dengan Kerajaan Siantar dengan ibukota (*pamatang*) yakni di Pulau Holang, Kampung Pamatang terletak di inti kota Pematangsiantar dewasa ini.

Tersebut raja-raja Siantar pasca Sang Nauluh Damanik adalah Riahata Damanik dan Riah Kadim Damanik (keduanya dari *Partuanon* Marihat dan Sidamanik) yang memerintah tahun 1911-1916, Waldemar Damanik yakni anak Sang Nauluh Damanik yang bukan putra mahkota (1916-1923) dan Sawadim Damanik dari *Partuanon* Bandar (1924-1946).

Seorang *pangulu balei* (sekretaris) raja yang terkenal di Siantar adalah Djaudin Saragih, yakni ayah dari Djasamen Saragih, seorang dokter (sekaligus dokter pertama orang Simalungun) yang tewas dibunuh tahun 1946 sewaktu revolusi yang menghantam bangsawan di Sumatera Timur. Nama dokter ini diabadikan sebagai nama rumah sakit Kota (*Gemeente Krankenhaus*) di Siantar yang disebut dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Siantar.

Pada era kolonial Belanda, penguasa lokal yakni Kerajaan Siantar klan Damanik disebut dengan *Zelfbestuur* (pemerintahan swapraja). *Zelfbestuur* memiliki kawula (penduduk) sendiri yang umumnya adalah *inlanders* (pribumi) sedangkan kawula (penduduk) pemerintahan kolonial pada umumnya adalah orang Eropa dan India dan Tionghoa.



Foto Sang Nauluh Damanik, 1913
'Pioner Toleransi dan Pengentas dari Siantar'
Sumber: Damanik, 2017

Menurut Dasuha dan Damanik (2016)⁵⁶, Raja Siantar yang terkenal gigih melawan Belanda adalah Sangma Damanik dengan gelar *Sang Nauluh Damanik*. Sang Nauluh berarti *Delapan Keutamaan* yang menjadi karakter dan kepribadiannya. Ia menolak berdamai, tunduk dan menjadi bawahan Belanda. Berbagai tawaran perdamaian dibuat Belanda, tetapi tidak mampu membujuk Sang Nauluh Damanik mengakui kedaulatan Belanda. Sebanyak 17 fitnah

⁵⁶Lihat Juandahara Raya Dasuha dan Erond L. Damanik. 2016. *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetri Institute

sengaja diperbuat Belanda untuk melemahkan Sang Nauluh Damanik. Akhirnya Sang Nauluh Damanik di tangkap Belanda tahun 1904. Ia dipenjarakan di penjara kolonial di Pantoan dan Batubara. Pada tahun 1906, pemenjarannya dipindahkan ke penjara Sukamulya Medan. Pada bulan September 1906, Sang Nauluh Damanik dihukum (vonis) buang (*internir*) ke Bengkalis, Riau. Hukum pembuangan dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah mendengar pertimbangan Menteri Kehakiman Belanda. Selama 7 tahun di pembuangan Bengkalis, Sang Nauluh Damanik meninggal dunia sebagai wira bangsa pada tahun 1913. Jasadnya di kuburkan di Dusun Senggoro, Kelurahan Bantan, Bengkalis, Riau.

Menurut Damanik (2013)⁵⁷, selama menjadi raja di Siantar sejak 1889-1904, Sang Nauluh Damanik menjadi pioner pembangunan *Nagori* Siantar. Ia membangun pekan (*tiga*) yang tidak jauh dari istana Kerajaan Siantar yang kini disebut dengan Pasar Horas. Ia juga merintis pembangunan jalan setapak dari Pamatang hingga Pardagangan yang kini disebut dengan Jalan Sang Nauluh Damanik. Ia juga memberikan izin lokasi pembangunan Gereja RMG (kini HKBP jalan Gereja) di Pematangsiantar. Ia memberikan izin lokasi pembangunan Mesjid di jalan Kartini yang kini disebut Mesjid Agung Pematangsiantar. Selain itu, ia juga membangun *sopou bolon* sebagai sanggar seni dan tari di jalan Simbolon yang kini menjadi lokasi Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar. Ia juga mengizinkan pendirian rumah potong hewan di jalan Nias, Kampung Kristen di Siantar Selatan. Kiranya, walaupun singkat memerintah di Siantar, Sang Nauluh Damanik sangat tepat diberi apresiasi sebagai ‘*Sosok Pembaharu*’ sekaligus ‘*Tokoh Toleransi*’ di Pematangsiantar. Karena kedua kepeloporan yang dilakukan Sang Nauluh Damanik ini, maka kiranya kepada sangat tepat dikatakan sebagai ‘*Sang Pengentas dari Siantar*’.

Pada masa-masa pembuangan di Bengkalis antara tahun 1907-1913, Sang Nauluh Damanik lebih mendedikasikan diri pada Tuhannya, yakni Allah SWT. Agama Islam yang diterimanya pada tahun 1902 menjelma pada Delapan Keutamaan (*Sang Nauluh*) yang menjadi gelar kebangsawanannya. Di Bengkalis, Sang Nauluh menjadi mubaligh (penyiar) agama Islam. Sehari-hari ia hanya dapat berdakwah. Ia sangat disegani sebagai ‘*Raja Batak*’ yang berwibawa. Di Bengkalis, ia memprakarsai sebuah pesantren tradisional yang

⁵⁷Lihat Erond L. Damanik. 2013. *Sang Na Ualuh Damanik: Gagasan, Karya dan Tindakan*. Medan: Unimed Press.

kini menjadi sebuah sekolah (MTA) dan juga membangun sebuah rumah ibadah (Mesjid) di Jalan Senggoro, Bengkalis.



Lukisan Sang Nauluh Damanik
Sumber: Koleksi Djariaman Damanik

Pasca pemakjulan, penangkapan dan pemakjulan Sang Nauluh Damanik di Siantar, maka seluruh wilayah dari 7 Kerajaan Simalungun menjadi takluk dan tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Sebagai pernyataan tunduk, maka pada tahun 1907 sebanyak 7 (tujuh) kerajaan Simalungun beserta 29 Desa Induk

(*partuanon*) menandatangani Plakat Pendek atau *Korte Verklaring* (Perjanjian Singkat). Menurut Sinar (2006)⁵⁸, penandatanganan *Korte Verklaring* tahun 1907 itu menjadi awal kolonialisme di Simalungun.

Pada waktu itu, Siantar masih menjadi wilayah yang tergabung ke *Onderafdeling Simalungun en Karolanden* dengan ibukota (pamatang) di Saribudolog yang dibentuk pada tahun 1907. Kemudian, pada tahun 1912, ibukota *Onderafdeling Simalungun en Karolanden* dipindahkan dari Saribudolog ke Pematangsiantar. Kemudian, sejak tahun 1917, Pematangsiantar dikeluarkan dari *Onderafdeling Simalungun en Karolanden* dan dibentuk menjadi wilayah administratif sendiri yang disebut dengan *gemeente* Siantar. Baik *Onderafdeling Simalungun en Karolanden* maupun *Gemeente* Siantar menjadi wilayah Keresidenan Pantai Timur Sumatera (*residentie Ooskust van Sumatra*) yang dibentuk tahun 1887 dimana Medan menjadi ibukotanya.



Istana (Rumah bolon) Raja Siantar, 1919

Sumber: kitlv.nl

Dipastikan bahwa, Sang Nauluh Damanik adalah raja Simalungun yang terakhir melakukan perlawanan terhadap

⁵⁸Lihat T. Lukman Sinar. 2006. *Bangun dan Runtuhnya Kesultanan Melayu Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.

kolonialisme Belanda. Pasca pembuangannya tahun 1907, tidak satupun dari 7 (tujuh) raja Simalungun yang berkuasa melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda. Raja-raja Simalungun pasca tahun 1907 cenderung menjadi 'anak emas' Belanda. Mereka menjadi kaki tangan Belanda untuk mengamankan gejolak kawula raja, mengadili dan menahannya.

Raja-raja Simalungun pasca 1907 cenderung menggadaikan tanah (konsesi) berupa *erpacht* (hak pakai) kepada Belanda dan pengusaha mancanegara lainnya. Mereka mendapatkan sewa tanah (*land rente*) dari penggadaian tanah itu. Para raja ini, bukan saja menjadi penguasa *zelfbestuur* (pemerintah swapraja) tetapi sekaligus sebagai Pamongpraja Belanda. Mereka mendapatkan gaji, pakaian dinas, mobil dan hak-hak istimewa memungut pajak dari kawulanya masing-masing. Kondisi seperti ini sangat terasa seperti di Siantar pasca Sang Nauluh Damanik, di Panei, Raya, Tanoh Djawa dan Dolog Silau. Di wilayah-wilayah ini, sebagian besar tanah-tanah kawula digadaikan raja kepada pengusaha perkebunan asing.



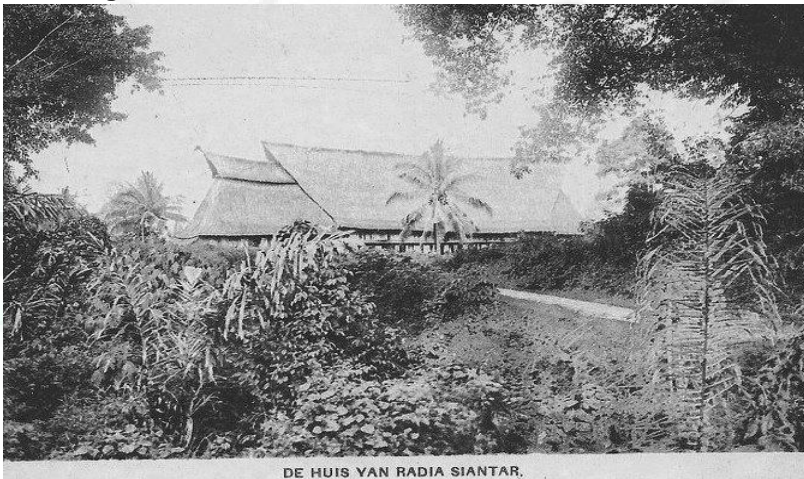
Sudut lain istana Raja Siantar, 1919

Sumber: kitlv.nl

Pada era sebelum kedatangan Belanda, istana (*palace*) atau dalam bahasa Simalungun disebut *Rumah Bolon* kerajaan Siantar

berdiri megah di Kampung Pamatang, Pulau Holang, Siantar. *Rumah Bolon* itu berbentuk persegi panjang berukuran 15 x 30 meter. Terdapat tiang-tiang utama sebagai sokoguru bangunan berbentuk *tiang jonjong* (penyangga berdiri) terutama bangunan bagian belakang. Di bagian depan, terdapat bangunan berupa teras (*surambi*) yang ditopang *tiang galang* (penyangga datar). Dinding istana ini terbuat dari tepas (bilah bambu yang dianyam) serta beratapkan ijuk. Bentuk atapnya menyerupai pelana (melengkung) dan dibagian puncak sebelah belakang dan muka terdapat replika kepala kerbau sebagai pembeda dengan rumah masyarakat. Bentuk atap terdiri dari dua *terseh* (tingkatan) yang membedakan atap rumah bagian belakang dan bagian depan. Apabila dicermati dengan seksama, tampak bahwa model rumah Simalungun kaya dengan pengetahuan (kearifan).

Istana ini dikabarkan terbakar pada tahun 1919 yang menghancurkan keseluruhan bangunan. Sebagai bangunan pengganti istana, maka pemerintah kolonial di Siantar membangun Pesanggerahan yang terbuat dari cor beton. Di Pesanggerahan inilah raja-raja Siantar pasca pembuangan Sang Naualuh Damanik menerima tamu atau menerima kunjungan kenegaraan dari Belanda. Sedangkan rumah tinggal raja terletak tidak jauh dari Pesanggerahan ini yang kini berada dekat pada sebuah pohon Beringin. Kedua bangunan tersebut masih berdiri di Pulau Holang, Kampung Pamatang di Siantar.



DE HUIS VAN RADJA SIANTAR.

De Huis van Radja Siantar, 1916

Sumber: Tropen museum institut

Tampak di atas adalah *de Huis van Radja Siantar* atau disebut rumah kediaman Raja Siantar tahun 1916. Foto dibawahnya adalah Pesanggerahan Kerajaan Siantar sejak 1920. Terletak di pulau Holang atau sering disebut Kampung Pematang, di Siantar. Kampung ini merupakan embrio Kota Pematangsiantar. Dari Pematang inilah, Raja Siantar mengendalikan pemerintahan lokalnya serta mengontrol desa induk (*Partuanon*) mulai dari Sipolha, Sidamanik, Marihat, Dolog Marlawan, Padang, Bandar, hingga Tanjung Kasau.



Dienshotel (Pasanggerahan) Raja Siantar, 1935

Sumber: kitlv.nl

Foto bersumber dari *Tropen Museum Institut* maupun *kitlv* itu memperlihatkan bentuk rumah bercirikan arsitektur Simalungun menyerupai pelana. Terdiri dari dua bagian yakni bagian belakang (ruang utama) dan bagian depan berupa serambi atau teras. Tampak bahwa jalan masih setapak, tanpa aspal dan dibahu kiri dan kananya masih ditumbuhi rumput. Tampak pula sebuah pohon Beringin yang hingga kini masih tumbuh di sekitar lokasi istana ini. Rumah raja atau *Rumah Bolon* ini berdiri dengan kombinasi tiang berdiri (*tiang jongjong*) dan tiang galang (*tiang tidur*) sehingga menyerupai rumah panggung. Atapnya terbuat dari ijuk, berdinding tepas dan bilah kayu. Bagian serambi atau teras ditopang oleh tiang galang sedangkan bagian inti rumah ditopang tiang berdiri.



Rumah Raja Siantar di Pulau Holang, 1925

Sumber: kitlv.nl

Ukuran *Rumah Bolon* mencapai 15 x 30 meter berbentuk persegi panjang. *Rumah Bolon* Siantar ini terbakar tahun 1919 yang kemudian diganti dengan rumah cor beton yang hingga kini masih berdiri megah di Kampung Pamatang, Kota Pematangsiantar. Disekitar Pasangerahan Raja Siantar sekarang ini di Pamatang, terdapat rumah raja yang terletak sekitar 30 meter. Rumah ini berdekatan dengan pohon beringin. Di rumah inilah raja tinggal sedangkan di Pasangerahan adalah tempat menerima tamu-tamu kerajaan seperti '*Toean Keboen*' (*planters*) maupun pemerintah kolonial.

Sarmahata Damanik adalah putra Sang Nualuh Damanik yang lahir di Bengkulu, Kepulauan Riau pada saat menjalani pembuangan (*internir*). Ia lahir tahun 1909 dan meninggal tahun 1976 serta dimakamkan di Tanjung Balai. Pasca kembalinya dari Bengkulu, Sarmahata Damanik setelah dewasa tidak pernah diresmikan (*patampej sihilap*) menjadi raja di Siantar. Justru, Belanda senantiasa mengangkat Pemangku Raja di Siantar.

Alasannya ialah adanya kekhawatiran balas dendam apabila keturunan langsung Sang Nualuh Damanik diangkat sebagai raja di Siantar. Ibu Sarmahata Damanik yakni istri Sang Nualuh Damanik meninggal dan di makamkan di Pemakaman Islam Jalan Panei Pematangsiantar. Keturunan dari Sarmahata Damanik adalah Syahalam Damanik yang wafat tahun 2010 di Jakarta. Sedangkan keturunan Syahalam Damanik adalah Difi Sang Nuan Damanik yang tinggal di Jakarta.



Kondisi terkini Rumah Raja Siantar di Pulau Holang
Sumber: Dok. penulis



Sarmahata Damanik, putra Sang Nauluh Damanik
Sumber: Simalungun Frame

Difi Sang Nuan Damanik menjadi *'Pemegang Tahta Adat Kerajaan Siantar'* yakni nama lain sebagai sebutan Raja Siantar di era pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Berturut-turut



Pemangku Raja Siantar pasca pembuangan Sang Nauluh Damanik adalah sebagai berikut: i) Riahata Damanik dan Riahkadim Damanik (1911-1916) yang berasal dari desa induk (*partuanon*) Marihat dan Sidamanik, ii) Riahkadim Waldemar Damanik (1916-1923) yakni anak Sang Nauluh Damanik yang lahir bukan dari putra mahkota. Pemangku raja inilah yang memberikan tanah Siantar menjadi tanah kota (*gemeente*) dalam bentuk: *hibah, anugerah dan pemberian*. Selanjutnya, iii) adalah Sawadim Damanik (1924-1946) yang berasal dari Desa Induk (*partuanon*) Bandar.



Sawadim Damanik (*Pemangku Raja Siantar, 1924-1946*)
Dalam busana pejabat kolonial dan Swapraja
Sumber: kitlv.nl

Sawadim Damanik adalah pemangku raja yang menjadi anak emas Belanda hingga diberikan *Satya Lencana Kesetiaan* pada tahun 1935 di Siantar. Ia berhasil selamat dari gejolak pembunuhan bangsawan yang bergelora 3 Maret 1946. Pada saat itu, Sawadim Damanik sedang berada di Pamatang Bandar. Namun demikian, pada saat gejolak pembunuhan bangsawan terendus *spionase* Inggris

pada sore hari tanggal 2 Maret 1946, maka Pasanggerahan dan Kediaman Raja Siantar dijaga ketat serdadu Inggris. Itulah sebabnya, kedua bangunan vital Kerajaan Siantar itu masih berdiri hingga saat ini. Djaudin Saragih adalah *Pangulu Balei* (sekretaris raja) atau *mangkubumi* Kerajaan Siantar pada era Sawadim Damanik. Djaudin Saragih adalah ayah Djasamen Saragih, dokter pertama dari orang Simalungun. Djasamen Saragih tewas dibunuh pada gejala pembunuhan bangsawan tahun 1946. Kini, nama Djasamen Saragih diabadikan sebagai nama Rumah sakit Daerah Kota Pematangsiantar.

Sebagai pejabat swapraja (*zelfbestuur*) Sawadim Damanik, mengenakan pakaian tradisional (*perhatikan foto dibawah*), sedangkan sebagai pegawai pamongpraja maka raja memiliki seragam sendiri. Sebagai *zelfbestuur*, maka raja mengenakan busana tradisional Simalungun mulai dari penutup kepala (*gotong*), kemeja (*toluk balanga*), selendang (*suri-suri*), pisau (*pisou halasan*), ikat pinggang (*ponding*) dan aksesoris lainnya.

Penguasa lokal seperti Sawadim Damanik memiliki kendaraan dinas yang diberikan pemerintah kolonial sebagai 'hadiah' terhadap kesetiannya bagi Belanda. Mereka juga diperkenankan menjalankan peradilan yang disebut dengan '*kerapatan*' baik '*kerapatan adat*' dan '*kerapatan na bolon*' yang berfungsi untuk mengadili kawula kerajaan yakni kaum *inlanders* (rakyat raja). Mereka ini juga mendapatkan penghasilan berupa gaji sebagai pegawai pamong praja dan juga mendapatkan *land rente* terhadap tanah-tanah yang digadaikan kepada pengusaha perkebunan. Pemerintah *zelfbestuur* ini biasanya diperalat Belanda untuk menciptakan keamanan bagi kawula raja. Sama seperti orang India atau Tionghoa yang memiliki '*kapitan*' ataupun '*mayor*' yang secara khusus bertugas untuk menangani dan mengatur kawulanya masing-masing.

Diantara tujuh kerajaan Simalungun, maka Siantar adalah kerajaan yang paling memiliki kedekatan dengan Belanda. Kedekatan itu terjadi pada era Sawadim Damanik sebagai pejabat pemangku kerajaan Siantar. Seperti disebut diatas, kesetiannya kepada Belanda tergambar pada penganugerahan tanda kesetiaan (*gouden ster*) pada tahun 1935. Ia juga memiliki beberapa pasanggerahan atau vila (*dienshotel*) seperti di Siantar, Haranggaol, Sipolha, Tigaras dan termasuk di Pulo Tao.



Sawadim Damanik (*pemangku Raja Siantar*), 1936
dan *Djaudin Saragih* (*Pangulu Balei atau Sekretaris Raja Siantar*)
di *Dienshotel* (*milik Raja Siantar*) di *Pulo Tao-Danau Toba*.
Sumber: kitlv.nl

Di Kota Pematangsiantar, nama Sang Nauluh Damanik telah ditetapkan sebagai: i) nama stadion, ii) nama jalan sepanjang 50 Km, dan iii) tahun lahirnya ditetapkan ulang tahun kota Pematangsiantar. Penetapan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Pematangsiantar terhadap jasa-jasa, kepeloporan dan kepioneran Sang Nauluh Damanik bagi pertumbuhan kota Siantar. Hal ini karena Siantar adalah embrio lahirnya kota Pematangsiantar yang multi-etnik, multibudaya, tetapi tetap mencerminkan solidaritas dan bertumbuhnya toleransi. Itulah sebabnya, setiap bulan April, Pemerintah Kota Siantar melakukan ziarah bersama baik ke pusara Sang Nauluh Damanik di Bengkalis, Riau maupun di *Jerat Partongah* Sang Nauluh Damanik di Pematangsiantar.



Pembukaan *Dienshotel* di Tigaras, 1936

G.L. Tichleman berdiri berdekatan dengan Sawadim Damanik
Sumber: kitlv.nl



***Dienshotel* Kerajaan Siantar di Haranggaol, 1937**

Sumber: kitlv.nl



Seremoni pembukaan *Dienshotel* di Haranggaol, 1935

Sumber: kitlv.nl



Rumah Raja Siantar di Pulau Holang, 1936

Sumber: kitlv.nl



Sawadim Damanik dan ketiga putrinya, 1936

Sumber: kitlv.nl

C. Gemeente (Kota) Siantar

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Siantar tidak saja mengakibatkan mengerdilnya wilayah Kerajaan Siantar berupa lepasnya Kota Padang, Dolog Marlawan dan Tanjung Kasau ke daerah-daerah Melayu. Kehadiran Belanda ini juga berdampak pada carut marutnya pemerintahan lokal di Kerajaan Siantar berupa terbuangnya Sang Nauluh Damanik ke Bengkalis. Ironisnya, pasca pembuangan itu, tidak satupun putra mahkota (*parana*) di Kerajaan Siantar menduduki tahta Kerajaan Siantar. Belanda melakukan politik adu domba di internal keluarga istana maupun Desa Induk (*partuanon*) Kerajaan Siantar.

Selain itu, pemerintah kolonial berperan menata wilayah Siantar Simalungun yang dikenal dengan sebutan *afdeling* (kabupaten Simalungun) dan *gemeente* (kotamadya) Siantar. Pada tahun 1906 dan nyatanya pada tahun 1912, ketujuh subkultur kerajaan Simalungun dibentuk menjadi satu *afdeling* yakni *afdeling* Simalungun. Namun, pada tahun 1917, satu daerah subkultur yakni Siantar dikeluarkan dari *afdeling* Simalungun dan ditata menjadi sebuah kota perkebunan (*plantation city*) yang disebut dengan *Gemeente* Siantar. Namun demikian, tidak semua desa induk (*partuanon*) Kerajaan Siantar yang digabung menjadi *gemeente*,

melainkan hanya Siantar saja. Itulah sebabnya, dalam tulisan Belanda, nama Siantar disebut dengan *Gemeente* Pematangsiantar, yaitu Kota yang dibentuk dari ibukota (*pamatang*) Kerajaan Siantar yakni Siantar. Sedangkan Sipolha, Sidamanik, Marihat, dan Bandar tidak digabung ke *Gemeente* Siantar meskipun diantara mereka masih terikat oleh kekerabatan (*kinship ties*).

Pembentukan *Gemeente* (Kotapraja) Siantar terjadi pasca pembuangan raja Siantar Sang Na Ualuh Damanik ke Bengkulu pada tahun 1906. Ibukota Kerajaan Siantar yakni Pamatang berada dalam tangan kekuasaan penjajah Belanda yang dijaga ketat pasukan KNIL. Upaya menuju *Gemeente* Siantar, maka hal pertama dilakukan pemerintahan kolonial Belanda adalah reorganisasi pemerintahan menurut versi kolonial. Hal pertama ini adalah mengganti Sang Naualuh Damanik sebagai penguasa lokal di Siantar kepada dua pemangku kerajaan dari Sidamanik dan Marihat.



Chinatown (Pecinan) di Jalan Cipto Siantar, 1935

Sumber: kitlv.nl

Dengan demikian, penunjukan kedua pemangku ini jelas akan memihak keinginan dan mendukung rencana kolonial di Siantar. Namun keduanya dimakjulkan Belanda dan menyerahkan tahta Kerajaan Siantar kepada Riah Kadim Waldemar Damanik. Pengembalian ini sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan lahan di Siantar kepada pemerintah kolonial guna dijadikan sebagai tanah

Gemeente. Hal ini dilakukan Belanda mengingat dua pemangku raja sebelumnya tidak berhak menyerahkan tanah kepada Belanda. Justru yang paling *legitimate* dalam urusan penyerahan itu adalah keturunan Sang Nauluh Damanik. Pilihan pada saat itu jatuh pada Riah Kadim Waldemar Damanik karena sudah dianggap berpendidikan dan pro Belanda.



Foto Udara (luftoto) inti kota Siantar, 1938
Sumber: kitlv.nl

Penyerahan tanah di Kerajaan Siantar kepada Belanda guna keperluan tanah *Gemeente* dalam bentuk, *hibah, anugerah dan pemberian* terjadi pada era Kerajaan Siantar di pimpin Riah Kadim Waldemar Damanik. Pasca penyerahan (serah terima) tanah selesai tahun 1923, maka pada tahun 1924 dirinya diganti sebagai raja dan diserahkan kepada Sawadim Damanik dari desa induk (*partuanon*) Bandar. Karena itu itu tampak sekali bahwa rencana Belanda mendudukkan Riah Kadim Waldemar Damanik sebagai raja di Siantar adalah untuk *legitimate*-nya penyerahan tanah kepada Belanda guna keperluan tanah *gemeente*.

Setelah Belanda berhasil mereorganisasi pemerintahan, maka Pematangsiantar dibentuk menjadi menjadi kota modern. Beberapa faktor mempengaruhi kondisi sosial politik Pematangsiantar pasca

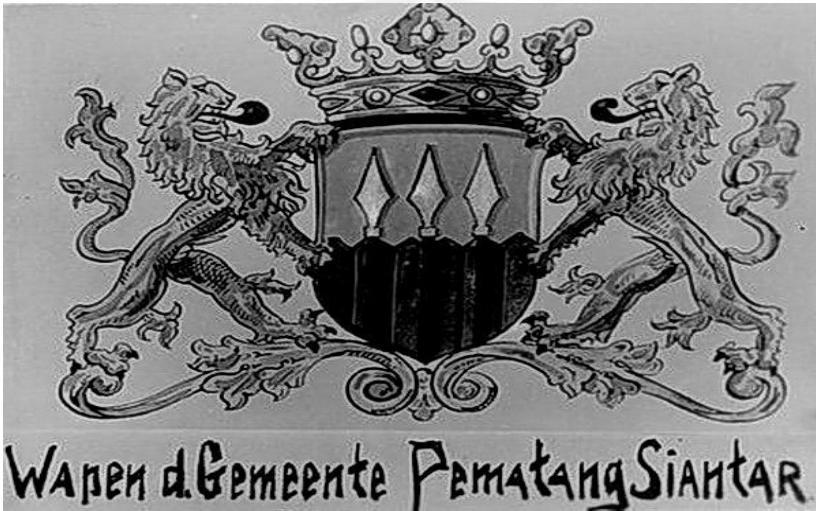
pembuangan Sang Na Ualuh Damanik di antaranya adalah perpindahan kedudukan kontrolir dari Pardagangan Tomuan ke Pematangsiantar pada tahun 1907 berkantor sementara di istana raja Siantar (*rumah bolon*), perluasan ekonomi perkebunan disertai masuknya kaum migran dari Jawa sebagai buruh kontrak dan pemukim Toba yang didatangkan atas kerjasama *zending* RMG dan pemerintah Belanda dengan tujuan sosial, ekonomi dan politik.

Perkebunan adalah faktor utama masuknya kolonialisme Belanda ke Siantar. Hal ini disebabkan tanah subur dan berada di dataran rendah yang sangat cocok untuk perkebunan karet, kopi, tembakau dan sisal, serta kelapa sawit menciptakan Siantar tanah dollar (*dollarland*). Sebenarnya sebelum Simalungun secara umum dijadikan Belanda sebagai daerah perkebunan (*cultuurgebied der Oostkust van Sumatra*) sejak 1 Juli 1920 sudah sejak tahun 1890 konsesi diberikan pemerintah kolonial kepada para pengusaha perkebunan (*onderneming*) membuka perkebunan di daerah Tanah Jawa dan Siantar.

Atas kebijakan politik kolonial Belanda, pengusaha-pengusaha perkebunan asing seperti *Rubber Plantation Trust* (Inggris), *Handelsvereniging Amsterdam* (Belanda) antara tahun 1908-1920 berhasil memperoleh kontrak tanah di Siantar dan Tanah Jawa. Tahun 1908 *Siantar Estate* perkebunan pertama di Siantar dibuka, mula-mula diusahakan tanaman karet dan kopi. Tahun 1911 di Nagahuta diusahakan perkebunan teh berikut pabrik pengolahannya. Kebun teh ini menjadi yang pertama diusahakan di Simalungun.

Akhirnya pada tahun 1917, secara resmi ibukota tradisional Kerajaan Siantar dijadikan kotamadya (*Gemeente*) yang dikukuhkan dengan dikeluarkannya *besluit* (ketetapan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda J. Van Limburg Stirum yang dicatat dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) Nomor 285 tanggal 27 Juni 1917 di keluarkan di *Buitenzorg* (Bogor) dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 1917. Dalam *besluit* itu diputuskan bahwa nama daerah otonomi itu bernama Kota Pematangsiantar (*Gemeente Pematangsiantar*) dalam lingkup wilayah pemerintahan Sumatera Timur berkedudukan di Pematangsiantar. Pada tanggal 12 Desember 1923 Waldemar sebagai raja Siantar tanpa meminta persetujuan *harajaan* Siantar menandatangani penyerahan hibah atas tanah di Pematangsiantar menjadi perluasan *gemeente* Pematangsiantar dengan pengecualian: i) tanah-tanah yang termasuk di dalam lingkungan *Pamatang* (tanah kosong) yang mana berada rumah raja Siantar (rumah batu) pengganti istana yang terbakar pada tahun

1919, ii) tanah-tanah yang dipergunakan pemerintah, dan iii) tanah-tanah yang sudah mendapat hak kontrak dari pengusaha jawatan perkeretaapian *Deli Spoorweg Maatschappij (DSM)*.



Wapen d. Gemeente Pematangsiantar, tahun 1918

Sumber: kitlv.nl

Penyerahan hibah tanah dari raja Siantar Waldemar Damanik kepada *Gemeente Siantar* dicatat dalam akta notaris tertanggal 12 Desember 1923 di Pematangsiantar. Pihak Belanda diwakili Jacob Bosch kontrolir urusan dalam negeri, Hermanus Evert Karel Ezerman ketua *Gemeenteraad* di Pematangsiantar dan Westenenk, Gubernur Sumatera Timur. Namun tidak lama setelah penyerahan tanah kerajaan Siantar kepada kotapraja Siantar, Belanda mencopot jabatan Waldemar Damanik sebagai raja dengan dalih Waldemar Damanik dinilai '*tidak becus*' memerintah dan terlibat korupsi terhadap beberapa kas daerah di Kerajaan Siantar.

Jika merujuk pada *Peta Infrastruktur Gemeente Siantar* tahun 1926, tampak beberapa unit bangunan, kantor, pemukiman, dan keletakannya di inti kota Pematangsiantar, yaitu: 1) pemukiman orang Tionghoa, 2) tangki minyak *Batafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*, 3) Gudang *Deli Spoorweg Maatschappij (DSM)*, 4) Stasiun DSM, 5) Kantor Telepon, 6) Siantar Hotel, 7) *Societeit (International Simalungun Club)*, 8) Kediaman pejabat DSM, 9) Kantor Dinas Pekerjaan Umum (B.O.W), 10) *Hotel Rittener*, 11) *Rex Bioskop*, 12) kantor *showroom mobil Lindeteves*, 13) Kantor

Walikota, 14) Kantor *Kerapatan* dan Bank Pribumi, 15) Bank, 16) kediaman Asisten Residen, 17) kediaman Kontrolleur, 18) Museum Simalungun, 19) sekolah, 20) kantor pejabat pemerintah.

Selanjutnya terdapat 21) kantor polisi, 22) kantor agen mobil Ford, 23) stasiun bensin, 24) kantor *Hufner and co*, 25) kantor dan bengkel, 26) pusat pasar, 27) kantor dinas pasar, 28) pengadilan Siantar, 29, pengadilan tinggi, 30) rumah direktur *Harison and Crosfield* berdekatan dengan *Simalungun Central Hospital*, 31) *Gevangenis*, 32) Hotel Orange, 33) Grand Hotel Siantar, 34) Kantor Pos dan Telegraf, 35) *Grote Chines Winkel*, 36) bioskop, 37) Orange Bioskop, 38) kediaman direktur *Central Hospital Siantar*, 39) rumah direktur sekolah *Central Hospital SDF*, 40) sekolah perawat pribumi *Central Hospital SDF*, 41) Kantor Kepala *Central Hospital SDF*, 42) kediaman Kepala *Central Hospital SDF*, 43) administrasi *Central Hospital SDF*, 44) Perusahaan airminum, 45) pabrik es Siantar, 46) Kolam Renang, 47) Gereja Katolik, 48) gereja Protestan, 49) Sekolah Zending, 50) sekolah perkebunan berasrama, 51) sekolah berasrama persatuan pribumi Simalungun, 52) rumah sakit perkebunan, 53) Gereja Engels, 54) *Dierentuin*, 55) stasiun pengisian bensin untuk Bus, 56) garasi dan bengkel *Koek and Co*, 57) Jembatan Diponegoro.

Sebagai langkah awal maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan anggaran kota Pematangsiantar sebanyak 5.700 gulden per tahun. Untuk menjaga ketertiban kota, pemerintah Hindia Belanda menempatkan polisi bersenjata. Infrastruktur kota dibangun dengan sangat baik dan terencana, seperti pemeliharaan, renovasi, perbaikan dan pembangunan jalan-jalan umum, penyediaan sarana air minum, tanggul anti banjir, selokan (kanal), pasar, jembatan, gorong-gorong, taman bunga, rumah potong hewan, tempat pencucian pakaian, dan lain-lain.

Tidak lupa ditetapkan pula tentang sarana kebersihan kota seperti menyediakan tempat pembuangan sampah, lampu jalan dan pemakaman umum. Tidak lupa dinas pemadam kebakaran secara gratis kepada warga kota Pematangsiantar. Disediakan juga lokasi khusus untuk bisnis. Untuk menunjang kehidupan kota modern, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk dewan kota (*Gemeenteraad van Pematang Siantar*) yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan ketentuan 5 (lima) orang Eropa atau yang dipersamakan (*hen gelijkgestelden*), 3 (tiga) orang penduduk asli (*inlanders*) dan 1 (satu) orang warga Timur Asing (*Vreemden Oosterling*). Ketua *Gemeenteraad* sesuai artikel 6 ayat 3 adalah Asisten Residen *Afdeeling Simalungun* dan Tanah Karo sebagai

kepala daerah. Pada dasarnya, kesembilan anggota dewan kota ini bukanlah merupakan perwakilan rakyat Kota Pematangsiantar, sebab mereka langsung dihunjuk dan diangkat Pemerintah kolonial Belanda. Tugas Dewan Kota Pematangsiantar adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Kota dalam hal penentuan kebijakan di Pematangsiantar.



Gemeentehuis (Townhall) Pematangsiantar

Sumber: kitlv.nl

Dalam keputusan itu disebutkan adanya keraguan atau perselisihan tentang tapal batas kota Pematangsiantar yang masuk dalam lingkup tanggungjawab Dewan Kota dan Otoritas Kota Pematangsiantar diputuskan Gubernur Jenderal di *Batavia*. Sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Siantar (1945) belum pernah satu orang pun dari putera Simalungun asli yang diangkat Belanda

menjadi anggota Dewan Kota (*Gemeenteraad van Pematang Siantar*). Di antara pribumi yang pernah menjadi anggota *Gemeenteraad* adalah Mahmud Hamzah Harahap, seorang dokter yang dihormati masyarakat karena dedikasinya terhadap kesehatan masyarakat.



Board of Gemeente Siantar, 1934

Sumber: Tropen Museum Institut

Anggaran kota Pematangsiantar ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) nomor 290 tanggal 27 Juni 1917 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1917. Dewan Hindia Belanda di *Batavia* (Jakarta) memutuskan anggaran untuk *Gemeente* Pematangsiantar masing-masing sebagai berikut: i) anggaran pejabat pemerintah kota 4.684 gulden, ii) anggaran urusan umum (teknis, administrasi, kantor) 3.7565 gulden, iii) anggaran urusan kebersihan 3.624 gulden, iv) anggaran jawatan pemadam kebakaran 400 gulden, v) anggaran infrastruktur jalan raya sebesar 3.255 gulden, vi) anggaran pemakaman umum (termasuk pemakaman etnis Tionghoa dan Muslim) 2.940 gulden, vii) anggaran rumah potong hewan dan ternak babi sebesar 540 gulden, viii) anggaran pemeriksaan ternak dan daging 300 gulden, ix) anggaran sarana air minum 11.602,50 gulden, x) anggaran pertanian 625 gulden dan xi) anggaran biaya tak

terduga 3.323,50 gulden. Total anggaran pengeluaran *Gemeente Pematangsiantar* 68.859 gulden per tahun, sedangkan pemasukan kota dapat menutup anggaran pengeluaran sebesar 68.859 per tahun.

Sampai tahun 1938, sepertiga tanah Simalungun sudah menjadi perkebunan dari total luas Simalungun 151.295 hektar. Dalam laporannya, J. Tideman (1921) menyebutkan 120.000 hektar tanah di Simalungun sudah dijadikan tanah konsesi perkebunan yang diberikan kepada 46 pengusaha perkebunan. Di antaranya 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, 10 perkebunan campuran (karet, teh, kopi dan kelapa sawit). Selain perusahaan yang disebutkan di atas, di Simalungun (khususnya di Siantar), hak konsesi diberikan kepada *het Nederlandsch Indisch Landsyndicaat, de Marihat Sumatra Plantage Cy, the Good Year Tire and Rubber Co.*



Gemeente Werken (board of Siantar), 1930

Sumber: kitlv.nl

Setelah Kontrolir pindah ke Pematangsiantar tahun 1907, makin deras arus migrasi dari Tapanuli Utara ke Siantar. Pada tahun 1906-1920 Belanda membuka jalan-jalan utama dari Siantar menuju Tebingtinggi. Dari Siantar ke Tapanuli melalui Parapat dibuka pada tahun 1911, jalan Siantar ke Tanah Jawa dibuka antara tahun 1916-

1917. Jalan dari Siantar hingga ke Saribudolog mulai dikerjakan pada tahun 1917. Dengan adanya pembukaan jalan-jalan baru ini, arus migrasi dari seluruh penjuru masuk ke Siantar. Pematangsiantar mulai tahun 1907 makin berkembang dan mengalami perubahan signifikan.

Tuan Bandar yakni Sawadim Damanik yang sudah lama menginginkan jabatan 'raja' Siantar itu menggantikan Riah Kadim Waldemar Damanik sejak tahun 1923-1946 yakni sampai pecahnya revolusi. Untuk mengisi lowongnya jabatan Tuan Bandar yang ditinggalkan, Sawadim Damanik mengangkat puteranya Distabulan Damanik menjadi penguasa di Bandar. Sesuai aturan yang ditentukan Belanda, setiap kepala daerah (baik distrik, *onderdistrik* atau *partuanon*) wajib menyatakan sumpah setia kepada pemerintah *Hindia Nederland* dan ratu Belanda. *Besluit* dikeluarkan raja Siantar dengan sepengetahuan pejabat Belanda.



Design kota Eropa di Kota Pematangsiantar

Balai Kota, Simalungun club, Stasiun Kereta Api dan Hotel

Sumber: Kitlv.nl

Sejak tahun 1918 seluruh rakyat pendatang pribumi ditempatkan di bawah otoritas pemerintah swapraja Siantar. Komposisi penduduk Siantar sejak tahun 1907 menempatkan penduduk asli Siantar (suku Simalungun) melorot populasinya menjadi kelompok minoritas. *volkstelling* (sensus penduduk) tahun 1930 menunjukkan *Gemeente* Pematangsiantar di dominasi etnis Cina sebesar 4.964 jiwa (23,62%), disusul Toba sebanyak 2.968 jiwa (19,17%), Mandailing 1.297 jiwa (8,26 %), Angkola 953 jiwa (6,16%) dan Simalungun 495 jiwa (3,20%). Untuk masing-masing etnis ini, Belanda mengangkat pimpinannya, untuk etnis Cina diangkat Letnan Cina (*Luitenant Chinezen*).

Kelenteng China dibangun di dekat istana raja Siantar di Pematang. Pendidikan tidak luput dari perhatian pemerintah, seiring dengan politik etis sejak 1899 yang dianut pemerintah Belanda, maka di Siantar mulai dibangun sekolah-sekolah dan sarana pendukungnya. Tahun 1915 sebuah sekolah swasta khusus buat anak-anak Eropa di dirikan di Siantar. Setahun kemudian (1916) berdiri *HIS (Hollandsch-Indlandsche School)* dikhususkan untuk anak-anak raja dan kaum terkemuka di Simalungun (lokasinya sekarang berada di sekitar kantor Bupati Simalungun lama di Jalan Simarito (kini menjadi jalan Adam Malik).

Pada tahun 1919 khusus untuk anak-anak raja dan bangsawan Simalungun dibangun asrama khusus (*Internaat voor Hoofden Zonen*). Di antara keluarga bangsawan Simalungun yang pernah bersekolah di sini adalah: Tuan Djomat Purba, Tuan Sarmahata Damanik (anak Sang Na Ualuh Damanik), Djontara Damanik, Djariaman Damanik, dan lain-lain. Sementara itu untuk anak-anak orang biasa (rakyat kebanyakan) dibangun dua sekolah di Pematangsiantar dan dua kelas di Perdagangan. Sekolah didirikan *Misi Sungai Rhein* sudah sejak tahun 1904 berdiri di Bulu Raya dan mengalami perkembangan seiring dengan berdirinya gereja-gereja di seluruh Simalungun. Tidak ketinggalan misi Metodis dari Amerika mendirikan sekolah di Siantar pada tahun 1921.



Chung Hua School (Sekolan Sultan Agung) **Siantar, 1935**

Sumber: kitlv.nl

Selain itu sekolah untuk warga Tionghoa juga tidak ketinggalan hadir di Siantar sejak tanggal 9 September 1909 (Perguruan Sultan Agung sekarang). Pematangsiantar berkembang menjadi kota pusat pemerintahan *Afdeeling Simalungun* dan Tanah Karo (12 Desember 1906) tempat kedudukan asisten residen yang resmi pindah dari Saribudolog ke kota ini pada tahun 1912 dengan *besluit* nomor 4 tanggal 15 Nopember 1912, *staatsblad* nomor 560. Pematangsiantar perlahan-lahan menjadi pusat perkebunan (*middelpunt van cultuurondernemingen*). Sejak 1 Juli 1920 Simalungun resmi masuk daerah perkebunan Pantai Timur Sumatera (*cultuurgebied Oostkust van Sumatra*).

Lembaga pengadilan ini disebut '*kerapatan*'. Kerapatan di Simalungun dibagi dua, pertama daerah hukum Pematangsiantar meliputi daerah swpraja Siantar, Tanoh Jawa, Panei dan Raya kemudian daerah hukum Saribudolog meliputi swpraja: Dolog Silou, Silimahuta dan Purba. Kerapatan di Saribudolog dianggap bagian dari *kerapatan na bolon* (*karapatanlandschap*) di Pematangsiantar.



Gedung Kerapatan Simalungun, 1936

Sumber: kitlv.nl

Di bawah *kerapatan na bolon* terdapat kerapatan urung yakni peradilan di masing-masing *landschap* (kerajaan). *Kerapatan na*

bolon di pimpin pejabat pemerintah Belanda dengan raja-raja sebagai anggotanya. Sementara itu *kerapatan urung* langsung diketuai raja sebagai pimpinan *landschap (urung)* atau kerajaan. *kerapatan na bolon* memutuskan perkara yang bukan wewenang *kerapatan urung*. Setiap vonis dijatuhkan *kerapatan na bolon* harus disetujui gubernur sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda.

Bersamaan dengan pembentukan lembaga peradilan ini, Belanda membangun kantor *kerapatan na bolon* di Pematangsiantar (gedung DPRD Siantar sekarang) tempat raja-raja Simalungun dan pejabat pemerintah Belanda bersidang. Pada tahun 1920 terjadi perubahan di mana setiap perkara yang masuk harus diselesaikan sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Hindia Belanda.

Mulai tahun 1917 ditetapkan pribumi di bawah otoritas pemerintah swapraja (*zelfbestuur*). Sampai tanggal 1 Nopember 1921 pengadilan di daerah ditentukan hakim yang bertugas. Sebelumnya setiap kasus yang dilimpahkan ke pengadilan dibawa bersidang di Tebingtinggi tempat kedudukan hakim yang ditetapkan pemerintah Belanda. Seiring perkembangan kota Pematangsiantar, sejak tahun 1921 kota ini ditetapkan tempat kedudukan hakim, meskipun persidangan tetap dilakukan di Tebingtinggi. Pada tahun 1917 semua warga pribumi diputuskan pemerintah kolonial berada di bawah otoritas hukum pemerintah swapraja Simalungun.



Ambacht School (Sekolah Tukang) Siantar

Sumber: kitlv.nl

Foto ini memperlihatkan ‘sekolah tukang’ atau dikenal dengan nama *Ambachtschool* terutama bagi orang pribumi (*voor Inlanders*). Kini, sekolah ini dikenal dengan STM HKBP Siantar. Tujuan utama pendirian sekolah ini di era kolonial Belanda adalah tersedianya tenaga-tenaga tukang yang handal yang diprioritaskan sebagai tenaga kerja bangunan di Siantar. Para lulusan sekolah inilah yang membangun Kantor Walikota (*gemeentehuis*), kantor DPRD (*gemeenteraad*), *de Javasche Bank* (kini BRI Siantar), *Simalungun international club* (kini Gedung Juang Nasional), jembatan Diponegoro, bioskop dan lain-lain. Foto di bawah ini adalah sekolah orang pribumi (*native school*) di Siantar dikembangkan *Nijkerk*, 1927. Sekolah adalah permintaan penguasa lokal (*zelfbestuur*) Siantar guna memberikan perhatian pada pendidikan dan masa depan orang pribumi (*native*) di Siantar.



***Native School* milik *Nijkerk* di Siantar 1927**

Sumber: kitlv.nl

Walaupun memiliki bangunan yang sederhana, tetapi keberadaan sekolah ini menjadi awal pembangunan mental penduduk *native* di Siantar. Siswa sekolah ini tidak saja berasal dari orang Simalungun, tetapi juga orang Toba, Mandailing, Jawa, Minangkabau dan lain-lain. Hadirnya sekolah-sekolah yang dibangun oleh perusahaan

perkebunan seperti ini sangat berdampak bagi masyarakat *native* berupa dikenalnya sistem persekolahan modern di jamannya. Kenyataan ini dipastikan berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat *native* di era kolonial untuk mengisi jabatan-jabatan entah itu juru tulis atau juru catat.



***Native School* milik Nijkerk di Siantar 1927**

Sumber: kitlv.nl



***HVA boardingschool* (Taman Asuhan) di Siantar, 1935**

Sumber: kitlv.nl

Foto diatas memperlihatkan sekolah berasrama (*boarding school*) atau dalam bahasa Belanda di sebut *internatschool*. Di bangun perusahaan perkebunan *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)* yang mengelola perkebunan teh, karet dan sisal di Siantar. Sekolah ini dibangun khusus bagi anak-anak orang Eropa baik sebagai *planters* maupun pejabat kolonial. Sekolah ini dibangun sejak tahun 1925 dan terus berkembang hingga tahun 1942. Pada masa kini, sekolah ini dikelola PTPN-IV yang dikenal dengan nama Sekolah Taman Asuhan yang berlokasi di Jalan M.H. Sitorus di kawasan *Weltreveden* atau *Europeanwijk* (pemukiman orang Eropa) di Siantar.



RMG School di Jalan Gereja, Pematangsiantar, 1920

Sumber: kitlv.nl

Gambar di atas adalah bangunan sederhana sekolah yang di dirikan *Rheinische Mission Geselschaf (RMG)* yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Pematangsiantar di Jalan Gereja. Sekolah ini menjadi bagian integral dari upaya *RMG* disamping menyebarkan agama Kristen. Di samping itu, terdapat sekolah khusus bagi kawula pribumi yang disebut dengan *native school*. Sekolah ini didirikan *Nijkerk* yang juga memiliki perkebunan luas di Siantar Simalungun. Sebagai kewajiban sosial, maka *Nijkerk* juga mengembangkan pengetahuan pribumi lewat pendidikan dan keterampilan. Sekolah zending Belanda dan Jerman ini menambah deretan sekolah yang

berdiri di Siantar di samping sekolah yang di dirikan pemerintah Belanda seperti *Lafarge School* (sekolah dasar bagi orang Eropa), *Holand Inlandsche School (HIS)*, *AMS*, *Kwekschool*, *Normal School* (sekolah guru bagi pribumi), sekolah perkebunan, sekolah tukang (*ambacht school*), sekolah perawat *Central Hospital SDF* dan lain-lain. Seluruhnya ini menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat di Siantar setidaknya pada era kolonial.



De Javasche Bank (BRI), Siantar 1934

Sumber: kitlv.nl

Pemerintah Kolonial Belanda memiliki badan khusus untuk mengelola keuangan yang disebut dengan *De Javasche Bank* (Bank Jawa). Secara khusus, bank ini menjadi bank sentral yang berfungsi sebagai pencetak uang dan pengawasan uang. Di Siantar, *De Javasche Bank* membuka kantor di Jalan Sutomo yang kini beralih nama menjadi Bank Rakyat Indonesia. Di Medan, *de Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia cabang Sumatera Utara. Bank ini dibuka sejak tahun 1915, sejalan dengan berkembang pesatnya Siantar. Bangunan berarsitektur *art deco* ini masih berdiri megah di Siantar yang berhadapan dengan Kebun Bunga Pematangsiantar. Selain *de Javasche Bank*, di Siantar pernah berdiri *NV. De Batakbank* yang didirikan orang Angkola sejak tahun 1930. Bank ini bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan uang bagi orang Angkola yang bekerja di Siantar. Pada tahun 1947, Bank ini pernah mengeluarkan

uang yang berlaku khusus di Sumatera Utara. Pembangunan ini sejalan dengan konflik antara orang Mandailing dan Angkola terkait pekuburan Sei Mati Medan tahun 1922-1925.

Penetapan Siantar menjadi *gemeente* berdampak pada penentuan pemimpin kota yang disebut dengan Walikota ataupun *Burgermeister*. Pemimpin kota ini berkantor khusus di kantor kota yang disebut *Gemeentehuis* atau *Townhall*. *Gemeentehuis* Siantar mulai dibangun tahun 1922 dan selesai pada tahun 1926. Bangunan berarsitektur *art deco* ini masih digunakan sebagai Balai Kota Siantar dengan sejumlah renovasi dan penambahan unit bangunan di bagian belakang.

Dari kantor inilah, walikota Siantar menjalankan roda pemerintahan kota. Kantor walikota ini berdampingan dengan *Gemeenteraad* (Dewan Kota) di Jalan *Wilhelminastraat* (Jalan Sutomo) dan berhadap langsung dengan Kebun Bunga Siantar. Kantor Walikota Siantar ini pernah dipergunakan sebagai Kantor Gubernur Sumatera Utara selama 8 bulan tahun 1947 pada saat Medan tidak nyaman karena berkecamuknya Perang Medan Area. Bangunan ini menjadi salah satu ikon dan *landmark* kota Siantar yang masih terpelihara (terawat) dengan baik.



Central Market (Pusat Pasar) 'Horas' di Siantar, 1935

Sumber: kitlv.nl.

Foto di atas adalah *central market* atau pusat pasar yang kini disebut Pasar Horas di Siantar. Embrio pasar ini adalah gagasan Sang Nauluh Damanik tahun 1901. Pada pasar inilah, para penjual dan pembeli saling menukar dagangan baik dengan cara barter maupun dengan uang. Kemudian, sejak Siantar menjadi *Gemeente* (Kotapraja) tahun 1917, pasar ini dikembangkan dengan cara modern seperti terlihat pada foto. Pada tahun 1970-an, pusat pasar ini diperbaharui lagi seperti tampak dewasa ini di Siantar dengan berlantai tiga. Pusat pasar '*Horas*' ini adalah pasar kebanggaan orang Siantar. Disana terdapat aneka komoditas sembako, pakaian, furnitur, ataupun jajanan instan dengan berbagai rasa. Lokasi pusat pasar ini tidak jauh dari *Rumah Bolon* (istana) Kerajaan Siantar di Pulau Holang, Kampung Pamatang di Siantar.



Rex Bioscoop (Ria Bioskop) Siantar, 1925

Sumber: kitlv.nl

Di Siantar pada era kolonial Belanda terdapat beberapa sarana hiburan seperti bioskop. Diantaranya adalah *Rex bioscoop*, *Orange Bioscoop*, *Simalungun Bioscoop* dan lain-lain. Bioskop seperti *Orange bioscoop* dikelola pemerintah kolonial, sedangkan bioskop lainnya dikelola pihak swasta. Pada masa itu, film-film yang diputar adalah film hitam putih (*black and white colour*) dengan tambahan suara (*dubber*) dan film dimaksud berasal dari belahan dunia Eropa.

Biasanya, bioskop ini dipadati pengunjung pada akhir pekan (*weekend*) dan terutama yang menjadi penonton adalah para tuan kebun (*planters*), pejabat kolonial (*colonial ambtenar*), dan pengusaha-pengusaha kelas atas lainnya di Siantar. Bioskop pada era kolonial Belanda hingga saat ini merupakan bagian gaya hidup. Berkunjung dan menonton ke bioskop memiliki gaya tersendiri daripada sekedar *nonton* di rumah walaupun menggunakan *home theater* dengan fasilitas CD, DVD dan lain-lain. Itulah sebabnya, bioskop hingga saat ini masih berjalan aktif seperti *XXI*, *21*, *Flixx* maupun *Cinemaxx*. Hingga tahun 1942, bioskop di Siantar masih aktif. Tapi kini, keseluruhan bioskop itu tidak lagi beroperasi.



DSM Station di Pematangsiantar, 1935

Sumber: kitlv.nl

Kereta Api Deli atau sering disebut *De Delispoorweg Maatschappij (DSM)* dibangun sejak tahun 1886 dari Medan ke Labuhan Deli dan seterusnya ke *Belawan Seaport* (Pelabuhan Belawan). Pembangunan ini diprakarsasi Jacob Cremer yakni Presiden Komisariss NV. *De Deli Maatschappij* atau PT Deli Maskapai. Tujuan pembangunan Kereta Api pada mulanya adalah untuk mengangkut hasil perkebunan dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Sejak tahun 1915, sejalan dengan pembukaan dan perkembangan perkebunan di wilayah Siantar, maka jalur kereta api Medan-Tebingtinggi-Siantar mulai dibuka sejak tahun 1918. Pada

tahun 1922, jalur kereta api itu sudah dapat dilalui oleh Kereta Api. Stasiun Kereta Api di Siantar terdapat di *Stationweg* atau Jalan Stasiun. Stasiun kereta pembantu terdapat di Dolog Malangir, Kabupaten Simalungun. Setiap hari, kereta api dari Siantar melaju ke Medan dan Belawan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti teh, karet, kelapa sawit, kopi dan termasuk coklat maupun sisal.



Kantor Pos dan Telefoon di Pematangsiantar, 1920

Sumber: Tropen Museum Institut

Sejak tahun 1891, perusahaan *NV. de Deli Maatschappij* tidak saja memprakarsai pendirian *NV. de Delispoorweg Maatschappij*, tetapi juga memprakarsai pembangunan kantor Telepon dan Telegraf. Pada mulanya, pembangunan telepon dan telegraf ini berguna untuk mendukung pembangunan jaringan kereta api. Hal mana yang mau disebut ialah bahwa, setiap stasiun maupun pos pemantau Kereta Api dipersimpangan jalan selalu dihubungkan oleh telepon ataupun telegraf. Dengan adanya telepon dan telegraf ini, maka laju kereta api disetiap stasiun dan persimpangan kereta api dapat dipantau. Selain itu, fungsi telepon dan telegraf ini adalah untuk membantu keselamatan kereta api di setiap persimpangan jalan. Namun, sejak tahun 1901, jaringan telepon dan telegraf tidak saja melayani khusus kereta api tetapi telah merembet kepada kantor-kantor perkebunan, kantor pemerintahan, toko, leveransir, grosir, rumah sakit dan lain-lain.

Sejak tahun 1920, jaringan telepon dan telegraf sudah tersambung ke Pematangsiantar. Jaringan ini percis berada di

sepanjang jalur kereta api hingga stasiun kereta api di Siantar. Kantor cabang telepon dan telegraf di Siantar terdapat di jalan W.R. Supratman yang kini menjadi bagian dari lokasi Kantor Telkom Pematangsiantar. Hingga kini, unit bangunan ini masih berdiri megah di Siantar walaupun terdapat penambahan bangunan lainnya.

Kantor Pos adalah vital di era kolonial untuk menghubungkan Eropa dan *Netherland India*. Termasuk Siantar. Kantor Pos Siantar dibangun sejak 1913 di Jalan Merdeka berdekatan dengan Kantor Polisi. Hingga kini, bangunan sejak era kolonial masih berdiri dengan beberapa renovasi. Demikian pula fungsinya masih sebagai kantor pos.



Polizei Kantoor (**Kantor Polisi**) Pematangsiantar, 1923

Sumber: kitlv.nl

Kerawanan sosial seperti pencurian, kriminal, pembunuhan, mabuk-mabukan, peredaran narkotika (opium) maupun pengawasan kota Siantar, maka dibentuk kantor Polisi (*Polizei Kantoor*). Kantor polisi ini tepat berlokasi di ujung Jalan Merdeka, yang saat ini menjadi Mako Polresta Siantar di Jalan Sudirman Pematangsiantar. Sebagaimana disebut Jean Gelman Taylor (2001), pembentukan Polisi di setiap kota (*gemeente*) ialah karena tingginya kerawanan sosial seperti di *Batavia* (Jakarta) yang digambarkan Taylor. Itulah sebabnya, rumah-rumah orang Eropa maupun *planters* (tuan kebun) yang dahulunya tidak menggunakan pagar, tetapi akhirnya harus diberi pagar sehingga tindakan kriminal bisa direduksi. Inilah awal mula rumah-rumah atau kantor pemerintah di era kolonial menggunakan pagar.

Di Siantar, polisi di era kolonial Belanda merupakan aparaturnya pemerintah yang digaji pemerintah kolonial. Sumber daya polisi biasanya adalah orang Eropa dan juga orang India. Hal ini karena tubuh orang India cenderung berpostur besar sehingga dianggap tangguh menghadapi para kriminal kota. Disamping itu, polisi ini juga dipersiapkan untuk menjaga kantor-kantor pemerintah maupun pengusaha perkebunan. Mereka ini memegang jabatan penting terutama menciptakan keamanan dan ketertiban Kota Siantar sejak ditetapkan sebagai *Gemeente* sejak 1917.



***Societiet* (Simalungun International Club) Siantar, 1935**
Sumber: kitlv.nl

Societiet atau Asosiasi Kerah Putih (*white collar*) adalah paguyuban para Tuan Kebun (*planter*) dan Pejabat Kolonial (*colonial ambtenar*) yang berdiri pada tahun 1879 di Medan. Paguyuban ini berdiri di Siantar sejak pembukaan perkebunan yang resminya sejak 1907. *Societiet* di Siantar berdiri sejak tahun 1910 yang disebut dengan *Simalungun International Club*. Gedung ini merupakan tempat bertemunya para pengusaha perkebunan maupun pejabat kolonial. Mereka saling berinteraksi seputar perkebunan, kuli kontrak maupun politik. Di gedung ini, biasanya mereka mendengarkan musik, baca buku, baca koran, berdansa dan lain-lain sambil minum kopi. Pada masa kini, gedungnya menjadi Gedung Juang Nasional Siantar. Pada era revolusi tahun 1945-1949, gedung ini pernah digunakan sebagai Markas KNIL.

Disamping bioskop, pemerintah kolonial Belanda maupun pengusaha Belanda selalu membangun kolam renang (*zwembaad*). Sarana berupa kolam renang ini menjadi tempat mewah bagi para pengusaha, *planters* (tuan kebun) maupun kaum elit kota untuk menghabiskan waktu dengan cara berenang.



Siantar Zwembaad (Kolam Renang Siantar), 1934

Sumber: kitlv.nl

Di Siantar, kolam renang pertama yang di bangun Belanda berada di Pulau Holang, Kampung Pamatang, di Siantar. Sumber air kolam ini berasal dari Sungai (*Bah*) Bolon yang percis mengalir di sampingnya. Kolam ini pada awalnya merupakan bagian dari Istana Kerajaan Siantar, tetapi kini menjadi milik pengusaha yang disebut dengan *Detis Sari Indah*.

Jika di Jakarta maupun di Medan terdapat pabrik es batangan yang terkenal yaitu '*Petodjo*'. Sama halnya dengan di Siantar, maka dikota inipun terdapat pabrik es yang berada di kampung Pamatang, di lokasi Kerajaan Siantar. Pabrik es ini dibangun sejak tahun 1922 dan menjadi penyuplai es batangan di Siantar. Sumber air guna pembuatan es ini berasal dari Sungai (*bah*) Bolon.

Sungai (*bah*) Bolon di bendung dan sebagian airnya di belokkan ke pabrik pengolahan es setelah di suling (dibersihkan). Sejak tahun 1950-an, pabrik es menjadi milik swasta di Siantar dan memproduksi minuman kemasan botol cap Badak seperti Sarsaparilla yang sangat terkenal itu. Hingga kini, pabrik Es Siantar masih beroperasi dan menyalurkan produknya ke berbagai wilayah di Indonesia.



Siantar Icefabriek (Pabrik Es Siantar), 1930

Sumber: Tropen Museum Institut

Sejak penetapan Siantar menjadi *gemeente*, maka pemimpin kota diangkat seorang walikota atau (*mayor*) atau dalam bahasa Belanda disebut *Burgermeester*. *Huis van Controleur* atau Rumah Kontrolir ini berada di *Weltevreden* (Pemukiman orang Eropa) di jalan M.H. Sitorus Siantar. Rumah ini menjadi rumah dinas walikota yang pada era kolonial disebut *asisten residen* atau walikota.



Huis van Controleur (Rumah Kontrolir) Siantar, 1930

Sumber: kitlv.nl

Hingga kini, rumah dinas Walikota ini masih berdiri megah dan ditempati oleh setiap walikota terpilih di Pematangsiantar. Rumah ini tidak jauh dari *Gereja RMG* (Gereja HKBP Jalan Gereja Siantar) ataupun *HVA Internaat School* (Sekolah Taman Asuhan) ataupun *Simalungun Central Hospital* (kini Rumah Sakit Tentara), serta *Siantar Zoo* (Taman Hewan Siantar).

Bangunan berarsitektur *art deco* ini cukup asri karena dikelilingi oleh aneka jenis kayu seperti *Trembesi* (pohon pelindung yang dibawa dari Amerika Latin). Juga berdekatan dengan Sungai (bah) Bolon yang mengalir disampingnya menambah keindahan lokasi bangunan ini. Di bagian tengah bangunan terdapat corong asap guna mengalirkan asap dari pembakaran arang guna memberikan kehangatan pada penghuni rumah. Sejak era kolonialisme Belanda di Siantar terdapat beberapa rumah sakit seperti: *Simalungun Central Hospital* (kini Rumah Sakit Tentara) yang dikelola pengusaha Perkebunan *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)*. Demikian pula *Siantar Central Hospital* (kini Rumah Sakit Daerah Kota Siantar) yang dikelola *gemeente* Siantar. Termasuk *Hospital van Mardjandi Estate* yang juga dikelola HVA. Rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Balimbingan maupun Rumah Sakit di Dolog Ilir.



Hospital van Mardjandi Estate, Siantar, 1938

Sumber: kitlv.nl

Hospital van Mardjandi Estate adalah rumah sakit kuli bagi kuli perkebunan *Mardjandi Estate* yang berlokasi di Nagahuta. Pasca kemerdekaan Indonesia, terutama sejak tahun 1954 lokasi rumah sakit ini dikuasai oleh institusi HKBP dan dirubah menjadi kampus Universitas HKBP Pematangsiantar. Sejak pengalihan kepemilikan itu, rumah sakit dinonaktifkan dan diganti menjadi kampus Nomensen yang mengelola perguruan tinggi, sekolah pendeta maupun persekolahan SMP dan SMA.

Salah satu rumah sakit (*krankenhaus*) ataupun hospital yang berdiri di Pematangsiantar adalah *Siantar Central Hospital* atau sering disebut *Krankenhaus van Gemeente Siantar*. Rumah sakit ini dikelola oleh Pemerintah Kota Siantar yang diperuntukkan bagi kawula (penduduk) Kota Siantar. Lokasinya berada di jalan Merdeka Siantar yang tidak jauh berada dari *central market* (Pusat Pasar) Horas Pematangsiantar.



J.J. van Lonkhuyen, 1925

Direktur *Siantar Central Hospital* (RSUD Djasamen Saragih)

Sumber: kitlv.nl

Lokasi rumah sakit ini sangat luas yang memanjang dari Jalan Merdeka di sebelah barat hingga Jalan Panei di sebelah timur. Di dalam kompleks rumah sakit ini terdapat ruang rawat inap bagi warga kota. Demikian pula terdapat laboratorium Paru-paru serta Laboratorium penyakit tropis seperti malaria, beri-beri, anemia dan lain-lain. Termasuk ruang direktur rumah sakit, kepala-kepala staf (biro), dokter, perawat dan karyawan lainnya. Pada tahun 1925,

Direktur Rumah Sakit ini adalah J.J. van Lonkhuyen (pada gambar menggunakan tongkat). Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1958 rumah sakit ini di Nasionalisasi menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat-II Kota Siantar yang disebut dengan Rumah Sakit Umum Kota Siantar. Sejak tahun 2003, nama rumah sakit ini diberi nama Djasamen Saragih yakni dokter pertama Orang Simalungun, tewas terbunuh tahun 1947, putra Djaudin Saragih, seorang *Pangulu Balei* (Sekretaris) Kerajaan Siantar.



Simalungun Central Hospital (RSU Tentara Siantar), 1930
Sumber: kitlv.nl

Foto di atas memperlihatkan keberadaan sebuah rumah sakit yang disebut dengan Rumah Sakit Pusat Simalungun atau *Simalungun Central Hospital*. Lokasinya berdampingan dengan *Siantar Zoo* (Taman Hewan Siantar). Pada mulanya, rumah sakit ini dibangun oleh Pengusaha Perkebunan *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)* yang memiliki perkebunan paling luas di Siantar Simalungun dengan berbagai komoditas perkebunan seperti Teh, Karet, Kelapa Sawit, Kopi maupun Sisal.

Lokasi rumah sakit ini berada di *Weltreveden* atau Pemukiman orang Eropa (*Europeanwijk*) di Siantar yang berlokasi di sekitar *Jalan Simbou na Bolon* yang kini lebih sering disebut Jalan Simbolon, Pematangsiantar. Beberapa bangunan yang terdapat di lokasi rumah sakit ini seperti tertulis pada *Peta Infrastruktur*

gemeente Siantar tahun 1926 disebut antara lain: kediaman direktur *Central Hospital Siantar*, 39) rumah direktur sekolah *Central Hospital SDF*, sekolah perawat pribumi *Central Hospital SDF*, Kantor Kepala *Central Hospital SDF*, kediaman Kepala *Central Hospital SDF*, dan administrasi *Central Hospital SDF*. Sejak Indonesia merdeka, dan sejalan dengan Nasionalisasi Aset Belanda tahun 1958, maka rumah sakit ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dikuasai oleh militer. Hingga kini, rumah sakit masih berjalan sebagaimana mestinya yang disebut dengan Rumah Sakit Umum Tentara di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kota Pematangsiantar.



Siantar Zoo, Pematangsiantar, 2018

Sumber: Dok. penulis, 2019

Tidak jauh dari *Simalungun Central Hospital* atau kini disebut Rumah Sakit Umum Tentara di Siantar, terdapat Taman Hewan (*Siantar Zoo*). *Siantar Zoo* merupakan Taman Hewan ke-4 di Indonesia dan dibuka sejak era kolonial. Taman Hewan ini terbuka untuk umum dan dibuka setiap hari. Koleksi yang menjadi kebanggaan Taman Hewan ini adalah aneka satwa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti harimau, orangutan, buaya, gajah, monyet, unta, aneka reptil, aneka burung dan unggas, aneka mamalia, dan lain-lain.

Pada akhir pekan (*weekend*) ataupun libur lebaran, natal dan hari besar keagamaan lainnya, *Siantar Zoo* selalu ramai dikunjungi oleh

masyarakat dari dan disekitar Siantar. *Siantar Zoo* ini dikelola pihak Swasta yakni seorang pengusaha di Medan yang bernama Rahmad Shah, yang juga pemilik *Rahmad Worldwide Museum and Gallery*. Keberadaan *Siantar Zoo* di Kota Pematangsiantar ini menambah deretan destinasi kunjungan wisata di kota itu. Taman hewan Siantar (*Siantar Zoo*) ini berada di lokasi yang berbukit-bukit sehingga menambah keasrian dan keindahan penakaran hewan ini. Aneka kayu dan bambu tersedia sehingga menambah kesejukan. Selain itu, terdapat aneka permainan seperti ayunan, perosotan ataupun tempat bersantai lainnya untuk memanjakan pengunjung. Lokasinya berada di tempat strategis yang termasuk pada inti kota (jantung) Kota Pematangsiantar. Dari Pusat Pasar Horas dapat ditempuh berjalan kaki menuju Kebun Bunga dan seterusnya ke Lapangan Merdeka. Dari lapangan ini terus berjalan menyusuri Jalan M.H. Sitorus dan seterusnya hingga ke Taman Hewan Siantar.



Grand Siantar Hotel, 1930

Sumber: kitlv.nl

Perkembangan Siantar yang begitu pesat sejak tahun 1908, sejalan dengan pembukaan perkebunan maupun penetapan menjadi *gemeente* sejak tahun 1917, maka Siantar bertumbuhan sarana hiburan seperti kolam renang, bioskop, *alun-alun* dan termasuk hotel. Terdapat beberapa hotel di Siantar seperti *Grand Siantar Hotel* (di *Stationweg*), *Orange hotel* (di jalan Bandung) dan *Juliana Hotel*. Hotel yang paling ramai adalah *Grand Siantar Hotel*.

Ditempat ini tersedia penginapan, hiburan berupa musik dan fasilitas dansa, serta *cafe*. Pada revolusi fisik tahun 1947, Siantar Hotel pernah menjadi sasaran amuk laskar karena menjadi markas tentara Belanda yang disebut dengan '*Penyerangan Siantar Hotel*'. Pada saat itu, kesatuan laskar tentara di Siantar Hotel karena tentara Belanda tidak juga meninggalkan Siantar walaupun Indonesia sudah membacakan proklamasi kemerdekaannya tahun 1945 di Jakarta. Kini, *Grand Siantar Hotel* dimiliki pengusaha Siantar dan tetap mengoperasikan hotel sebagaimana pada era kolonial Belanda. Hotel ini menjadi salah satu *landmark* Siantar.

Selain *Grand Siantar Hotel* terdapat *Juliana Hotel* berkedudukan di Siantar, tidak jauh dari Bah Bolon yang berhadapan dengan barak militer (kini Markas Brimob) Kota Pematangsiantar. Hotel ini bersebelahan dengan Pabrik Es Siantar. Nama Juliana diambil dari putri Beatrix yakni Ratu Belanda. Juliana lahir pada tahun 1939 di Negeri Belanda. Kini, hotel ini beralih nama menjadi *Riatur Inn* dan hingga kini tetap berfungsi sebagai hotel yang menyediakan penginapan bagi pengunjungnya.



Juliana Hotel Siantar, 1930

Sumber: kitlv.nl

Hotel lainnya yang tersedia di Siantar adalah *Orange Hotel*. Hotel ini berada di Jalan Bandung yang kini menjadi bagian dari Hotel Garuda di Siantar. Nama *Orange* adalah merujuk pada warna khas Belanda sebagaimana tampak pada bendera kebangsaan mereka. Pada saat ini, di Kota Pematangsiantar terdapat hotel bercorak modern selain Siantar Hotel seperti *Sapadia Hotel*, *Horison Hotel* dan lain-lain yang berada pada kualifikasi bintang tiga. Keberadaan hotel-hotel ini menambah semarak Kota Siantar sebagai daerah transit di Provinsi Sumatera Utara terutama yang hendak berkunjung ke pantai barat Sumatera Utara.



Alun-alun (Kebun Bunga) Siantar, 1925

Sumber: kitlv.nl

Sama seperti di Medan, maka Siantar juga memiliki taman bunga. Taman ini sengaja dibuat di inti kota sebagai taman kota yang berfungsi bukan saja menambah keindahan kota tetapi yang terpenting adalah memberikan kesejukan bagi udara di pusat kota. Sebagaimana diketahui bahwa, di sekitar taman bunga terdapat bangunan-bangunan penting seperti Balai kota (*gemeentehuis*), Balai DPRD Kota (*gemeenteraad*), *de Javasche Bank* (Bank Java), *Simalungun International Club*, *Grand Hotel Siantar* maupun *Rex Bioscoop*. Karena itu, keberadaan taman bunga ini menambah keindahan pusat kota Siantar. Pada saat ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pematangsiantar sedang

gigih mengembangkan taman ini menjadi tempat tongkrongan asik di Siantar. Di taman ini terdapat monumen menjulang tinggi berarsitektur Simalungun. Disekitarnya, terdapat permainan anak-anak, kursi beton dan jajanan. Di dekat *Simalungun International Club* atau kini Gedung Juang Nasional, terdapat pelataran parkir pariwisata yang diprioritaskan bagi pertunjukan budaya seperti lagu, opera, tarian, maupun atraksi lainnya. Di depan pelataran parkir ini terdapat monumen Becak yang didaulat sebagai salah satu ikon (*icon*) kota Pematangsiantar.

Monumen ini diresmikan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi pada tahun 2013 atas inisiatif Rizal Ginting, seorang penggemar dan kolektor barang dan kendaraan antik termasuk Becak. Becak Siantar memiliki karakter sendiri dan menjadi ikon kota Siantar. Mesinnya disebut BSA atau singkatan *Birmingham Small Army* yakni kendaraan militer tentara Inggris yang berasal dari pabrik mesin di Brmingham, Inggris. Pada mulanya, kendaraan ini digunakan sebagai kendaraan perang dan patroli tentara Inggris di Siantar. Namun, sejak penyerahan kedaulatan tahun 1949, kendaraan ini banyak ditemukan di Siantar.

Masyarakat Siantar kala itu, kendaraan itu diperbaiki menjadi becak. Hingga kini, nama kendaraan ini lebih identik dengan sebutan '*Becak Siantar*', yang mirip dengan *Motor Gede (Moge)* tetapi memiliki bak penumpang di sampingnya. Becak Siantar menjadi salah satu daya tarik pengunjung yang datang ke Pematangsiantar.

Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah yang disebut dengan *Esplanade*. Konsep ini berarti 'Lapangan Terbuka' atau dalam bahasa Indonesia disebut *Alun-alun*. Dalam Tata Ruang Kota yang dibentuk di era kolonial Belanda di seluruh kota di Indonesia, maka *Alun-alun* ataupun *esplanade* serta Taman Bunga pasti ditemukan. *Alun-alun* diperuntukkan bagi upacara kenegaraan maupun karnaval budaya. Keletakan '*Alun-alun*' di era kolonial pasti berdekatan dengan *Gemeentehuis* ataupun stasiun Kereta Api maupun Bank serta kantor pos. Sesungguhnya perencanaan seperti ini di berbagai kota di Indonesia adalah mencontoh Tata Kota di Eropa. Peruntukannya jelas bertujuan bagi masyarakat kota yang ingin menghabiskan waktunya menjelajahi kota atau sekedar bermain di kota. Sejak Merdeka, *Esplanade* di rubah menjadi *Lapangan Adam Malik* guna menghargai Adam Malik, Wakil Presiden di era Soeharto yang berasal dari Siantar.

Sejalan dengan penetapan Siantar menjadi *gemeente* (Kota) tahun 1917, maka diperlukan kebutuhan air bersih bagi kawula kota. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda di Siantar membangun

jaringan air bersih sejak tahun 1921. Perusahaan air ini disebut *NV. Ayer Bersih Maatschappij*. Sumber air yang digunakan sebagai air bersih bagi warga kota saat itu berasal dari hulu Bah Bolon yang berada di Nagahuta. Di hulu itu, Bah Bolon berasal dari hutan yang ditumbuhi kayu tropis di *Bah na lihou* (Aek Nauli). Pipanisasi dibangun sebagai saluran air ke Siantar.



Ayer Bersih Maatschappij, Siantar 1922

Sumber: kitlv.nl

Pemerintah kota Siantar pada saat itu, juga membangun bak mandi umum yang dikhususkan bagi warga kota. Hal ini sejalan dengan instruksi *Gubernur Jenderal Belanda di Batavia* yang mengharuskan pengadaan air bagi warga kota. Kini, *NV. Ayer Bersih Maatschappij* dikelola Pemko Siantar yang disebut PDAM Tirtauli Pematangsiantar. *Density kantoor van Siantar* adalah kantor kota yang khusus mewadahi penduduk (kawula) kota. Kantor ini terletak di Jalan Sutomo yang berdampingan dengan *Gemeentehuis* (Kantor walikota Siantar). Pada era Belanda, kantor inilah yang melakukan sensus (*volkstelling*) penduduk seperti pada tahun 1930. Jika sekarang, kantor ini identik dengan *Biro Pusat Statistik* yang mengeluarkan komposisi demografi dengan berbagai indikatornya.

Kantor ini mengeluarkan laporan berkala bersifat tahunan tentang keadaan penduduk kota dari segi populasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Dari kantor ini pulalah muncul kebijakan-kebijakan pemerintah kota guna mengembangkan

kebijakan populis di kota Siantar. Pemukiman-pemukiman berbasis etnik seperti Kampung Jawa, Kampung Karo, Kampung Mandailing, Kampung Toba, Kampung Simalungun, termasuk pekuburan berbasis religi adalah kebijakan yang diteruskan kantor ini. Kenyataan seperti ini ditempuh pemerintah kota guna membatasi paguyuban etnik yang bisa berdampak pada ketegangan antar masyarakat di Kota Siantar. Bangunan berarsitektur *art deco* ini masih berdiri megah di Pematangsiantar yang difungsikan sebagai kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar.



Museum Simalungun di Pematangsiantar, 2018

Sumber: Dok. Penulis 2018

Museum Simalungun ini menjadi salah satu *landmark* atau ikon Kota Pematangsiantar. Museum ini dibangun pada tahun 1939 dan diresmikan pada tahun 1941. Inisiator pembangunan museum ini adalah Dr. Petrus Voorhoeve, seorang ahli Linguistik dari *Leiden University* Belanda. Biaya pembangunan museum ini berasal dari 7 (tujuh) Kerajaan Simalungun sebesar 1.600 Gulden. Bangunan berarsitektur Simalungun ini beratap ijuk, dinding kayu dan tiang galang yang terbuat dari kayu gelondongan. Adapun koleksi museum ini adalah temuan-temuan artefak dari tujuh Kerajaan Simalungun berupa arca (patung), *laklak*, *hiou*, maupun benda-benda kebudayaan artefaktual lainnya.

Dalam buku *Pedoman Museum Indonesia* (2014) disebut bahwa Museum Simalungun termasuk diantara 6 (enam) museum di Indonesia yang dibangun pada era kolonial Belanda sekaligus museum pertama di Sumatera Utara. Hingga kini, museum yang beralamat di Jalan Sudirman Pematangsiantar ini masih berdiri tegak dan dapat dikunjungi setiap hari.



Dekorasi eksterior Museum Simalungun, 1939

Sumber: kitlv.nl

THE
Character Building
UNIVERSITY



Museum Simalungun di Siantar, 1941

*Dibangun sejak tahun 1939 dan diresmikan pada 30 April 1940
Menjadi museum ke enam di era kolonial Belanda di Indonesia.*

Sumber: kitlv.nl



Pabrik teh di Bah Birong Ulu, Simalungun, 1925
Sumber: kitlv.nl



Pengangkutan Teh dari Pagarjawa, Simalungun, 1925
Sumber: kitlv.nl



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB IV

ALAM, KAMPUNG DAN PASAR DI SIMALUNGUN

Pada koleksi foto yang tersedia di Belanda, terdapat foto yang menggambarkan keadaan alam, kampung (*huta*) dan pasar (*tiga*) di Simalungun. Foto-foto yang dipotret sesuai keadaan pada masanya dan lokasinya (*in situ*) menjadi penanda tentang aspek geografi, topografi, perkampungan dan interaksi Simalungun di pasar. Sebagaimana dicatat Tideman (1922), sejumlah peneliti tanah telah melakukan penelitian keadaan tanah di Haranggaol, Saribudolok, Siantar, Tigaras, Sidamanik, Siantar, Panei dan Tanoh Jawa, semenjak akhir tahun 1870-an. Rekomendasi mereka adalah bahwa Simalungun sangat cocok untuk perkebunan dengan komoditas teh, kopi, sawit maupun karet. Rekomendasi inilah kemudian menjadi faktor utama aneksasi Simalungun sebagai upaya perluasan *cultuurgebied van Sumatra Ooskust*.

Alam Simalungun yang digambarkan cenderung pada hutan belantara (*talun*) dimana didalamnya masih terdapat pohon dengan kayu yang relatif besar. Foto ini memberikan pesan tentang besarnya rintangan perubahan hutan belantara menjadi areal perkebunan ataupun mengubahnya menjadi '*urban*' (kota) pada program *municipality* (penciptaan dan penataan kota di era kolonial). Sekaligus foto-foto tentang alam itu memberikan pesan bagi orang Eropa tentang kesahajaan, kesederhanaan atau bahkan keprimitifan masyarakat terjajah yang harus dimodernkan sesuai dengan kriteria orang Eropa.

Aktifitas berupa penebangan kayu dan perambahan hutan mutlak dilakukan guna memberikan dorongan modernisasi kepada masyarakat terjajah. Hutan itu harus dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat melalui budidaya perkebunan (*cultuurgebied*) yang menguntungkan. Sewaktu dirambah, di hutan-hutan itu terdapat jalan setapak (*dalan ni horbou*) yang digunakan sebagai jalur perdagangan (*dalan martiga-tiga*) ataupun jalan ke ladang (*dalan hu juma*). Momen jalan seperti ini sengaja dipotret fotografer untuk memberi orisinalitas masyarakat terjajah yang bodoh, lusuh dan belum beradap. Karena itu, orang Eropa harus turun mengangkat harkat dan martabat orang Simalungun dan alamnya yang dianggap memiliki potensi tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Di satu sisi, kenyataan ini adalah bahagian dari

misi kolonialisme untuk mengeksploitasi alam dan manusianya, tetapi dibagian lain Belanda harus menunjukkan 'orisinalitas' sebagai pembenaran terhadap masyarakat terjajah kepada bangsanya di Eropa. Dalam hal ini, foto dianggap sebagai penyampai pesan kepada masyarakat di Eropa.



Pembabatan hutan di Siantar, 1915

Sumber: kitlv.nl

Kondisi alam berupa geografi dan topografi Simalungun yang tersedia di Belanda lebih banyak menyuguhkan potret geografi dan topografi Simalungun yang berbatas langsung dengan Danau Toba. Keadaan alam di Tongging, Haranggaol (*Tiga Langgiung*), Panahatan, Tigaras, Sipolha, Parapat (*Tuktuk Sipiak*), Sibaganding, Tanjung Unta, Saribudolok, Merek Situnggaling, maupun Bah (Aek) Nauli. Seperti diketahui, kunjungan pertama orang Eropa yang menceritakan tentang bagian utara Simalungun yang berbatas dengan Danau Toba (*Laut Daur*) adalah Sipituhuta, Silimahuta hingga Purba adalah Hagen pada tahun 1883.

Foto-foto tentang alam di daerah ini terdapat berulang-ulang pada tahun yang berbeda dan sudut pandang berbeda. Tampaknya, setiap juru foto (fotografer) yang berkesempatan hadir di Simalungun baik karena undangan pemerintah kolonial maupun karena keinginan sendiri, tidak lupa mengunjungi daerah-daerah dimaksud dalam kunjungan kerjanya. Foto-foto dari tahun berbeda dengan sudut pandang fotografer yang berbeda tentang keadaan alam ini menyuguhkan panorama Simalungun yang berbatas dengan Danau Toba. Keindahan geografi dengan puncak-puncak gunung, tebing yang landai serta berada pada jalur Bukit Barisan menjadi objek destinasi wisata yang sangat panoramik. Orang Eropa yang

datang ke Sumatra Timur kala itu, guna melihat Medan yang disebut 'Parijs van Sumatra' tidak lupa mengunjungi Gundaling di Brastagi dan Tongging, Haranggaol dan Parapat di Simalungun.



Pembukaan jalan di *talun* Dolog Ulu, Simalungun, 1925

Sumber: kitlv.nl

Daerah-daerah yang berbatasan dengan Danau Toba menjadi tempat berlibur pejabat kolonial, pengusaha perkebunan, maupun pemerintah swapraja setempat. Itulah sebabnya, di Gundaling seperti juga di Parapat terdapat hotel, vila maupun pesanggerahan (*dienshotel*) yang dimiliki pengusaha maupun pemerintah swapraja. Raja Siantar sewaktu dipangku Sawadim Damanik memiliki sejumlah pesanggerahan di Haranggaol, Tigaras, Sipolha, Parapat dan termasuk di Pulo Tao. *Dienshotel* milik Kerajaan Siantar di Pulo Tao memiliki halaman berupa kebun bunga yang luas serta terdapat pula *watertoren* (tangki air) guna keperluan pasanggerahan. Setiap peresmian *dienshotel* milik Kerajaan Siantar ini selalu dihadiri oleh pejabat kolonial dan pejabat perkebunan yang menandai relasi dan intimasi Raja Siantar itu kepada orang Eropa itu. Beberapa foto yang tersedia memperlihatkan keramaian masyarakat sewaktu peresmian hotel yang turut dihadiri *asisten residen afdeeling* Simalungun (bupati). Beberapa foto Sawadim Damanik tampak sedang berlibur

di pasanggaerahan miliknya, berfoto di kebun bunga miliknya ataupun sedang berenang di Danau Toba.



Lembah Haranggaol (*Tiga Langgiung*), Simalungun, 1931
Sumber: kitlv.nl

Pada intinya, penggambaran geografi dan topografi Simalungun melalui fotografi di era kolonial bertujuan untuk menunjukkan keindahan alam Simalungun yang menyatu erat dengan Danau Toba. Dalam hal ini, tujuannya sangat jelas yakni menjadikan Simalungun sebagai destinasi wisata pada era kolonial. Sebagaimana disebut Damanik (2016)⁵⁹, bahwa sejak tahun 1923, pemerintah kolonial Belanda melalui perusahaan kapal laut *D'loyd* menjadi pioner promosi wisata di Indonesia seperti Bali, Lombok, Minangkabau dan Danau Toba. Media promosi seperti brosur, *leaflet* ataupun narasi-narasi tentang alam dan kultural menjadi iklan promosi di Eropa. Karena itu, seperti disebut Damanik (2016), semenjak tahun 1927, jumlah wisatawan Eropa meningkat tajam ke Danau Toba guna mengunjungi Brastagi dan Parapat.

Hanya saja, pasca Indonesia merdeka, promosi wisata danau Toba terhenti total. Berbeda dengan Bali yang terus meningkat di awal Indonesia merdeka dan menjadi satu-satunya destinasi wisata internasional dari Indonesia. Pariwisata di Sumatra Utara semakin melayu dan mati suri. Tak ubahnya di Simalungun. Jika pemerintah kolonial telah berupa membangun jalur-jalur wisata di lereng

⁵⁹Lihat Erond L. Damanik. 2016. *Danau Toba: Permata Mahkota Pulau Sumatera*. Medan: Simetri Institut.

perbukitan sepanjang Danau Toba mulai dari Tongging hingga Parapat, tetapi pasca Indonesia merdeka pembangunan jalan itu terhenti total. Bahkan, sebagian jalan warisan kolonial terutama dari Tongging hingga kampung di sekitar Bukit Simarjarunjung, tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Ini adalah ironi pembangunan masyarakat di era kemerdekaan Indonesia seperti diperlihatkan sepanjang jalur wisata di Simalungun yang berbatas dengan Danau Toba.



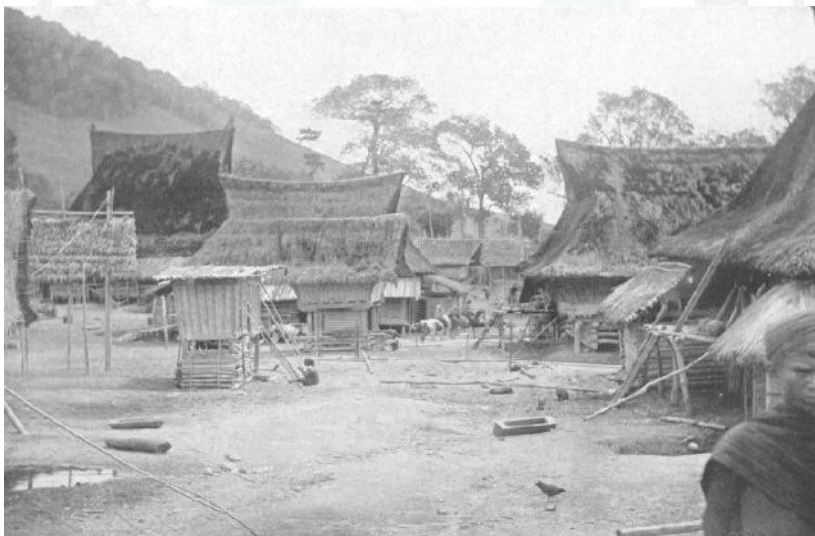
Pantai Tigaras, Simalungun, 1930

Sumber: kitlv.nl

Geografi dan topografi Simalungun seperti di Dolog Silou, Serdang, Bedagei, Padang (Tebingtinggi), Batubara, Siantar, Asahan, Raya, Panei dan Tanoh Jawa kurang digambarkan melalui foto arsip kolonial. Kenyataan ini bukan karena keengganan fotografer mengunjungi daerah dimaksud tetapi lebih disebabkan peralihan hutan-hutan di kawasan itu menjadi areal perkebunan. Foto tentang Pematangsiantar misalnya, lebih menyuguhkan perkembangan Kampung Siantar itu menjadi *gemeente*, yakni keberhasilan pemerintah kolonial mengubah hutan belantara menjadi sebuah kota modern. Sedangkan di daerah-daerah lain yang disebutkan diatas, maka arsip foto lebih memperlihatkan keadaan dan kondisi perkebunan milik orang Eropa seperti komoditas perkebunan, pabrik, rumah sakit, sekolah, barak kuli, dan lain-lain yakni penonjolan aktifitas pengusaha (*planter*).

Foto kampung (*huta*) yang ditonjolkan juru foto kolonial tentang Simalungun lebih menyuguhkan orisinalitas berupa masyarakat, aktifitas, perladangan, persawahan maupun rumah-rumah

masyarakat. Masyarakatnya digambarkan masih sederhana. Tidak mengenakan alas kaki, badan hanya ditutup dengan cara dililiti kain tanpa corak dan tanpa dipotong, kepala ditutup menggunakan kain yang tempelkan begitu saja, rok atau celana menggunakan kain yang mirip seperti sarung. Penonjolan masyarakat seperti ini lebih kepada penggambaran masyarakat yang tradisional, kumuh, kolot dan statis jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa yang dinamis. Gaya berbusana seperti ini menjadi kewajiban bagi orang Eropa untuk mengubahnya. Karena itu, sejak periode kolonial maka sejumlah busana dari Pekalongan dan Surabaya di impor ke Simalungun. Menurut Damanik (2017)⁶⁰ kedatangan orang Eropa di Simalungun turut berpengaruh pada pergantian gaya berpakaian pada orang Simalungun.



Kampung Dolog Paribuan, Simalungun, 1917

Sumber: kitlv.nl

Menurut Damanik (2017), gaya berbusana Simalungun hampir berubah drastis sejak era kolonialisme. Busana-busana yang dianggap menggambarkan kelusuhan, kolot dan statis diubah dengan memperkenalkan busana modern. Gaya berbusana seperti ini menurut Damanik (2017) turut diprakarsai *Misi Zending RMG*

⁶⁰Lihat Erond L. Damanik. 2017. *Busana Simalungun: Politik Kolonial, Peminjaman Selektif dan Modernitas*: Medan: Simetri Institute.

guna menghantarkan masyarakatnya sebagai bagian dari binaan Eropa yang tengah berubah. Busana dari Jawa (Surabaya dan Pekalongan) yang dihasilkan industri garmen milik kolonial di sebarakan dan dijual ke seluruh masyarakat Tanah Jajahan. Pada periode ini terjadi modernisasi gaya berbusana dengan sebagai dampak politik kolonial dengan cara peminjaman selektif.

Busana Jawa yakni kebaya disebarakan ke seluruh Indonesia dan menjadi pakaian wajib kawula jajahan. Sementara elite diperkenalkan gaya berbusana meniru orang Eropa seperti disebut Taylor (2003)⁶¹. Busana mereka dikategorikan dalam tiga corak yakni setelan putih (kelas menengah Eropa), setelan hitam (kelas elite Eropa) dan busana tradisi (kelas elit pribumi). Kepada mereka diperkenalkan topi, ikat pinggang, sepatu, tas jinjing, syal (menggantikan selendang), tas jinjingan dan juga tanda bintang di bagian dada untuk memperlihatkan kelas sosialnya di masyarakat. Busana hitam dimaknai sebagai lobi atau negosiasi bisnis perkebunan, busana putih dimaknai sebagai kekuasaan dan busana tradisi dimaknai sebagai kompleksitas (kerumitan) elit swapraja yang harus tunduk pada aturan kolonial.



Kampung Simalungun di Pematanggraya, 1917

Sumber: kitlv.nl

⁶¹Lihat Jean Gelman Taylor. 2003. *Indonesia: Peoples and Histories*. New Heaven: Yale University Press.

Rumah-rumah yang ditunjukkan pada foto kolonial disebut *'orisinal in situ'* yakni sebagaimana tampak di lokasi sewaktu di potret. Rumah-rumah itu cenderung berpanggung, menggunakan bambu atau kayu sebagai konstruksi rumah, beratap nipah atau ijuk dan berdinding kayu atau tepas. Bahkan, tidak satupun foto itu memperlihatkan adanya *waterclosed (WC)* sebagaimana ada di Eropa. Keadaan sekeliling kampung cenderung ditutupi hutan belantara. Model perkampungan cenderung mengelompok antara 5-15 kepala keluarga. Rumah-rumah berpanggung itu saling berhadapan. Selain rumah terdapat lumbung padi dan juga *pattangan* (tempat menyimpan kerangka jenajah) atau di Karo disebut *geriten*.

Catatan tentang keadaan perkampungan di Simalungun terdapat pada catatan Anderson (1976) yang mengunjungi Sumatera Timur pada tahun 1823. Dalam catatan sewaktu mendeskripsikan Pasir Mandogei di hulu Sungai Asahan, Anderson menjumpai dua perkampungan. Disebutkan bahwa rumah-rumah masyarakatnya adalah berpanggung. Terdapat 20 rumah berbaris di kiri dan di kanan dan jumlah populasi satu kampung mencapai 50 orang saja. Di antara rumah-rumah itu terdapat halaman yang diperuntukkan guna bersilaturahmi ataupun sebagai tempat mengeringkan hasil pertanian. Model atap melengkung dari bagian belakang hingga depan. Terdapat beberapa ornamentasi yang tidak profesional.



Kampung Simalungun di Pamatangpurba, 1937

Sumber: kitlv.nl

Perkampungan Simalungun sebagaimana tersedia di arsip kolonial adalah seperti di Dolog Paribuan, Tongging, Nagasaribu, Purbasaribu, Haranggaol, Purba, Raya, Panahatan, Tigaras, Sipolha, Sidamanik, Maligas, Hutabayu (Tanoh Jawa), Parapat, Dolog Silou, Kahean, Bandar, dan lain-lain. Potret rumah orang Simalungun di daerah ini cenderung menunjukkan kemiripan seperti berbentuk pelana, berpanggung, beratap ijuk atau nipah, lumbung dan lain-lain. Dibeberapa kampung terdapat *pattangan*, *losung* (lesung), alat tenun (*martonun*), *sopou* (balai) dan lain-lain. Keadaan ini menjadi penanda awal dari keadaan perkampungan di Simalungun pada periode kolonialisme.

Foto-foto ini menunjukkan 'orisinalitas' Simalungun yang menyuguhkan tentang kesederhanaan, kelusuhan dan keprimitifan peradaban Simalungun yang masih statis. Adapun penonjolan foto seperti ini adalah guna 'mempertontonkan' keaslian kultural Simalungun yang dikatakan eksotis. Karena itu, orang Eropa memiliki kewajiban mengubah masyarakat eksotis dan statis ini ke alam baru modernitas. Itulah sebabnya, *Rumah Bolon* (istana) Kerajaan Siantar dibakar tahun 1919 dan diganti dengan Pasanggerahan yang disebut dengan *dienshotel*. Istana lama diganti dengan menggunakan cor beton. Hal sama dilakukan terhadap rumah raja Siantar yang terbuat dari kombinasi beton dan kayu. Istana yang dibakar itu berada di *Kampung Holang* yakni *pamatang* (ibukota) Kerajaan Siantar yang menjadi embrio *gemeente* Pamatangsiantar.

Anggapan orang Eropa terutama pejabat kolonial dan perkebunan di Siantar Simalungun bahwa *rumah bolon* yang 'kolot' itu tidak pantas sebagai istana seorang raja di tengah-tengah kota Siantar yang ditetapkan sebagai *gemeente* (kotamadya) pada tahun 1917. Penetapan Siantar sebagai *gemeente* dan kota perkebunan (*plantations city*) menjadi dasar intensnya kunjungan pejabat kolonial seperti Residen, Gubernur Jenderal, Menteri Negara atau bahkan Ratu dan Pangeran Belanda ke Siantar. Karena itu, Raja Siantar harus menerima tamu-tamunya di istana modern bukan di istana yang terbuat dari kayu, berpanggung dan masih sangat sederhana. Hal ini terbukti dari sejumlah kunjungan resmi kenegaraan seperti residen Sumatra Timur ke Siantar tahun 1927, 1935, dan 1945. Demikian pula kunjungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1937, kunjungan Menteri Negara Kolonial tahun 1939, dan juga kunjungan pangeran Bernard dan Ratu Juliana ke Siantar tahun 1945.

Sementara istana kerajaan lainnya di Simalungun seperti di Tanoh Djawa, Panei, Raya, Dolog Silau maupun Silimahuta ataupun istana-istana *partuanon* (desa induk) dibiarkan tetap seperti semula. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa istana itu berada di daerah kabupaten (*afdeeling*) sehingga kunjungan kenegaraan sangat jarang terjadi. Sebuah foto di arsip kolonial memperlihatkan tentang rumah baru raja Purba di Pematangpurba (*nieuwe woning van de radja van Pematangpoerba*) tahun 1937. Rumah baru raja Purba ini terbuat dari cor beton yang berjarak sekitar 800 meter dari kompleks istana di *Huta Lama* (kampung lama). Sementara rumah disampingnya sudah menggunakan semi permanen.



Rumah baru Raja Purba di Pematangpurba, 1937

Sumber: kitlv.nl

Sorotan lain juru foto (fotografer) di Simalungun adalah pasar (*market*) atau disebut '*tiga*' dalam bahasa Simalungun. Sejumlah foto memperlihatkan kerumunan masyarakat Simalungun di pasar seperti Siantar, Tigaras, Haranggaol, Raya dan lain-lain. Pasar menjadi tempat bertemunya para penjual dan pembeli baik secara uang tunai, barter maupun pemberian (*gift*). Di pasar, biasanya masyarakat membawa hasil pertanian, pakaian, maupun ternak serta makanan guna dipertukarkan dengan barang lainnya dan membeli kebutuhan lain pada masyarakat. Karena itu, pasar menjadi bentuk kapitalisme awal pada masyarakat modern. Di pasar, interaksi yang terbentuk dapat bercorak ekonomi, politik, hukum dan lain-lain yang seluruhnya membutuhkan keteraturan sosial.

Di Simalungun, pasar dibedakan menjadi dua, yakni *tiga* dan *bandar*. Adapun yang dimaksud dengan *tiga* adalah pasar mingguan atau pasar yang digelar satu hari atau dua hari pada setiap minggunya. Biasanya, pasar seperti ini ada pada setiap pusat *partuanon* (desa induk). Pada hari 'pasar', setiap orang berangkat dengan membawa barang dagangan guna dipertukarkan dengan komoditas lainnya. Di pasar seperti ini, biasanya masyarakat berdagang secara borongan (*martulak* atau *tulakan*) ataupun eceran. Sedangkan *bandar* adalah pasar yang tidak terikat oleh waktu. *Bandar* adalah sebuah kawasan yang lebih ramai dari segi populasi dan aktifitas sehari-hari lebih menunjuk pada kegiatan perdagangan seperti adanya warung (kedai), grosiran, eceran dan lain-lain. Karena itu, sebuah *bandar* di Simalungun adalah sebuah area yang menunjuk pada sebuah 'kota' dalam konsep Melayu. *Bandar* ini tersedia pada satu kawasan tertentu yang setiap harinya selalu ramai dikunjungi masyarakat dari desa-desa sekitarnya. *Bandar* adalah pasar yang terbuka setiap harinya sepanjang waktu. Karena itu, *bandar* menawarkan interaksi secara terus menerus pada setiap orang yang membutuhkan pertukaran atau perdagangan.



Tiga Saribudolok, Simalungun, 1925

Sumber: kitlv.nl

Untuk melihat aktifitas ekonomi masyarakat, dapat diukur dari pasar. Semakin intens masyarakat ke pasar, maka masyarakat dimaksud memiliki sejumlah komoditas untuk dipertukarkan. Karena itu, *bandar* sebagai bentuk pasar yang ada sepanjang waktu

menjadi tumpuan masyarakat yang memiliki sejumlah komoditas untuk dipertukarkan itu. Sedangkan pada masyarakat yang kurang maju aktifitas pertanian dan ekonominya, maka *tiga* menjadi pilihannya. Itulah sebabnya, pemerintah kolonial Belanda lebih memilih '*bandar*' sebagai aktifitas perekonomian daripada *tiga*. Di beberapa '*bandar*', stan atau lods perdagangan dibangun sebagai cermin modernitas dan juga memungut pajak dari bandar perdagangan itu. Itulah sebabnya, di era *gemeente* Siantar, maka pasar yang awalnya dirintis Sang Nauluh Damanik dibangun menjadi pasar permanen yang disebut dengan *Siantar Central Market* (Pusat Pasar Siantar) yang kini disebut dengan Pasar Horas.



Tiga Haranggaol, Simalungun, 1925

Sumber: kitlv.nl

Sementara itu, di pasar seperti *Tiga Raya* dan *Tiga Saribudolak*, *Tiga Haranggaol*, *Tiga Bosar Maligas* dan *Tiga Parapat*, maupun *Tiga Ras*, dibangun lods atau stan untuk menampung para penjual dan pembeli. Pada stan yang dibangun pemerintah afdeeling Simalungun itu, aneka komoditas dipertukarkan. Karena itu, pasar adalah cermin aktifitas perekonomian. Beragam penelitian tentang pasar sudah dilakukan oleh peneliti ekonomi maupun antropologi serta sosiologi guna mendeskripsikan tentang aktifitas masyarakat. Hasil penelitian

Mauss (1954)⁶² di Amerika Utara, Polynesia dan Melanesia menyebut bahwa pasar menjadi salah satu tempat untuk saling bertukar ataupun memberi hadiah (*gift*) sebagai sebuah sistem total yang terbentuk pada masyarakat. Pemberian atau *gift* menurut Mauss (1954) terjadi karena dorongan religius, hukum, ekonomi maupun mitologi.

Karena itu, pasar bukanlah sekedar tempat perjumpaan para penjual dan pembeli, tetapi memiliki makna-makna secara antropologis dan sosiologis. Di pasar, orang dapat saja bersilaturahmi ataupun berinteraksi sehingga keyakinan terhadap barang dagangan bisa lebih terpercaya. Keadaan ini tentu berbeda dengan pasar *online* atau *electronic commerce* sekarang yang telah menggantikan pasar *offline*. Transaksi perdagangan seperti disebut terakhir ini lebih memfokuskan diri pada *trust* (kepercayaan) antara penjual dan pembeli. Sedangkan pada pasar (tiga atau bandar) *trust* itu dibangun lewat perjumpaan antara pembeli dan penjual. Di pasar juga masyarakat dapat bertutur (*martarombo*), menguatkan kekerabatan, mengundang atau menyampaikan pesan tentang sesuatu, bertukar informasi tentang hal-hal umum dan khusus, atau juga membicarakan politik.

Menyoal tentang foto berupa alam, kampung dan pasar di Simalungun ini, foto tersebut diambil (difoto) *in situ* sesuai sudut pandang fotografer. Karena itu, walaupun objek foto adalah *in situ*, maka interaksi fotografer dengan objek foto cenderung terbatas. Objek yang difoto tidak dapat dikelola secara sengaja (*by design*) kecuali sudut pandang juru foto saja. Dengan demikian, foto itu menunjukkan kealamiahannya ataupun orisinalitas.

Walaupun demikian, sebagaimana disebut Taylor (2003), foto tetaplah merupakan catatan berupa rekayasa canggih antara objek dengan juru foto. Karena itu, manipulasi pada foto tetap saja kelihatan walaupun objeknya *in situ*, setidaknya dari sudut pandang sewaktu memfoto. Objek foto berupa kampung terutama bagi juru foto adalah panoramic orang terjajah yang bersahaja, statis dan belum beradap. Foto-foto ini sebagaimana terjadi di Aceh sewaktunya tingginya perwira Belanda terbunuh pada Perang Aceh menjadi iklan bagi di Eropa guna menunjukkan kebringasan orang Aceh sekaligus menggalang dana bagi keluarga korban ataupun guna memupuk simpati pada Perang Aceh. Demikian halnya foto-foto panoramic dari Simalungun khususnya yang terbatas langsung dengan Danau

⁶²Lihat Marcel Mauss. 1954, *The Gift: Forms and Function of Exchange in Arabic Societies*. London: Cohen and West

Toba menjadi objek iklan bagi pengusaha perjalanan guna memancing wisatawan berkunjung ke Sumatra (Simalungun).

Beranjak dari foto-foto itu, Orang Simalungun setidaknya menjadi paham dan memahami bahwa leluhur mereka pernah melakukan 'hal-hal luar biasa' seperti tampak pada foto arsipnya. Momentum seperti kesahajaan, kesederhanaan, keanehan dan ketidakberadapan orang Simalungun sebagaimana ditafsirkan juru foto adalah gambaran manipulatif orang Simalungun guna dipertontokan di Eropa. Tindakan manipulatif (*by design*) itu menuntut suatu kegiatan yang disebut dengan 'memanusiakan manusia'. Terlepas dari semua itu, setidaknya arsip foto tentang Simalungun sebagaimana tersimpan di Belanda adalah khasanah kebudayaan Simalungun pada eranya. Minimal, foto itu menjadi bukti keberadaan tentang kebudayaan dan peradaban Simalungun bahwa kebudayaan dan peradaban itu pernah didokumentasikan pada 100 tahun yang lalu. Foto-foto di bawah ini adalah keadaan alam, kampung dan pasar di Simalungun sebagaimana tersedia di berbagai koleksi di Belanda.



Jalan desa di Bosar Maligas Simalungun, 1910

Sumber: kitlv.nl



Dalan hu juma (jalan ke ladang) di Hinalang, 1915

Sumber: kitlv.nl



Hornbill (Onggang) di Siantar, 1935

Sumber: kitlv.nl.

Enggang (orang Simalungun menyebutnya *Onggang*) atau *Hornbill*. Adalah sejenis burung pelatuk yang biasanya menjadikan sarangnya di pokok kayu sewaktu regenerasi. Sesungguhnya, burung ini tidaklah khas Simalungun walaupun masih dapat ditemui di Simalungun sebelum era kolonialisme. Burung ini lebih familiar di Kalimantan dan Sulawesi. Di kedua wilayah itu, burung ini dimitoskan dan masuk dalam arsitektur rumah, pakaian tradisi dan folklore mereka. Namun demikian, di Simalungun, burung ini ternyata masuk juga dalam sebuah tarian yang disebut *Tortor Toping Huda-huda* (Tari Topeng dan Kuda). Tarian ini merupakan kombinasi antara dua hewan yakni hewan liar berupa burung Enggang dan hewan domestikasi berupa Kuda.

Struktur gerakannya adalah jingkrak-jingkrak seperti kuda, dan terbang seperti burung Enggang. Setiap penari menggunakan topeng yang terdiri dari dua bahagian menyerupai kuda (*huda-huda*) dan paruh burung Enggang. Kombinasi kedua hewan ini dalam tarian Simalungun menghasilkan kejenakaan. Karena itu, tarian ini pada awalnya digunakan untuk 'penghiburan' atau *pangilikion*, terutama pada saat berkabung. Masuknya burung Enggang dalam sejumlah hewan yang dikenali familiar orang Simalungun sesungguhnya karena eksistensi burung ini di Simalungun. Namun, keberadaan burung ini semakin hilang karena pemusnahan hutan-hutan Simalungun menjadi areal perkebunan milik kolonial sejak tahun 1885 dan massif terjadi sejak tahun 1908.

Dalam perspektif Antropologi, sesungguhnya hewan dan tumbuhan dapat masuk menjadi hewan mitologi, folklore, arsitektur, ragam hias, dan lain-lain karena masyarakat tersebut sudah melihat hewan dan tumbuhan dimaksud. Artinya, hewan dan tumbuhan tersebut dapat didomestikasi sehingga familiar dengan masyarakat. Di Simalungun, hewan domestikasi tersebut adalah seperti ayam, ikan, monyet, anjing, celeng dan lain-lain. Sedangkan hewan lain cukup familiar di Simalungun adalah aneka jenis burung pipit, *uao* (elang), *onggang* (enggang), *imbou* (monyet), *porkis* (semut) dan lain-lain. Sedangkan ragam hias floral adalah seperti pakis, pisang, *sasange*, dan lain-lain.



Perladangan dan pemukiman di Saribudolog, 1915

Sumber: kitlv.nl

Saribudolog terletak pada ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Merupakan daerah beriklim dingin dan suhu terendah dapat mencapai 16°C. Kondisi tanahnya sangat subur dan sangat cocok dengan pertanian palawija serta hortikultura (sayur mayur). Foto bertahun 1915 di atas memperlihatkan perladangan dan beberapa permukiman masyarakat di kaki bukit Singgalang. Sejak tahun 1915, Saribudolog menjadi basis pertanian hortikultura yang diperkenalkan Ir. Botje di Tanah Karo sejak tahun 1911. Sayur mayur ini dipergunakan guna memenuhi kebutuhan sayur mayur di Medan terutama bagi masyarakat Eropa. Saribudolog adalah ibukota *Afdeeling Simalungun en Karolanden* (Kabupaten Simalungun dan Tanah Karo) pada waktu di bentuk tahun 1906. Di wilayah itu, terdapat kantor *controleur* Simalungun yang kini berada Lapangan Sepak Bola Saribudolog. Pada saat ini, kantor dimaksud difungsikan sebagai kantor camat Silimahuta.



Dolog Sigalang bij Siboe Doet.

Dolog Sigalang di Saribudolog, Simalungun, 1905

Sumber: Tropen Museum Institut



Tiga (Pekan) Saribudolog, 1925

Sumber: kitlv.nl



Simpang Empat Saribudolog, 1937

Sumber: kitlv.nl



Rumah *Controleur* Simalungun di Saribudolog, 1935

Sumber: kitlv.nl



Rumah Controleur Simalungun di Saribudolog, 1935
Sumber: kitlv.nl



Perempuan Penjaja Sarung di Tiga Raya, Simalungun, 1940
Sumber: kitlv.nl



Pantai Tongging, Sipituhuta, 1918

Sumber: Tropen Museum Instituut



Perkampungan di Tongging, Sipituhuta, 1880

Sumber: kitlv.nl



Solu (sampan) dan penduduk di Tongging, Sipituhuta, 1900
Sumber: kitlv.nl



Pengerjaan jalanraya menuju Saribudolog, 1927
Sumber: kitlv.nl



Air Terjun Sipiso-piso, Sipituhuta, 1922

Sumber: kitlv.nl



Jalanraya di Dolog Merek Situnggaling, Sipituhuta, 1937

Sumber: kitlv.nl



Harang Gaol. Spolhuis.

Pantai Tiga Langgiung (Haranggaol), Simalungun, 1916

Sumber: kitlv.nl



Penjaja dagangan di pantai Haranggaol, Simalungun, 1936
Sumber: kitlv.nl



Persawahan di teluk Haranggaol, Simalungun, 1936
Sumber: kitlv.nl



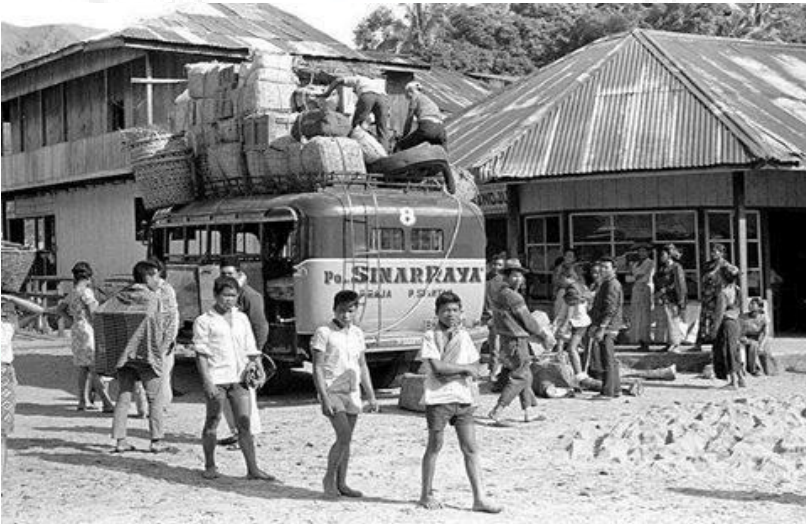
Jalan raya dan bus menuju Haranggaol, Simalungun, 1925
Sumber: kitlv.nl



Purbasaribu (dekat Haranggaol), Simalungun, 1917
Sumber: kitlv.nl



Haranggaol *Haranggaol* *Haranggaol*
Mamuro (menjaga padi) di Purbasaribu, Simalungun, 1920
Sumber: kitlv.nl



P.O. Sinar Raya di Haranggaol, Simalungun, 1961
Sumber: kitlv.nl



Anak-anak dan wanita di Dolog Paribuan, 1910
Sumber: kitlv.nl



Rumah Simalungun di Dolog Paribuan, Simalungun, 1910
Sumber: kitlv.nl



Rumah Simalungun di Dolong Paribuan, 1910

Sumber: kitlv.nl



Rumah Simalungun dan penduduk di Purba, 1934

Sumber: kitlv.nl



Rumah Tuan Bandar Hanopan di Pamatangbandar, 1945

Sumber: kitlv.nl



Panorama Tuktuk Sipiak (Parapat), Simalungun, 1910

Sumber: kitlv.nl



Panorama Teluk Sipiak (Parapat), 1935
Sumber: kitlv.nl



Panorama Sibaganding, Simalungun, 1936
Sumber: kitlv.nl



Sabah (sawah) di Pintu Bosi Simalungun, 1917
Sumber: kitlv.nl



Pantai Tigaras, Simalungun, 1930
Sumber: kitlv.nl



Pasar (*tiga*) di Tigaras, Simalungun, 1910

Sumber: kitlv.nl



Kampung Panahatan, Simalungun, 1935

Sumber: kitlv.nl



Hotel Grand Parapat di Parapat, Simalungun, 1925

Sumber: kitlv.nl



Sopou (gubuk) di Sidamanik, Simalungun, 1917

Sumber: kitlv.nl



Barak Militer di Saribudolog, 1947
Sumber: kitlv.nl



Hutabayu, Tanoh Djawa, Simalungun, 1934
Sumber: kitlv.nl



Rumah Bolon (Istana) Raja Purba, 1971

Sumber: kitlv.nl

Berada di *Hutalama* (kampung lama) sekitar 600 meter dari jalan raya Pematangsiantar-Saribudolog. Istana ini terletak pada benteng alam dimana sekelilingnya adalah jurang. Di lembah jurang itu adalah persawahan masyarakat. Pada era Radjamin Purba (1960-1973) sebagai Bupati Simalungun, rumah bolon ini direnovasi sehingga tampak seperti sekarang. Pada tahun 1971, rumah bolon ini diserahkan kepada Pemkab Simalungun guna dikelola Yayasan Museum Simalungun bersama dengan Museum Simalungun yang terletak di Pematangsiantar.



Konstruksi tiang rumah bolon Pematangpurba, 1971
Sumber: kitlv.nl



Rahalim Purba Pakpak, 1935
Berfoto di kompleks Rumahbolon, Pematangpurba, tahun 1935
Sumber: kitlv.nl



Orang Simalungun di Nagasaribu, Silimahuta, 1937
Sumber: kitlv.nl



Pasukan NICA di Nagasaribu, Silimahuta, 1947
Sumber: kitlv.nl



Anak sungai Bah Bolon Siantar, 1920

Sumber: kitlv.nl



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB V

PERUBAHAN SOSIAL DAN KULTURAL DI SIMALUNGUN

Dua faktor utama modernisasi yang berkembang pesat di Simalungun adalah perkebunan dan masuknya agama. Perkebunan menjadi inti perkembangan kewilayahan (teritorial) karena mengubah belantara menjadi daerah modal yang sangat menguntungkan. Berturut-turut wilayah Simalungun yang menjadi basis perkebunan bermula dari Serdang Hulu atau yang sering disebut dengan Serdang Dusun seperti di Bangun Purba, Dolog Masihol dan lain-lain. Kemudian, dari daerah ini merembes hingga ke Bedagei, Kota Padang (Tebingtinggi), Batubara dan Simalungun. Faktor perkebunan ini menjadi salah satu penenggerdilan teritorial Simalungun sebagaimana dijelaskan semula.

Terlepas dari debat tentang negatif dan positif perkebunan ini, tetapi yang pasti ialah bahwa perkebunan ini menjadi faktor awal modernisasi Simalungun. Jikapun hari ini Orang Simalungun mengenal sistem perkebunan, pertanian, pemerintahan, perbangkan, persekolahan, peradilan, musik dan tarian, rekreasi, rumah sakit, termasuk berbusana dan lain-lain, maka cara-cara itu adalah bagian dari imperialisme ketika perkebunan Belanda mulai eksis di Simalungun.

Jika perkebunan lebih memfokuskan diri pada perkembangan fisik, ataupun memerdulikan masyarakat lewat rumah sakit dan perkebunan, tetapi strategi yang lebih manusiawi justru dilakukan *Misi Zending* terutama RMG Jerman. Bukan bermaksud mengedepankan apalagi mengkultuskan institusi dari Jerman ini, tetapi lewat institusi inilah 'program memanusiaikan manusia' lebih mendekati hasil maksimal. Orang Simalungun menjadi terlibat dalam program kesehatan masyarakat, pendidikan, kelembagaan, kompetisi dan lain-lain guna menopang dan mensejahterakan hidup. Dengan pendidikan yang dimiliki orang Simalungun sebagai didikan RMG Jerman, akhirnya orang Simalungun mampu mereduksi ketertinggalan dan kemiskinan yang mereka alami. Demikian pula melalui pendidikan, akhirnya orang Simalungun dapat menjadi 'tuan' di negerinya sendiri. Mereka juga menjadi pejabat perkebunan, pejabat gereja, pejabat pemerintahan kolonial dan lain-lain. Kedua faktor yang disebut dengan 'modernisasi Simalungun' ini

dijelaskan secara ringkas lewat foto arsip yang tersimpan online di Belanda, ataupun repro dari berbagai sumber yang dimiliki penulis.

A. Budidaya perkebunan

Sebagaimana diketahui bahwa hingga tahun 1938, sepertiga tanah Simalungun sudah menjadi perkebunan dari total luas Simalungun 151.295 hektar. Dalam laporannya, J. Tideman (1921) menyebutkan 120.000 hektar tanah di Simalungun sudah dijadikan tanah konsesi perkebunan yang diberikan kepada 46 pengusaha perkebunan.



Karet dan Kopi Robusta di Siantar Estate, milik HVA, 1920

Sumber: kitlv.nl

Di antaranya 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, 10 perkebunan campuran (karet, teh, kopi dan kelapa sawit). Selain perusahaan yang disebutkan di atas, di Simalungun (khususnya di Siantar), hak konsesi diberikan kepada *Het Nederlandsch Indisch Landsyndicaat, de Marihat Sumatra Plantage Cy, The Good Year Tire and Rubber Co.*



Pembukaan lahan guna perkebunan di Martoba, 1920

Sumber: kitlv.nl

Demikian halnya di Siantar. Perkebunan yang menjadi penyokong Siantar telah jatuh kepada pengusaha Belanda dan macangera seperti *HVA*, *Goodyear* dan *Londsum* dan lain-lain. Eksistensi perkebunan inilah yang pada akhirnya menopang dan mendukung Siantar menjadi kota majemuk (*plural society*) dan multi budaya (*multiculture*) karena tingginya arus urbanisasi ke Siantar. Perkembangan pesat yang dialami Siantar sejak tahun 1885 (dan resminya sejak 1907) hingga 1915 membuat pemerintah kolonial menetapkan Siantar sebagai Ibukota *Afdeling* Simalungun tahun 1913 sekaligus menetapkannya menjadi *Gemeente* (kotapraja) tahun 1917. Siantar adalah kota Perkebunan (*Plantations Citys*)

Sebelumnya, tanah-tanah di lokasi *partuanon* Siantar yakni *Kota Padang* (Tebingtinggi) maupun beberapa *partuanon* di kerajaan Dolog Silou (kerajaan marga Tambak) khususnya yang berbatas dengan Melayu Serdang Bedagei sejak tahun 1885 telah direbut pemerintah kolonial guna ditanami komoditas perkebunan. Singkatnya, sejak tahun 1906 yakni tahun dimana Sang Na Ualuh Damanik di buang ke Bengkalis, maka sejak itu pula seluruh tanah-tanah di Simalungun jatuh ke tangan pemerintah kolonial. Pemberian yang disebut dengan: '*Hibah, Anugerah, dan Pemberian*'

ini ditandai oleh penandatanganan *Korte Verklaring* (Pernyataan Pendek) pada tahun tanggal 16 Oktober 1907 oleh seluruh Raja dan *Partuanon* di Simalungun (Damanik, 2015).



Perkebunan Kopi milik HVA di Siantar Estate, 1925

Sumber: kitlv.nl

Sejak saat itu, tanah-tanah di lokasi kerajaan ini jatuh kepada pemerintah kolonial yang diberikan kepada sejumlah pengusaha seperti perusahaan perkebunan milik *Handels Vereeniging Amsterdam (HVA)* yakni perusahaan terluas di Siantar Simalungun yang mengelola: 4 (empat) unit komoditas Serat (Sisal) di Dolog Ilir, Laras, Bah Djambi dan Bandar Betsy, 5 (lima) unit Kebun Kelapa Sawit yakni di Tindjowan, Dolog Sinumbah, Pagar Djawa dan Tonduhan di Simalungun serta Bulu Blang Ara, 3 (tiga) unit Kebun Teh yakni di Balimbangan dan Sidamanik (Simalungun) serta Kayu Aru serta 4 (empat) unit Kebun Karet seperti di Bangun (Simalungun) serta Gohor Lama, Ayer Jambu, Pulau Tiga.



Perkebunan Teh di Nagahuta, 1925

Sumber: kitlv.nl

Selain itu, perusahaan HVA juga mengelola Rumah Sakit (*hospital*) Balimbingan serta sekolah berasrama (*boarding school*) yang disebut dengan *Internaat voor Schoolgande Kinderen* di Pamatang Siantar (kini disebut Taman Asuhan) serta sejumlah poliklinik di perkebunan. Pada tanggal 27 Desember 1958, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 86 tentang *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia* dan HVA ini dialihkan menjadi aset Indonesia yang dikelola dibawah PTPN-IV

Selanjutnya, terdapat perusahaan non Belanda seperti *Harrison and Crosfield* (kini London Sumatera) yang berpusat di London, Inggris yang bergerak pada komoditas utama seperti teh dan karet. Perusahaan ini masuk ke Sumatera di Medan sejak tahun 1906 dan mendapatkan konsesi tanah di Simalungun sejak tahun 1907. Perusahaan ini bergerak pada dua komoditas utama yakni karet (*rubber*) dan teh (*tea*). Perusahaan ini pernah diambilalih sesuai kebijakan Nasionalisasi 1958, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya pada tahun 1962.



Perkebunan Kelapa Sawit HVA di Siantar Estate, 1930

Sumber: kitlv.nl

Di *Bah Lias* Simalungun, Lonsum mengoperasikan komoditas Kelapa Sawit, sedangkan di *Bah Bulian* mengoperasikan komoditas Kelapa Sawit, Coklat dan Kelapa. Sejak bulan Oktober 2007, *Indofood Agri Resources Ltd (Indo Agri)*, anak perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk di bidang perkebunan, menjadi pemegang saham mayoritas di Lonsum. Selain itu, terdapat perkebunan *Bridgestone Sumatra Rubber Estate*. Sejak tahun 2005 sahamnya di kuasai Jepang. Sebelumnya, *Bridgestone Sumatera Rubber Estate* bernama *Goodyear Sumatra Plantation* yang berdiri di Dolog Merangir dan Dolog Ulu (Simalungun) dan Aek Nabara (Labuhanbatu), Nagaraja (Serdang Bedagei) sejak 1917 dan merupakan anak perusahaan *the Goodyear Tire and Rubber Company* yang berpusat di Ohio, Amerika Serikat sejak 1898.

Pada tahun 1964, *Goodyear Sumatra Plantation* diambilalih Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1964, namun pada tahun 1967 dikembalikan kepada pemiliknya. Kebun Dolog Merangir dan Dolog Ulu diusahai berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 3/HGU/DA/80 dan telah memperoleh perpanjangan selama 25 tahun sesuai SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 117/HGU/BPN/1997 tanggal 16 September 1997 seluas 11.226,38 Hektar.



Slotemaker dan Volker di kebun teh HVA Nagahuta, 1936

Sumber: kitlv.nl

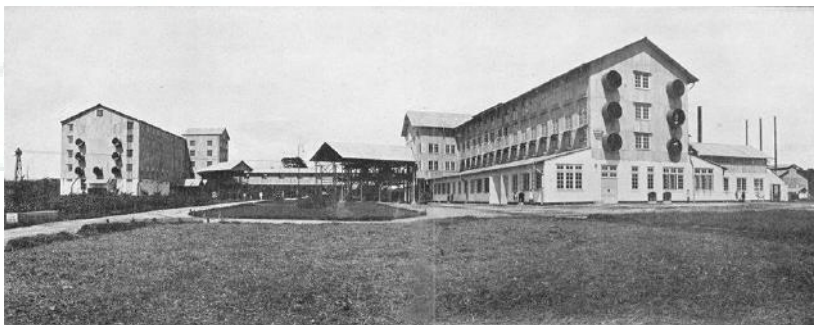
Perusahaan lainnya yang bergerak di komoditas Kelapa Sawit dan Karet adalah RCMA yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1924. Di Gunung Bayu, Bosar Maligas, Simalungun, RCMA mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sedangkan di Dolog Batu Nanggar, RCMA mendirikan Pabrik Karet, tetapi sejak 1958 pabrik karet ini telah dibongkar sejalan dengan konversi karet ke kelapa sawit. Perusahaan *Rubber Cultuur Matschappij Amsterdam (RCMA)* diambilalih menjadi milik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia No. 24 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi milik Belanda. Kini, PKS Gunung Bayu dikelola PTPN-IV di Indonesia. PKS Gunung Bayu dahulunya bernama *NV. RCMA* ini mengoperasikan 10 *afdeeling* perkebunan diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 21/HGU/BPN/2003 tertanggal 14 Maret 2003 seluas 8.479, 83 hektar tanah.

Sebagaimana di sebut Tideman (1922), komoditas pertama yang ditanam di Siantar-Simalungun adalah perkebunan teh yakni sejak tahun 1908. Masuknya komoditas lain seperti karet, kelapa sawit, sisal dan bahkan coklat telah mengakibatkan pergeseran lahan di Simalungun menjadi areal perkebunan. Hingga tahun 1938, sepertiga tanah Simalungun sudah menjadi areal perkebunan dari luas total Simalungun 151.295 hektar. Dalam laporannya, Tideman (1922) menyebutkan bahwa 120.000 hektar tanah di Simalungun sudah

dijadikan tanah konsesi perkebunan diberikan kepada 46 pengusaha perkebunan. Di antaranya terdapat 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, dan 10 perkebunan campuran (karet, teh, kopi dan kelapa sawit).

Selain perusahaan disebutkan di atas, di Simalungun (khususnya di Siantar), hak konsesi diberikan kepada *Het Nederlandsch Indisch Landsyndicaat, de MARIHAT Sumatra Plantage Co, The Good Year Tire and Rubber Co*. Tanah-tanah yang dikonsesikan kepada pengusaha perkebunan Belanda maupun non-Belanda seperti Inggris dan Amerika Serikat memang disatu sisi telah menjadi faktor modernisasi kewilayahan di Simalungun, tetapi disisi lain memunculkan sengketa agraria berkepanjangan (Pelzer, 1991). Tanah-tanah yang seharusnya dikembalikan kepada orang Simalungun pasca selesainya *Hak Guna Usaha (HGU)* terutama yang dimiliki Belanda, ternyata tidak pernah kembali kepada mereka. Rezim kolonial Belanda berganti menjadi rejim Indonesia yang tetap mengabaikan pengembalian tanah-tanah milik ulayat orang Simalungun itu (Damanik, 2017). Kenyataan inilah yang kerap menimbulkan unjuk rasa bahkan protes kepada ‘negara’ (*state*) maupun sejumlah perusahaan perkebunan lainnya di Simalungun.

Sejak tahun 1907, wilayah (teritorial) Simalungun mengalami perkembangan yang sangat cepat khususnya terkait dengan pembukaan perkebunan milik kolonial. Dalam perkembangan itu, Siantar-Simalungun memperoleh jaringan jalan yang baik. Jalur kereta api sepanjang 58 km dibuka tepat pada tanggal 5 Mei 1916. Pada tahun 1920 sebuah cabang kecil dibuka menuju pabrik serat di Lima Laras (Batubara) agar dengan mudah dapat mengangkut produk perkebunan ini melalui Dolog Merangir, yang terletak di tengah perjalanan ke Tebing Tinggi.



Pabrik pengolahan Teh di Balimbingan, 1925

Sumber: kitlv.nl

Jalur Tebing Tinggi-Siantar bukan merupakan salah satu jaringan jalan kereta terpendek, terbukti dari statistik dalam laporan Perusahaan Kereta Api Deli (*Deli Spoorweg Matschappij*). Pada 15 kilometer pertama dari Pematang Siantar, jalan ini memotong 8 jalur air penting, yakni Bah Bolon, saluran dari Bah Korah, Bah Biak, Bah Buldakbuldak, Bah Sapuran, Bah Hilang, Bah Birong dan Bah Kasindir. Selanjutnya, ada beberapa selokan dan sebuah jembatan indah yang dibangun melengkung di atas kolam air di depan Parapat. Ketika melewati tempat ini dijumpai jembatan di atas Binanga Sorasora dan Mursahan



Pengeringan daun teh di Kasindir, 1930

Sumber: kitlv.nl

Lahan yang cenderung datar dan komposisi tanah yang sangat cocok untuk perkebunan di Siantar-Simalungun adalah dengan komoditas Teh, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Sisal (Serat) maupun Coklat. Aneka komoditas ini menjadi unggulan Kota Siantar pada saat itu dan menjadi salah satu faktor Kota Pematangsiantar bertumbuh menjadi Kota Perkebunan (*plantation city*) dan menjadi bagian integral dari *Cultuurgebid van Sumatra Oostkust* (perkebunan Sumatra Timur). Salah satu komoditas unggulan tersebut adalah teh (*tea*) yang banyak dikembangkan oleh *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)* seperti di *Mardjandi Estate*, *Sidamanik Estate* dan *Kasindir Estate*. Perkebunan ini menghasilkan bubuk (serbuk) teh yang sangat baik dan diekspor ke Amsterdam guna di pasarkan di Eropa.



Kebun Karet milik HVA di Siantar Estate, 1920

Sumber: kitlv.nl

Pabrik pengolahan bubuk teh ini terdapat di Marjandi, Sidamanik, Bah Butong, Tobasari serta Kasindir. Namun saat ini, sebagian dari lokasi perkebunan ini telah di konversi ke Kelapa Sawit. Sejak Nasionalisasi 1958, HVA menjadi milik Indonesia dibawah perusahaan perkebunan negara yang disebut dengan PTPN-IV. Selain perkebunan teh, terdapat jenis perkebunan lain di Siantar yakni perkebunan Karet. Jenis perkebunan banyak di kembangkan di *Martoba Estate, Siantar Estate* terutama *HVA, Harison and Crosfield* (Londsum) maupun *Goodyear* ataupun *Brigestone*.

Perusahaan ini berasal dari mancanegara seperti Belanda, Inggris, Amerika dan Jepang. Hingga kini, beberapa perusahaan ini masih berdiri dan bertahan di Indonesia. Kecuali aset HVA karena milik Belanda, maka perusahaan yang bukan milik Belanda tidak ikut serta di nasionalisasi pada tahun 1958, di saat Presiden Soekarno memerintahkan pengambilalihan seluruh aset-aset pemerintah dan pengusaha kolonial Belanda guna memperbaiki perekonomian Indonesia. Keberadaan perkebunan milik asing ini menyumbang Siantar sebagai Kota Perkebunan yang terus melanjut hingga dewasa ini. Keberadaan itu ialah daya dukungnya sebagai pembayar pajak bagi Pemerintah setempat.

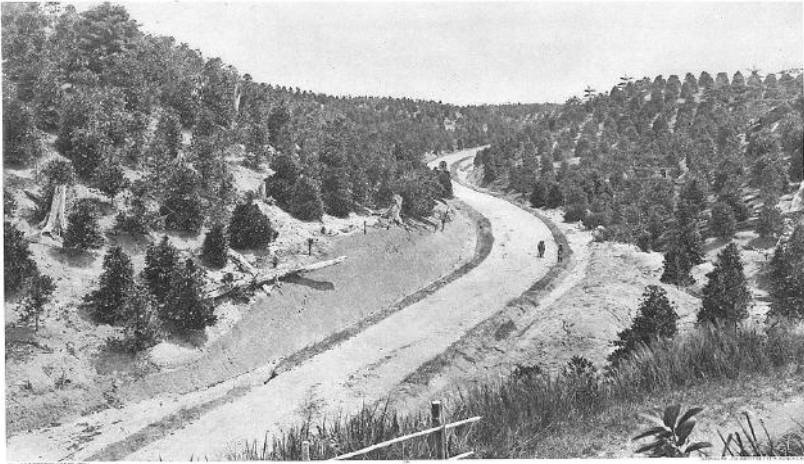


Perkebunan Sawit HVA di Bangun, Dolog Malela, 1930

Sumber: kitlv.nl

Foto di atas adalah perkebunan Kelapa Sawit milik *HVA* di daerah Bangun, berdekatan dengan Dolog Malela, Siantar. Kelapa sawit untuk kali pertama di kembangkan di Siantar oleh *HVA* setelah sebelumnya hanya dijadikan sebagai tanaman hias di rumah-rumah *tuan keboen (panters)* di Medan. Namun, penyelidikan terhadap minyak yang dihasilkan dari jenis kelapa ini membawa kesimpulan untuk dikembangkan secara massif. Karena itulah, akhirnya kelapa sawit dikembangkan secara massif terutama di Siantar-Simalungun dimana komposisi tanahnya sangat cocok untuk jenis budidaya ini. Komoditas inipun telah mendukung peneгуahan Siantar sebagai kota perkebunan atau *plantation city*.

Keberadaan perkebunan-perkebunan yang berada di sekitar Kota Pematangsiantar ini sangat cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata lewat Wisata Agro. Hal ini karena perkebunan yang menjadi komoditas unggulan Indonesia dewasa ini perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya guna memberikan pemahaman kuat bagi generasi muda.



Koffie Bangun *Bangun-Purba* *Koffie mangkat* *Koffie plantaten*

Perkebunan Kopi di Bangun Purba, 1900

Sumber: kitlv.nl

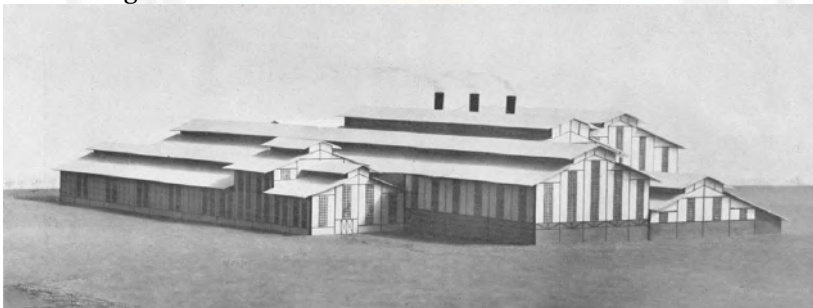
Bangunpurba saat ini berada di Deliserdang. Dahulu dikenal dengan *Serdang Hulu (Boven Serdang)*. Daerah ini adalah pemukiman orang Simalungun tetapi sejak tahun 1896 diambil oleh Kesultanan Serdang dan menjadi basis perkebunan kopi.



Perkebunan Sisal (*Agave*) di Dolog Ilir, 1910

Sumber: kitlv.nl

Pada uraian foto di laman kitlv disebut: *fabriek van vezelonderneming Dolog Ilir bij Pematangsiantar 1910*, atau Pabrik perusahaan perkebunan di Dolog Ilir dekat Pematangsiantar. Sisal menghasilkan serat sebagai bahan membuat benang dan menjadi bahan pembuatan pakaian. Demikian pula, sisal ini dipergunakan untuk membuat tali tambang karena dikenal lebih kuat. Sisal (*Agave*) dikembangkan di Simalungun terutama di kawasan Dolog Ilir yang dimiliki perusahaan perkebunan HVA dan menjadi salah satu komoditas perkebunan dari Simalungun. Namun, memasuki tahun 1930-an, perkebunan Sisal di Simalungun tidak lagi dikembangkan.



Pabrik Kelapa sawit Dolog Sinumbah, 1929

Sumber: kitlv.nl



Penanaman teh di Bah Birong Ulu, 1910

Sumber: kitlv.nl



Kelapa sawit muda di Bangun, Dolog Malela
Sumber: kitlv.nl



Perkebunan Kelapa Sawit di Balata, Simalungun 1936
Sumber: kitlv.nl



Pemetikan Teh di Nagahuta, 1938
Sumber: kitlv.nl

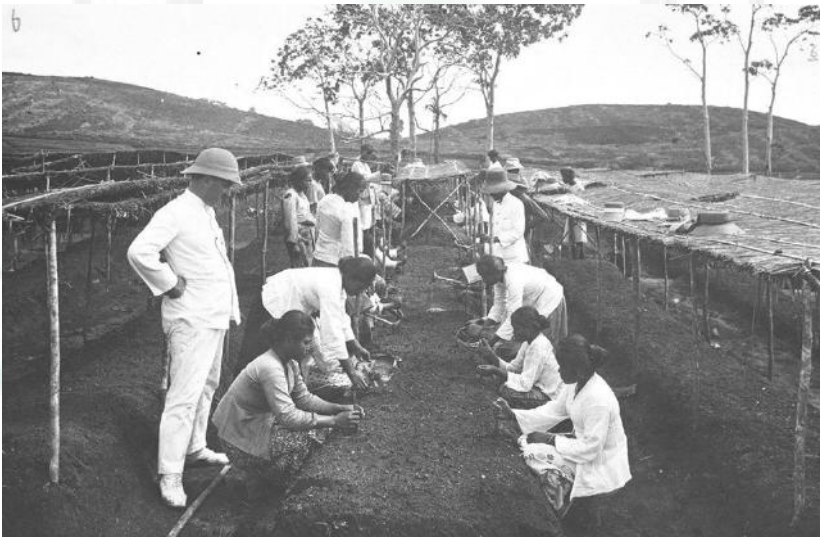


Pabrik Teh Nagahuta, 1925
Sumber: kitlv.nl



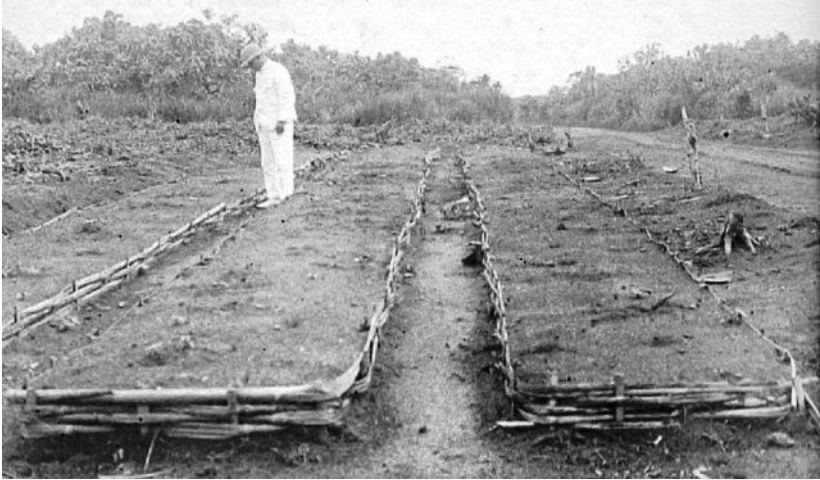
Pembangunan jalan di Bandar Dolog ke Parapat, 1937

Sumber: kitlv.nl



Pembibitan Sawit di Bah Birong Ulu, 1910

Sumber: kitlv.nl



Pembibitan Sawit milik Nijkerk, 1927

Sumber: kitlv.nl



Pembangunan Barak Kuli milik Nijkerk, 1927

Sumber: kitlv.nl



Pemetikan dauh teh di Nagahuta, 1915

Sumber: kitlv.nl



Pemilahan daun teh di Perkebunan Nagahuta, 1915

Sumber: kitlv.nl



Minyak Sawit (CPO) milik Nijkerk, 1927
Sumber: kitlv.nl



Pengeringan Teh di Kasindir, 1920
Sumber: kitlv.nl



Pengerjaan lahan perkebunan Teh di Bah Birong Ulu, 1910
Sumber: kitlv.nl



Pengerjaan lahan perkebunan Teh di Bah Birong Ulu, 1910
Sumber: kitlv.nl



Pengerjaan lahan perkebunan Teh di Bah Birong Ulu, 1910
Sumber: kitlv.nl



Pengepakan teh di Bah Birong Ulu, 1927
Sumber: kitlv.nl



Peremajaan Teh di Kasindir, 1925
Sumber: kitlv.nl



Perkebunan teh MARIHAT Estate, 1920
Sumber: kitlv.nl



Perkebunan Teh Mardjandi Estate, 1920

Sumber: kitlv.nl



Pemetikan Teh di Mardjandi Estate, 1929

Sumber: kitlv.nl



Roller Bateray Pabrik Teh Bah Butong, 1929

Sumber: kitlv.nl



Rumah Administrator (ADM) Bah Butong, 1938

Sumber: kitlv.nl



Rumah Asisten Kebun Sawit Nijkerk, 1927
Sumber: kitlv.nl



Rumah orang Eropa di Jalan Simbolon, 1923
Sumber: kitlv.nl



**Rumah Asisten Kebun *Liberta van de Rubber Cultuur*
Maatschappij Amsterdam, 1931**
Sumber: kitlv.nl



Rumahsakit HVA Balimbingan, 1936
Sumber: kitlv.nl



Barak Kuli di Bukit Maradja, 1912
Sumber: kitlv.nl



Barak Kuli Nijkerk di Kampung Kubuan, 1927
Sumber: kitlv.nl



Perkebunan teh sistem teras di Simalungun, 1920
Sumber: kitlv.nl



Irigasi di Dolog Marlawan, 1934
Sumber: kitlv.nl



Rumah G.L. Tichelman di Jalan Simbolon, 1935
Sumber: kitlv.nl



Stasiun Kereta Api DSM Dolog Malangir, Simalungun, 1925
Sumber: kitlv.nl



Irigasi di Bah Birong, Simalungun, 1934
Sumber: kitlv.nl



Terowongan Sibaganding, Simalungun, 1935
Sumber: kitlv.nl



Air Minum di Nagori Bosar, Simalungun, 1937
Sumber: kitlv.nl



Jembatan di Merek Raya, Simalungun, 1925
Sumber: kitlv.nl



Angkutan bus di Parapat, Simalungun, 1931

Sumber: kitlv.nl



Lori di Dolog Ilir, Simalungun, 1928

Sumber: kitlv.nl



Irigasi di Rawa Bening, Pardagangan, Simalungun, 1934
Sumber: kitlv.nl



Pembibitan Pinus di Bah (Aek) Nauli, Simalungun, 1934
Sumber: kitlv.nl



Pemilahan Kopi di Bangunpurba, 1905

Sumber: kitlv.nl

B. Perkembangan lewat Misi Zending

Peran penting *Misi Zending* terutama RMG (Protestan) sejak tahun 1903 dan Rome Khatolik sejak tahun 1932 di Simalungun berdampak pada: i) dikenalnya agama samawi menggantikan agama asli Simalungun yakni '*Habonaron*', ii) dikenalnya pendidikan modern bergaya barat lewat sekolah *zending*, iii) dikenalnya sistem kesehatan modern lewat kegiatan diakonia, iv) meningkatnya keterampilan hidup lewat pertanian, sanggar budaya dan lain-lain. Walaupun demikian, agama Islam sudah lebih dahulu berkembang terutama di wilayah Simalungun yang berbatasan dengan wilayah perairan Selat Malaka, karena di wilayah ini islam sudah berkembang. Daerah seperti Bandar misalnya, agama Islam sudah sangat merakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa, Sang Nauluh Damanik menerima agama Islam sejak tahun 1902. Walaupun ia telah menganut agama Islam, tetapi ia tetap memberikan izin bagi pendirian rumah ibadah berupa Gereja maupun sekolah yang dikelola gereja RMG Jerman maupun Yayasan Gereja Belanda. Bukan saja mengizinkan, tetapi juga menunjuk lokasi pendirian gereja, sekolah dan pemakaman bagi pemeluknya di sekitar Jalan Gereja Pematangsiantar. Demikian pula Sang Nauluh Damanik memberikan ijin pendirian rumah ibadah berupa Masjid di Kampung Timbang Galung, serta memberikan

lokasi pekuburan Muslim di Jalan Panei, Pematangsiantar. Hal lainnya adalah bahwa Sang Nauluh Damanik memberikan ijin pendirian pembangunan Klenteng atau vihara khususnya bagi orang Tionghoa di Jalan Panei, berdekatan dengan Kampung Pamatang di Siantar.



Ulama Islam di Bandar, Simalungun

Sumber: BRMG

Di wilayah Siantar-Simalungun, agama Islam pertama sekali masuk di bagian bawah Simalungun terutama daerah Bandar yang berbatasan langsung dengan masyarakat Melayu. Perkembangan Islam di Simalungun seperti di wilayah kerajaan Siantar dan Tanoh Djawa dimulai sejak akhir abad 19. Di Siantar, penyiari Islam yang utama adalah Syech Yusuf dan Muhammad Thaib yang berasal dari Siak, Riau. Demikian pula pada tahun 1919, seorang Simalungun bernama Basyir Saragih telah menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Di Siantar-Simalungun, agama Protestan disiarkan dan dikembangkan August Theis sejak tahun 1903. *Zending* ini tiba di Tigaras dan mendaki perbukitan hingga sampai di daerah Raya. Dari daerah inilah agama Kristen Protestan disiarkan bagi orang Siantar-Simalungun dan terus berkembang hingga saat ini (Dasuha dan Sinaga, 2003). Sementara itu, agama Katolik masuk ke Simalungun sejak tahun 1933 dari arah Siantar, lalu ke Haranggaol hingga ke Silimahuta. Di daerah ini, adapun penggiat-penggiat agama Katolik

adalah seperti Elpidius Van Duijnhoven yang dikenal dengan panggilan *Oppung Dolog* (Saragih, 2014).



GKPS 1903 Pematang Raya

Sumber: Dok. Penulis, 2018

Bangunan *RMG Kerk* atau *Gereja Rheinische Missiengesellschaft* kini dikenal dengan sebutan Gereja HKBP berlokasi di Jalan Gereja, Siantar Selatan. Lokasi pembangunan gereja ini adalah atas rekomendasi Sang Nauluh Damanik tahun 1904 sebelum ia ditangkap dan dimakzulkan sebagai penguasa lokal di Siantar. Gereja ini merupakan gereja pertama di Siantar pasca penyebaran injil dari Tarutung ke ‘Tanah Timur’ (*Timor landend*) terutama di Siantar. Di belakang gereja ini terdapat pemakaman Kristen yang ditetapkan pasca pembentukan *Gemeente* Kota Siantar tahun 1917. Salah satu penguasa lokal dari Kerajaan Raya, dimakamkan di lokasi pemakaman Kristen ini.

Sebagaimana di ketahui, di era pemerintahan *Gemeente* Siantar, ditetapkan lokasi pemakaman seperti Tionghoa di Jalan Panei, pemakaman Islam di Jalan Panei, dan pemakaman Kristen di Jalan Gereja. Sementara itu, pemakaman orang Eropa dilakukan di Jalan Asahan, yang kini dikenal dengan ‘*Taman Makam Pahlawan Nagur*’ Siantar. Di samping gereja ini, terdapat *RMG School* (Sekolah RMG) yang dikhususkan bagi anak-anak pribumi (*native*) sebagai cara pembangunan fisik anak-anak Misi RMG di era kolonialisme Belanda dan pekerjaan *zending* RMG.

Pada saat ini, lokasi bangunan berupa gereja dan sekolah serta pemakaman menjadi milik institusi HKBP terutama setelah pemisahan (*manjae*) antara institusi Gereja Kristen Protestan Simalungun dari HKBP tahun 1963. Sesudah itu, institusi GKPS membangun gerejanya sendiri yang terletak di Jalan Sudirman Pematangsiantar yang bersebelahan dengan Sungai (Bah) Bolon. Pendirian rumah ibadah ini menjadi tonggak kemandirian GKPS dari HKBP sekaligus menemukali identitas Simalungun yang berbeda dengan HKBP yakni orang Toba. Berdirinya institusi gereja yang bernama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) sejak tahun 1963 dari HKBP, berdampak pada pendirian rumah ibadah berupa GKPS di Jalan Sudirman Pematangsiantar ini. Pada awalnya, di lokasi gereja ini menjadi bagian integral sebagai Kantor Pusat GKPS sebelum pindah ke Jalan J. Wismar Saragih di Kota Pematangsiantar. Lokasi rumah ibadah berdampingan dengan Sungai (*bah*) Bolon yang membelah Kota Pematangsiantar. Rumah ibadah ini berdampingan pula dengan Museum Simalungun yang dibangun sejak tahun 1939 dan diresmikan pada tahun 1941.

Tidak jauh dari bangunan gereja ini adalah tempat berdirinya rumah ibadah bagi pemeluk agama islam yakni Masjid. Lokasinya berada di Timbanggalung, yakni pemukiman Islam terutama orang Mandailing di Kota Pematangsiantar. Kemajemukan agama di Siantar tampak pada hadirnya agama-agama besar di kota ini seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, maupun *Kong Hu Chu*. Salah satu agama dengan komunitas besar adalah Islam.



Ulama Islam di Bandar, Simalungun, 1934

Sumber: kitlv.nl.

Agama ini berkembang dan masuk ke Siantar sejak tahun 1902, yang ditandai penerimaan agama Islam oleh Sang Nauuluh Damanik. Untuk mendukung penyebaran agama Islam di Siantar, maka Sang Nauuluh Damanik mendukung dengan cara memberikan ijin lokasi pendirian rumah ibadah berupa mesjid di Timbang Galung, tepatnya Jalan Kartini Pematangsiantar. Kini, mesjid itu disebut dengan Masjid Agung Kota Pematangsiantar. Mesjid ini menjadi rumah ibadah kebanggaan warga Siantar khususnya bagi pemeluk agama Islam di Kota Pematangsiantar. Keberadaan mesjid di Kota Pematangsiantar ini menjadi penanda kebhinekaan agama di kota ini. Karena wajar apabila kota ini mendapat predikat 'Kota Tolerans' karena koeksistensi dan minusnya konflik horisontal.



Vihara Tionghoa di Jalan Panei, Siantar, 1923

Sumber: kitlv.nl

Eksistensi komunitas orang Tionghoa yang menganut agama Buddha di Kota Pematangsiantar tampak pada berdirinya vihara yang disebut *Monastery Avalokitesvara Buddhist* di Siantar. Vihara ini berdiri megah di Jalan Panei Kota Pematangsiantar. Sebuah patung perempuan yang disebut dengan *Dewi Kwan Im* berdiri megah dan menjadi patung tertinggi di Sumatera Utara. Pembangunan vihara ini percis berada di lokasi *Chinese Temple* sejak tahun 1920. Dewasa ini, vihara ini menjadi lokasi yang ramai

didatangi atau dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberadaan vihara Buddha ini di Kota Pematangsiantar, semakin menambah heterogenitas agama di Siantar. Eksistensi orang India yang beragama Hindu di Pematangsiantar di tandai oleh berdirinya rumah ibadah berupa Kuil Hindua yang disebut dengan *Shree Guru Nanak Devji Gurdaya*. Bangunan ini berlokasi di Jalan Thamrin No. 50 di Kota Pematangsiantar. Sama seperti orang China (Tionghoa) yang hadir di Siantar, maka orang India juga hadir di Siantar pada saat pengembangan dan perkembangan perkebunan milik kolonial berkembang pesat. Karena kebutuhan tenaga kerja yang cukup tinggi di perkebunan, maka sejumlah pengusaha berupaya mendatangkan karyawan yang disebut dengan *coelie contract* guna dipekerjakan di perkebunan.



Gereja Rome Katolik Siantar Jalan Sibolga

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Tersebut, pertama kali karyawan yang didatangkan ke Siantar adalah Orang Tionghoa, India dan Jawa pada permulaan tahun 1910 sejalan dengan pembukaan hutan-hutan di Martoba, Nagahuta, Kasindir, Dolog Ilir dan Balimbingan sebagai areal perkebunan. Jumlah mereka ini sangat tinggi sehingga menambah heterogenitas masyarakat termasuk agama di Siantar. Kehadiran Agama Hindu dari komunitas India di Siantar menambah khasanah keberagaman agama di Siantar.

Gereja Rome Katolik (RK) berdiri di Siantar sejak tahun 1920. Penyebaran agama Katolik ini sejalan dengan masuknya penganjur agama Katolik dari Sumatera Utara terus ke Siantar, Haranggaol dan Saribudolog. Di Siantar, bangunan gereja pertama yang dimiliki agama Katolik berlokasi di Jalan Sibolga, Pematangsiantar. Bangunan ini berlokasi dengan sekolah perguruan RK Cinta Rakyat. Selain itu, beberapa tempat yang dikelola Gereja Katolik adalah seperti tempat *Retreat Fransiskan* Nagahuta Siantar. Juga terdapat *Sekolah Frater* di Sinaksak. Juga rumah sakit yang dikelola Katolik seperti Rumah Sakit Harapan maupun Seminari di Jalan Lapangan Bola, Pematangsiantar. Sekolah lain yang dikelola Katolik adalah seperti Yayasan Perguruan Budi Mulia, Yayasan Asisi, Bintang Timur dan lain-lain.



GKPS Sudirman Pematangsiantar

Sumber: Dok. Penulis 2018



GKPS Sudirman Pematangsiantar, 1952

Sumber: Dasuha dan Sinaga (2003)



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB VI MASYARAKAT DAN ARTEFAK KULTURAL DI SIMALUNGUN

Bab ini diberi judul *masyarakat dan artefak kultural di Simalungun*. Secara khusus, bab ini akan menceritakan arsip foto-foto Simalungun pada tema masyarakat dan artefaktualnya. Adapun masyarakat adalah performa kulturalnya sedangkan artefak kultural adalah tinggalan bukti-bukti (*evidence*) kultural dan arkeologis yang ada dan dikenal pada masyarakat Simalungun.

Foto-foto tentang gambaran masyarakat dan aspek kultural yang disuguhkan seperti pada koleksi *KITLV* maupun koleksi *Leiden Universitet* lebih banyak pada aspek kebendaan (visual) atau kebudayaan materil. Koleksi-koleksi tersebut adalah seperti peragaan tarian, upacara kematian, alat musik, *laklak* (*pustaha* pada kulit kayu), permainan dan bela diri (*dihar*), bentuk dan bahan pembuatan rumah tradisi, rupa ataupun wajah, ornamentasi bangunan, arca atau patung batu dan lain-lain yang menunjuk pada kebudayaan kebendaan orang Simalungun. Foto-foto ini menggambarkan aktifitas masyarakat Simalungun yang belum berkembang yang hidup dengan kompleks kebudayaan tradisional. Mereka ini dilukiskan dengan beragam norma hidup yang bertentangan dengan keadaan sebagaimana di Eropa.

Dilihat dari performa kultural khususnya tarian (*tortor*) dan seni beladiri (*dihar*), jelas sekali arsip foto dimaksud menyebutkan tentang Simalungun. Beberapa koleksi performa kultural dimaksud adalah di daerah seperti Dolog Silou, Hutabayu (Tanoh Jawa), Pematangraya maupun di Pematangsiantar. Aktifitas tarian dan *dihar* dari segi analisis foto sangat jelas dihasilkan melalui kesengajaan (*by design*) sehingga tidak tampak alamiah (natural). Di Hutabayu (Tanoh Jawa) tahun 1936 misalnya, masyarakat yang menjadi pemain *dihar* (*pandihar*) mengenakan pakaian putih dengan penutup kepala berupa peci hitam. Mereka digambarkan bermain dihar diatas tikar pandan dan terdapat penonton. Situasi ini sangat jelas dipotret pada momen tertentu yang sengaja dipotret fotografer.

Demikian pula tarian (*tortor*) Dolog Silou tahun 1937 misalnya. *Tuan Anggi* (Raja Muda) diperlihatkan sedang menari, sedang raja bermain serunai. Tuan muda mengenakan pakaian (busana) lengkap Simalungun seperti *gotong*, *hiou*, tetapi tidak beralas kaki. Sang

Tuan Muda menari diatas tikar serta disaksikan oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Foto pada saat Tuan Muda ini sedang menari dipotret dari berbagai sudut fotografer. Demikian pula pada saat Raja Dolog Silou memainkan serunai dengan mengenakan busana setelan putih tetapi mengenakan peci hitam dan beralas kaki. Situasi foto seperti ini jelas menunjukkan *by design* yakni situasi yang sengaja di potret untuk menambah keunikan masyarakat.



Dihar (seni bela diri khas Simalungun) di Hutabayu, 1938

Sumber: kitlv.nl

Hal mana ingin ditunjukkan bahwa seorang pemimpin swapraja di Simalungun (tanah jajahan) sangat piawai menari dan mandihar ataupun memainkan alat musik. Keadaan seperti ini *memang* jamak bagi masyarakat Simalungun dimana seorang pemimpin (raja) memiliki keterampilan khusus termasuk menari dan memainkan musik. Hal ini termanifestasi bagi orang Simalungun, bahwa seorang Raja adalah *Toehan* yakni wakil tuhan di muka bumi, sehingga dipandang memiliki sejumlah pengetahuan khusus. Tetapi, sejumlah foto lain memperlihatkan bahwa seorang raja (pemimpin) di muka bumi dapat bersedih karena kehilangan anaknya seperti tercermin pada *Tortor Toping Huda-huda* (tari topeng dan kuda jingkrak) sebagaimana disebut Damanik (2017)⁶³. Namun bagi orang Eropa,

⁶³Lihat Erond L. Damanik. 2017. *Tortor: Gerak Ritmis, Ekspresi berpola dan Maknanya bagi orang Simalungun*. Medan: Simetri Institute.

keadaan seperti ini adalah unik karena yang mereka ketahui bahwa seorang pemimpin (raja) adalah sosok yang memiliki pengetahuan manajerial tinggi serta memiliki keterampilan berperang. Seorang raja dapat saja kehilangan segalanya termasuk harta benda ataupun anaknya sekalipun, tetapi keadaan itu dimaknai sebagai kekalahan strategi perang menghadapi musuh.



Tuan Anggi (raja muda) **Dolog Silou** sedang menari, 1938

Sumber: kitlv.nl

Pemahaman masyarakat Eropa yang individualis dan lebih mempertimbangkan kualitas hidup daripada kolejial kolektif tercermin pada pembahasan Weber (1992)⁶⁴ dalam tulisannya tentang *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Sebagaimana Weber (1992) menyebut bahwa perkembangan pesat Eropa Barat khususnya ialah karena dorongan Etika Protestan yang menuntut etika kerja berdasarkan protestantisme guna menghimpun modal. Etika Protestan itu menjadi pemicu perkembangan Eropa karena memang masyarakatnya yang individualis dan terdidik. Kenyataan itu berbeda dengan orang Indonesia yang lebih kolektif (kolejial)

⁶⁴Lihat Max Weber. 1992. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dimana kebenaran ilmiah sekalipun terkadang harus di kompromikan.

Masyarakat Simalungun yang digambarkan lewat foto-foto yang dipotret oleh fotografer ini lebih menunjukkan orisinalitas budaya lokal Simalungun. Orisinalitas menjadi sebuah keanehan ataupun kelucuan orang lokal yang distigmakan terbelakang dan statis sebagaimana terbentuk pada paradigma orang Eropa. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan situasi masyarakat Melayu yang tidak digunakan sebagai kuli kontrak perkebunan di Sumatera Timur, karena adanya asumsi orang Eropa bahwa masyarakat ini adalah pemalas (Pelzer, 1985)⁶⁵. Sama halnya dengan orang Toba yang berperkara (*perkaraziekte*), suka melawan dan suka berkonflik.



Tortor Toping Huda-huda (tari topeng) Simalungun, 1940

Sumber: kitlv.nl

Masyarakat Simalungun pada era kolonial digambarkan belum cukup terdidik untuk bekerja di perkebunan ataupun menjadi juru tulis (*klerek*) di kantor perkebunan. Kehidupan masyarakat Simalungun digambarkan masih mencirikan tradisionalisme, kelusuhan dan keterbelakangan karena tidak mengenal dunia pendidikan. Demikian juga masyarakatnya disebut kurang berkembang (tidak dinamis) karena faktor pendidikan yang sangat

⁶⁵Lihat Karl J. Pelzer. 1985. *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.

minim. Dengan alasan itu, orang Simalungun pun ‘terbuang’ dari perkebunan yang sedang digarap pemerintah kolonial. Lebih dari itu, badan *zending* RMG pun memiliki cara pandang yang sama. Badan ini menanggapi bahwa orang Simalungun belum cukup trampil mengasuh masyarakatnya pada perubahan sebagaimana terjadi di Eropa.



Upacara kematian (*marujunggoluh*) di Simalungun, 1940

Sumber: kitlv.nl

Jelas sekali bahwa paradigma seperti tidak hanya kurang tepat tetapi juga sangat tidak benar. Harus diakui bahwa, berbicara tentang pendidikan (ataupun kesehatan) di Simalungun barulah dikenal pada era kolonialisme dan *zending*. Sebelum itu, lembaga pendidikan dan kesehatan modern seperti di Eropa dipastikan belum pernah berdiri di Simalungun. Jadi, wajar saja kultur perkebunan sangat jauh dari orang Simalungun, atau kultur birokrasi dan organisasi modern seperti di Eropa sangat minim bagi orang Simalungun. Sebagaimana dicatat bahwa, orang Simalungun pertama kali mendapatkan pendidikan modern bergaya barat adalah Djason Saragih dan Djaulung Wismar Saragih. Keduanya menamatkan pendidikan dari Seminari Sipoholon dan Seminari Jakarta menjelang tahun 1930. Jadi, dibandingkan dengan orang Eropa ataupun Orang Toba yang sudah lebih dulu mendapatkan pendidikan modern, maka wajar saja jika Simalungun lebih

terbelakang dari mereka. Karena itu, persepsi negatif yang dialamatkan kepada orang Simalungun pada era kolonialisme dan *zending* adalah pernyataan yang dibuat-buat guna menghegemoni orang Simalungun.



Penari massal Simalungun, 1945

Menyambut kedatangan Ratu Juliana dan Pangeran Bernard di Pematangsiantar pada tahun 1945

Sumber: kitlv.nl

Selanjutnya, artefak kultural Simalungun yang digambarkan lewat arsip kolonial cenderung terfokus pada aspek kebendaan (materil) seperti batu, laklak, topeng maupun peralatan hidup lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa, penggunaan bahan-bahan dari batu, kulit kayu, dan logam merujuk pada peradaban manusia. Karena itu, penggunaan peralatan hidup seperti itu adalah bagian dari peradaban Simalungun yang harus diberi makna tersendiri. Penggunaan batu sebagai peralatan hidup maupun upacara pemujaan misalnya, merujuk pada kebudayaan mula-mula karena sumber batu adalah sumber tertua dan termudah diperoleh. Kemudian peradaban itu beralih ke kulit kayu dan daun (lontar) sehubungan dengan bertambahnya tingkat pengetahuan.

Kenyataan ini disebabkan oleh adanya keterampilan khusus untuk mengolah kulit kayu, daun ataupun bambu menjadi bagian peralatan hidup. Lain halnya tentang penggunaan bahan logam sebagai periode akhir prasejarah yakni merujuk pada makin

sempurnanya pengetahuan manusia. Bila merujuk pada foto-foto arsip kolonial, maka artefaktual kebudayaan Simalungun yang paling banyak difoto adalah patung batu (*arca*) dan *hiou* (kerajinan tenunan). Bahan berupa batu diolah menjadi pemujaang, lesung, peralatan hidup dan lain-lain yang menunjuk pada era prasejarah. Arca atau patung adalah bangunan yang terbuat dari batu berbentuk binatang atau manusia yang melambangkan nenek moyang dan menjadi pujaan. Peninggalan litikum ini banyak ditemukan di dataran tinggi seperti di Pasemah, Nias, Toraja dan lain-lain.



Gua Homin dan lukisan Enggang di Simalungun

Sumber: Voorhoeve, 1940

Di Simalungun, arca batu digunakan sebagai pemujaan leluhur, tempat menaruh jenazah ataupun penjaga kampung (*ulubalang*). *Ulubalang* adalah patung pelindung desa khususnya pada saat penduduk desa sedang meninggalkan desa. Dari segi sejarahnya, sebuah batu diukir menyerupai manusia dan kepada batu itu diisi roh (arwah) sehingga dipercaya memiliki energi. Batu yang sudah di

isi energi itu kemudian ditaruh di jalan masuk kampung untuk memberikan rasa keamanan. Konsep sebagai ulubalang ataupun pemujaan yang terbuat dari batu ini menjadi bagian ajaran yang disebut *Murti* pada agama Buddha mazhab Mahayana. Media arca batu pada pemujaan adalah sarana memfokuskan meditasi.

Tidak mengherankan misalnya, di Simalungun bangunan batu menjadi media pemujaan banyak ditemukan sebagaimana tersimpan pada arsip foto kolonial. Misalnya Batu Gajah yang terdapat di dekat Balata Simalungun, ataupun lukisan gajah di tepi sungai Bah Bolon di Pardagangan, ataupun ditemukannya *gua homin (rock chambers)* di beberapa tempat di Simalungun seperti di Bah Pasussang, Bah Gambir, bah Balutu, Halombingan dan lain-lain. Tentang keberadaan *Gua Homin (rock chambers)* di Simalungun ini telah ditulis Voorhoeve (1940)⁶⁶, Tichelman (1939)⁶⁷ maupun McKinnon (2011)⁶⁸. *Gua Homin* adalah wadah menyimpan tulang atau kerangka jenajah (*rotskamers* atau *rotsgraven*) pasca dimakamkan. Dalam masyarakat Simalungun, *homin* adalah manusia kerdil yang disebut dengan manusia bunian. Ia dapat meniru manusia dan bekerja seperti manusia.

Namun jejak kakinya berbeda dengan manusia. Jejak kaki manusia selalu mengarah ke depan, maka jejak kaki *homin* mengarah ke depan tetapi *homin* itu sedang bergerak ke belakang. Jadi, jejak kaki *homin* adalah kebalikan jejak kaki manusia. Manusia kerdil atau *homin* ini membentuk rumahnya di gua (*cave*) di tebing jurang sehingga tidak tampak oleh manusia. Dari asumsi seperti ini, maka disebut bahwa *homin* bertempat tinggal di gua yang disebut dengan *gua homin*. Namun anehnya, dipintu masuk menuju *gua-gua homin* tersebut ada kalanya terdapat lukisan seperti terdapat pada *gua umang* pada masyarakat Karo. Lukisan itu adalah hasil pahatan pada batu berbentuk manusia, burung atau perahu (*solu*) yang menggambarkan aktifitas hidup dari pemuja (masyarakatnya).

Foto-foto tentang masyarakat dan artefak aktual kebudayaan karena *by design* maupun *in situ* tetap saja menarik untuk dianalisis karena

⁶⁶Lihat P. Voorhoeve.1940. "Simaloengoen Steenplastiek en Rotskamers" in: *Cultureel Indië* 2, 88-92.

⁶⁷Lihat G.L. Tichelman. 1939. "Dr P. Voorhoeve over rotsgraven in Simaloengoen (S.O.K.)" in: *Cultureel Indië*, 1, 261-264.

⁶⁸Lihat Edward E. McKinnon. 2011. *Rock-cut chambers on the East Coast of Sumatra: A translation and review of G.L. Tichelman's Felsengänge an Sumatras Ostküste, with additions and amendments*. Singapore. NalandaSriwijaya Centre Working Paper Series No.5

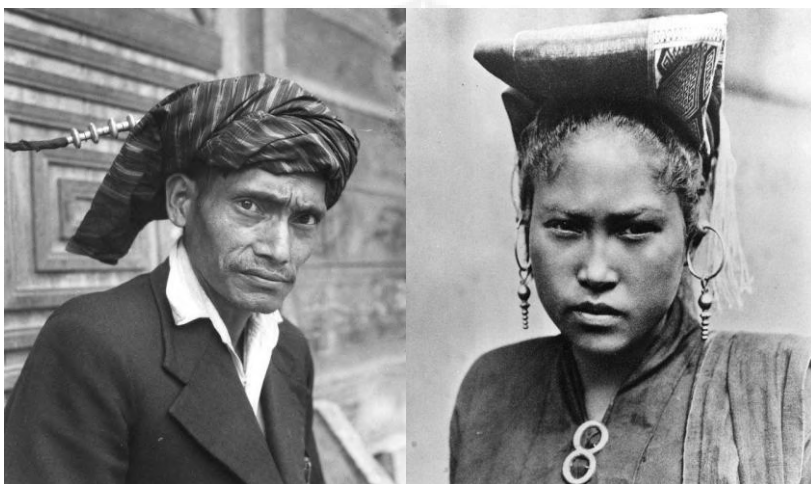
asumsi bahwa foto tersebut mewakili Simalungun pada periode awal hingga kolonialisme di Simalungun. Dengan begitu, barangkali dibutuhkan pencarian-pencarian sumber lain guna melengkapi narasi-narasi sejarah sosial Simalungun yang tidak hanya berorientasi pada arsip berupa foto ini. Hal lainnya ialah bahwa mengamati penjelasan (catatan) ringkas tentang masyarakat dan artefak kultural sebagaimana dicatat pada deksripsi foto, maka seringkali terdapat kesalahan tempat dan narasinya. Hal ini dipahami sebagai dampak kekurangtelitian juru foto menangkap arti objek fotonya. Kesalahan-kesalahan narasi foto pada arsip kolonial itu adalah hal lazim karena banyaknya koleksi foto yang bersumber dari berbagai fotografer pada waktu yang berbeda-beda.



Arca pemujaan (patung panumbahan) di Dolagsilou, 1930
Sumber: kitlv.nl

Sebagaimana disebut pada bab pertama naskah ini, bahwa penyusunan dan penulisan naskah ini ditengarai sebagai upaya inventarisasi terhadap seluruh foto-foto koleksi di Belanda dari era kolonialisme. Oleh karena itu, setidaknya pokok bahasan berupa: *masyarakat dan artefak kultural di Simalungun* berguna karena masyarakat dan artefak kultural yang dikumpulkan lewat jejak digital Belanda ini menjadi bukti-bukti (*evidence*) terhadap kebudayaan materil Simalungun. Bukti-bukti ini menjadi pelengkap setiap deskripsi tentang penjelasan kebudayaan Simalungun yang sudah bercampur dengan kebudayaan luar (terutama Eropa) di era kolonialisme. Berikut dibawah ini, foto-foto yang menggambarkan

elite, masyarakat dan artefaktual kebudayaan Simalungun ditampilkan pada uraian berikut di bawah ini.



Potret orang Simalungun, 1945

Sumber: kitlv.nl



***Martonun* (menenun) di Purbasaribu, Simalungun, 1900**

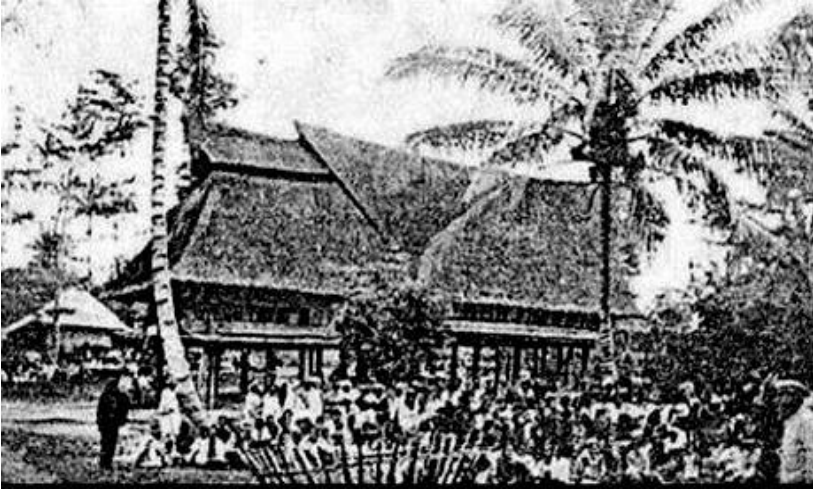
Sumber: kitlv.nl



Martonun (menenun) di Pematangpurba, 1917
Sumber: kitlv.nl



Menunggang Kerbau di Saribudolog, 1920
Sumber: kitlv.nl



Istana Raja Panei, Simalungun, 1920

Sumber: kitlv.nl



Borahim Purba (*gurubolon Raya*) dan Pustaha Laklak

Di depan Museum Simalungun, Siantar, 1939

Sumber: kitlv.nl



Tortor Manduda (menumbuk padi) di Siantar, 1945
Menyambut Kedatangan Pangeran Bernad dan
Ratu Juliana di Pematangsiantar
Sumber: kitlv.nl



Tortor Toping Huda-huda di Hutabayu, Simalungun, 1938
Sumber: kitlv.nl



Tortor Sombah (tari Sembah) di Sipolha, 1938
Sumber: kitlv.nl



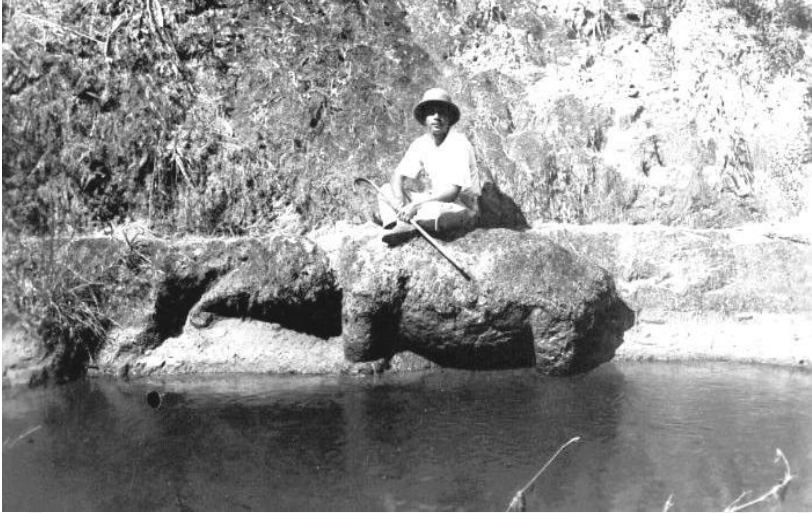
***Ulubalang* ditemukan di Girsangsipanganbolon, 1918**

Sumber: kitlv.nl



***Pattangan Bandar Hanopan* di Bandar, Simalungun, 1945**

Sumber: kitlv.nl



Pahatan batu berornamen gajah di Simalungun, 1938

Sumber: kitlv.nl



Sarkofag di Mariah Panei (kiri) di Dologsilou (kanan), 1938

Sumber: kitlv.nl



Arca ulubalang di Siantar, Simalungun 1938
Sumber: kitlv.nl



Arca batu pemujaan di Dolgsilou, Simalungun, 1938
Sumber: kitlv.nl



Sarkofak dan batu relief di Raya Kahean, 1935

Sumber: kitlv.nl



Pustaka pada kulit bambu (kiri)

Relief manusia di Rumah Bolon Pematangpurba, Simalungun

Sumber: Leiden University dan kitlv.nl



Toping (topeng) dari kebudayaan Simalungun, 1938

Sumber: Leiden University

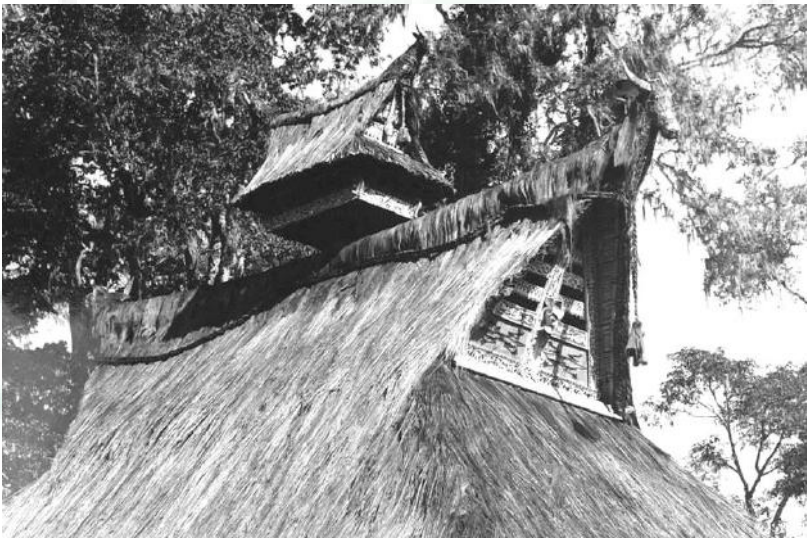


Ornamen kadal di batu, Padangbujur, Simalungun, 1935

Sumber: kitlv.nl



Bodil Pamuras di Dolongsilou, Simalungun, 1925
Sumber: Leiden University



Kepala kerbau pada rumah bolon Pematangpurba
Menandai kehormatan dan wibawa pemilik rumah.
Sumber: kitlv.nl



Padung ni onggang (patuk enggang) **di Simalungun, 1940**
Menandai perkabungan (dukacita) bagi orang Simalungun
Sumber: kitlv.nl



Dihar (seni bela diri khas Simalungun) **di Hutabayu, 1928**
Sumber: kitlv.nl



Putra dan putri Simalungun di Rumahbolon, 1971

Sumber: kitlv.nl

Foto ini ditemukan di laman (*website*) *kitlv* secara *online*. Foto ini memperlihatkan seorang dara (gadis) dan laki-laki Simalungun sedang asik bermain di kompleks rumah bolon Pematangpurba. Dari pose yang terlihat, jelas sekali anak-anak ini sangat tahu ketika akan difoto. Tampak wajah yang menghadap ke kamera juru foto menudukung pernyataan ini. Sedangkan anak laki-laki jelas sama sekali tidak mengetahui terhadap adanya pemotretan ini.



Raja Dolog Silau sedang meniup Serunai, 1937
Serunai adalah alat musik tiup khas Simalungun yang terbuat dari bambu dan diberi lubang untuk menghasilkan nada-nada merdu.

Sumber: kitlv.nl



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB VII TOKOH YANG BERKONTRIBUSI BAGI SIMALUNGUN

Secara khusus bab ini menyebutkan beberapa tokoh-tokoh orang Simalungun dan Barat yang berkontribusi positif bagi kemajuan orang Simalungun. Bab ini secara khusus membicarakan sejarah orang-orang yang mendedikasikan diri bagi kemajuan Simalungun. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang secara total mendedikasikan dirinya, pekerjaannya dan pemikirannya bagi kemajuan sosial, fisik, dan kultural orang Simalungun. Kemajuan dimaksud dapat saja menyoal pemerintahan, agama, militer dan lain-lain yang semuanya dapat dimaknai sebagai prestasi dan prestise menurut orang Simalungun.

Adapun tokoh-tokoh yang disebutkan dan dideskripsikan pada naskah ini berasal dari periode kolonialisme hingga tahun 1965. Tokoh-tokoh Simalungun setelah periode itu tidak dimasukkan dalam naskah ini karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Demikian pula saya tidak memasukkan setiap '*nama-nama besar*' dari orang Simalungun. Hal ini disebabkan oleh kealpaan dan keterbatasan sumber yang menyebutkan prestasi dan prestise dari tokoh di maksud. Ataupun karena '*orang-orang besar*' dimaksud bukan berasal dari periode sebelum tahun 1965. Gambar-gambar yang di insert pada naskah ini berasal dari berbagai sumber seperti internet dan referensi yang membutuhkan scan ulang.

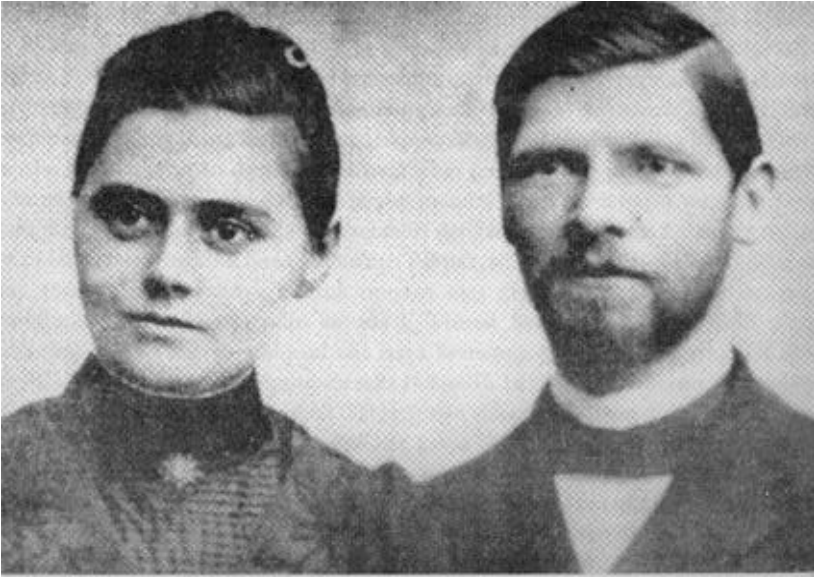
Tentulah pekerjaan untuk *browsing* internet atau juga membolak balik puluhan referensi adalah pekerjaan menyita waktu. Karena itu, wajar saja jika pada naskah subbab ini terdapat kekurangan tertentu seperti masa kecil tokoh, aktifitas dan pergerakan maupun masa akhir hidup dari tokoh dimaksud. Dengan semua keterbatasan itu, naskah ini menjadi salah satu cara mendokumentasikan tokoh-tokoh yang dikompilasi sebagai cara mewariskan nilai-nilai ketokohan mereka kepada generasi penerus Simalungun. Sebagaimana diketahui, sejarah orang-orang besar adalah sejarah sosial etnik. Karena itu, semakin banyak anggota masyarakat Simalungun yang menorehkan prestasi luar biasa, maka mereka ini patut dimaknai sebagai sejarah sosial etnik memajukan bangsanya. Hanya saja, patut diketahui bahwa tidak semuanya sejarah orang-orang besar itu berkontribusi positif bagi etniknya karena ada saja tokoh yang sedikit '*melenceng*' dari hakikat hidup masyarakat etniknya. Namun

demikian, sikap melenceng itu patut pula dipelajari sehingga tidak terjadi pengulangan yang berakibat fatal bagi etniknya. Selanjutnya, sejarah orang-orang besar yang berkontribusi bagi etniknya adalah cambuk bagi generasi penerus guna membangun masyarakat (etniknya).

Dari beberapa tokoh yang dinarasikan pada naskah ini terdapat beberapa kesimpulan deskriptif yang dapat dipetik bagi orang Simalungun itu sendiri: i) dikenalnya tokoh-tokoh yang berkontribusi bagi orang Simalungun karena dedikasi tentang pemikiran dan kinerjanya bagi kemajuan orang Simalungun itu sendiri, ii) tokoh-tokoh yang diikuti serta dinarasikan pada naskah ini menjadi inspirasi bagi orang Simalungun secara umum untuk meraih prestasi yang berkontribusi bagi kemajuan etniknya, iii) untuk mengenali strategi, cara dan metode memperoleh keberhasilan atau kesuksesan sebagai cara mereduksi kemiskinan guna meraih dan mengisi pembangunan fisik dan phisikis bagi orang Simalungun.

Urgensi pendeskripsian tokoh-tokoh yang dicantumkan pada naskah ini adalah bagaimana orang Simalungun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan sosial, ekonomi dan kultural Simalungun. Mereka yang dianggap memiliki kontribusi positif ini penting dikemukakan sehingga menjadi pelajaran penting bagi setiap orang Simalungun dalam upaya pembangunan masyarakat dan kebudayaannya. Hal ini menjadi mutlak mengingat setiap kontribusi itu sangat bermakna bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat Simalungun, baik di wilayah administratif dan kultural ataupun wilayah lain dimanapun orang Simalungun berada.

Karena itu, tidaklah berlebihan apabila tokoh dan sosok yakni 'orang-orang besar' dimaksud dipelajari sebagai cara membangun diri sendiri dan kemudian didedikasikan bagi kemajuan masyarakat (etniknya). Harus dipahami bahwa, sekecil apapun itu kontribusi bagi masyarakat adalah sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat itu. Disanalah letaknya urgensi tokoh dan sosok yang dideskripsikan pada naskah ini.



August Theis dan istri, Henriette Banner

Sumber: Sinaga, 2004⁶⁹

Adalah penyebar Agama Kristen Protestan di Simalungun. Penyebaran agama Kristen di Simalungun dilakukan atas rekomendasi Nommensen dari pearaja ke Wupertal, Jerman. Pusat *Rheinische Missionsgesellschaft (RMG)* di Jerman mengutus *zendeling* August Theis guna menyebarkan Injil di Simalungun. August Theis lahir pada 16 Februari 1874 di Haiger, Barmen Jerman. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Meninggal pada tahun 1968. August Theis mengikuti pendidikan di Seminari Zending Barmen. Pada umur 21 tahun ia dipanggil oleh direktur *Rheinische Missionsgesellschaft (RMG)* dan mengikuti belajar kependetaan selama 7 tahun.

Pada tanggal 6 Agustus 1902 ditahbiskan menjadi pendeta. Kemudian pada 23 Oktober 1902, RMG mengutus August Theis ke Indonesia melalui Belanda seterusnya ke Padang ke Sigumpar dan seterusnya ke Simalungun sejak 2 September 1903. Mendampingi August Theis maka pada 3 Maret 1903 turut diutus seperti Henry

⁶⁹Lihat Martin Lukito Sinaga. 2004. *Identitas Poskolonial Gereja Suku dalam masyarakat sipil: Studi tentang Jaulung Wismar Saragih dan Komunitas Kristen Simalungun*. Yogyakarta: LKiS.

Guillaume, G.K.Simon dan Meisel ke Simalungun. Pada 2 September 1903, August Theis mendarat di Raya setelah dari Purba dan Haranggaol. Di Raya, setelah mendapat izin dari Raja Raya maka didirikan Pos Penginjilan. Di wilayah inilah akhirnya August Theis bermukim dan Raya menjadi sentra penyebaran Injil di Simalungun. Setelah bermukim di Raya, August Theis mendirikan sekolah zending. Sekolah sejenis turut dibuka di Raya Usang, Buluraya, Sipoldas dan Raya Tongah. Dari seluruh sekolah ini, empat tahun kemudian diluluskan 183 murid dan diantaranya hanya 19 orang yang sudah memeluk agama Protestan.



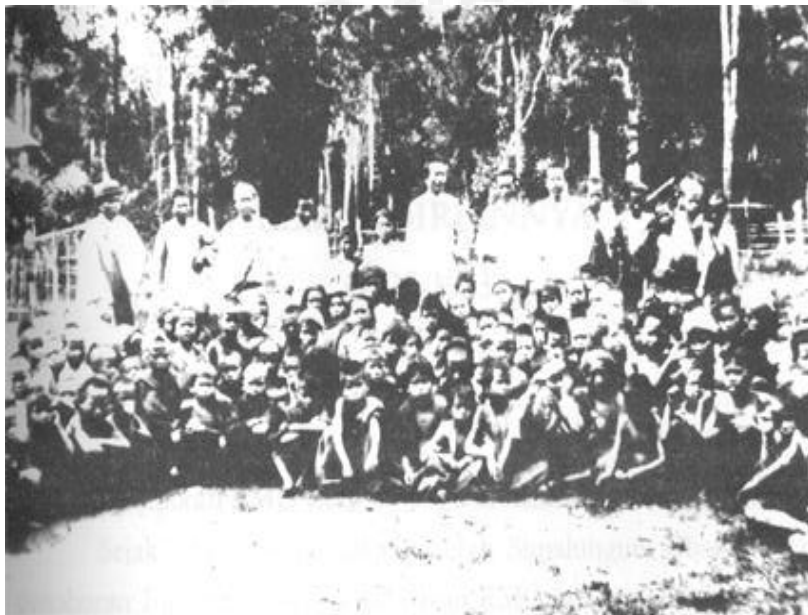
Keluarga August Theis di Pematangraya

Sumber: Dasuha dan Sinaga, 2003

Pembaptisan pertama di Simalungun baru dilaksanakan tanggal 26 Desember 1909 seperti Musa Damanik, Marianna Saragih, Sanna Damanik, Marinus Damanik, Hulda Damanik, Nonna Damanik, Petrus Damanik, Salomo Sinaga, Abina Saragih, Hormainim Sinaga, Marthe Sinaga, Lamina Sinaga, Andreas Sinaga, dan lain-lain.

Mertua August Theis meninggal pada 1919 dan pada tahun itu, dua putrinya dikirim ke Belanda untuk bersekolah. Pasca cuti ke Belanda pada tahun 1921, August Theis di tempatkan di Dolog Sanggul dan kemudian di Medan dan akhirnya pulang ke Eropa.

August Theis meninggal pada tahun 1968. August Theis menikah dengan Henriette Bannier, yang meninggal dunia pada 12 Juni 1909, sembilan hari setelah melahirkan anaknya yang keempat. Ia dimakamkan di Pematang Raya. Empat orang anaknya adalah Ernst, Paul, Johanna, dan Maria.



Murid Sekolah *Zending* RMG di Pematangraya, 1925

Sumber: Dasuha dan Sinaga, 2003

Perkembangan Protestan di Simalungun tidak hanya terlihat dari berdirinya institusi bernama *Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)* yang bertugas untuk 'memuliakan manusia' lewat agama Protestan, tetapi juga pengembangan manusia Simalungun lewat pendidikan dan kesehatan. Lewat badan pendidikan protestan, beberapa orang Simalungun telah sampai pada pendidikan tertinggi di jaman kolonialisme seperti Djaulung Wismar Saragih, Andaraya Wilmar Saragih, Djason Saragih, Lesman Purba, Jenus Siboro dan lain-lain. Mereka ini menjadi motivator sekaligus motor penggerak perubahan sosial di Simalungun melalui organisasi (*kongsi Laita dan Commite na ra Marpodah*) maupun surat kabar (*Sinalsal*) termasuk pioner pemandiran eksklusif HKBPS menjadi GKPS.



Perjumpaan orang Simalungun dengan alat musik Eropa

Sumber: Dasuha dan Sinaga, 2003

Hal lainnya adalah perkembangan aspek kultural yakni kesucian hidup dengan mengabaikan *'hasipalabeguon'* (penyembahan berhala) sebagai bagian dari animisme, dinamisme dan lain-lain menuju pada satu kepercayaan yang monotheis. Sejak perjumpaan orang Simalungun dengan agama Kristen Protestan ini, orang Simalungun mulai menapak kebaruaran hidup sebagaimana ditawarkan *zendeling*. Lewat pendidikan akhirnya orang Simalungun mampu bersaing dan mengisi jabatan-jabatan publik ataupun pekerjaan yang layak, lewat kesehatan akhirnya orang Simalungun mengetahui tentang 'kebersihan' jiwa dan rohani dan fisik yang sangat penting membangun manusia Simalungun seutuhnya.

Demikian pula lewat seni, orang Simalungun tidak lagi mengandalkan ansabel musik tradisional sebagai alat musiknya, tetapi juga sudah mengenal gitar, biola, organ, trumpet dan lain-lain. Karena itu, salah satu dampak positif pengenalan orang Simalungun dengan zending Jerman ini dalam kebudayaan Simalungun adalah dikenalnya alat musik yang lebih modern. Itulah sebabnya, seorang komponis Simalungun seperti Taralamsyah Saragih mampu menyusun dan menciptakan lagu dan musik Simalungun yang sangat dikenal dan populer dewasa ini. Sebut saja seperti *Deideng* dan *Sitalasari* yang melegenda.



Anggarahim D Jason Saragih dan Istri, Banim Damanik

Sumber: <http://www.25tahungkpsdepok>

Adalah guru pertama orang Simalungun. Ia adalah *Sang Pengentas dan Pioner Pendidikan* bagi Orang Simalungun. Lahir di desa Nagakasiangan Tebing Tinggi tahun 1883. Merupakan anak ke delapan dari sepuluh bersaudara di keluarga Balim Saragih dan Orow Purba. Pada Januari 1904 bersama abangnya Djarap Saragih pindah ke Raya. Pada Mei 1907 diangkat menjadi mandor (*mandur*) sewaktu Hapoltakan menjadi Raja Raya. Kemudian, Juni 1909 diangkat menjadi *Mandor Landschap*. Anggarahim di Baptis dengan nama D Jason Saragih pada 11 September 1910.

Sepanjang yang diketahui, Aanggarahim atau D Jason Saragih adalah orang pertama dari Simalungun yang mendapat kesempatan sekolah modern bergaya Barat. Demikian pula D Jason Saragih dapat disebut sebagai guru (pengajar) pertama orang Simalungun yang menamatkan pendidikan dari sekolah guru.

D Jason Saragih dan Djaulung Wismar Saragih sekolah di *Zending School*, Sipoholon tahun 1910. Sejak 1 Agustus 1911, D Jason Saragih sekolah di Seminari Depok dan lulus pada 15 Agustus 1915 dengan gelar diploma. D Jason Saragih berangkat dari Raya ke Depok pada 9 Juli 1911. Kembali ke Raya dan menjadi guru sejak 15 Oktober 1915 *Zending Volkschool* (Sekolah Pribumi Zending) atau lebih dikenal Sekolah Rakyat. Pada tahun 1916 D Jason Saragih menikah dengan Banim Maria Damanik dan dikaruniai 10 anak.

Dari sekolah *Zending Volksschool* di Pematang Raya, D Jason Saragih pindah menjadi Kepala Sekolah di *Zending Volksschool* Raya Tengah. Kemudian, bersama-sama 14 orang tokoh Simalungun pada 3 September 1928 mendirikan institusi bernama: *Komite Na Ra Marpodah* yang bertujuan guna melestarikan dan memberdayakan bahasa Simalungun. Duduk sebagai ketua adalah Djaulung Wismar Saragih dan D Jason Saragih sebagai *Voorzitter Ihutan*. Institusi ini menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah seperti: *Podah Pasal Marhorja*, *Panggomgomion (Pemerintahan)*, *Tolu Saodoran*, *Rudang Ragi-ragian* dan lain-lain.

Selanjutnya, tahun 1929, D Jason Saragih dipercaya sebagai Kepala Sekolah *Zending Vervolgschool* (bersubsidi) yang baru dibuka sebagai lanjutan sekolah *Volksschool*. Sekolah *Vervolgschool* ini adalah pertama di Raya setelah di Pamatangsiantar maupun Saribudolok. Pada tahun 1950 bersama Tokoh Damanik (Asisten Wedana), membangun di Sondi Raya dan Kampung Jawa. Selanjutnya, pada tahun 1951 mendirikan dan menjadi Kepala Sekolah di *Sekolah Guru Cepat* di Pematang Raya. Seluruh hidupnya didedikasikan bagi pendidikan dan utamanya terhadap pendidikan bagi Orang Simalungun. Pengabdian terhadap pendidikan itu berlangsung selama 43 tahun dan pensiun pada 1 Januari 1958. Pada hari Sabtu 30 Maret 1963, pada usia 80 tahun meninggal karena kesehatan. D Jason Saragih dimakamkan di Pematang Raya pada 2 April 1963. D Jason Saragih adalah '*Sang Pengentas*' sekaligus *Pioner Pendidikan* bagi Orang Simalungun.

Lewat pengabdian ini, tidak salah apabila D Jason Saragih diabadikan sebagai pioner pendidikan modern di Simalungun. Ia adalah putra Simalungun mula-mula yang menaruh keprihatian tentang bangsa terjajah yakni Simalungun. Karena itu, meskipun mengetahui ketidakmampuannya sendiri guna mengentaskan Simalungun yang kebanyakan buta huruf latin waktu itu, tetapi kiprah dan kinerja D Jason Saragih patut dihargai. Karena itu, tidak salah pula jika badan pendidikan GKPS misalnya, mengabadikan nama D Jason Saragih sebagai salah satu nama sekolahnya. Juga mengabadikan nama itu menjadi salah satu nama jalan.



Djaulung Wismar Saragih

Sumber: Sinaga, 2004

Adalah Pendeta (Rohaniawan Kristen) Pertama Orang Simalungun. Lahir pada tahun 1888 di Sinondang. Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara di keluarga Djalum Saragih dan Ronggainim Purba. Ayahnya adalah *Abdi Dalem* Kerajaan Raya pada masa Rondahaim Saragih (1828-1891) maupun Sumayan Saragih (1857-1932). Pada usia 12 tahun sudah memahami Aksara

Simalungun, *Surat Sapuluhsiah* (Aksara 19) yang diperoleh dari ayahnya. Pada tahun 1905 pindah ke Raya Dolog dan pindah lagi ke Parsimagotan.

Sejak di Parsimagotan, ia diasuh Pamannya (*tulang*) sepeninggal ayahnya 24 Oktober 1904⁷⁰. Menamatkan pendidikan di Sekolah Zending Pamatang Raya. Setelah tamat, kemudian melanjutkan pendidikan ke Narumonda, Tapanuli Utara. Pada 11 September 1910, Djaulung di baptis dengan nama Wismar Saragih. Kemudian, sejak bulan Oktober 1910 ikut testing di Narumonda tetapi gugur (kalah).



Comite Na Ra Marpodah dan Tichelman di Raya, 1937

Sumber: kitlv.nl

Kemudian pada tahun 1911, ikut testing di *Zending Kweekschool Narumonda* dan ia dinyatakan menang. Sejak 1911 hingga 1915 mengikuti proses belajar hingga tamat pada 18 Oktober 1915. Pasca tamat, Djaulung Wismar Saragih dipekerjakan sebagai Guru di Sekolah Zending Raya. Pada 3 September 1928 bersama dengan Djason Saragih dan 14 tokoh Simalungun mendirikan organisasi bernama *Komite Na Ra Marpodah* yang bertujuan guna melestarikan dan memberdayakan bahasa Simalungun. Duduk sebagai ketua adalah Djaulung Wismar Saragih dan Djason Saragih

⁷⁰Lihat Jan Jahaman Damanik. 1995. *Tunggul yang Bertunas*. Thesis Magister Theologia STT HKBP. Pematangsiantar.

sebagai *Voorzitter Ihutan*. Institusi ini menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah seperti: *Podah Pasal Marhorja, Panggomgomion (Pemerintahan), Tolu Saodoran, Rudang Ragi-ragian* dan lain-lain.

Di samping menjadi guru, Djaulung Wismar Saragih juga sekaligus sebagai *Pangulu Balei* (Sekretaris raja di Kerajaan Raya). Sejak Januari 1927, Djaulung Wismar Saragih melanjutkan sekolah ke Seminari Sipoholon. Pendidikan itu dijalani selama tiga tahun. Pada 15 Desember 1929, Djaulung Wismar Saragih ditabalkan sebagai pendeta oleh Warneck yang saat itu menjabat sebagai Eporus HKBP.

Adapun karya-karya dan tentang Djaulung Wismar Saragih selama mendedikasikan diri bagi pendidikan dan *zending* di Simalungun adalah sebagai berikut: *Tadah ni tondujta: in ma hata ni Naibata rupeita ari-ari*. (Tandjung Pengharapan, 1967); *Memorial peringatan pendeta J. Wismar Saragih: Marsinalsal*, (BPK Gunung Mulia, 1977); *Ambilan na madear pasai Toehan Jesoes Kristoes: songon sinoeratkon ni Si Loekas*; Loopbaan J. Wismar Saragih (British and Foreign Bible Society, 1939); *Portama i tongah djaboe*, (Pan Djaporman, 1942); *Pasal panggomgomion* (Comite "Na Ra Marpodah", 1929); *Barita ni toean Rondahaim na ginoran ni halak toean raja na Mabadjan*; *Siluah hun pulou Djawa* (Adventus, 1950); *Roehoet manoeratkon hata Batak Simaloengoen, marhiteihon soerat Boelanda* (Issue 14246); *Buei ambilan na binuat humbani buku na pansing padan na basai*, (Lembaga Alkitab Indonesia, 1957); *Partingkiean ni hata Simaloengoen: Simaloengoen Bataks verklarend woordenboek* (Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen, 1938); *Padan Na Baru*, bersama Petrus Purba dan LAI, (LAI, 1978); *Pardiateihon ma, ise do ia: Goluh pakon pangajarion ni Jesus*, bersama Petrus Purba dan LAI (LAI, 1976); dan *Ambilan na madear mangihutkon si Johannes: indjil Johannes*, bersama Petrus Purba dan LAI (LAI, 1971) dan lain-lain.

Djaulung Wismar Saragih memiliki peranan penting guna penyebaran agama Kristen Protestan di Simalungun. Pada 27 Oktober 1937 melayangkan surat protes kepada penginjil H. Volmer di Saribudolog. Surat itu memprotes perubahan nama Distrik Simalungun-Pesisir Timur (*Simalungun-Oostkust*) yang digabung menjadi HKBP Distrik Sumatera Timur, Aceh dan Dairi. Pengesahan seperti itu dilakukan pada tata gereja HKBP tahun 1940. Protes itu dilakukan karena adanya kekhawatiran akan hilangnya identitas Simalungun di HKBP.

Pada Sinode HKBP tanggal 10-11 Juli 1940 di Pearaja protes Djaulung Wismar Saragih turut dibicarakan. Pasca Sinode, dilakukan

pembicaraan maraton di Raya, Saribudolog dan Nagoridolog pada 26 September 1940. Hasilnya adalah berdirinya institusi bernama HKBPS (Distrik HKBP khusus di Simalungun)⁷¹. Pada 5 Oktober 1952, Djaulung Wismar Saragih pada pertemuan di HKBPS Distrik Simalungun membicarakan pemisahan Simalungun dari HKBP. Puncaknya ialah munculnya gagasan agar Simalungun menjadi institusi tersendiri yang lepas dari HKBP. Pada waktu itu, Djaulung Wismar saragih (1953) menduduki jabatan sebagai Wakil Ephorus HKBP.

Dapat dikatakan bahwa Djaulung Wismar Saragih menjadi Ephorus di Distrik Simalungun. Menurut Sinaga (2004), HKBPS merupakan rintisan menuju kemandirian penuh jemaat-jemaat di Simalungun di dalam Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang terjadi pada tahun 1963 dan Djaulung Wismar Saragih mendedikasikan diri sepenuhnya bagi kemajuan Simalungun lewat pendidikan dan institusi gerejawi. Ia meninggal pada 7 Maret 1968. Sebagaimana diketahui, hingga tahun 1950, terdapat 5 orang pendeta (rohaniawan Kristen) Simalungun yang lulus dari Seminari Sipoholon Tapanuli Utara. Mereka itu adalah Djaulung Wismar Saragih, A. Wilmar Saragih, Kerpianus Purba, Jenus Purba Siboro dan Abner Hendrik Purba Girsang. Nama yang disebut terakhir mengabdikan sebagai pendeta tentara di Bandung dan meninggal pada 1978.

Selanjutnya, tahun 1952 lewat sekolah pendeta di Raya dengan pendidikan selama 2 tahun tamat 7 orang pendeta seperti Joter Damanik, J. Petrus Purba, Bonarsius Saragih, Hiskia P. Tondang, Willem Saragih, dan lain-lain. Sedangkan lewat sekolah pendeta (STT) HKBP Pematangsiantar yang mulai berdiri sejak tahun 1952 di lokasi Rumah Sakit *Mardjandi Estate*, tamat pendeta Simalungun. Demikian pula dari STT Jakarta, STT Dutawacana Yogyakarta dan lain-lain. Tersebut beberapa nama adalah seperti Urahman Purba, Lesman Purba, U.H Sumbayak, Minaria Saragih, Armencius Munthe dan lain-lain.

⁷¹Lihat Paul Pedersen. 1975. *Darah Batak dan Jiwa Protestan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.



Andaraya Wilmar Saragih (paling kiri) di Jerman, 1960

Sumber: Damanik dan Sinaga, 2013

Menurut sumber Damanik dan Sinaga (2013)⁷², nama kecilnya adalah Andaraya Saragih. Merupakan anak ketiga dan enam bersaudara. Dilahirkan pada 4 Juli 1916 di desa Dolog Maraja, sebuah kampung di kaki Bukit Simarjarunjung, di dekat Tigarunggu, Kecamatan Purba, Simalungun. Ayahnya adalah Jatinggi Saragih adalah seorang petani dan tukang bangunan. Ibunya adalah Dorma Purba Pakpak seorang keturunan *Pangulu* (Kepala Dusun) di desa Dolog Maraja.

Pada tahun 1923, Andaraya Saragih masuk pendidikan *Volkschool* atau *Sekolah Rakyat* di Purba Tengah dan lulus tahun 1926. Kemudian, pasca tamat dari sekolah *Volkschool*, Andaraya Saragih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yakni *Vervolgschool* pada tahun 1927. Pada waktu menempuh pendidikan inilah, Andaraya Saragih dibabtis dengan nama 'Wilmar' sehingga namanya lengkap menjadi Andaraya Wilmar Saragih. Pada tahun 1929, Andaraya Wilmar Saragih lulus sekolah *Vervolgschool*.

Pada tahun 1930-1931, melanjutkan pendidikan ke sekolah pemerintah kolonial Belanda yakni *Normalleergang* yakni

⁷²Lihat Jan Jahaman Damanik dan Salmon Sinaga. 2013. *Parmahan Ulang Gabe Iparmahani: Mengenang dan Belajar dari Pelayanan Pdt. A. Wilmar Saragih, 1916-1962*. Medan.

pendidikan guru untuk Sekolah Rakyat (*Volkschool*). Pertemuan dan intimasi Andaraya Wilmar Saragih dengan L. Bregenstroth yakni inspektur pendidikan RMG di Pematangsiantar membawa dirinya melanjutkan sekolah ke Seminari Sipoholon sejak tahun 1932. Dari sekolah ini, ia lulus pada tahun 1935.

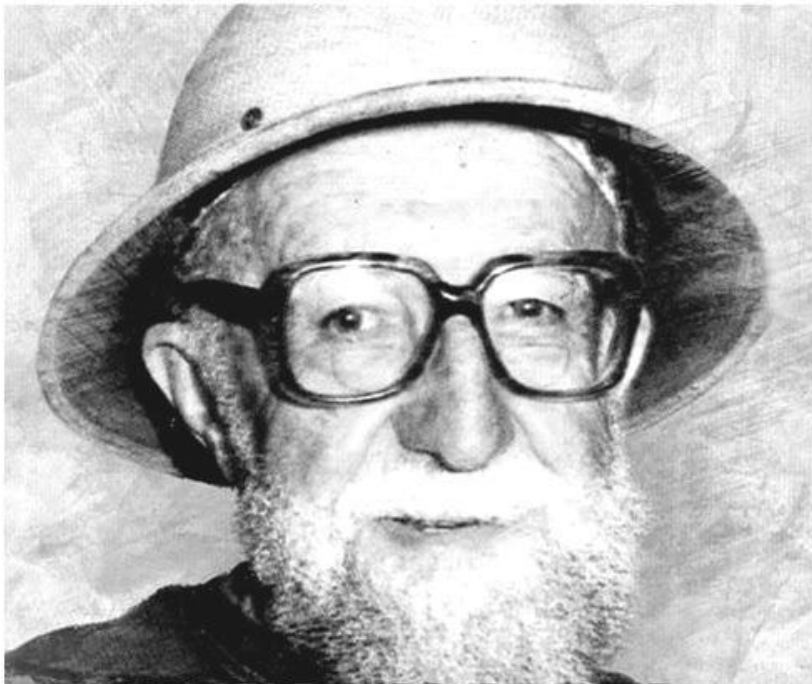
Pasca tamat dari Seminari Sipoholon, Andaraya Wilmar Saragih ditempatkan sebagai pendeta (rohaniawan) di Sinaman (1936-1938), Pamatangpurba (1938-1939), Saribudolok (1941-1948), dan Pematangraya (1949-1952). Sejak tahun 1952-1960, Andaraya Wilmar Saragih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal HKBPS selama dua periode. Ia mendampingi Djaulung Wismar Saragih yang ditetapkan sebagai Wakil Ephorus HKBPS. Pada tahun 1960-1962, ia terpilih sebagai Wakil Ephorus HKBPS dan Lesman Purba terpilih sebagai Sekretaris Jenderal.



Andaraya Wilmar Saragih (tengah) di GKPS Sudirman, 1950
Sumber: Damanik dan Sinaga, 2013

Andaraya Wilmar Saragih menikah dengan R. Maulina Purba serta dikaruniai 4 anak. Sebelum wafat, Andaraya Wilmar Saragih telah menandatangani jadwal peresmian *panjaeon* HKBP Simalungun pada 2 September 1962 menjadi GKPS. Akhirnya, kemerdekaan GKPS baru dilakukan pada 1 September 1963 sewaktu Jenus Purbasiboro (*Ephorus*) dan Lesman Purba (Sekretaris Jenderal). Andaraya Wilmar Saragih tidak sempat menyaksikan pemandirian HKBP menjadi GKPS karena meninggal dunia.

Andaraya Wilmar Saragih wafat pada 18 Juni 1962 karena penyakit. Ia dimakamkan di pekuburan orang Eropa jalan Laguboti Pematangsiantar.



Elpidius van Duijnhoven

Sumber: Saragih, 2014.⁷³

Adalah *zendeling* Agama Roma Katolik di Simalungun. Bagi komunitas Katolik di Simalungun, van Duijnhoven dikenal dengan nama '*Oppung Dolok*'. Duijnhoven adalah anak ketiga dari delapan bersaudara. Lahir di Erp, Belanda pada 7 Oktober 1906 dan wafat tahun 1993 di Sumatera Utara. Orangnya yakni Henricus van Duijnhoven dan Joanna adalah petani.

Sejak muda, van Duijnhoven akrab dengan kehidupan biarawan Kapusin di dekat Erp, Handel, Belanda. Van Duijnhoven sekolah seminari pada usia 19 tahun sejak tanggal 7 September 1925. Kemudian melanjut ke pendidikan Filasafat dan Teologi di Belanda.

⁷³Lihat Simon Saragih. 2014. *Elpidius Van Duijnhoven, Oppung Dolok, Rasul dari Simalungun Atas*. Medan: Bina Media Perintis.

Ditahbiskan menjadi Imam pada tanggal 11 Maret 1933. Pada 16 Februari 1934 mendapat penugasan berupa penginjilan di Sumatera Utara. Ia mendarat di Belawan dan terus ke Pematangsiantar. Dari Siantar, Van Duijnhoven menaburkan injil di Saribudolog, area subkultur Silimahuta dari Kerajaan Girsang.

Elpidius van Duijnhoven dikenal dengan nama *Oppung Dolog*. Panggilan ini mencerminkan intimasi atau keakraban dengan masyarakatnya di sekitar Saribudolog. Rintisannya terhadap pengembangan Katolik di Saribudolog adalah berdirinya institusi Gereja Rome Khatolik di Saribudolog sekitarnya seperti di Simpang Haranggaol, Haranggaol, Pematang Purba, dan Tigarunggu.



Peresmian Gereja Katolik Pematangpurba tahun 1937

*Tampak G.L. Tichelman, Asisten Residen Simalungun,
(mengenakan seragam putih) dan rohaniawan Roma Katolik.*

Sumber: kitlv.nl

Selama dedikasinya terhadap pengembangan Katolik di Saribudolog dilakukan dengan sepeda dan jalan kaki. Elpidius van Duijnhoven dikenang karena secara tuntas telah memberi contoh dan teladan hidup tentang kesalehan (iman), kepedulian akan sesama dan kepekaan sosial sejak kehadirannya di tanah Simalungun secara khusus dan di Indonesia secara umum. Guna mengenang dedikasinya bagi masyarakat Simalungun Katolik, maka namanya diabadikan sebagai nama sekolah yakni SMA van Duijnhoven Saribudolog.



Peresmian Gereja Roma Khatolik Pematangpurba, 1937

Sumber: kitlv.nl

Sama seperti zending Jerman yang menyebarkan agama Protestan di Simalungun, maka *zending* Katolik juga turut mewarnai keberagaman di Simalungun. Dewasa ini, gereja Katolik selalu mengadopsi budaya lokal (Simalungun) dalam bangunan-bangunan rumah ibadah (gereja) mereka. Perpaduan Barat dan Simalungun yang disebut dengan bangunan *inkulturatif* ini sangat menakjubkan karena tidak melepaskan budaya lokal pada penyebaran agama ini. Lembaga pendidikan yang dikembangkan Katolik juga tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri dan justru menjadi incaran sewaktu memilih satuan pendidikan untuk bersekolah.

Jenus Purbasiboro adalah rohaniawan (pendeta) di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Gereja ini adalah hasil pemandirian dari eksklusi HKBPS atau Huria Kristen Batak Protestan Simalungun sejak tanggal 1 September 1963. Pemandirian eksklusi HKBPS menjadi GKPS adalah perjuangan panjang sejak 5 Oktober 1952 lewat Sinode Agung HKBP yang meminta pemandirian menjadi GKPS yang terpisah dari HKBP. Beberapa nama yang pantas dicatat pada gerakan pemandirian eksklusi HKBPS menjadi GKPS ini adalah seperti Djaulung Wismar Saragih, Andaraya Wilmar Saragih, Jenus Purbasiboro, Kerpanius Purba, Jonathan Purba, Lesman Purba dan lain-lain.



(kiri-kanan) **J.M. Girsang, Armensius Munthe dan Jenus Purbasiboro di Danau Toba**

Sumber: E.L. Sumbayak

Pada tahun 1950, Jenus Purbasiboro menjabat sebagai Praeses Distrik Kaean di HKBPS. Jenus Purbasiboro pada sidang agung HKBP tahun 1952 tidak setuju pemisahan total HKBPS dari HKBP. Karena itu, sinodisten istimewa digelar untuk menentukan nasib HKBPS yakni menjadi sebuah distrik tersendiri di HKBP. Pada sidang tahun 1952 itu, terpilih J. Wismar Saragih sebagai wakil Eporus dan A. Wilmar Saragih sebagai Sekretaris Jenderal. Setelah berdirinya HKBPS, maka 2 September 1952, HKBPS melakukan Jubileum 50 tahun Pekabaran Injil di Simalungun. Pada saat itu, Jenus Purbasiboro menulis buku berjudul: *50 Tahun Injil Kristus di Simalungun: Pesta Omas ni HKBP Simalungun, 2 September 1903-1953*.

Pada 18 September 1961, Jenus Purbasiboro menjadi salah satu panitia *panjaeon* HKBPS dari HKBP. Pada 2 September 1963, dilaksanakan serah terima *panjaeon* HKBPS yang diterima Jenus Purbasiboro yang kemudian berganti nama menjadi GKPS. Kemudian, Jenus Purbasiboro adalah *Ephorus* (pimpinan tertinggi)

GKPS pasca dimandirikan pada 1 September 1963 hingga 1970. Panjaeon atau pemandirian atau tepatnya pemisahan institusi religi itu ditandatangani GHM Siahaan (Wakil HKBP) dan Jenus Purba Siboro (mewakili HKBPS). Penandatanganan berlangsung di Gereja HKBPS (kini GKPS Sudirman) Pematangsiantar.

Pada tahun 1933-1938 menurut sumber Dasuha dan Sinaga (2003) disebutkan berdiri *Kongsi Laita* di Sondiraya, dimana Jenus Purbasiboro berada didalamnya. Pada tahun 1949, Jenus Purbasiboro menjadi salah satu pendeta (rohaniawan) yang berasal dari Simalungun disamping Kerpanius Purba, A. Wilmar Saragih, Jonathan Purba dan Djaulung W. Saragih).

Selanjutnya, pada tahun 1964, Jenus Purbasiboro lewat institusi GKPS mendirikan pusat pendidikan GKPS di Pematangraya, termasuk pembangunan asrama putra dan putri di Pematangraya. Kemudian, pada tahun itu juga, GKPS terdaftar sebagai anggota di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang berpusat di Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 1965, Jenus Purbasiboro dari GKPS bekerjasama dengan RMG Jerman mendirikan Pusat Latihan Pertanian (PLP) pada lahan seluas 33 hektar di Siantar. Walaupun sempat mendapat penolakan dari Partai Politik di Siantar terkait peruntukan 33 hektar lahan bagi PLP GKPS, namun karena dukungan Radjamin Purba (Bupati Simalungun), proses peruntukan itu dapat berjalan mulus. PLP GKPS ini berganti nama menjadi *Pelayanan Pembangunan* (Pelpem GKPS) dan pada tahun 1981 mendapat apresiasi Kalpataru dari Pemerintah Indonesia.

Menurut Saragih (2016)⁷⁴ Taralamsyah Saragih berasal dari Simalungun subkultur Kerajaan Raya. Dilahirkan di Raya pada 18 Agustus 1918. Taralamsyah Saragih menyelesaikan pendidikan di *Holansche Inlandsche School (HIS)* Simalungun. Menikahi Siti Mayun Siregar tahun 1944 dan dikaruniai 11 anak. Taralamsyah Saragih wafat pada 1 Maret 1993 dan dimakamkan di Jambi. Ia adalah *Pioner Modernisasi Tari Simalungun*.

Pada tahun 1928-1935, sudah mempelajari alat musik barat seperti Biola, Gitar dan lain-lain. Alat musik ini dikenal di Simalungun sebagai pengaruh pekerjaan Misi Zending RMG Jerman. Karena Taralamsyah Saragih adalah *Partongah* atau '*Ningrat*' di Kerajaan Raya, maka wajar jika dirinya mendapatkan kemudahan interaksi dengan orang Eropa ataupun mendapatkan fasilitas seperti orang Eropa di Simalungun. Pada tahun 1952-1953, aktivitasnya

⁷⁴Lihat Simon Saragih. 2016. *Biografi Taralamsyah Saragih : Jejak Sepi Seorang Komponis Legendaris*. Medan: Bina Media Perintis.

pada dunia tari adalah seperti di Badan Kesenian Simalungun maupun bersama dengan M. Sauti menyusun gerak tari Kuala Deli, Mainang maupun Tanjung Katung.



Taralamsyah Saragih Garingging

Sumber: Saragih, 2016

Pada tahun 1953, Taralamsyah Saragih menyusun tari (*tortor*) atau koreografi *Sitalasari* yang dikenal dan sangat populer di Simalungun hingga dewasa ini. Kemudian, pada tahun 1954, Taralamsyah Saragih mendampingi tim Kesenian Indonesia ke luar negeri. Kemudian ia menjadi pelatih tari Melayu dan Sumatera Utara di Medan. Antara tahun 1960-1965 melakukan pertunjukan tari keliling bersama *Orkes Na Laingan* di Medan dan Simalungun. Juga melatih rombongan Sabang-Merauke untuk tari *Haroon Bolon* pada pembukaan even olahraga Ganefo di Jakarta.

Beberapa koreografi besutan Taralamsyah Saragih adalah seperti '*Sitalasari*' (1946), '*Pamuhunan*', '*Simodak-odak*', '*Haroharo*' (1952), '*Sombah*' (penyelarasan tor tor Sombah, 1953), '*Runten Tolo*' (1954), '*Nasiaran*' (1955), '*Makail*', '*Manduda*' (1957), '*Haroon Bolon*' (1959), '*Uou*' (1960), '*Tembakau*' (1964), '*Panakboru Napitu*', '*Oratorium Kelahiran Nabi Isa*' (1966), Sendratari '*Yasin*' (1967), '*Erpangir*' (1968), Sendratari Ramayana dalam tari dan musik Melayu (1970), dan lain-lain.

Demikian pula Taralamsyah Saragih banyak menciptakan lagu-lagu Simalungun seperti: *'Eta Mangalop Boru'*, *'Parmaluan'*, *'Hiranan'*, *'Inggou Parlajang'*, *'Tarluda'*, *'Parsonduk Dua'*, *'Padan Na So Suhun'*, *'Tading Maetek'*, *'Pamuhunan'*, *'Paima Na So Saud'*, *'Sihala Sitaromtomp'*, *'Sanggulung Balunbalun'*, *'Ririd Panonggor'*, *'Marsalop Ari'*, *'Mungutni Namatua'*, *'Pindah-Pindah'*, *'Inggou Mariah'*, *'Uhur Marsirahatan'*, *'Poldung Sirotap Padan'*, *'Bujur Jehan'*, *'Simodak Odak'* (ciptaan bersama dengan Tuan Jan Kaduk Saragih), dan lain-lain. Beberapa lagu tradisi Simalungun yang ia gubah kembali, seperti *'Parsirangan'*, *'Doding Manduda'* (ilah tradisi dari *Ilah I Losung*), *'Ilah Nasiholan'*, *'Marsigumbangi'* dan *'Na Majetter'* (ilah tradisi dari *Ilah Bolon*). Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) Sumatera Utara memperbantukan Taralamsyah Saragih di Jambi atas permintaan Djamaluddin Tambunan, Gubernur Jambi.



Sketsa Foto Djasamen Saragih

Sumber: Simalungun Net

Adalah Dokter Pertama dan Perintis Kesehatan di Simalungun. Djasamen Saragih adalah anak Djaudin Saragih, *Pangulu Balei* (Sekretaris Raja di Kerajaan Siantar) sejak tahun 1934. Djasamen Saragih menempuh pendidikan kedokteran di Mosvia Surabaya Jawa Timur. Berdasarkan laman *Simalungun Net* disebutkan bahwa, Djasamen Saragih pasca tamat sekolah dokter dari Surabaya, kemudian bertugas di rumah sakit *Siantar Central Hospital* atau Rumah Sakit Pusat Siantar di jalan Merdeka.

Rumah Sakit tersebut didirikan pemerintah *Gemeente Siantar* sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Kota (*gemente Siantar*). Rumah Sakit *Siantar Central Hospital* ini didirikan pada tahun 1929. Di samping sebagai dokter di *Siantar Central Hospital*, Djasamen Saragih juga bertugas di Rumah Sakit *Simalungun Central Hospital* yang berkedudukan di Jalan Simbolon, di kawasan Pemukiman Orang Eropa (*Europeanwijk*). Kini rumah sakit *Simalungun Central Hospital* ini dikuasai dan dimiliki menjadi Rumah Sakit Tentara. Rumah sakit ini di Indonesianisasi (Nasionalisasi) pada tahun 1958 yakni pengambilalihan aset-aset Belanda di selu ruh Indonesia.

Djasamen Saragih sering ditugaskan sebagai Dokter Tentara di daerah Kabanjahe, Tanah Karo. Djasamen Saragih meninggal pada tahun 1946 pada usia relatif muda. Ia adalah salah satu korban keganasan pada waktu pembunuhan bangsawan di Simalungun yang berkecamuk sejak 3 Maret 1946. Karena perannya sewaktu bertugas di *Siantar Central Hospital*, makanya namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit yang kini dikuasai lewat Nasionalisasi 1958 yang dikenal dengan nama *Rumah Sakit Dr. Djasamen Saragih*, milik Pemerintah Kota Pematangsiantar. Baik Djaudin Saragih maupun Djasamen Saragih adalah contoh elite Simalungun yang terbentuk



Djaudin Saragih
Pangulu Balei Kerajaan Siantar

diakhir kolonialisme. Mereka ini mendapatkan pendidikan modern dikala kolonialisme masih berada di Indonesia. Hal ini karena adanya kenyataan bahwa, lembaga pendidikan di era kolonial 'hanya' terbuka bagi golongan ningrat, sementara rakyat kebanyakan nyaris tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Namun demikian, merek ini adalah contoh orang Simalungun yang mendapatkan dan merasakan kesuksesan hidup di era kolonial.



Djaidin Purba

Sumber: Tim Penyusun, 1958⁷⁵

⁷⁵Lihat Tim Penyusun. 1958. *Lima Puluh Tahun Kota Praja Medan*. Medan.

Djaidin Purba, lahir pada tanggal 1 Mei 1906 di Nagori, Kecamatan Purba, Simalungun. Menempuh pendidikan *Holandsche Indische School (HIS)* di Pematangsiantar, kemudian melanjutkan ke *MULO* di Medan. Setelah itu, melanjutkan ke *AMS, AFD. B* di Jakarta dan terakhir lulus Sarjana Hukum dari *Rijksuniversiteit*, Belanda tahun 1937. Setelah tamat dari *Rijksuniversiteit*, Djaidin Purba sempat bekerja sebagai Repertoire di Leiden sejak tahun 1937-1938.

Sejak tanggal 1 Desember 1938 hingga 26 Juni 1942 bekerja sebagai *Advocat dan Procureur di Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) di Medan. Sejak 1942 hingga 1946 bekerja sebagai Leader dari *Kerapatan Nabolon* dan *Magisstraat* di Pematangsiantar, merangkap Ketua Pengadilan Negeri di Pematangsiantar dan Tebing Tinggi. Kemudian, sejak 20 November 1946 hingga 31 Agustus 1947 bekerja sebagai Hakim pada Mahkamah Pengadilan Tinggi di Pematangsiantar, merangkap dosen pada Sekolah Marsuse di Parapat, *Majortituler* dan Ketua Komite Nasional Kabupaten Simalungun.

Setelah itu, sejak 31 November 1947-10 Juli 1952 bekerja sebagai Walikota Medan, hingga era Negara Sumatera Timur (NST). Pasca kembalinya ke NKRI (15 Agustus 1950) Djaidin Purba masih menjabat sebagai Walikota Medan hingga 10 Juli 1952. Setelah itu, terhitung sejak 11 Juli 1952, Djaidin Purba bekerja sebagai Kepala Bahagian Perundang-undangan di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Sejak tanggal 1 Agustus 1959 menjabat sebagai Residen diperbantukan Gubernur Sumatera Utara.

Beberapa pekerjaan lain yang pernah digeluti Djaidin Purba adalah Anggota Senat RIS (1950), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (1950-1956), Anggota Konstituante (1957-1958), Penasehat Penguasa SOB-Tentara Teritorium I, Sumatera Utara (1957-1958), kepala Bahagian Perundang-undangan Staf Penguasa Perang Swatantra I Sumatera Utara (1958-1959) dan pengajar tidak tetap pada KPPA dan KDC Medan (1953-1959). Jasanya sangat besar terhadap pembangunan Stadion Teladan guna menghadapi Pekan Olahraga Nasional di Medan.

Madja Purba dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1909 di Pematang Purba, Kecamatan Purba, Simalungun. Menempuh pendidikan *Holandsche Indische School (HIS)* di Pematangsiantar, kemudian melanjutkan studi ke *MULO* di Medan dan Jakarta. Menamatkan pendidikan tinggi *MOSVIA* di Bukittinggi, Minangkabau tahun 1932. Pasca menamatkan sekolah tinggi *MOSVIA*, Madja Purba diangkat sebagai *Hoofmantrie* (Mantri kepala) di *Algemene Dienst* (Urusan Umum) di Pematangsiantar, Simalungun.



Madja Purba

Sumber: Tim Penyusun

Setelah itu, bekerja sebagai Kepala Urusan *Belasting* (Pajak) dari Kerajaan-kerajaan Simalungun. Pekerjaan ini terus dipegang hingga era pendudukan Jepang (1942-1945). Pada waktu bersamaan, Madja Purba diangkat sebagai sekretaris *Gunseibu* di Pematangsiantar.

Pasca Indonesia Merdeka, Madja Purba sejak Proklamasi 1945 diangkat sebagai Wakil Pemerintah Indonesia untuk Kerajaan-kerajaan Simalungun. Jabatan inilah kemudian di kudeta Urbanus Pardede pada Maret 1946. Pada waktu Agresi Belanda I, Madja Purba mengungsi ke Bukit Tinggi. Semenjak April 1946 hingga 1947, Madja Purba diangkat sebagai Bupati Simalungun. Setelah itu, Madja Purba diangkat sebagai Bupati Tapanuli Utara (1947-1949). Setelah itu, Madja Purba dipercaya kembali menjadi Bupati Simalungun periode 1950-1954. Pada tahun 1953, Madja Purba melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Sejak tahun 1955-1956 diangkat sebagai Sekretaris Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan kemudian pada tahun 1956 diangkat menjadi Residen diperbantukan pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu, sejak 3 Juli 1958 hingga 27 Februari 1962 dipercaya sebagai Walikota Medan. Pada waktu menjabat sebagai Walikota Medan, dirayakan jubileum 50 tahun *Gemeente* (Kotamadya) Medan. Salah satu kontribusi Madja Purba bagi orang Simalungun di Medan adalah pengupayaan lokasi rumah ibadah Kristen di Jalan Hang Tuah Medan.

A.E. Saragihras lebih dikenal sebagai Komandan Barisan Harimau Liar (BHL) di Simalungun. Ia adalah komandan pasukan yang diberi tugas membunuh dan merontokkan bangsawan di Simalungun. Berdasarkan catatan Mohammad Said di Harian Merdeka, 1972 dimuat profile singkat A.E Saragihras. Profil tersebut adalah hasil wawancara Mohammad Said, pemilik koran Waspada, sewaktu Saragihras mendekam di penjara. Disebutkan bahwa, pada tahun 1922, Saragihras bekerja sebagai *Leerlingsschrijver* atau Juru Tulis (*Klerek*) di Panei. Kemudian pada tahun 1923 ia berhenti dari pekerjaan itu dan bergabung dengan preman di Siantar. Pada tahun 1924-1925, Saragihras bergabung dengan Persatuan Pencak Natal.

Pada tahun 1926, Saragihras bekerja sebagai supir. Sejak tahun 1927 hingga 1930, ia menjadi supir taxi. Sejak tahun 1931 hingga 1941, Saragihras bekerja sebagai Juru Tulis dan Anggota Kerapatan Kampung di Tigaras. Selain itu, ia juga bekerja sebagai kontraktor di beberapa perkebunan.

Sejak tahun 1938, menjadi anggota Gerindo di Pamatangsiantar serta bertugas membangun Gerindo di Tigaras. Selanjutnya, pada tahun 1943, Saragihras membangun usaha pertanian sekaligus menjadi Kepala Serikat Tani. Tahun 1944, Saragihras mengikuti pendidikan militer Jepang yakni Kenkoku Teisintai di Gunung Rintis. Pada tahun 1945, Saragihras menjadi Komandan BHL Simalungun.



Anggaraim Elias (A.E.) Saragihras

Sumber: Damanik, 2017⁷⁶

Pada menjelang malam 1 Maret 1946, Saragihras melakukan pertemuan dengan Umar Saleh, Sarwono Sutardjo, Zainal Baharuddin, dan Adjis Siregar di *Simalungun International Club* (kini Gedung Juang) Siantar untuk menjalankan aksi pembunuhan

⁷⁶Lihat Erond L. Damanik. 2017. *Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif hapusnya swapraja Simalungun pada Maret 1946*. Medan: Simetri Institut.

bangsawan di Simalungun. Pada dini hari, 3 Maret 1946, Saragihras mendapat telegram untuk menjalankan aksi. Bersama dengan Jatongam Sumbayak, Jatongam Sitio, Bagus Saragih, Oscar Tambunan dan Adjis Siregar menjalankan aksi secepat kilat.

Pasca pembunuhan bangsawan 1946 di Simalungun, Saragihras bergabung dengan bergabung dengan pasukan Batalion IX Sumatera Utara. Pasukan ini menumpas pemberontakan hingga ke Sipirok dan Benteng Huraba di Sidempuan. Saragihras menggunakan sebagian uang rampasan harta bangsawan untuk membeli senjata dari Singapura dan sebagian lagi diserahkan kepada Saleh Umar dan Nathar Zainuddin.

Pasca KMB tahun 1949, Alex Kawilarang menjadi Komando Sub Teritorium-VII dan melakukan pemanggilan terhadap 9 orang perwira militer. Saragihras menolak panggilan itu. Akibat penolakan itu, ia dianggap desersi militer. Ia dituduhkan sebagai terdakwa tunggal menyangkut pembunuhan bangsawan di Simalungun.

Sejak Januari 1950, Saragihras dikejar-kejar 'Tentara Tapanuli'. Kemudian, pada 22 Agustus 1950, Saragihras menyerahkan diri kepada Polisi Brimob di Bandar Tinggi. Sejak 22 Agustus 1950 hingga tahun 1953, Saragihras mendekam di penjara. Ia diperiksa maraton dan ditahan secara bergantian di Penjara Sukamulya Medan maupun penjara Pantoan Pematangsiantar. Pada akhir tahun 1953, Saragihras dibebaskan dari semua tuduhan yang disematkan kepada dirinya perihal 'desersi militer'. Tidak lama setelah bebas, Saragihras meninggal dunia karena penyakit *Tuberculosis* yang diidapnya.

Laurimba Saragih adalah seorang perwira militer dengan pangkat terakhir yakni Letnan Kolonel (Letkol). Laurimba Saragih adalah pejuang kemerdekaan dan menghabiskan masa tuanya sebagai Ketua Harian Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) 1945. Menurut sumber Tribun (2011)⁷⁷, Laurimba Saragih lahir di Tanggabatu, sebuah desa di Haranggaol pada tanggal 10 September 1927. Pada era pendudukan Jepang di Simalungun, Laurimba Saragih masuk sekolah kelaskaran di era Jepang pada tahun 1943. Pada tahun 1965, Laurimba Saragih diangkat menjadi Kepala Seksi Kodim-1. Semenjak masuk dinas ketentaraan di era Jepang, Laurimba Saragih banyak terlibat pada revolusi fisik tahun 1945-1949 yakni pada Agresi Militer I dan II di Simalungun. Demikian pula setelah Pengakuan Kedaulatan 1949, Laurimba Saragih aktif berdinasi di militer.

⁷⁷Lihat [http://www.tribun.com/walikota bersahaja dan pengayom itu telah berpulang](http://www.tribun.com/walikota_bersahaja_dan_pengayom_itu_telah_berpulang)., 27 Juni 2011.



Laurimba Saragih sebagai Walikota Pematangsiantar, 1967
Sumber: Koran Tribun

Pada era Negara Sumatera Timur (NST) maupun PRRI/Permesta, Laurimba Saragih menjadi salah satu penjaga kedaulatan Simalungun yang pro terhadap kemerdekaan. Ia tidak mendukung NST maupun PRRI/Permesta. Demikian pula Laurimba Saragih aktif dalam penumpasan komunis tahun 1965-1966. Menurut sumber Tribun (2011), pasca redamnya komunis tahun 1966, Laurimba Saragih diangkat sebagai Walikota Siantar sejak tahun 1967-1984. Setelah 7 tahun menjadi walikota, kemudian sejak tahun 1979 hingga 1984 diangkat sebagai Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Golongan Karya. Kemudian, sejak tahun 1985, Laurimba Saragih menjadi Ketua DPC Golkar Pematangsiantar.

Pada tahun 1987-1992, Laurimba Saragih terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Pematangsiantar. Sewaktu menjabat sebagai Ketua DPRD inilah, Laurimba Saragih menjadikan slogan *Sapangambe Manoktok Hitei* (Bersama mencapai tujuan) sebagai motto kota Pematangsiantar. Sumber Tribun (2011) menegaskan bahwa Laurimba Saragih adalah tipikal pemimpin yang lahir dari masa perjuangan meraih kemerdekaan. Karena mewarisi sifat pejuang yang membaktikan dirinya untuk NKRI, sosok Laurimba Saragih

kontras dengan pemimpin jaman sekarang yang hanya mementingkan diri dan golongan tertentu.

Laurimba Saragih menikah dengan Darijah Hasvy Hutasuhut. Laurimba Saragih meninggal pada usia 84 tahun pada 27 Juni 2011 di Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. Laurimba Saragih adalah pemimpin bersahaja dan pengayom bagi masyarakat, sebuah tauladan yang mencerminkan *Habonaron do Bona* dari masyarakat Simalungun.



Radjamin Purba Pakpak

Sumber: <http://www.neosimalungunjaya.com>

Adalah pensiunan militer berpangkat Letnan Kolonel dan menjadi bupati di Simalungun pada usia 32 tahun. Radjamin Purba di lahirkan di Bangun Purba, Haranggaol pada 22 Desember 1928 dan meninggal tahun 1977 pada usia 49 tahun. Radjamin Purba adalah Bupati Simalungun periode 1960-1973. Kepemimpinannya lebih menonjol di pemerintahan daripada di militer. Karya-karyanya cukup menonjol seperti pada bidang pemerintahan desa, pangan, penyelesaian sengketa tanah, pembangunan jalan, infrastruktur perkantoran, pariwisata, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. Radjamin Purba turut membidangi lahirnya *Partuha Maujana Simalungun (PMS)*, pengelolaan *Rumah Bolon Purba* dan Museum Simalungun, aktualisasi *Habonaron do Bona (HdB)* di logo Kabupaten Simalungun.

Hal lainnya adalah kepioneran dan gagasan pendirian Universitas Simalungun pada 18 September 1965. Pendirian universitas yakni lembaga pendidikan yang diharapkan membangun orang Simalungun ini berdiri diatas lahan seluas 33 hektar. Demikian halnya menggagas pendirian *Pelayanan Pembangunan (Pelpem)* di GKPS pada 15 Januari 1965 sebagai mitra pemerintah Simalungun meningkatkan pembangunan masyarakat dan fisik. Pada tahun 1972, Radjamin Purba menulis pemikirannya tentang pembangunan dan perubahan struktur desa di Simalungun dengan judul: *Pembangunan dan Perubahan Struktur Desa di Kabupaten Simalungun (1972)*.

Radjamin Purba mempersunting Kencana (meninggal tahun 2013), seorang Putri Jawa. Putra putri dari perkawinannya adalah Budi Raja Manggala Purba, Darmayanti Purba, Juli Suhaerani Purba, Kurniaty Purba dan Adi Rajadiningrat Purba. Karena dianggap sebagai pelopor pendidikan tinggi di Simalungun, maka monumen Radjamin Purba dibangun dengan megah di depan Universitas Simalungun Pamatangsiantar. Pembangunan monumen itu ditengarai sebagai monumen peringatan atas jasa besar Radjamin Purba terhadap pembangunan pendidikan di Simalungun.

Berdasarkan sumber Team Asistensi Pangdam II/BB (1977)⁷⁸, disebut bahwa Lahiradja Munte adalah seorang perwira militer purnawirawan dengan pangkat terakhir adalah Brigadir Jenderal (Brigjend). Lahir di daerah Garingging, daerah Sipituhuta, (pada awalnya adalah wilayah Simalungun, namun sejak 1906 digabungkan

⁷⁸Lihat Team Asistensi Pangdam II/BB. 1977. *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II Bukit Barisan*. Medan: Dinas Sejarah Kodam II Bukit Barisan.

ke *onderafdeeling* Karo). Memasuki pendidikan militer pada era pendudukan Jepang tahun 1943. Pasca Indonesia merdeka, Lahiradja Munthe bergabung pada kelaskaran yakni *Nasional Pemuda Indonesia (Napindo)*. Laskar rakyat ini aktif memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Utara.



Lahiradja Munthe

Sumber: Team Asistensi Pangdam II/BB

Lahiradja Munthe dikenal aktif memperjuangkan kemerdekaan pada Agresi Militer Belanda I dan II di Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhanbatu, Simalungun, Balige, hingga Sidempuan. Demikian pula Lahiradja Munthe aktif di *Komando Militer Kota Besar (KMKB)* Medan yang memperjuangkan Djamin Gintings

sebagai Panglima TT-I/Bukit Barisan pasca pemberontakan Maludin Simblolon. Peristiwa ini dikenal dengan PRRI/Permesta tahun 1956.

Menjelang Agresi Militer-I tahun 1947, perang kemerdekaan di Medan Area dibagi dalam beberapa sektor. Lahiradja Munthe menjadi Komandan Batalion-II Napindo Medan Area bersama dengan Selamat Ketaren dan Bangsi Sembiring. Batalion-II Napindo Medan Area adalah bagian front tempur pasukan Napindo. Menurut sumber Biro Sejarah Prima (1976)⁷⁹, pada Agresi Militer I di Medan Area, Lahiradja Munthe bersama Abdul Manaf Lubis yang membawahi kesatuannya masing-masing yakni Napindo I dan Batalion II melakukan penyerangan dan pendudukan stasiun kereta api Lubuk Pakam dan bahagian kota lainnya seperti Tebingtinggi yang bergerak dari Bandar Sakti (Kampung Brohol). Pasukan Lahiradja Munthe melakukan perlawanan sengit di Pompa Minyak, Bandar Sakti yang dipertahankan Belanda.

Menurut sumber Team Asistensi Pangdam II/BB (1977) disebutkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 1947, disusun Brigade XII di Tanoh Djawa. Pada saat itu, Lahiradja Munthe dari Napindo diangkat sebagai Kepala Staf sedangkan Richardo Siahaan sebagai komandan. Adapun komandan resimen adalah seperti Bedjo (Napindo), Selamat Ketaren (Napindo), dan Sukardi (asal TRI). Adapun wilayah perjuangan Brigade XII ini adalah Asahan, Labuhanbatu, Simalungun dan Tapanuli Utara.

Menjelang Agresi Belanda II, pasukan-pasukan yang tergabung dalam Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA) dan Komando Medan Area (KMA) yang bermarkas di Tanjung Morawa mengundurkan diri ke Labuhanbatu dan Tapanuli. Sejumlah pasukan termasuk pasukan Lahiradja Munthe termasuk di dalamnya dan juga pasukan Bedjo, Jakub dan Manaf Lubis, Selamat ketaren, Kasmuni, Mateus Sihombing dan Timur Pane dan lain-lain. Pasukan yang tergabung pada Brigade XII ini mengundurkan diri ke Balige. Pengunduran diri ini terjadi akibat perjanjian Renville yang mewajibkan seluruh pasukan mundur dari garis status quo (garis demarkasi yang memisahkan pasukan Sekutu dan pasukan Republik di Medan).

Selama Perang Kemerdekaan (Agresi Militer) II di Sektor I dengan wilayah perang yakni Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur terdapat reorganisasi pasukan. Adapun komandan sektor I

⁷⁹Lihat Biro Sejarah Prima. 1976. *Perjuangan Kemerdekaan Dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi*. Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area.

berkedudukan di Padangsidempuan adalah Bedjo (pangkat Mayor) dan sebagai Kepala Staf adalah Lahiradja Munthe (pangkat Kapten). Pasca berkecamuknya perang di dimana Padangsidempuan telah dikuasai Belanda, maka sejak 2 Januari 1949, Markas Komando Sektor I dipindahkan dari Sidempuan ke Sihepeng.

Pada waktu gejolak internal militer di Tentara Teritorium Sumatera Utara (TTSU) atau kini dikenal Kodam II Bukit Barisan, Lahiradja Munthe (berpangkat Mayor) turut memiliki andil besar. Menurut sumber Republika (2014)⁸⁰, Lahiradja Munthe mendarangi Djamin Ginting (Kepala Staf Tentara dan Teritorium I Bukit Barisan) pada malam Natal 26 Desember 1956. Tujuan kedatangan Lahiradja Munthe adalah memaksa Djamin Gintings untuk segera mengambil alih komando TTSU yang ditinggalkan Maludin Simbolon (Panglima TTSU).

Pada saat itu, Djamin Gintings masih gamang mengambilalih Komando TTSU sehubungan dengan '*Ikrar Bersama*' petinggi militer TTSU pada 16 Desember 1956 yang menyatakan '*berontak kepada militer pusat*'. Sesuai dengan telegram yang diterima kalangan petinggi militer pro-tentara pusat yakni Sugiharto (Komandan KMKB Kota Medan) dan Ulung Sitepu (Kepala Staf KMKB Kota Medan) dan Lahiradja Munthe, bahwa Maludin Simbolon harus ditangkap karena dinilai telah memberontak. Karena desakan Lahiradja Munthe dan perwira lainnya sesuai telegram dari Nasution di Jakarta, maka Djamin Gintings diperintahkan mengambil alih pimpinan Panglima TTSU menggantikan Maludin Simbolon. Reaksi Djamin Gintings ialah mengambilalih jabatan itu pada subuh pukul 23.00 di Markas TT-I Bukit Barisan dengan memanggil sejumlah perwira.

Pasca pensiun dari dinas militer, Lahiradja Munthe mendedikasikan hidupnya bagi keluarga dan Simalungun. Ia pernah menduduki fungsionaris di Partuha Maujana Simalungun (PMS) yakni lembaga cerdas pandai di tengah-tengah komunitas etnik Simalungun.

⁸⁰Lihat http://www.republika.co.id/gerakan_senyap_melawan_panglima, 16 Juni 2014.



Kaliamjsjah Sinaga

Sumber: <http://www.simalungunjaya.com>

Adalah Pemangku Raja dari subkultuur Simalungun di Tanoh Djawa. Kaliamjsjah Sinaga adalah seorang tokoh Pergerakan Indonesia yang turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kaliamjsjah Sinaga menikah dengan Solimah Damanik, putri Sawadim Damanik, pemangku raja di Kerajaan Siantar.

Kaliamjsjah Sinaga dapat lolos dari incaran pembunuhan bangsawan di Simalungun yang berkejolak sejak 3 Maret 1946. Tetapi beberapa bangsawan dari Tanoh Jawa bernasib sial karena tidak lolos dari sergapan gerombolan pembunuhan bangsawan di Simalungun yang dikomandoi A.E. Saragiras.

Sewaktu Kemerdekaan Indonesia 1945, Kaliamjsjah Sinaga turut aktif membela kemerdekaan itu di Simalungun dan Sumatera Utara. Sehubungan dengan pembentukan Negara Sumatera Timur tahun 1949, Kaliamjsjah Sinaga dipercaya menjadi Wakil Walinegara Sumatera Timur. Pada saat itu, walinegara NST adalah Mansoer dari Kesultanan Asahan dan sehari-hari menjadi dokter pribadi Sultan Langkat. Selama aktif di NST, Kaliamjsjah Sinaga dikenal dekat dengan Mohammad Hatta, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat.



Kaliamsjah Sinaga dan delegasi NST di KMB, 1949
Sumber: kitlv.nl

Perannya di NST cukup sentral karena menduduki jabatan sebagai Wakil Walinegara di NST. Namun, perjuangan NST yang bercorak serikat (RIS) ini agak berlawanan dengan NKRI. Sebagaimana diketahui bahwa NST lebih banyak menuntut pengembalian lahan-lahan perkebunan yang dikuasai swasta dan militer maupun penggarap kepada pemilik perkebunan yakni Belanda. Karena itu, NST lebih banyak menyuarakan pengembalian lahan perkebunan kepada Belanda daripada perjuangan kemerdekaan NKRI. Pada waktu pengukuhan kembali NKRI pada 15 Agustus 1950, maka NST dibubarkan. Sejak saat itu, kiprah politik Kaliamsjah Sinagapun turut memudar.

Tampak pada foto diatas sebelum menghadiri KMB di Den Haag tahun 1949 seperti Kaliamsyah Sinaga (berdiri paling kiri), Muhammad Hatta (duduk paling kiri), Tengku Mansur, (duduk di tengah), Ali Sastroamijoyo (berdiri paling kanan), dan Mr. Muhammad Roem (duduk paling kanan).



Kaliamsjah Sinaga dan delegasi NST di KMB, 1949

Sumber: kitlv.nl

Foto diatas memperlihatkan suasana di Den Haag pada waktu menghadiri KMB tahun 1949. Pada foto tampak Kaliamsjah Sinaga (duduk nomor 2 dari kiri), Muhammad Hatta (nomor 3 dari kiri), Tengku Mansur (nomor 4 dari kiri), Muhammad Roem (nomor 5 dari kiri), dan Mr. Ali Sastroamijojo (nomor 6 dari kiri).

Selanjutnya, Kaliamsjah Sinaga turut hadir pada Mukhtar Sumatera yang berlangsung di Medan pada bulan Maret 1949 di Medan. Mukhtar ini digelar sebagai langkah penyatuan persepsi terhadap rencana KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Mukhtar Sumatera ini dihadiri seluruh negara-negara bagian NST dari seluruh pulau Sumatera.



Sangmajadi Sinaga dan ketiga putranya, 1940

Sumber: kitlv.nl

Pada foto tampak Sangmajadi Sinaga (duduk) Raja Tanah Jawa periode 1919-1940, Kaliamsjah Sinaga, Omsjah Sinaga dan Kalam Sinaga. Sangmajadi Sinaga wafat pada 23 Juli 1940 dan digantikan Kaliamsjah Sinaga hingga meletusnya pembunuhan bangsawan Simalungun sejak 3 Maret 1946.



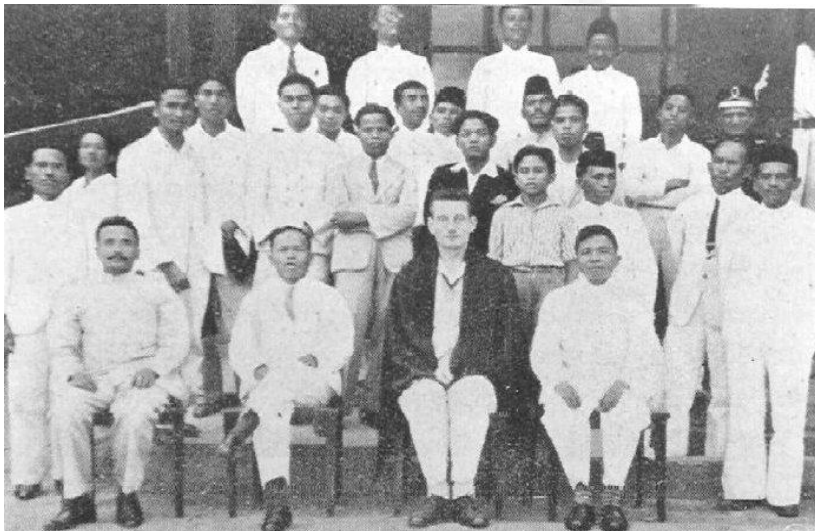
Kaliamjsjah Sinaga pada Mukttamar Sumatera, 1949
Tampak pada foto adalah Kaliamjsjah Sinaga (tengah), diapit Tengku Hafas dari Bedagai dan Tengku Damrah dari Kesultanan Serdang. Sumber: kitlv.nl

Berdasarkan tulisan Teeuw and Uhlenbeck (1997)⁸¹ didapat informasi bahwa Petrus Voorhoeve lahir pada 22 Desember 1899 dan meninggal pada 9 Februari 1996. Pada tahun 1918 menamatkan sekolah *Gymnasium (grammar school)* di kota Middelburg. Pada Juni 1921 menamatkan B.A., dan Februari 1925 lulus M.A. dengan Bahasa Melayu sebagai subjek utama kajian dan Bahasa Aceh dan Linguistik lainnya sebagai minor kajian. Selanjutnya, pada bulan September 1972 menamatkan Ph.D, dengan judul kajian '*Overzicht van de Volksverhalen der Bataks*' atau *A Survey of Batak Folk-Tales*.

Pada tahun 1937, Voorhoeve mendapatkan vokasi untuk mengkaji Bahasa Simalungun di *Zelfbesturende Landschappen* (pemerintah swapraja) Simalungun. Ia tinggal di Pematangsiantar dan memulai penyelidikan bahasa Simalungun serta menyusun diksiionari bahasa

⁸¹Lihat A. Teeuw and E. Uhlenbeck. 1997. In memoriam Dr. Petrus Voorhoeve 22 December 1899-9 February 1996, In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 153 no: 3, Leiden, 311-317

Simalungun. Pada tahun Januari 1933, Voorhoeve menyelesaikan kajiannya: *'Note on the study of linguistics and anthropology in the province of Sumatra'* yang diserahkan kepada Direktur Pendidikan di Jakarta (*Director of Education in Batavia*).



Petrus Voorhoeve di Simalungun, 1937

P. Voorhoeve (duduk di tengah mengenakan kemeja hitam) diapit Djaulung Wismar Saragih (kiri) dan DDjason Saragih (kanan).

Sumber: kitlv.nl

Menurut Teeuw and Uhlenbeck (1997), selama berada di Simalungun, Voorhoeve sangat disibukkan bukan hanya guna meneliti Bahasa Simalungun tetapi juga berbagai informasi tentang kebudayaan, etnografi, adat, teks dan performansi kultural. Secara khusus, Voorhoeve juga mengkaji tentang artefaktual berupa arca batu pemujaan (*steenplastieken*) atau (*stone sculptures*). Karena itu, pada tahun 1938, Voorhoeve meminta bantuan kepada G.L. Tichelman untuk mengedit karyanya tentang arca batu pemujaan di Simalungun itu.

Sumbangsih terbesar P. Voorhoeve yakni seorang *Talambtenaar* di Simalungun sejak tahun 1937 adalah karyanya berjudul: *Poestaka Simeloengen in Abad 20* (Th. IV, No. 47, Medan 23 November 1940). Demikian pula tulisannya tentang: *Simaloengoen Steenplastiek en Rotskamers* (Cultureel Indië no 2, pp 88-92). Voorhoeve adalah lulusan doktor (S3) yang mendedikasikan diri bagi penelitian

linguistik bahasa Simalungun. Menurutnya, bahasa Simalungun merupakan rumpun bahasa Austronesia yang lebih dekat dengan bahasa Sansekerta yang paling banyak mempengaruhi bahasa-bahasa di Indonesia. Voorhoeve membuktikan argumentasinya dengan menunjuk kekhasan (karakteristik) Bahasa Simalungun jika dibanding dengan bahasa-bahasa lain yang disebut dengan bahasa Batak (*Sinalsal* No. 90/September 1938 hlm. 22-23).

Sarjana Linguistik itu menyebut bahwa kedekatan bahasa Simalungun dengan bahasa Sansekerta ditunjukkan dengan huruf penutup suku mati 'uy', dalam kata 'apuy' dan 'babuy', atau 'g' dalam kata 'dolog', 'b' dalam kata 'abad', 'd' dalam kata 'bagod' dan 'ah' dalam kata 'bahah', 'sabah' juga 'ei' dalam kata 'simbei', dan 'ou' dalam kata 'sopou', 'lopou', dan lain-lain. Voorhoeve bekerja di Simalungun selama 2 tahun. Ia turut menggagas dan mendorong pemerintah Swapraja (*zelfbestuur*) dari 7 kerajaan Simalungun untuk membangun Museum Simalungun di Pematangsiantar. Pada tahun 1939, Museum Simalungun mulai dibangun dan selesai pada tahun 1940. Pada peresmian museum itu tahun 1940, Voorhoeve turut memberikan sambutannya.

Dalam tulisannya, Teeuw dan Uhlenbeck (1997) mengemukakan sebagai berikut:

He devoted himself with determined energy to the collection of information on anything Batak: not only all the Batak dialects, but also the material culture, ethnography, adat, texts, and cultural performances. In particular the so-called 'steenplastieken' (stone sculptures) in the Simalungun Batak area kept him busy. He had undertaken to help G.L. Tichelman with the final editing of his book on these sculptures (1938). Each time he received new information about an undescribed object, he would go and visit it, and additions were inserted in the text of the book until the last proofs. Still later additions were published in the journal Cultureel Indië. His reports faithfully mention his frequent tours and visits, which, like his illustrious predecessor Van der Tuuk, he often made on foot, to the farthest corners of the country. Apparently documenting and cataloguing for Voorhoeve was the first responsibility of a field worker. Perhaps his assiduous efforts in connection with the founding of a Simalungun Museum should also be seen in this light, as a considerable amount of his time had to be spent on this project during the two years preceding the opening of the museum on 30 April 1940.



Sorbaradja Saragih dikenal Tuan Silumbak, 1938

Sumber: Dasuha dan Sinaga, 2003

Penyebaran Kristen Protestan di Simalungun adalah kinerja misi RMG Jerman sejak tahun 1903. Pelayanan guna 'Memanusiakan Manusia' itu pada mulanya dikembangkan *zendeling* orang Toba dari Tapanuli Utara dan kemudian orang Simalungun yang sudah menamatkan sekolah Seminari (Theologia). Namun demikian, di Simalungun, terdapat nama yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan agama Protestan itu yang notabene bukan lulusan sekolah misi theologia.

Nama dimaksud adalah Sorbaradja Saragih atau yang lebih dikenal dengan '*Tuan Silumbak*' yakni pemimpin *partuanon* (desa induk) Silumbak sebuah desa di tepian Danau Toba dekat Haranggaol. *Partuanon* (desa induk) ini adalah salah satu wilayah dari Kerajaan Purba yang berpusat di Pamatangpurba, Simalungun, dari klan Purba Pakpak.

Foto Sorbaradja Saragih diatas adalah koleksi Daniel Saragih sebagaimana termuat pada Dasuha dan Sinaga (2004). Menurut sumber Dasuha dan Sinaga (2003) disebut bahwa Sorbaradja Dasuha dilahirkan tahun 1880. Ayahnya adalah Bosi Saragih, yakni seorang *puanglima* (panglima) di Kerajaan Purba, klan Purba Pakpak. Sorbaradja Saragih adalah seorang *datu bolon* (ahli nujum) yang sangat disegani. Ia bisa mendatangkan hujan, menghalau hujan, membuat lesung (*losung*) terbang, membuat alu (*andalu*) menari dan lain-lain.

Pada awalnya, ia adalah momok bagi sejumlah *zendeling* Simalungun. Ia banyak ditentang karena 'melarang' orang Simalungun beralih menjadi penganut agama Kristen (Protestan). Namun, karena bimbingan Jenus Purbasiboro, Sorbaradja Saragih mengalami pergumulan hidup. Tadinya Sorbaradja Saragih menolak Protestan, tetapi sejak tahun 1938 dirinya meminta agar ia di baptis. Pasca pembaptisan itu, Sorbaradja Saragih diangkat sebagai *Evangelis* (penyiar agama Protestan) GKPS dan aktif mengabarkan agama itu. Metode penyebaran yang dilakukan adalah sinkretisme antara dogma Protestan dan *Habonaron*, agama asli Simalungun. Dengan cara itu, banyak orang Simalungun yang masih beragama asli itu beralih menganut agama Protestan.

Pada waktu pembangunan Museum Simalungun tahun 1938, Sorbaradja Saragih turut hadir di Siantar. Pada momen bersamaan, Sorbaradja Saragih menerjemahkan *laklak* (tulisan pada kulit kayu) kepada Djaulung Wismar Saragih. Naskah yang terkandung pada *laklak* dimaksud adalah sebuah cerita rakyat tepatnya hikayat yang ditulis dalam aksara Simalungun. Naskah itu dibacakan Sorbaradja Saragih dan kemudian ditransiterasi huruf Latin oleh Djaulung

Wismar Saragih. Hikayat dimaksud adalah '*Pustaka Parpandangan Na Bolag*', yakni sebuah cerita rakyat Simalungun tentang *Kerajaan Nagur* dari klan Damanik. Naskah ini telah berulang kali di tulis dan terakhir pada tahun 2017 dengan membuat analisis wacana terhadap teksnya (Damanik, 2017)⁸².

Sorbaradja Saragih meninggal dunia pada 14 Februari 1966 dan dimakamkan di Silumbak, Simalungun. Ia adalah ahli nujum yang beralih menjadi *Evangelis* yang dari keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya memungkinkan orang Simalungun menerima ajaran Protestan. Tehnik ini adakalanya sangat mumpuni mengingat masyarakat Simalungun kala itu masih menganut agama asli (*parhabonaron*) yang dalam ajaran-ajarannya masih terdapat hal-hal mistis (gaib). Pada saat itu, Sorbaraja Saragih hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong guna menghantarkan orang Simalungun *parhabonaron* itu ke cakrawala dan horison baru melalui agama Kristen Protestan.

Mansen Purba dilahirkan pada tanggal 03 Juni 1937 di Pematang Raya, Simalungun. Menamatkan studi Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung. Mansen Purba menikah dengan Tuti Dora Rusnaini Sumbayak. Latar belakang hukum, membuat Mansen Purba penah menjadi pengacara (*advokat*) di Pematangsiantar. Selain itu, dalam bidang pendidikan, Mansen Purba pernah menjadi menjadi dosen di Universitas Simalungun.

Ayah dari Marim Purba, (mantan Walikota Pematangsiantar) ini pernah menyibukkan diri pada bidang politik dan pemerintahan seperti menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, ataupun menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golongan Karya Sumatera Utara. Dalam bidang kemasyarakatan, Mansen Purba pernah menjadi ketua *Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)* Provinsi Sumatera Utara. Mansen Purba pensiun dari '*Abdi Negara*' (PNS) tahun 1972.

Pada aspek kegerajaan, Mansen Purba banyak berkiprah di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Jasanya tampak pada persiapan pendirian GKPS Bandung, Jawa Barat lewat HKBPS. Ia (Mansen Purba) menjadi Pengantar Jemat (*Vorhanger*) atau pemimpin gereja pertama di GKPS Bandung pasca didirikan. Demikian pula Mansen Purba pernah menjadi *Ketua Umum Pemuda*

⁸²Lihat Erond L. Damanik (ed). 2017. *Analisis Teks Cerita Sejarah Parpandangan Na Bolag: Awal mula Kerajaan Nagur di Simalungun*. Pematangsiantar: KPBS. Lihat juga Erond L. Damanik. 2017. *Habonaron do Bona: Tantangan dan Refleksi Abad 21*. Medan: Simetri Institute

GKPS. Dalam bidang pemajuan kebudayaan Simalungun, Mansen Purba termasuk orang yang menyibukkan diri guna memperjuangkan dan meletakkan basis *hasimalungunon* pasca terhegemoni kebudayaan lain. Mansen Purba pernah bergabung dengan perkumpulan orang Simalungun yang disebut *Sauhur* (Sehati). Termasuk menjadi personil *Orkes Parlajang* (Orkes Perantau).



Mansen Purba

Sumber: <http://mansenpurba.blogspot.co.id//>

Pada perayaan ulang tahun ke 70, Mansen Purba dan keluarganya melakukan penanaman 1000 pohon seperti mangga, kemiri, *petai*, durian, pinus dan lain-lain di Sondi Raya. Sebelumnya, pada tahun 2003 sewaktu perayaan 100 tahun injil di Simalungun, juga dilakukan penanaman 2000 batang pohon seperti meranti, *ingul* dan kemiri. Aktifitas dan pengalaman hidupnya, telah dirangkum pada memoar pribadinya dengan judul: *Kenalkan, Mansen Purba: Guru Saya Marsimalungun* (2007) yang diterbitkan Bina Budaya Medan.

Mansen Purba adalah salah satu tokoh Simalungun yang bangkit kepermukaan pasca pembunuhan bangsawan 1946. Kesadaran dan kesetiaan terhadap etniknya Simalungun mereka tunjukkan lewat pemikiran dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Identitas Simalungun yang mengalami reduksi dan bahkan eksklusi karena hegemoni etnik lain, tiada lain harus ditunjukkan lewat pemikiran dan perbuatan Mansen Purba. Bersama dengan tokoh-tokoh Simalungun lainnya seperti T.B.A Tambak, Dkenan Purba, Djariaman Damanik, M.D.Purba, Djaniapoh Purba, Djapiten Sumbayak dan lain-lain adalah sekelompok elite Simalungun pasca pembunuhan bangsawan 1946 yang getol memperjuangkan '*hasimalungunon*' seperti kesenian, bahasa, adat istiadat, busana, dan lain-lain. Unsur-unsur nyata tentang identitas hasimalungunon ini mengalami reduksi dan hegemoni kultur orang lain selama periode kolonialisme dan *zending* Jerman. Merasa bahwa jati diri sebagai orang Simalungun mengalami kemunduran, juga dominasi etnik lain di Simalungun yang semakin tinggi, pun karena minimnya kaum terpelajar, minimnya elit politik dan pemerintahan dari Simalungun, maka memaksa orang Simalungun yang minim itu menyatakan pemikiran dan perbuatan nyata bagi Simalungun.

Itulah sebabnya, tokoh-tokoh seperti Dkenan Purba, M.D. Purba, Djariaman Damanik, TBA Tambak, Djaniapoh Purba, Djapiten Sumbayak dan lain-lain menyempatkan diri menulis gagasan, ide, pemikiran dan sejarah Simalungun. Mansen Purba menulis karyannya tentang Simalungun seperti: *Horja Sari Matua* (1994) bersama dengan O.E. Saragih, kemudian *Pangarusion Pasal Adat Perkawinan Simalungun* (1984), dan lain-lain.

Djariaman Damanik lahir pada 19 November 1920 di Pamatang Sidamanik, Simalungun dan meninggal tahun 2013 dalam usia 93 tahun. Djariaman Damanik terlahir di keluarga ningrat (*partongah*) Simalungun di *partuanon* (desa induk) Sidamanik, yakni salah satu wilayah di Kerajaan Siantar. Ayahnya adalah Ramahadin Damanik (*tuan* di Sidamanik) sedangkan ibunya adalah Inim Saragih. Djariaman Damanik adalah anak pertama dari 12 bersaudara.



Djariaman Damanik
Sumber: Beritasimalungun.com

Sekolah dasar ditamatkan dari *Zending School* di Sidamanik. Sekolah ini didirikan atas permintaan kakeknya yakni Riahata Damanik kepada *Zending* Jerman. Pasca tamat dari *Zending School*, Djariaman Damanik melanjutkan studi ke *Holands Indische School (HIS)* di Jalan Simarito Pematangsiantar. Sekolah ini memiliki asrama (*boarding* atau *internaat*) yang diprioritaskan bagi keturunan

bangsawan atau anak-anak pemimpin (*internat voor Hoofden Zonen*). Selanjutnya, pada tahun 1936, Djariaman Damanik melanjutkan studi ke *Hogere Burger School (HBS)* di Medan. Djariaman Damanik adalah lulusan hukum (Sarjana Hukum) Universitas Indonesia, Jakarta. Ia tinggal di asrama dan bekerja sebagai *part timer student* di perpustakaan. Pada tahun 1954, menyelesaikan studi dengan gelar '*Mesteer in de Rechten (MR)*' atau Sarjana Hukum. Djariaman Damanik menamatkan *post graduate* bidang hukum selama dua tahun di *Cambridge University*, Inggris. Juga pernah mengikuti pendidikan yang dilaksanakan PBB di Tokyo selama 4 bulan dan meraih predikat terbaik kedua.

Pasca menamatkan studi hukum, pada tahun 1956 menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Medan, dan pada tahun 1959 menjadi Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Selanjutnya, pada tahun 1963 diangkat menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Negeri Medan. Pada tahun 1967, diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, kemudian pada tahun 1972 diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Selama di Bali, pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali (1972-1980). Selanjutnya, pada tahun 1983 dipercaya menjadi Rektor Universitas Simalungun di Pematangsiantar.

Selama menempuh studi di Medan, pernah tinggal bersama dengan Rafii Damanik, Salimah Damanik, Satia Damanik dan Bunga Damanik, yakni putra putri Tuan Bandar di rumah Freichman di jalan Padang Bulan (*padangboelanweg*), Medan. Pernah juga tinggal bersama TBA. Tambak (anak raja Dologsilou), dan Omsjah Sinaga (anak raja Tanoh Djawa) di Medan. Pada waktu pendudukan Jepang, Djariaman Damanik turut serta latihan ketentaraan di Bengkulu. Kemudian, pada tahun 1944, ia mendapat tugas dari *Bun Syu Cho* (bupati era Jepang) untuk mengikuti pendidikan militer di Gunung Rintis, Deli Serdang. Selanjutnya, pada tahun 1945, Djariaman Damanik mendirikan *Pesindo* di Pamatangsidadamanik. Juga menjadi ketua Tani di awal kemerdekaan.

Pada tahun 1946 terjadi gerakan radikal guna menghapus kerajaan Simalungun berupa pembunuhan bangsawan, Ramahadin Damanik (ayah Djariaman Damanik) membawa serta keluarganya mengungsi ke Siantar guna menghindari peristiwa yang sama. Mereka bergabung dengan beberapa partongah Simalungun lainnya seperti Bisara Sinaga, Jansen Saragih, Baja Purba dan mendengar bahwa Jan Kaduk Saragih dari Raya telah ditangkap dan dibunuh. Atas saran dari *Yoshida* (opsir menengah Jepang), Djariaman Damanik bergabung dengan ketentaraan di Tapanuli Utara. Pada

waktu itu, ia menjadi Komando Resimen II di bawah pimpinan Jansen Siahaan.

Pada tahun 1949, Djariaman Damanik menikah dengan Martha Sidauruk dari Silampuyang. Salah satu putranya yang bergerak dalam bidang hukum adalah Ridwan Damanik, sedangkan anaknya yang lain adalah seperti Riasyah Damanik yakni seorang dokter dan pemilik *Hope Clinic* (klinik Kanker) di Teladan Medan.

Djariaman Damanik dan sejumlah tokoh lainnya seperti Aman Damanik turut mendukung dan memenangkan Dzulkarnain Damanik menjadi bupati Simalungun. Mereka berdua juga turut menggagas dan memprakarsai pendirian Sanggar Tari Simalungun di Medan sebagai penjaga musik, lagu dan *tortor* Simalungun. Pun mereka ini mendirikan majalah *Sauhur* sebagai pewarta tentang *hasimalungun* di Simalungun, Siantar, Sumatera Utara dan Indonesia. Kedua media ini menjadi salah satu alat mempromosikan kebudayaan Simalungun di tanah rantau yakni Medan.

Menjelang akhirnya hidupnya tahun 2013, Djariaman Damanik turut membantu sekuat tenaga pengusulan Sang Na Ualuh Damanik (raja Siantar) menjadi Calon Pahlawan Nasional dari Sumatera Utara. Pada saat itu, bertempat di Hotel Grand Antares Medan, dilakukan seminar nasional pengusulan Sang Naualuh Damanik menjadi Pahlawan Nasional. Acara itu dibuka Gubernur Sumatera Utara serta dihadiri Bungaran Saragih serta tokoh Simalungun lainnya. Namun, belum lagi berkas pengusulan calon Pahlawan Nasional Sang Na Ualuh Damanik selesai diperbuat, Djariaman Damanik jatuh sakit di Bali. Ia ke Bali dalam rangka perayaan ulangtahun hotel Puri Nusantara miliknya di Denpasar. Dari Bali, Djariaman Damanik di terbangkan ke Rumah Sakit di Jakarta. Ia menghembuskan nafas di Jakarta dan diterbangkan di Medan. Dari Medan selanjutnya dibawa dan dimakamkan di Sidamanik. Djariaman Damanik meninggal dalam usia 93 tahun. Mottonya adalah *Fight till the end for Simalungun*: Berjuang hingga akhir hayat bagi Simalungun. Buku memoar pribadinya terbit dengan judul: *80 tahun Mr. Djariaman Damanik: Seorang Ningrat, Pejuang Kemerdekaan, Penegak Hukum dan Tokoh Masyarakat* (2000).



J. Tideman, *Asisten Residen Simalungun, Jul 1917-Des 1921*
Sumber: kitlv.nl

Secara pribadi, penulis harus memasukkan nama Tideman dalam daftar orang-orang yang berkontribusi pada orang Simalungun. Kontribusi itu adalah upayanya menulis buku tentang Simalungun sewaktu menjabat sebagai Asisten Residen Simalungun (1917-1921) dengan judul: *Simeloengen: Het land der Timoer batak in zijn ontwikkeling tot Een Deal Van het Culturgebied van de Ooskust van Sumatera* (1922). Buku ini menjadi rujukan pertama tentang Simalungun secara holistik. Buku ini menjadi referensi wajib apabila berkeinginan menulis Simalungun dari perspektif historis. Dalam

buku itu, Tideman mengurai masa lalu Simalungun sebelum dan selama periode kolonialisme. Demikian pula ia menjelaskan tentang upaya-upaya pemerintah kolonial guna mendorong kemajuan bagi rakyat dan teritorial Simalungun hingga tahun 1920.



G.L. Tichelman, *Asisten Residen Simalungun, 1936-1938*

Sumber: kitlv.nl

G.L. Tichelman adalah Asisten Residen Simalungun yang paling banyak mengunjungi daerah-daerah di Simalungun selama menjabat sebagai Asisten Residen periode 1936-1938. Daerah-daerah Simalungun yang dikunjunginya selain Siantar adalah seperti Bandar, Sipolha, Tigarasa, Purba, Saribudolog, Silimahuta, Nagori Dolog, Panei, Raya, Parapat, Silou Kahean dan lain-lain.

Tichelman juga menulis tentang Simalungun seperti: *Timoer-Bataksch Dorpstaboe voor de Ladang-Beplanting* (Desa dan

Perladangan di Simalungun), *Beschrijving van de Ablutie vóór het huwelijk in Simalungun* (Deskripsi sebelum pernikahan di Simalungun), *Enkele Simaloengoensche Gebedsformulieren, Offeranden en Afweermiddelen* (Doa Pengorbanan dan Tolakbala pada orang Simalungun), *Timoer Bataksch reveil, Local patriotisme in het Timoer Bataksch gebied ter Sumatra's Ooskust, Dr P. Voorhoeve over rotsgraven in Simaloengoen*, (*Cultureel Indië* no, 1, pp 261-264, 1939), *Felsengänge an Sumatras Ostküste* (*Paiduma Journal*, Germany, 1939) dan lain-lain. Beberapa foto arsip kolonial yang menunjukkan aktifitas Tichelman selama menjabat sebagai Asisten Residen di Simalungun.



Tichelman mengunjungi Kama Damanik di Bandar, 1936

Sumber: kitlv.nl



G.L. Tichelman dan Pinta P. J. Hamonangan Damanik (*tuan Sipolha*) di Sipolha, 1937
Sumber: kitlv.nl



G.L. Tichelman di Saribudolog, 1937
Sumber: kitlv.nl



G.L. Tichelman di Silou Kahean, 1936

Sumber: kitlv.nl



Menyambut G.L. Tichelman di Pamatangbandar, 1937

Sumber: kitlv.nl



(kiri-kanan): **Taraman** (Dirjen Pemasyarakatan), **Radjamin Purba** (Bupati Simalungun), **Madja Purba** (Bupati Simalungun, Bupati Tapanuli Utara dan Walikota Medan), dan **Tn. Medan** (Kepala Pertanian Sumatra Utara), 1971. Sumber: Istimewa.



Radjamin Purba dan Pangeran Bernard (Belanda), 1971 di Kabupaten Simalungun. Sumber: istimewa.



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB VIII

ELITE SIMALUNGUN (1920 hingga 1970)

A. Pendahuluan

Bab ini secara khusus membicarakan tentang elit di Simalungun sesuai dengan foto-foto arsip yang tersedia di Belanda dan Jerman ataupun sumber lain yang kiprah ke-elite-annya berada pada kurun waktu tahun 1920 hingga 1970. Dalam naskah ini, elite dibagi dalam dua kategori yakni elit Simalungun yakni yang berasal dari dalam etnik Simalungun itu sendiri, sedangkan lainnya adalah elite yang berasal dari luar etnik Simalungun. Boleh jadi, mereka ini adalah orang Belanda atau orang Jerman yang memiliki pekerjaan dan pemikiran luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan Simalungun dewasa ini. Persamaan dari kedua kategori elite itu adalah keduanya memiliki karsa, karya dan tindakan luar biasa terutama bagi kemajuan di Simalungun.

Foto-foto arsip yang tersedia pada sumber *online* di Belanda menyuguhkan tentang elite (*ningrat*, *partongah* atau bangsawan) yakni pemerintah swapraja (*zelfbestuur*) Simalungun. Foto-foto itu lebih menitikberatkan pada aktifitas elite seperti rapat, sidang, pertemuan ataupun menyambut para asisten residen, gubernur, menteri negara maupun gubernur jenderal, maupun pengusaha perkebunan di Simalungun. Foto-foto yang menunjuk pada elite Simalungun ditunjukkan secara individualis menyerupai orang Eropa, tetapi tetap digambarkan statis karena terikat dengan norma-norma adat Simalungun yang rumit.

Elite swapraja Simalungun pada era kolonialisme yakni golongan bangsawan yang mendapat kesan pertama tentang orang Eropa. Mereka ini adalah peniru pertama tentang kebudayaan Eropa lewat gaya berpakaian, memanfaatkan waktu luang, menikmati fasilitas yang disediakan orang Eropa dan lain-lain. Kebanyakan foto-foto elite Simalungun (raja) selalu dipotret mengenakan pakaian tradisional dan sedikit foto mengenakan pakaian putih ataupun pakaian sebagai pejabat pemerintah kolonial. Mereka ini dianggap sebagai sekutu kolonial karena melalui merekalah masyarakat Simalungun dapat 'dijinakkan' sehingga eksploitasi sumber daya tanah dapat berjalan mulus. Foto-foto elite (raja dan *pangulu balei* atau juru tulis raja) selalu digambarkan berwajah murung dan menunduk sebagai cara orang Simalungun menyambut tamunya

yakni orang Eropa. Penggambaran seperti ini cenderung negatif tetapi momen itulah yang dipilih fotografer guna menunjukkan masyarakat dan kebudayaan ‘tanah jajahan’ di Simalungun. Namun demikian, foto-foto itu menjadi penanda tentang khasanah masyarakat dan kebudayaan Simalungun pada periode awal hingga kolonialisme di Simalungun.



7 penguasa lokal (*swapraja*) Simalungun, 1935

(ki-ka) Gomok Saragih Garingging (Raja Raya), Bosar Sumalam Purba Dasuha (Raja Panei), Sang Madjadi Sinaga (Raja Tanah Djawa), Ragaim Purba Tambak (Raja Dologsilou), Padiraja Purba Girsang (Raja Silimahuta), Sawadin Damanik (Raja Siantar) dan Karel Tanjung Purba Pakpak (Raja Purba), pada waktu penganugerahan Satya Lencana Kesetiaan ‘Gouden Ster’ kepada Sawadin Damanik di Pematangsiantar, 1 Juni 1935.

Sumber: kitlv.nl

Elite atau *eligere* menurut Keller (1995)⁸³ adalah ‘memilih’ yang kemudian dipergunakan dalam arti paling umum yakni ‘sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat’. Seperti disebut Keller(1995), elite dipergunakan untuk membedakan

⁸³Lihat Suzanne Keller. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektifitas dengan cara bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggungjawab terhadap realisasi tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung. Pernyataan Keller (1995) menyebutkan bahwa dalam masyarakat ada personal yang 'terpilih' yakni elite dari masyarakat.

Elite adalah sekumpulan (sekelompok) kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya mendapatkan dan menduduki posisi untuk memerintah dalam masyarakat. Karena itu, elite selalu berhubungan dengan politik yakni orang tertentu yang berkuasa dan mengemban tugas dengan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Elite selalu berhubungan dengan kelas penguasa (*the rulling class*) maupun kelompok berkuasa (*the rulling elite*). Kekuasaan dapat dicapai oleh kelas penguasa dan menjadi kelompok berkuasa. Namun demikian, adakalanya kekuasaan dicapai melalui kumpulan massa jika elite yang berkuasa kehilangan kemampuan untuk memerintah. Berdasar pada konsepsi ini, maka sebenarnya masyarakat terdiri dari lapisan sosial yang disebut kelas atau stratifikasi. Kelas sosial itu terjadi karena posisi sosial ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.

Berdasarkan penulis Masoed dan MacAndrew (2006)⁸⁴ disebut bahwa elite dalam masyarakat memiliki kecenderungan yakni: *pertama*, kekuasaan dalam masyarakat terdistribusikan dengan tidak merata dan hanya dimiliki orang atau sekelompok orang yang disebut elit. *Kedua*, secara internal, elit bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok serta mengatur sendiri kelangsungannya dan karena itu elit menjadi otonom. Dalam hal ini, elit menjadi otonom guna menjalankan otoritas, wewenang atau kekuasaan serta menjadi referensi bagi pejabat atau pemerintah di Simalungun.

Masyarakat di Sumatera Utara pada era kolonialisme hingga 1942 sebagaimana disebut Van Langenberg (1976)⁸⁵ terdiri dari dua dua kategori yakni: i) elite atas yakni orang Eropa dan Asia yakni pengusaha perkebunan dan pejabat pemerintah, ii) elite menengah yakni pribumi yaitu bangsawan, pedagang, dan pengusaha

⁸⁴Lihat Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrew. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁸⁵Lihat Michael van Langenberg. 1976. *National Revolution in North Sumatera: Sumatera Timur and Tapanuli, 1942-1950*. Ph.D Thesis. Sydney, Australia.

perkebunan. Kedua elite ini menduduki kelas sosial tertinggi di Sumatera Timur hingga tahun 1946.



Penganugerahan Bintang Kesetiaan ‘Gouden Ster’ kepada Sawadim Damanik di Pematangsiantar, 1 Juni 1935.

(Kiri-kanan) Sangmajadi Sinaga (Raja Tanoh Jawa), Gaib Purba (Partuanon Silou Kahean), Gomok Saragih Garingging (Raja Raya), Sawadim Damanik (Raja Siantar), Bosar Sumalam Dasuha (raja Panei), Ragaim Purba Tambak (Raja Dolog Silou, Mogang Purba Pakpak (Raja Purba), Desta Bulan Damanik (Partuanon Bandar), dan Padiraja Girsang (Raja Silimahuta).

Sumber: kitlv.nl

Penulis seperti van Langenberg membuat kategori sosial elit di Sumatera Utara berdasarkan kepemilikan modal ekonomi dan pengaruh politik. Hal ini berarti bahwa orang Eropa dan Asia terutama Tionghoa adalah kelas sosial atas karena keberadaan kapital dan politik. Diluar elite ini, maka masyarakat kebanyakan baik kuli pendatang maupun masyarakat asli Sumatera Utara adalah non elite yang dianggap tidak memiliki kekuasaan.

Elite masyarakat seperti disebut van Langenberg (1976) itu berbeda dengan kategori elit seperti disebut Pelly (2015). Sebenarnya, Pelly tetap merujuk kategorisasi elit seperti dibuat van Langenberg. Namun, Pelly lebih membuat kategorisasi yang lebih

luas dengan cara menempatkan orang-orang profesional maupun karena pendidikan. Karena itu, Pelly (2015) menyebutkan kelas sosial masyarakat di Sumatera Timur hingga tahun 1946 adalah: i) elite atas yakni pengusaha Eropa, pengusaha Tionghoa, pejabat kolonial dan bangsawan, dan ii) elit menengah yakni para pedagang, profesional dan terpelajar.



Gomok Saragih (*Raja Raya*) menyambut H.A. van Karnebeek (*Menteri Negara Kolonial*) di Pamatangraya, 1935

Sumber: kitlv.nl

Kategorisasi masyarakat di Sumatera Timur hingga 1946 ini merupakan kelas masyarakat yang terbentuk di era kolonialisme. Posisi orang Eropa dan Tionghoa di Sumatera Timur memegang kendali dan pengaruh besar karena pemilikan modal dan kekuasaan politik terhadap masyarakat pribumi. Sementara, orang pribumi yang memiliki kedekatan khusus terhadap orang Eropa lebih dimungkinkan karena kebangsawanan (*ningrat*). Posisi sosial yang dicapai seperti ini bukan karena dampak politik dan pendidikan ataupun ekonomi. Karena itu, dimata orang Eropa, bangsawan pribumi tetap dipandang rendah. Mereka hanya dipakai sebagai upaya legitimasi terhadap eksploitasi tanah-tanah yang diperlukan pemerintah kolonial, ataupun mengendalikan masyarakat pribumi melalui peradilan pribumi (*kerapatan*).

B. Kelompok elit di Simalungun

Elit di Simalungun dapat dikelompokkan pada 4 kategori, yakni: i) periode sebelum kolonialisme, ii) periode selama kolonialisme (1907-1946), iii) periode tahun 1946-1960, dan iv) periode tahun 1960-1980. Adapun masing-masing stratifikasi sosial yang menggambarkan kelas elit (*upper class*) di Simalungun adalah sebagai berikut:

Kelas sosial Simalungun pra kolonialisme

No	Stratifikasi (kelas)	Komponen	Kelompok
1	<i>Upper class</i> (kelas elite)	<i>Partongah</i> (bangsawan)	Raja, Tuan (pemimpin desa induk) serta kerabatnya
2	<i>Middle class</i> (kelas menengah)	<i>Paruma</i> (pedangan dan profesional)	<i>Pangulu balei, tungkat harajaan</i> (pegawai kerajaan), <i>gamot</i> , pedagang, petani dan pemilik lahan yang luas.
3	<i>Lower class</i> (kelas rendah)	<i>Simbuei</i> (masyarakat kebanyakan dan budak)	Petani, pedagang, <i>parambou</i> , penggarap, budak dan lain-lain.

Sebagai kelas elit pada periode ini berasal dari kelas *partongah* (bangsawan) yakni mereka yang menduduki kelas pemimpin (*chiefdom*) yang diperoleh secara turun temurun (askriftif) sehingga status sosial itu disebut *ascribed status*. Pada periode ini, unsur masyarakat yang tergabung pada *partongah* adalah raja dari Simalungun, beserta pemimpin di desa induk (*partuanon*). Mereka ini disebut '*toehan na taridah*' atau wakil tuhan yang nampak di bumi. Karena itu, mereka adalah objek sembah sebagai sumber hukum dan keteraturan sosial (*social order*) dalam segala hal seperti hukum dan penyelesaian sengketa agraria, hukum adat istiadat perkawinan, kematian, kelahiran, membuka kampung (*sipukkah huta*) dan lain-lain.

Kelas sosial masyarakat Simalungun, 1907-1946

No	Stratifikasi (kelas)	Komponen	Kelompok
1	<i>Upper class</i> (kelas elite)	<i>Partongah</i> (Bangsawan)	Pejabat pemerintah kolonial, pemimpin gereja, pedagang dan profesional Eropa dan Tionghoa serta <i>planters</i> (pengusaha perkebunan) Eropa dan Tionghoa
2	<i>Middle upper class</i> (kelas elit menengah)		<i>Zelfbestuur</i> (pemerintah swapraja) dan <i>Tuan</i> (pemimpin desa induk) dari tujuh kerajaan Simalungun.
3	<i>Middle class</i> (kelas menengah)	<i>Paruma</i>	<i>Kaum terdidik pribumi, Politisi, Pangulu balei, tungkat harajaan</i> (pegawai kerajaan), <i>gamot</i> , pedagang, petani dan pemilik lahan yang luas.
4	<i>Lower class</i> (kelas rendah)	<i>Simbuei</i> (masyarakat kebanyakan dan budak)	Petani, pedagang, <i>parambou</i> , penggarap, budak dan lain-lain.

Pada saat pendudukan kolonialisme Belanda di Simalungun, susunan kelas sosial turut terpengaruhi. Hal ini didasarkan pada sumber kekuasaan, legitimasi, dan kepemilikan modal. Pada saat pendudukan kolonialisme ini, kelas bangsawan (*partongah*) di bagi dua yakni *upper class* (elit atas) dan *middle upper class* (elit atas menengah). Adapun *upper class* diduduki pejabat pemerintah kolonial Belanda seperti *asisten residen* dan *controleur*. Kelas sosial elite ini ditambah sejumlah profesional Eropa dan Tionghoa seperti pemilik hotel, pemilik vila, pemilik bioskop, kepala perbangkan, kepala polisi, kepala militer, Kapiten Tionghoa dan India, kepala departemen dan lain-lain. Demikian pula kelas elite ini ditambah sejumlah pengusaha perkebunan orang Eropa maupun Tionghoa di Simalungun. Posisi pemimpin gereja seperti August Theis dan H. Guillaume serta rohaniawan Eropa lainnya menampati kelas sosial elit (*partongah*) Eropa ini.

Sedangkan posisi *middle upper class* diduduki *partongah* Simalungun yakni raja, pemimpin desa induk (*partuanon*) dari 7

kerajaan dan 26 *partuanon* di Simalungun. Peralihan posisi partongah Simalungun dibawah partongah Eropa dan Tionghoa seperti di Simalungun lebih didasarkan pada sumber kuasa dan pemerintahan maupun kepemilikan modal. Pada saat itu, partongah Simalungun menjadi subordinat dari orang Eropa dan Tionghoa sebagai yang menduduki ordinat. *Partongah* Simalungun hanya menjadi 'boneka' dan legitimasi terhadap kekuasaan kolonial di Simalungun. Dalam arti kata, *partongah* Simalungun hanya dijadikan sebagai sumber legitimasi bagi kawula pribumi (*inlanders*) sehingga memudahkan kontrol (pengawasan) terhadap masyarakat. Hal ini jelas tampak pada aspek peradilan lewat *Kerapatan (balei, urung dan Nabolon)* bagi kawula pribumi (Simalungun dan imigran lainnya) sedangkan orang Eropa dan Tionghoa tunduk pada *Raad van Justicie* (Peradilan Negeri).

Sedangkan *middle class* (kelas menengah) atau paruma pada periode ini adalah kaum terdidik pribumi yang sudah mendapatkan pendidikan Eropa baik di sekolah Belanda, sekolah perkebunan maupun sekolah *zending*. Mereka ini adalah kelas sosial menengah baru di Simalungun yang karena fasilitas dan kesempatan yang ada mampu memasuki arena (ruang) sosial lewat aspek pendidikan. Mereka inilah yang kemudian menduduki posisi sosial 'rendah' sebagai kerani, *clerk* atau juru tulis, mandor kebun, mandor pemerintah dan lain-lain. Demikian pula sejumlah nama orang Simalungun yang mendapatkan pendidikan *zending* dan melayani di institusi gereja, naik ke permukaan lewat *assigned status* (perolehan status karena prestasi). Sejumlah nama yang pantas di catat adalah seperti Madja Purba, Baja Purba, Mogang Purba, Djaidin Purba, Kaliamsjah Sinaga, TBA. Tambak, Rafii Damanik, Salimah Damanik, Omsjah Sinaga, Satia Damanik, Bunga Damanik, Djasamen Saragih, Djaidin Saragih dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan pendidikan modern ala Barat karena menjadi keluarga *partongah zelfbestuur* di Simalungun.

Lewat pendidikan *zending* RMG, sejumlah nama Simalungun yang menduduki kelas menengah yang pantas dicatat adalah seperti: Djason Saragih, Djaulung Wismar Saragih, Andaraya Wilmar Saragih, T. Belzazar Sinaga, Loranna Purba, dan lain-lain. Mereka inilah yang menggagas pendirian *Kongsi Laita, Komite Na Ra Marpodah (1928)*, *Kongsi Laita* di Sondi Raya (1931) penerbitan majalah *Sinalsal*, maupun Perguruan Saksi-saksi Kristus dan *Kongsi Bibel Simalungun (1942)*. Mereka ini juga memprakarsai pembukaan dan pendirian sekolah yang disebut *Volkschool* (sekolah rakyat) dan *Vervolgschool* di Pematangraya tahun 1929 ataupun sekolah pendeta

di Raya tahun 1930. Melalui organisasi, sekolah dan media itu, elit menengah Simalungun ini mulai menyuarakan *Hasimalungon* ditengah-tengah gemuruh pendatang Eropa, Toba, Jawa dan pendatang lainnya di Simalungun. Kelas sosial menengah demikian ditambah sejumlah orang Simalungun yang meniti karir lewat kelaskaran (militer Jepang) seperti Djariaman Damanik, Lahiradja Munthe, Laurimba Saragih, Pieter Damanik, T.M. Mardjans Saragih, Radjamin Purba, A.E. Saragihras, Djatongam Sitio, Djatongam Sumbayak, Bagus Saragih dan lain-lain.

Kelas sosial masyarakat Simalungun, 1946-1960

No	Stratifikasi (kelas)	Komponen	Kelompok
1	<i>Upper class</i> (kelas elite)	<i>Partongah</i> (Bangsawan)	Politisi dan pemimpin militer berpendidikan Eropa
2	<i>Middle upper class</i> (kelas elit menengah)		<i>Zelfbestuur</i> selamat pada 1946 dan berpendidikan Eropa, pemuka agama menamatkan pendidikan <i>Zending</i> .
3	<i>Middle class</i> (kelas menengah)	<i>Paruma</i>	<i>Pedagang, pegawai Republik, militer rendahan dan lain-lain</i>
4	<i>Lower class</i> (kelas rendah)	<i>Simbuei</i> (masyarakat kebanyakan dan budak)	Petani, pedagang, <i>parambou</i> , penggarap, budak dan lain-lain.

Pembunuhan bangsawan Simalungun pada Maret 1946, mengakibatkan hilangnya satu susunan masyarakat Simalungun yakni bangsawan. Mereka yang menjadi sasaran gerakan radikal pada Maret 1946 itu adalah Raja (pemerintah di *pamatang*) dan *partuanon* (pemimpin desa induk). Namun, tidak semuanya raja dan *partuanon* dapat ditangkap dan dibunuh. Beberapa raja dan *partuanon* serta kerabatnya dapat lolos dari serbuan itu. Hilangnya kelas bangsawan pada Maret 1946 itu mengakibatkan naiknya kelas *middle upper class* dan *middle class* ke posisi *upper class*. Pada waktu itu, adapaun sejumlah kelompok masyarakat Simalungun seperti politisi berpendidikan Eropa dan militer pendidikan Jepang. Tersebut beberapa nama pada kelas elit *partongah* Simalungun pada periode ini adalah seperti Madja Purba, Baja Purba, Djaidin Saragih,

Kaliamsjah Sinaga, Djomat Purba, Lahiradja Munthe, Laurimba Saragih, T.M. Mardjan Saragih, Radjamin Purba, A.E. Saragihras, Djatongam Sitio dan lain-lain.

Kelaurga bangsawan yang selamat dari serbuan gerakan radikal Maret 1946, mencoba memulihkan hak-hak swapraja lewat federalisme Negara Sumatera Timur. Tersebut diantaranya adalah Kaliamsjah Sinaga, (wakil wali negara Sumatra Timur), Djomat Purba (Kepala Kepolisian *Blue Piper* Negara Sumatera Timur) maupun Djaidin Purba (Walikota Medan era NST) dan lain-lain. Namun, perjuangan memulihkan hak-hak swapraja serta harta rampasan Maret 1946 maupun persoalan tanah-tanah yang digarap para imigran Jawa dan Toba, tidak berhasil di lakukan. Pada 15 Agustus 1950, NST di bubarkan dan perjuangan elit Simalungun inipun menemukan kegagalan. Pada periode ini, Djaidin Purba dan Madja Purba menjadi bagian kelas elit Simalungun yang menduduki jabatan penting sebagai walikota Medan.

Sedangkan di kelas menengah pada periode ini berasal dari kaum terdidik Simalungun yang menamatkan sekolah dari *zending* RMG. Mereka ini, walaupun bekerja di sektor agama, tetapi turut mengembangkan *hasimalungunon* lewat institusi etnoreligio itu. Pada tahun 1952, 7 orang pendeta Simalungun ditahbiskan seperti Frederik Damanik, Petrus Purba, Mailam Purba, Samuel Dasuha, Bonarcus Saragih, Marinus Girsang, dan Williamer Saragih. Mereka ini menambah deretan kelas sosial menengah Simalungun yang berjuang lewat institusi gereja seperti Djason Saragih, Djaulung Wilmar Saragih, Andaraya Wilmar Saragih, Kerpanius Purba, Jonathan Purba, Jenus Purbasiboro, Lesman Purba, Armensius Munthe dan lain-lain. Perjuangan mereka pada awal tahun 1950-an adalah meminta pembentukan HKBPS sebagai satu distrik di HKBP. Pemandirian HKBPS ini menjadi embrio GKPS yang resmi mandiri dari eksklusi etnoreligio-nya pada tahun 1963.

Kelas sosial masyarakat Simalungun, 1960-1980

No	Stratifikasi (kelas)	Komponen	Kelompok
1	<i>Upper class</i> (kelas elite)	<i>Partongah</i> (Bangsawan)	Politisi, kepala daerah, pemimpin militer, pemimpin partai politik, pemimpin paguyuban sosial (PMS, GKPS, Himapsi dll)
2	<i>Middle class</i> (kelas)	<i>Paruma</i>	<i>Profesional, pegawai pemerintah, polisi dan</i>

	menengah)		<i>militer, pedagang sukses yang sudah menamatkan pendidikan modern.</i>
3	<i>Lower class</i> (kelas rendah)	<i>Simbuei</i> (masyarakat kebanyakan dan budak)	Petani, pedagang, <i>parambou</i> , penggarap, budak dan lain-lain.

Menjelang tahun 1960, sejumlah nama Simalungun melejit ke permukaan seperti Andaraya Wilmar Saragih, Jenus Purbasiboro, Lesman Purba lewat HKBPS dan Radjamin Purba sebagai Bupati Simalungun (1960-1973). Kemudian, pada tahun 1963, Jenus Purbasiboro menjadi pimpinan tertinggi (Ephorus GKPS). Kemudian, pada tahun 1967, Laurimba Saragih ditetapkan menjadi Walikota Siantar (1967-1983). Mereka ini adalah trio elit Simalungun yang mengabdikan diri bagi kemajuan etnik Simalungun, pembangunan Simalungun dan kultur (identitas) Simalungun. Lewat trio kepemimpinan kharismatik Simalungun ini, identitas *hasimalungunon* diinventarisasi dan direvitalisasi guna mengejar keterbelakangan akibat hegemoni etnik lain. Tersebut beberapa diantaranya adalah seperti: lahirnya *Partuha Maujana Simalungun (PMS)*, pengelolaan *Rumah Bolon Purba* dan Museum Simalungun, aktualisasi *Habonaron do Bona (HdB)* di logo Kabupaten Simalungun, pencantuman semboyan *Sapangambe Manoktok Hitei* menjadi semboyan Kota Pematangsiantar, pendirian Universitas Simalungun pada 18 September 1965, pendirian *Pelayanan Pembangunan (Pelpem) GKPS* kerjasama dengan VEM Jerman pada 15 Januari 1965, seminar kebudayaan Simalungun pertama tahun 1964 di Pematangsiantar, mendirikan pusat pendidikan GKPS di Pematangraya (1964), pendaftaran GKPS menjadi anggota PGI Pusat dan lain-lain.

Pada era ini, sejumlah priyayi Simalungun dari kelas sosial menengah ini naik ke permukaan menjadi kelas elit seperti TBA. Tambak, Djariaman Damanik, Djaniapoh Purba, Dkenan Purba, MD. Purba, Mansen Purba, Djahutar Damanik, Rudolf Purba, J.E Saragih, Djapiten Sumbayak dan lain-lain. Mereka ini turut mengagagas *hasimalungunon* melalui kemampuan menulis mereka seperti: *Sejarah Simalungun* (TBA Tambak, 1976), *Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun* (M.D. Purba, 1986), *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun* (M.D. Purba, 1979), *Sejarah Asal usul terjadinya dan Makna Nama Simalungun* (Dkenan Purba, 1987), *Adat Istiadat Simalungun: Pelaksanaan dan*

Perkembangannya (Dkenan Purba, 1997), *Jalannya Hukum Adat Simalungun* (Djahutar Damanik, 1973), *Raja Sang Nauuluh: Sejarah Kebangkitan bangsa ini* (Djahutar Damanik, 1987), *Partongah Naitukkup: In Memoriam Tuan Laen Tahan Batu gelar Partongah Naitukkup, Tuan Sipolha ke XIV*, (Djahutar Damanik, 1990), *Aksara dan Bahasa Simalungun* (Rudolf Purba, 1964), *Pembangunan dan Perubahan Struktur Desa di Kabupaten Simalungun* (Radjamin Purba, 1972), *Pustaka Laklak No. 252 Simalungun* (J.E Saragih, 1988), *Kamus Simalungun-Indonesia* (J.E. Saragih, 1989), *Refleksi Habonaron do Bona dalam adat Budaya Simalungun* (Djapiten Sumbayak, 2005), *Pangarusion Pasal Adat Perkawinan Simalungun* (Mansen Purba, 1984), dan lain-lain.

C. Perubahan kelas elit Simalungun

Tak ubahnya di Simalungun, kelas sosial tertinggi atau elit tertinggi tetap berada pada orang Eropa dan Tionghoa, sementara bangsawan Simalungun menjadi kelas (*elite*) menengah. Para elit Simalungun ini berada dibawah kendali orang Eropa untuk menjalankan politik kekuasaan dan perkebunan (ekonomi). Para bangsawan ini dinilai memiliki kedekatan khusus terhadap orang Eropa terutama keperluan tanah, dan karena itu para bangsawan ini dianggap mendapatkan fasilitas atas sewa tanah, pajak dan ragam retribusi. Karena itu, tidak mengherankan apabila bangsawan Simalungun terutama di empat lokasi kerajaan yakni Siantar, Tanoh Djawa, Panei dan Dolog Silou memiliki kepemilikan modal yang lebih dibandingkan dengan tiga kerajaan lainnya. Bahkan, diantara 4 kerajaan yang menjadi areal perkebunan kolonial di Simalungun, maka Kerajaan Siantar dan Tanoh Djawa memiliki fasilitas yang lebih lengkap diantara lima kerajaan lainnya.

Jikapun muncul sejumlah orang terdidik (terpelajar) dari Orang Simalungun di era kolonialisme, maka mereka itu adalah keluarga bangsawan atau mereka yang masih memiliki hubungan dengan kerajaan. Mereka ini bukan hanya menyelesaikan pendidikan *Volkschool*, *Volgeschool*, *HIS*, *AMS* tetapi juga perguruan tinggi di dalam negeri dan Belanda. Sebut saja seperti Djaidin Purba dari *Partuanon* Nagori di Kerajaan Purba, Madja Purba dari Kerjaan Purba, Mogang Purba dari Kerajaan Purba, Kaliamsjah Sinaga dari Kerajaan Tanoh Djawa, ataupun Djaudin Saragih yakni *Pangulu Balei* di Kerajaan Siantar, pun Djasamen Saragih anak dari Djaudin Saragih dan lain-lain.



Ragam Purbatambak dan panglima, Dolog Silou, 1935

Sumber: kitlv.nl

Demikian pula sejumlah orang Simalungun yang mendapatkan pendidikan di era *zending* seperti Djason Saragih dan Djaulung Wismar Saragih yang memang berasal dari *abdi dalem* Kerajaan Raya. Pada intinya, jarang sekali masyarakat yang tidak memiliki gelar kebangsawanan ataupun *abdi dalem* kerajaan akan mendapatkan fasilitas seperti pendidikan.

Kedekatan-kedekatan yang dimiliki para bangsawan Simalungun baik dari keluarga kerajaan ataupun *partuanon* menciptakan tatatan sosial yang lain di Simalungun. Elite bangsawan Simalungun ini menjadi megah diri, penampilan kebarat-baratan, gaya hidup mewah, arogan, suka berpesta, rapat dan pertemuan dengan pejabat kolonial, mengendarai mobil dan lain-lain tetapi tidak pernah memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat kebanyakan. Justru, tanah-tanah yang digadaikan bangsawan kepada pengusaha membuat bangsawan itu lupa diri atau lupa memikirkan keberlangsungan masyarakatnya.

Tingginya kaum pendatang seperti Jawa dan India yang menjadi kuli perkebunan, ataupun orang Tionghoa yang menjadi pedagang di Simalungun, demikian pula pendatang Toba yang arogan karena kedekatannya dengan *zending* Jerman ataupun karena kedekatannya dengan pemerintah kolonial, maka mereka ini sesuka hati

menggarap tanah di Simalungun. Sementara itu, peran bangsawan yang seharusnya membela orang Simalungun yang tengah terdegradasi karena tingginya imigran dan kehilangan tanah, justru kehilangan patron.

Demikian pula menyoal kemerdekaan Indonesia 1945 dimana para bangsawan ini memperlihatkan penolakan terhadap proklamasi. Meskipun pada akhirnya mereka menerima proklamasi 2 bulan pasca tanggal 17 Agustus 1945, keadaan itu tidak merubah pandangan kaum Republik terhadap bangsawan. Kenyataan seperti inilah pada akhirnya mendasari letupan sosial pada 3 Maret 1946. Pasca gerakan radikal pada bulan Maret 1946 itu, kelas elit menengah yakni bangsawan yang terjungkal di Simalungun tergantikan oleh kelas sosial baru yang lebih mencerminkan kelas sosial sesama pribumi di Simalungun.



Rahalim Purbapakpak (*Raja Purba*) dan panglima, 1935
Sumber: kitlv.nl

Pada saat itu, kelas elit tertinggi dalam kasta sosial masyarakat pasca gerakan radikal ini bukan lagi dipegang orang Eropa ataupun orang Tionghoa, ataupun elite menengah yang didominasi bangsawan berubah total. Pasca gerakan itu, kelas elit tertinggi dipegang oleh kaum terpelajar, politisi dan militer eks militer era Jepang, sementara kelas elit menengah diisi oleh kaum profesional

seperti pedagang dan pengusaha. Ironisnya di Simalungun, kelas sosial bangsawan sebelum tahun 1946 tetap mencoba meraih dan mempertahankan posisi sosialnya tetapi semakin deras tuntutan negatif terhadap para bangsawan ini, membuat posisinya semakin rapuh.

Kelas elit pasca gerakan sosial 1946 di Simalungun ternyata di isi oleh orang Toba terpelajar, sementara kaum terpelajar Simalungun sepertinya tidak mampu mengembalikan dan mengambil alih situasi. A.E. Saragihras yang menjadi pentolan utama penyerbuan bangsawan, justru menjadi target operasi militer. Ia dianggap menjadi desersi dan akhirnya dijebloskan ke penjara menyoal harta jarahan (harta rampasan) dari istana kerajaan. Demikian pula, Madja Purba yang menjadi Wakil Pemerintah Republik di Simalungun (bupati) justru di kudeta Urbanus Pardede yang menjadi pemimpin komunis di Sintar.



(kiri-kanan): Riahata Damanik (Tuan Sidamanik), Djdiamat Dasuha (Raja Panei), Djintar Sinaga (Raja Tanoh Jawa), Sumayan Garingging, (Raja Raya), Sawadim Damanik (Tuan Bandar) dan Manase Sitompul (Jaksa Kerapatan Simalungun) pada Kerapatan Na Bolon, di Sintar, 1917

Sumber: kitlv.nl

Kaum terpelajar Simalungun yang memperoleh posisi sosial di badan *zending* RMG sepertinya memperlihatkan keengganan membela kerajaan yang diberangus. Tersebut beberapa *zendeling* Simalungun pada tahun 1940-1948, justru tidak melakukan pembelaan terhadap kondisi kerajaan yang sekarat. Orang Simalungun yang terpelajar karena pendidikan *zending* ini lebih memilih setia kepada pekerjaannya 'melayani masyarakat' dan *enggan* melibatkan diri pada politik Sumatera Utara.

Jika membaca Reid (1987)⁸⁶ misalnya, elite yang muncul di Sumatera Timur pasca peristiwa 3 Maret 1946 dikategorikan menjadi: i) pangeran, ii) politikus, dan iii) petani. Adapun pangeran yang dimaksud adalah para keluarga bangsawan yang dapat lolos (selamat) dari serbuan pada Maret 1946, sedangkan politikus adalah tokoh-tokoh yang menceburkan diri pada politik Sumatra Utara dan mereka ini memegang kekuasaan (pengaruh) sentral pada percaturan politik di Sumatera Timur sejak 1945 hingga 1950. Sedangkan petani yang dimaksud adalah petani-petani penggarap yang mampu meraih dan menguasai tanah-tanah di Sumatera Timur pasca kembalinya Belanda ke negeri asalnya.

Sejarahwan Reid (1987) menguraikan bahwa revolusi di Sumatera Timur tahun 1946 membuat keputusan total dengan kehidupan masa lalu yang beragam-ragam dan terbelah-belah. Susunan *ulebaleng*, *imeum* (Aceh), *Sibayak* (Karo), sultan dan *datuk* (Melayu) maupun *raja* dan *partuanon* (Simalungun) akhirnya dihancurkan bersamaan dengan sistem hukum peradilannya yang sejak dahulu terus menerus dipergunakan mereka untuk menguasai adat lembaga rakyatnya yang berbagai ragam.

Selanjutnya, Reid (1987) menyebut bahwa tuntutan terhadap kekuasaan yang bersifat tradisional dan kepentingan setempat telah ditundukkan kepada kepentingan nasional yang bersifat mutlak. Semangat para pemuda yang mengemban cita-cita nasional bergetar dengan hebatnya, lepas dari pengendalian kontrol praktis pemerintahan di Jawa. Semakin kacaunya situasi di Sumatera semakin dipergunakan propaganda Belanda untuk membuktikan ketidakmampuan Republik, dan semakin bergelora tekad para pemudanya untuk mendukung dan mempertahankan suatu identitas nasional.

Sistem pemerintahan di Sumatera Timur menunjukkan kesamaan dengan di pulau Jawa. Hiraki-hiraki sejajar dengan sistem Kerajaan

⁸⁶Lihat Anthony Reid. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*: Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

pada satu pihak, dan sistem Belanda/Republik di pihak lain terutama tentang *asisten residen* dan *controleur*, sekarang diganti dengan pangkat administratif yang seragam sama dengan residen, bupati dan camat. Bentuk ini lebih nyata setelah tahun 1956 tetapi proses itu sangat dimungkinkan oleh revolusi yang meletup dengan maha dahsyat pada Maret 1946. Dalam pandangan Reid (1987), kerja penghancuran tahun 1946 itu telah membuka jalan kepada suatu identitas nasional dan susunan masyarakat baru.



**Serah terima jabatan Asisten Residen Simalungun dari
G.L. Tichelman ke G.W. Meindersma, 1938**

*Tampak pada foto Sawadim Damanik (pemangku Kerajaan
Siantar) dan Raja Tanah Djawa di Pematangsiantar. Sumber:
kitlv.nl*

Gejolak sosial yang terjadi pada tahun 1946 itu tidak memberikan dampak positif kepada petani. Para motor dan pelaku revolusi 1946 adalah pemuda-pemuda kota yang tidak melibatkan petani dan masyarakat umum. Justru, masyarakat dimana korban paling banyak sewaktu revolusi 1946 yakni Simalungun dan Melayu justru kehilangan tanah-tanahnya. Pendatang Jawa dan Toba yang menggarap tanah-tanah perkebunan justru berterimakasih pada revolusi yang telah mencegah tuntutan pengembalian tanah perkebunan kepada pemiliknya. Bagi orang Melayu dan Simalungun yang telah lama duduk dan bermukim serta mengusahakan tanah-

tanah itu, menganggap gerakan radikal 1946 yang memuncak pada revolusi 1946 itu adalah tahun-tahun anarki dan penghinaan. Itulah sebabnya, orang-orang Simalungun dan Melayu yang sakit hati pada gerakan radikal 1946 itu, menyokong kembali politik federalnya hingga era Negara Sumatera Timur.

Penolakan terhadap proklamasi tahun 1945 menjadi awal pembunuhan bagi bangsawan swapraja di Simalungun. Raja-raja dan partuanon di Simalungun dianggap tidak ada gunannya. Sikap menganggap diri megah dan serba tahu, ditambah dengan perilaku yang sewenang-wenang, mempersulit aristokrat terpelajar didikan Belanda untuk menghargai dan membelanya. Karena itu, kepentingan Simalungun modern yang harusnya dilakukan lewat pendidikan, akhirnya kandas oleh keturunan raja dan partuanon. Dengan begitu, sejumlah kaum terdidik di Simalungun mengalami kerapuhan posisi sosial ketika berhadapan dengan kaum republik meskipun tidak pernah mengecap pendidikan. Hal inilah yang dialami Kaliamsjah Sinaga dan Djomat Purba. Sedangkan Madja Purba dan Djaidin Purba, berhasil memperbaiki kerapuhan posisi sosialnya dengan kembali ke pihak Republik sehingga dapat diterima menjadi walikota di Medan maupun di kantor gubernur Sumatera Utara di Medan.

Di Simalungun sendiri, sejumlah orang terdidik tetap dianggap memiliki kedekatan dengan bangsawan atau raja sehingga tidak lolos dari pembunuhan 1946. Meskipun gerakan radikal itu dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi dampaknya terus berlanjut hingga tahun 1947. Setiap orang yang berpakaian kebarat-baratan apalagi menyelesaikan pendidikan barat, ataupun menjadi keluarga bangsawan, tetap menjadi incaran dari pihak yang menyatakan diri anti feodal. Mereka yang menjadi korban dari asumsi seperti ini adalah seperti Djasamen Saragih, Mogang Purbapakpak, maupun Raja Silimahuta serta puluhan pegawai-pegawai di Simalungun.

Dari Simalungun, sejumlah golongan terpelajar dan terdidik pasca gerakan radikal 1946 yang naik di pentas politik Sumatera Timur adalah Madja Purba, Djaidin Purba, Kaliamsjah Sinaga, Djomat Purba, dan Lahiradja Munthe. Madja Purba adalah mantan bupati di Simalungun, Tapanuli Utara dan akhirnya menjadi walikota Medan. Djaidin Purba adalah walikota Medan era NST dan Republik dan terakhir bekerja di badan penerangan Sumatera Utara. Lahiradja Munthe adalah pejuang yang akhirnya aktif di militer Sumatera Utara dengan pangkat purnawirawan yakni Brigadir Jenderal. Sedangkan Kaliamsjah Sinaga adalah wakil walinegara Sumatera Timur di era NST dan Djomat Purba sebagai kepala

kepolisan Blue Piper di era NST. Dua nama yang disebut terakhir ini tenggelam pasca NST dibubarkan dan kembali ke pangkuan NKRI sejak 15 Agustus 1950.

Di Simalungun sendiri, beberapa nama yang aktif di politik di daerah ini adalah seperti Laurimba Sargih, T.M. Mardjan Saragih, Djaudin Saragih termasuk Djasamen Saragih. Tetapi, yang paling cemerlang kiprahnya dalam politik di Simalungun adalah Laurimba Saragih yang pernah menjadi walikota Siantar, ketua DPRD Siantar maupun pengurus di partai Golongan Karya. Sedangkan Djaudin Saragih adalah seorang *Pangulu Balei* (Sekretaris Raja Siantar) yang karir politiknya tenggelam pasca revolusi tahun 1946. Demikian pula Djasamen Saragih yakni seorang dokter lulusan Surabaya yang dibunuh pada rangkaian revolusi di tahun 1946.



Raja, Sultan dan Sibayak Sumatera Timur, 1938
Tampak Sawadim Damanik dari Siantar dan Rahalim Purba dari Purba hadir di Medan pada saat serah terima jabatan Gubernur Pantai Timur Sumatera kepada A.L. Spits.

Sumber: kitlv.nl

Nama-nama elit ini perlu ditambahkan dari orang Simalungun yang bergerak dari keagamaan seperti Djason Saragih, Djaulung Wilmar Saragih, Andaraya Wilmar Saragih, Kerpanius Purba, Lesman Purba maupun Jenus Purbasiboro. Mereka ini adalah elit

Simalungun yang berkiprah lewat *zending RMG* seperti membentuk *Kongsi Laita* maupun *Commite Na Ra Marpodah* di Simalungun. Mereka ini adalah pentolan pemandirian eksklusif HKBPS menjadi GKPS yang mulai mengemuka sejak tahun 1950. Kemerdekaan institusi gereja ini, walaupun telah disepakati tahun 1952, namun benar-benar terjadi pada tahun 1963. Pada periode menjelang tahun 1960-an, muncul nama-nama seperti Radjamin Purba maupun Djariaman Damanik dan lain-lain. Radjamin Purba misalnya, naik ke pangung pemerintahan menjadi bupati Simalungun selama dua periode. Demikian pula Djariaman Damanik muncul di kehakiman dan pernah menjadi ketua pengadilan tinggi.



Djomat Purba (Kepala Kepolisian NST) di Medan, 1950

Tampak pada foto Djomat Purba (paling kiri) dan Mansoer (tiga dari kiri, Walinegara NST) pejabat kolonial Belanda pada suatu upacara di Gubernurnan Mangalana (jalan Diponegoro Medan)

Sumber: kitlv.nl

Nama-nama seperti A.E. Saragihras, Bagus Saragih, Djatongam Sitio dan Djatongam Sumbayak yakni pentolan BHL Simalungun justru redup pasca gerakan radikal tahun 1946. Saragihras misalnya, akibat kejaran tentara akhirnya menyerahkan diri ke Brigade Mobil (brimob) dan dipenjara selama 4 tahun. Djatongam Sitio yang menjadi pentolan BHL di Sipolha menjadi pengusaha angkutan Laut

Tawar. Sedangkan yang lainnya sama sekali tidak pernah terangkat namanya. Demikian pula nama-nama penggerak revolusi yang bukan orang Simalungun seperti Urbanus Pardede yang mengukudeta Madja Purba sebagai wakil pemimpin republik di Kabupaten Simalungun, ataupun Adjis Siregar serta Oskar Tambunan yang mendekam di penjara.



Djaudin Saragih (*pangulu balei*) **Kerajaan Siantar, 1935**
Pada saat penganugerahan Bintang Gouden Ster kepada Sawadim Damanik di Dienshotel (Pasanggerahan) di Pulau Holang, Pamatangsiantar, 1 Juni 1935
Sumber: kitlv.nl

Perjuangan memulihkan marwah bangsawan dan pengembalian tanah-tanah perkebunan yang digarap para pendatang pasca 1946 yang dilakukan lewat NST akhirnya kandas. Kaum Republik seperti Adinegoro menyebut bahwa pemulihan kerajaan justru akan menguntungkan Negara Sumatera Timur. Dalam pandangan Reid (1987), betapapun kesalahan-kesalahan bangsawan, kharisma, kesaktian dan perlengkapan lambang-lambang yang dimanfaatkan untuk lebih memperkuat penghayatan politik kesukuan dan perbedaan golongan, tetapi cara ini tetap gagal. Para bangsawan juga telah bersaing di atas dasar perlambang dan kepercayaan pada yang

gaib, yang juga dipergunakan kaum Republik dan ternyata para bangsawan itu gagal. Kekalahan raja-raja pada tahun 1946 ini membuktikan pemutusan total untuk selama-lamanya Sumatera Timur pada masa lalunya.

D. Penutup

Pada era kolonialisme Belanda, elit masyarakat berubah drastis seperti disebut van Langenberg(1976). Menurut sejarawan Australia itu, elite sosial bukan lagi dipegang bangsawan pribumi tetapi bergeser kepada aspek pemilikan modal dan pekerjaan. Karena itu, elite pada era kolonialisme terdiri dari: i) elit Eropa sebagai kelas sosial tertinggi yakni pengusaha dan pejabat kolonial, ii) elit Tionghoa yakni pedagang dan profesional lainnya dan iii) bangsawan pribumi yakni para ningrat yang berada di Sumatera Timur. Elit Eropa adalah penguasa dan pemilik modal terbesar di Sumatera Timur sehingga pengaruhnya dapat menguasai Tionghoa dan Bangsawan Pribumi.

Pasca gerakan radikal 1946, susunan elit di Sumatera Timur termasuk di Simalungun berubah drastis. Kelompok bangsawan yang dihabisi pada Maret 1946 sirna dan punah selama-lamanya. Kemudian, pasca pembunuhan bangsawan itu, kelas sosial masyarakat Simalungun pun turut berubah yakni menjadi: i) militer, yakni tokoh-tokoh yang bergerak dalam kemiliteran didikan Jepang, ii) politisi yakni orang-orang terdidik di era kolonial Belanda baik yang berasal dari keluarga bangsawan maupun non bangsawan tetapi memiliki pendidikan mumpuni, dan iii) pejabat yakni pemimpin di pemerintahan yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Anehnya, keluarga bangsawan yang tersisa atau selamat dari pembunuhan pada Maret 1946, tidak mampu tampil dipublik. Selanjutnya, mereka ini, walaupun memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup, namun karena masih memiliki ikatan dengan kebangsawanan, maka posisi sosialnya dalam masyarakat sangat rapuh. Mereka justru dikuasai oleh politisi dan militer dadakan yang hanya berisikan ambisi.

Itulah sebabnya, merasa tidak mampu menandingi para militer dan politisi dadakan itu, maka sebagian besar bangsawan yang selamat di Maret 1946 berupaya membentuk hegemoni baru lewat feodalisme di Negara Sumatera Timur. Salah satu tujuan yang tersembunyi dalam sistem federal ini bagi keluarga bangsawan ialah memulihkan kembali kebangsawanan mereka serta mendapatkan kembali tanah-tanah yang sudah digarap orang Jawa, Toba dan pendatang lainnya di Simalungun. Namun, perjuangan lewat NST

inipun gagal sehingga kelas elit sosial bangsawan di Simalungun pun tak kuasa menandingi derasnya keinginan mengubur bangsawan atas suatu identitas nasional, yakni Indonesia. Kegagalan elit Simalungun mengambil alih kekuasaan pasca Maret 1946 membuat elit lain memikirkan Simalungun. Dalam hal ini, perjuangan dimaksud adalah mereduksi hegemoni etnik lain di institusi gereja.

Pada tahun 1952, muncul keinginan memerdekakan eksklusi etnoreligio Simalungun melalui berdirinya HKBPS yang terus bertransformasi menjadi GKPS pada tahun 1963. Perjuangan mereka ini didasari oleh sebuah kesadaran dan kesetiaan serta loyalitas terhadap etniknya yang ambruk pasca peristiwa Maret 1946. Pada saat itu, bukan hanya bangsawan yang hilang, tetapi juga tanah-tanah orang Simalungun yang tercabik-cabik oleh pendatang Jawa, Toba dan migran lainnya. Demikian pula Orang Simalungun semakin terabaikan dan terpinggirkan di pentas politik kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Lalu, lewat keberhasilan pemandirian eksklusi etnoreligio ini, orang Simalungun ternyata masih diperhitungkan walaupun dalam keadaan terseok-seok.

Walaupun Madja Purba menjabat sebagai Bupati Simalungun akhir tahun 1940-an, tetapi ia tidak cukup kuasa mengendalikan situasi pada saat itu karena kekhawatiran terhadap asal usulnya yang dari *partongah*. Demikian halnya Kaliamsjah Sinaga dari Tanoh Djawa, ataupun Djaidin Purba dari *Partuanon* Nagori, maupun Djomat Purba lebih memilih perjuangan lewat NST guna memulihkan martabat swapraja. Sementara itu sejumlah elite lain seperti Djaudin Saragih *Pangulu Balei* Siantar, lebih memilih diam menghindari amuk massa yang terus berlanjut mengejar bangsawan hingga tahun 1947. Sejumlah nama yang berkiprah di militer seperti Laurimba Saragih, Lahiradja Munthe, T.M. Mardjans Saragih, Radjamin Purba dan lain-lain tetap berada di balik Republik. Mereka ini lebih memilih jalur politik nasional pada saat itu yakni menumbuhkan identitas nasional yakni Indonesia.

Pada saat pemandirian eksklusi etnoreligio berhasil dilakukan pada tahun 1963, bermunculan elit Simalungun dikancah politik Simalungun dan Siantar. Radjamin Purba berhasil jadi Bupati Simalungun sedangkan Laurimba Saragih menjadi Walikota Siantar. Pada saat itu, Jenus Purbasiboro menjabat sebagai pimpinan tertinggi (*Ephorus*) GKPS. Trio kepemimpinan ini berhasil 'memandirikan' Simalungun dalam semua hal seperti pendidikan, kebudayaan, politik, militer, dan agama. Pada saat bersamaan, *hasimalungunon* pun dirumuskan lewat berbagai kegiatan seperti pendidikan GKPS di Pematangraya, Universitas Simalungun di

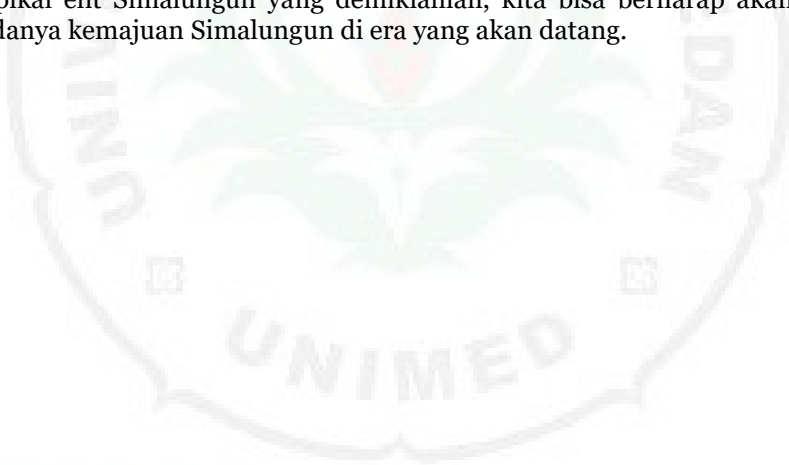
Siantar, pembentukan paguyuban cerdas pandai yakni *Partuha Maujana Simalungun*, Pelayanan Pembangunan (Pelpem), kesehatan lewat rumah sakit Bethesda Saribudolog, membentuk jejaring nasional (PGI pusat, PGI Sumatra Utara) dan internasional (VEM, LCA, ELCA dan lain-lain), revitalisasi museum Simalungun dan *rumah bolon* Pematangpurba, seminar kebudayaan dan lain-lain.

Elite Simalungun hingga tahun 1980-an diisi oleh kalangan non bangsawan yang merasa etniknya tertindas dan terhegemoni. Lewat kesadaran itulah, akhirnya loyalitas dan kesetiaan terhadap etniknya yang sedang ambruk dan terseok-seok dibangkitkan. Namun, pasca tahun 1980-an, elite Simalungun sepertinya kehilangan sosok pemimpin yang memiliki kharisma *hasimalungunon*. Orang Simalungun sudah terfragmentasi pada kelompok kepentingan yang tidak lagi memikirkan masa depan orang Simalungun secara umum. Slogan-slogan *Habonaron do Bona (HdB)*, *Sapangambe Manoktok Hitei* (bersama kita bisa), *haroan bolon* (gotong royong) termasuk *ahap (sense)* terus tereduksi.

Pada akhirnya, kehilangan pemimpin sebagai patron sosial *hasimalungunon* pun menggerus *hasimalungunon* itu sendiri. Lembaga-lembaga adat sosial mandul dan prematur. Mereka tidak bisa mengakomodasi dan mengadaptasi perubahan sosial dan kultural yang terjadi. Akibatnya, tatanan sosial seperti adat istiadat, bahasa, kesenian dan atribut identitas lainnya pun kian tergerus. Memang, penghujung tahun 1970-an, sejumlah orang Simalungun naik pada pentas nasional seperti menjadi jenderal, duta besar, profesor, direktur, pengusaha dan lain-lain. Tetapi impaknya terhadap Simalungun terlalu kecil. Mereka tidak bisa membawa suatu perubahan pemikiran terhadap sejumlah besar orang Simalungun di kampungnya maupun perantauan.

Fragmentasi ataupun pembelahan tajam akibat politik di Simalungun justru semakin akut pada era Reformasi. Bukan saja menyangkut elit Simalungun yang *segmented* dan *fragmented*, tetapi juga turut merembes ke lembaga sosial. Pada era ini, lembaga sosial seperti PMS ataupun Himapsi turut terbelah. Bahkan institusi gerejanya pun nyaris terbelah dua. Pada era ini, pragmatisme politik terjadi dalam hingar bingarnya sehingga merontokkan *hasadaon dan ahap* Simalungun. Politisi Simalungun *memang* naik ke pentas politik daerah, provinsi dan nasional. Namun, dasarnya keinginan berkuasa dari setiap elit itu, ditambah keinginan saling jejal, membuat fragmentasi masyarakat semakin nyata.

Orang Simalungun sepertinya semakin terbelah oleh keinginan politik praktis ini. Sepertinya, mereka ingin menampakkan diri dalam dunia baru yang terus dinamis yakni Indonesia, tetapi lupa bagaimana meraih dan memenangkan persaingan yang semakin cepat itu. Elit Simalungun pada masa kini, hanya mengemas atribut kultural sebagai cara meraih simpati dan dukungan, terus kemudian melupakannya baik sewaktu memenangi ataupun kalah kompetisi. Justru, makian dan umpatan serta fitnah sesama elitpun terjadi. Tauladan yang tidak pantas dipertontonkan para elit ini membuat keadaan Simalungun dewasa ini semakin bercerai berai (hilang kesetiaan dan loyalitas terhadap etniknya). Karena itu, kita membutuhkan elite yang bisa mempersatukan orang Simalungun lintas subkultur, lintas teritorial kultural dan lintas agama. Lewat tipikal elit Simalungun yang demikianlah, kita bisa berharap akan adanya kemajuan Simalungun di era yang akan datang.





Riah Kadim Waldemar Damanik

Pemangku Raja Siantar, 1917-1924

Sumber: Simalungun Frame

Nama kecilnya adalah Riah Kadim Damanik. Adalah anak Sang Nauluh Damanik dari *puangbona* (istri pertama) bernama Dorainim Purbadasuha. Pada waktu pembuangan Sang Nauluh Damanik ke Bengkalis (1907), Riah Kadim Damanik diasuh dan disekolahkan *zending RMG*. Ia dipersiapkan *zending RMG* menjadi raja di Siantar penerus ayahnya. Riah Kadim Damanik dibabtis dengan nama Waldemar oleh Henry Guillame di Haranggaol. Nama

lengkapnya menjadi Riah Kadim Waldemar Damanik. Sejalan dengan rencana Pemerintah Kolonial untuk menetapkan Siantar menjadi *Gemeente* (kotapraja) di Sumatera Timur, maka Riah Kadim Waldemar Damanik ditahtakan menjadi Pemangku Raja Siantar pasca pemangku sebelumnya yakni dari Sidamanik dan Marihat.

Pada tahun 1916, Riah Kadim Waldemar Damanik menjadi pemangku raja di Siantar. Disebut sebagai pemangku raja, karena ia bukan terlahir dari permaisuri (*puangbolon*) Kerajaan Siantar. Ia menjadi raja pertama di Siantar yang beragama Kristen Ia dipercaya menjadi raja karena dianggap tidak akan membalaskan dendam Sang Naualuh Damanik yang dimakzulkan dan diinternir Belanda. Tujuan Pemerintah Kolonial menetapkannya sebagai raja ialah untuk mendapatkan tanah gemeente Siantar. Hal ini karena hanya keturunan langsung Kerajaan Siantar-lah dianggap resmi memberikan persetujuan tanah kepada *gemeente*. Sedangkan pemangku lainnya seperti Bandar, Marihat, Sidamanik, Sipolha, dan Dolog Malela yang menjadi *partuanon* (desa induk) Kerajaan Siantar tidak berhak sama sekali.

Pada tahun 1917, Siantar ditetapkan menjadi *Gemeente*. *Negoriraad* (dewan Nagori) ditugasi merencanakan dan menetapkan batas gemeente serta tata ruang Gemeente Siantar. Pada tahun 1923, dihadapan notaris maka pelepasan tanah berupa *Hibah, Anugerah dan Pemberian* ditandatangani oleh Riah Kadim Waldemar Damanik (raja Siantar) dan Gubernur Sumatra Timur. Adapun luas tanah yang diserahkan kepada *Gemeente* Siantar adalah seluas 1014 hektar. Batas-batas wilayah tanah *Gemeente* ini mencakup sebelah timur Bah Bolon sampai ke *Europeanwijk* (jalan Simbolon), Kantor *Batafsche Petroleum Maatschapij (BPM)* di jalan Ade Irma Suryani, hingga ke *Mardjandi Estate Hospital* (kini Perguruan Nomensen Siantar). Lokasi istana Raja Siantar di Pulau Holang, Kampung Pamatang adalah otonom yang berada di wilayah *Gemeente* tapi tidak tunduk pada Pemerintah Kolonial. Pasca penyerahan tanah itu, pada tahun 1924, Riah Kadim Waldemar Damanik dimakzulkan dari raja dan selanjutnya tahta Siantar diserahkan kepada pemangku Sawadim Damanik dari Bandar. Ia meninggal dan dimakamkan di pekuburan keluarga di Simpang Dua, Nagahuta, Pematangsiantar. Salah satu istrinya adalah *boru* Purbadasuha yakni *ambou* Zainal Purba, eks wakil ketua DPRD Pematangsiantar.

BESLUIT.

Behwa soja WALDEMAR toean Mega Koots,
radja (bestuur) negeri S I A N T A R telah semoefakat
dengan Padoeke Toean Assistent Resident Simeloengoen dan
Kerolanden, behwa R A M A H A D I N telah diangkat dja-
di toean (radja) di S I D E M A N I K.-

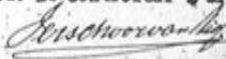
Pamatang Siantar, den 20sten Juli 1916.--



Voor legalisatie van de handteekening van
W A L D E M A R, Radje (bestuur) van Siantar,--

De Assistent-Resident van Sime-
loengoen en de Kerolanden,

V.d. De Controleur v/a



M E D A N, den J U L Y 1916

Goedgekeurd door mij Gouverneur der

GOEBKUNT VAN SUMATRA

bij afwezen

De Assistent Resident ter zeshikking



Besluit (Keputusan) Riah Kadim Waldemar Damanik menetapkan Ramahadin Damanik sebagai Tuan di Sidamanik. Sumber: istimewa

Sebagai catatan bahwa, pada waktu pendudukan kolonial Belanda di Simalungun khususnya, maka penentuan sebagai 'raja' (pemimpin) di *pamatang* (ibukota) kerajaan, maupun 'tuang' (pemimpin) di *partuanon* (desa induk) harus diketahui *controleur* dan *asisten residen*. *Besluit* (Keputusan) Nomor 5 tertanggal 28 Juli 1916 di atas adalah *Besluit* Riah Kadim Waldemar Damanik yakni Pemangku Raja Siantar sewaktu menetapkan Ramahadin Damanik sebagai pemimpin di Desa Induk (*Partuanon*) Sidamanik. Wilayah *partuanon* Sidamanik adalah salah satu *partuanon* di wilayah Kerajaan Siantar disamping Bandar, Marihat, dan Dolog Malela. *Besluit* di tandatangani penguasa lokal (*zelfbestuur*) dan juga pejabat pemerintahan setempat (*Controleur Simalungun en Karolanden*) maupun pejabat pemerintah di atasnya yakni Asisten Residen Sumatra Timur.

Kenyataan ini menunjukkan kerapuhan otoritas dan kewenangan swapraja Simalungun di era kolonial. Para swapraja yang sebelum era kolonial mendasarkan penentuan pemerintah di wilayah kekuasaannya berdasar kekerabatan itu harus diganti dengan sistem administrasi yang ditetapkan pada era kolonial. Kenyataan ini sebagai bagian dari 'politik penaklukan' yakni adanya keselarasan *zelfbestuur* sesuai keinginan pemerintah kolonial. Jadi, setiap pemimpin di desa induk (*partuanon*) adalah orang-orang yang dianggap loyal, setia dan kepada raja dan bersedia mempertahankan kepentingan kolonial di Simalungun. Itulah sebabnya, tidak satupun raja-raja dan *partuanon* di Simalungun yang 'berontak' kepada kekuasaan Belanda di Simalungun pasca penangkapan dan pemenjaraan Sang Nauuluh Damanik di tahun 1907.

Menyoal tentang organisasi sosial politik Simalungun yang mencerminkan 'bernegara' ini harus lebih dalam digali sehingga tampak bedanya sebelum dan selama kolonialisme Belanda. Jika merujuk Reid (1971) misalnya, disebutkan bahwa ketika Belanda memijakkan kakinya di Sumatera Timur menemukan bahwa Melayu dan Simalungun sudah menerapkan ketatanegaraan bercorak monarhi ini. Kenyataan ini menurut Reid (1971) lebih memudahkan dalam upaya penaklukannya daripada harus 'menciptakan' lagi. Tiap masyarakat yang sudah 'terbentuk' sistem kerajaannya, maka urusan Belanda tinggal mendekati dan menyodorkan *verklaring* saja. Jika menolak *verklaring*, maka dimakzulkan di penjarakan.



G.L. Tichelman menghadiri perayaan jubileum Perangkat Kerajaan Pamatang Tanah Jawa, 1937 *Sumber: kitlv.nl*



Sawadim Damanik (pemangku Raja Siantar) dan bangsawan Simalungun dalam busana Pejabat Kolonial, 1935
Sumber: kitlv.nl



Tuan Anggi Dolog Silou dan Keluarga, 1938
Sumber: kitlv.nl



Raja dan panglima Dolog Silou, 1910
Sumber: kitlv.nl



Penyucian diri (*maranggir*) di Kerajaan Panei, 1936
Sumber: kitlv.nl



Perangkat pemerintah di Pamatangpanei, 1936
Sumber: kitlv.nl



R. Fabricius (*penulis cerita sandiwaranya Belanda*) mengunjungi
Gomok Saragih di Raya, 1938.
Sumber: kitlv.nl



Salah satu keluarga bangsawan Simalungun, 1935
Sumber: kitlv.nl



Hapoltakan Saragih (*Raja Raya*), 1889-1932

Sumber: kitlv.nl



Pamoraidup Dorma Girsang (*Raja Silimahuta*), 1939
Sumber: kitlv.nl



Bandar Alam Purba Tambak (*Raja Dolog Silou*), 1967

Sumber: <http://sultanindonesiablog>



Sawadim Damanik (*pemangku raja Siantar*), 1935
Pasca penganugerahan Gouder Ster, 1 Juni 1935
Sumber: kitlv.nl



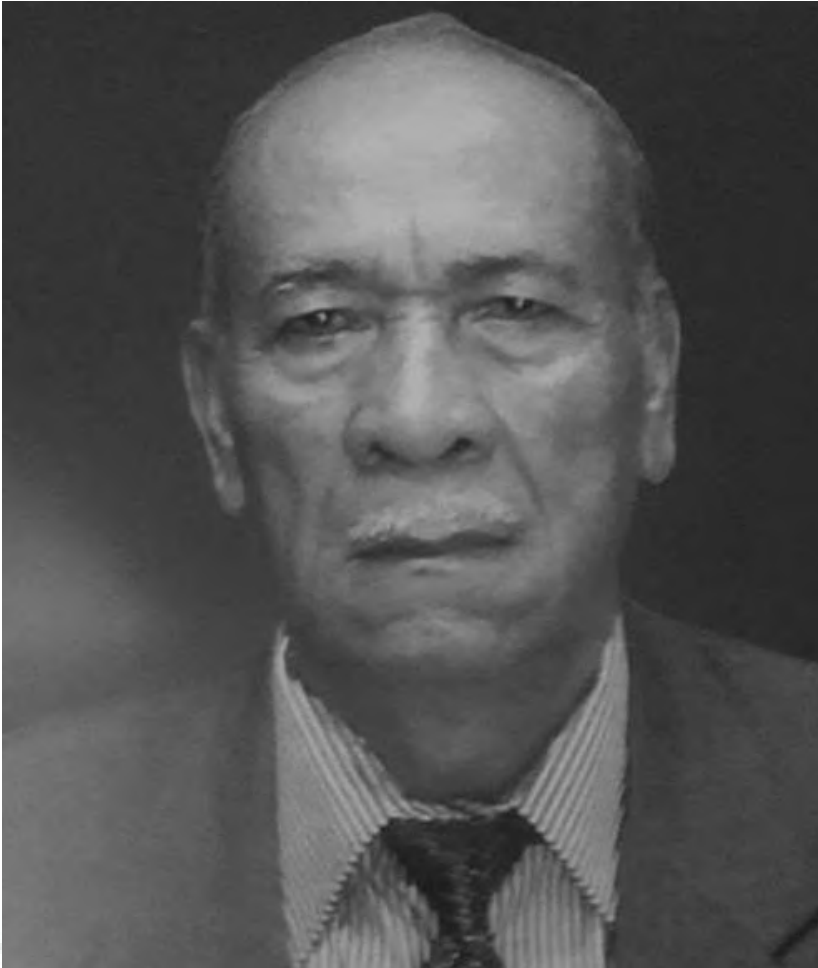
(kiri-kanan): **Ragaim Tambak** (*Raja Dolog Silou*) 1939, **Ramahadin Damanik** (*tuan Sidamanik*) 1939), **Gomok Saragih** (*Raja Raya*), 1939 dan sketsa **Rondahaim Saragih** (*Raja Raya*) diperbuat tahun 1909. *Sumber: kitlv.nl*



Pinta J. H Damanik (*Tuan Sipolha*), **Tichelman** (*Asisten Residen Simalungun*), **Sawadim Damanik** (*pemangku Raja Siantar*) dan **Djaudin Saragih** (*Pangulu Balei Siantar*) di **Sipolha, 1935**. *Sumber: kitlv.nl*



Tiga Pemangku adat Kerajaan Simalungun, 2017
(Kanan-kiri): Difi Sang Nuan Damanik (kanan, Siantar), Artalim Hotmatua Saragih (tengah, Raya) dan Tanjargaim Purba Tambak (kiri, Dolog Silou), pada Festival Keraton Nusantara ke-11 di Cirebon, 2017. Sumber: <http://www.neosimalungunjaya.com>



Djaniapoh Purba
Sumber: google image

Salah satu elite Simalungun yang muncul kepermukaan pada awal tahun 1970-an. Kemunculan itu sejalan dengan pemandirian eksklusif GKPS dari dominasi HKBP. Djaniapoh Purba masuk dalam kategori pemikir Simalungun sejak tahun 1970 guna merumuskan *Hasimalungunon* lewat tulisan ataupun ucapannya. Sangat getol mengkritisi campur aduk adat istiadat Simalungun karena asimilasi yang terjadi. Meninggal tahun 2018 di Medan.

BAB IX PENUTUP

Koleksi foto yang tersedia pada lembaga-lembaga arsip Belanda (*kitlv, Tropen Museum, dan Leiden University*) tentang Simalungun memperlihatkan lima hal, yaitu: *pertama* keadaan alam dan lingkungan, *kedua* masyarakat dan kebudayaan, *ketiga* modernisasi kewilayahan (*municipality*), *keempat* pejabat kolonial maupun penguasa lokal (*zelfbestuur*), dan *kelima* ragam aktifitas seperti rapat, pertemuan, upacara, serah terima jabatan maupun karnaval budaya.

Sebagai arsip sejarah Simalungun, foto arsip kolonial memiliki fungsi seperti: i) perekam objek dan subjek pada eranya, ii) media ekspresi subjek, iii) mengkomunikasikan ide dan gagasan, iv) kesenangan, dan v) dokumen pribadi (arsip pribadi). Sebagai alat bantu analisis sejarah tekstual dan kontekstual, maka foto arsip Simalungun membantu analisis kesejarahan tentang: *pertama* Desain dan tata ruang di era kolonial di Simalungun, *kedua* memahami teks dan kontekstual historis masyarakat dan kebudayaan Simalungun di era lampau, *ketiga* jejak (bukti) digital peradaban manusia dan lingkungan Simalungun di masa lampau, *keempat* lukisan atau gambaran tentang situasi, keadaan, dan peristiwa di Simalungun pada era lampau serta *kelima* refleksi konstruksi kesadaran Simalungun sebagai bagian dari bangsa Indonesia guna memperkokoh identitas nasional dan kolektif Simalungun.

Foto (*beeld* atau *picture*) adalah catatan yang direkayasa secara canggih dan merupakan hasil hubungan sekilas antara orang yang difoto dengan juru foto (fotografer). Karena itu, foto memperkaya kisah sejarah sosial dan etnohistori (sejarah etnik) yang menawarkan topik-topik kajian. Dalam hal ini, arsip foto tentang Simalungun selama era dan pasca kolonialisme hingga tahun 1960 adalah catatan sejarah (*history record*) yang terekam dalam bentuk visual. Catatan dan rekaman visual ini merupakan hubungan singkat antara fotografer dan objek Simalungun.

Foto adalah bukti riil tentang kejadian ataupun peristiwa di masa lampau yang dapat dilihat pada masa kini (*real object can be seen*). Arsip foto berguna untuk melihat kebudayaan materil untuk dapat dipahami (*to present material culture to be viewed*). Foto baik yang *by design* maupun natural (alamiah), ataupun di studio foto maupun

in situ harus melibatkan analisis tekstual dan kontekstual sehingga dapat berbicara dengan mata (*speak to the eyes*). Karena itu, foto bukanlah sekedar kenangan terhadap masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah bahwa foto dapat menjadi alat bantu analisis kebudayaan di masa silam. Dari pemahaman terhadap tekstual dan kontekstual foto, maka kebudayaan (*culture*) maupun peradaban (*civilization*) dapat didefenisikan.

Arsip foto merupakan sumber-sumber penulisan sejarah etnik disamping film, *foklore*, karya sastra maupun lukisan guna membentuk narasi sejarah etniknya. Karena itu, urgensi foto arsip Simalungun yang tersedia di Belanda seperti di *kitlv.nl*, *Tropen Museum Institut, NIOD* maupun *Leiden University*, ataupun di *VEM Wupertal Jerman* sangat penting guna memahami kedudukan masyarakat Simalungun dalam perjalanan sejarah, kebudayaan dan peradabannya.

Naskah ini mencoba mendeskripsikan sedikit foto tentang Simalungun yang tersimpan rapi di beberapa lembaga arsip di Belanda. Foto-foto itu menggambarkan tentang objek kultural *in situ*, atribut kultural materil, tradisi tulisan (*laklak*), geografi dan topografi, sumberdaya alam, maupun pengaruh modernisasi terhadap Simalungun dan kewilayahannya yang nampak pada infrastruktur, sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, perbangkan, perhotelan, jalan dan jembatan, bioskop, gedung pertemuan, dan lain-lain. Demikian pula tampak dengan jelas foto-foto pemerintah swapraja (*zelfbestuur*), pejabat kolonial, *planters* (pengusaha perkebunan), rumah ibadan maupun aktifitas serta tokoh-tokoh *zending RMG*.

Arsip foto tentang Simalungun pada periode 1907 hingga 1950 lebih memfokuskan diri pada sudut pandang kolonial. Itulah sebabnya, sebagian besar foto-foto tentang Simalungun lebih menunjukkan aktifitas pemerintahan maupun perkebunan. Bilapun terdapat foto-foto pemerintah swapraja, maka foto-foto tersebut lebih menonjolkan diri pejabat lokal sebagai *underbouw* kolonialisme. Juru foto kolonial lebih memilih orang-orang Eropa dan aktifitasnya sebagai perlambang keberhasilan dalam menata '*Negeri Terjajah Simalungun*', yang oleh mereka maka masyarakat Simalungun dihantarkan menjadi masyarakat terbarukan lewat pemerintahan modern, kesehatan modern, pendidikan modern, infrastruktur modern, perumahan modern, keuangan modern maupun adminisitrasi modern, termasuk cara mengisi waktu luang, membaca buku maupun membaca koran.

Orang-orang Eropa dengan gaya berbusana modern (setelan putih, setelan hitam) memakai alas sepatu, topi dan tanda bintang digambarkan sebagai citra masyarakat Eropa modern yang dinamis. Sementara itu, masyarakat pribumi Simalungun digambarkan sebagai masyarakat bodoh, belum beradab (*uncivized*), terbelakang dan statis. Dalam setiap pertemuan atau rapat-rapat kolonial misalnya, pejabat swapraja yang difoto selalu hadir dengan pakaian kebesaran tradisional yang rumit dan kompleks yang dicitrakan sebagai ketundukan pada aturan dan norma sosial tradisional.

Namun demikian, penerimaan orang Eropa terhadap elit lokal yakni *partongah* (bangsawan) yang bersifat *ascribed status* ini berbeda dengan pencapaian orang Eropa yang cenderung berdasarkan prestasi atau *assigned status*. Kehadiran orang-orang *partongah* pada jamuan makan malam ala kolonial, pertemuan ala kolonial, rapat ala kolonial, termasuk gaya berbusana ala kolonial ini, mencerminkan penerimaan orang-orang pribumi Simalungun terhadap perubahan sosial dan kultural yang ditawarkan orang Eropa.

Pada tahun 1930-an, sejumlah kecil orang Simalungun karena penerimaan mereka terhadap '*hal-hal modern*' yang ditawarkan orang Eropa lewat pendidikan misalnya, mampu tampil kepermukaan dan menjadi elit kedua setelah orang Eropa dan Tionghoa di Simalungun. Mereka ini dicitrakan sudah meninggalkan kebudayaan lokalnya karena tampil dengan balutan busana modern seperti busana setelan maupun jas. Mereka ini adalah contoh orang Simalungun yang menapak karir lewat pendidikan ala Belanda dan *zending* Jerman di Simalungun.

Memasuki tahun 1930-an, elite lokal Simalungun karena keberhasilan lewat pendidikan terutama karena *misi zending* Jerman mendirikan organisasi guna mengembangkan peradaban dan kemajuan Simalungun. Seperti *Comite Na Ra Marpodah*, *Kongsi Laita*, *Majalah Sinalsal*, *Parguru Saksi ni Kristus*, Sekolah Pendeta, sekolah rakyat (*Volkschool*) maupun *Volgeschool*, Kongsi Perguruan Alkitab dan lain-lain. Mereka yang bergerak lewat *zending* ini mampu membentuk kesadaran etnik Simalungun lewat pembentukan HKBPS tahun 1952. Kemudian, eksklusi etnoreligio HKBPS menjadi embrio terbentuknya GKPS pada tahun 1963.

Sementara itu, lewat pendidikan Belanda seperti *HIS*, *HBS*, *AMS*, *MOSVIA*, *Boarding (internaat) School*, maupun sekolah perkebunan dan lain-lain, mampu membawa perubahan signifikan bagi orang Simalungun. Mereka yang lolos dari sekolah Belanda ini, pada akhirnya melahirkan sejumlah orang Simalungun sebagai politisi

dan birokrat maupun pegawai pemerintah menjelang dan pasca Indonesia Merdeka. Demikian halnya lewat dinas ketentaraan (militer) Jepang, akhirnya sejumlah orang Simalungun menapak karir di dunia kemiliteran pasca Indonesia merdeka. Catatan dan foto rekam jejak mereka ini tersedia rapi di berbagai arsip kolonial.

Naskah analisis foto tentang peradaban Simalungun ini memperlihatkan kemampuan dan pengalaman orang Simalungun bergaul dengan orang (etnik) lain. Dari sebuah peradaban yang disebut *natives*, karena sentuhan peradaban modern ala Barat (Belanda dan Jerman) akhirnya menggiring dan melahirkan perubahan *natives* pada kehidupan modern. Modernisasi itu mencakup segala hal tentang kehidupan sosial, kebudayaan dan peradaban Simalungun.

Naskah ini telah menyampaikan bahwa identitas kolektif *hasimalungunon* dapat dipahami lewat pemahaman perjalanan memori kolektif sebagai sejarah sosial yang memeplihatkan penerimaan dan penolakan untuk merajut momen-momen yang dapat diingat bersama. Keberadaan memori kolektif Simalungun tidak hanya tergantung pada kemampuan warga Simalungun untuk merajut momen yang dapat diingat bersama, tapi juga pada keinginan warga Simalungun untuk melupakan bagian-bagian tertentu dari memori pribadi atau komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Naskah diterbitkan

Abendanon. J.H.

2005 *Door Duisternis tot Licht: Habis Gelap Terbitlah Terang* (Armijn Pane, penerjemah). Jakarta: Balai Pustaka.

Adishakti. L.T,

1997 *A Study on the Conservation Planning of Yogyakarta Historic-tourist City Based on Urban Space Heritage Conception*. Disertasi. Graduate School of Global Enviromental Engineering, Kyoto University, Japan.

Anderson. John.

1971 *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Barth. Fredrik.,

1969 *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia. Press

Barned. D. Joh.,

1912 *50 Jahre Batafmission in Sumatra*. Berlin: Verlag von Martin Warneck

Basundoro. Purnomo,

2009 *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.

Breman. Jan,

1997 *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial pada awal Abad ke-20*. Jakarta: Grafiti.

Buiskool. Dirk A,

2005 *Medan Historical Tours and its Surrounding*. Medan. Trijaya Travel and Agency.

2007 Orang-orang yang membawa kontribusi positif terhadap Sumatera Timur masa 1860-1942. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional: *Tokoh, Pejuang dan Pahlawan Sumatera Utara*, oleh Pussis-Unimed, Medan 10 November.

Budiharsono. S.,

2001 *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Bintarto. R., dan Hadisumarno. Surastopo,

1982 *Metode Analisis Geografi*. Jakarta: LP3ES.

Biro Sejarah Prima.

1976 *Perjuangan Kemerdekaan Dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi*. Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area.

Castels. Lance.,

2001 *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*. Jakarta: KPG.

Colombijn. Freek, Berwegen, M., Basundoro, P., dan Khusyairi. JA,

2005 *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.

Dasuha. Juandaha Raya P., dan Sinaga. Martin Lukito.

2003 *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun, 2 September 1903-2003*. Pematangsiantar: Kolportase GKPS.

Dasuha, Juandahara Raya. P., dan Damanik. Erond L.,

2016 *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetri Institute

Damanik, Jan Jahaman., dan Sinaga. Salmon.,

2013 *Parmahan Ulang Gabe Iparmahani: Mengenang dan Belajar dari Pelayanan Pdt A. Wilmar Saragih, 1916-1962*. Medan: Tanpa penerbit.

Damanik. Jan Jahaman,

1995 *Tunggul yang Bertunas*. Thesis Magister Theologia STT HKBP. Pematangsiantar.

Damanik. Erond L., dan McKinnon. E.E.,

2012 'Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Putri Hijau, Namurambe, Northeast Sumatera', in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. edited by Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz., Singapore: NUS Press PTE. LTD.

Damanik. Erond L.,

2017 *Agama, Perubahan Sosial dan Identitas Etnik: Moralitas agama dan kultural di Simalungun*. Medan: Simetri Institut.

2017 *Rumor Kanibal, Menolak Batak dan Jejak Perdagangan: Etnohistori Sumatra bagian Utara*. Medan: Simetri institut.

- 2017 *Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif hapusnya swapraja Simalungun pada Maret 1946*. Medan: Simetri Institut.
- 2017 *Busana Simalungun: Politik Kolonial, Peminjaman Selektif dan Modernitas*: Medan: Simetri Institute.
- 2017 *Tortor: Gerak Ritmis, Ekspresi berpola dan Maknanya bagi orang Simalungun*. Medan: Simetri Institute.
- 2016 *Kisah Dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas, Kota Medan 1863-1942 (Jilid-I)*. Medan: Simetri Institute.
- 2016 *Danau Toba: Permata Mahkota Pulau Sumatera*. Medan: Simetri Institute.
- 2016 *Kisah dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas, Kota Medan 1863-1942 (Jilid-I)*. Medan: Simetri Institute.
- 2013 *Sang Na Ualuh Damanik: Gagasan, Karya dan Tindakan*. Medan: Unimed Press.
- Damanik, Erond L. (ed).
- 2017 *Analisis Teks Cerita Sejarah Parpandangan Na Bolag: Awal mula Kerajaan Nagur di Simalungun*. Pematangsiantar: KPBS. Lihat juga
- 2017 *Habonaron do Bona: Tantangan dan Refleksi Abad 21*. Medan: Simetri Institute
- Geertz. Clifford., (ed).
- 1967 *The Integrative Revolution: Primordial Sentiment and Civil Politics in the New States, in Old Societies and New States* (Clifford Geertz, Ed). New York: The Free Press.
- Groeneveldt, W.P.,
- 1959 *Historical Notes on Indonesian and Malay: Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bharata.
- Holt. Claire.,
- 1968 *Art in Indonesia: Continuities and Change*. Ithaca: Naw York: Cornell University Press.
- Hirouse. Masashi.
- 2009 *The Role of Local Informants in the Making of the Image of "Cannibalism" in North Sumatera, in From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatera.*, Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

- Joustra. M.
 1910 *Batakspiegel*. Leiden: Uitgrave van het Bataksch Institut no. 3
- Keller. Suzanne,
 1995 *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kusno. Abidin,
 2009 *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo.
 1999 *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Loderics. E.A.,
 2008 *Medan: Beeld van een Stad: Pictures of a city*. Purmerend: Asia Maior.
- Mas'oe'd. Mohtar, dan MacAndrew. Colin,
 2006 *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mauss. Marcel
 1954 *The Gift: Forms and Function of Exchange in Arabic Societes*. London: Cohen and West
- Marsden. William
 2008 *Sejarah Sumatera*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- McKinnon. Edward E.,
 2011 *Rock-cut chambers on the East Coast of Sumatra: A translation and review of G.L. Tichelman's Felsengänge an Sumatras Ostküste, with additions and amendments*. Singapore. NalandaSriwijaya Centre Working Paper Series No.5
- Nordholt. Schulte, Purwanto. Bambang, dan Saptari. Ratna,
 2008 *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Parson. Talcott,
 1966 *Societies*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Perret. Daniel,
 2010 *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG dan EFEO Prancis.
- Pelzer. Karl J,
 1988 *Toe'an Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur (1863-1947)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

- Pelly. Usman,
 2015 *Urbanisasi dan Adaptasi: Misi Budaya Mandailing dan Minangkabau di Kota Medan*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Pedersen. Paul,
 1975 *Darah Batak dan Jiwa Protestan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Purwanto. Bambang,
 2006 *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*. Yogyakarta: Ombak.
- Purba. M.D.
 1977 *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*. Medan: Penerbit M. D. Purba.
- Polo. Marco,
 1995 *Cannibals and the Kings: Nothern Sumatera in 1290s*, in *Witnesses to Sumatera: A Travellers Anthology*. (Anthony Reid, Ed). Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Reid. Anthony,
 2009 *Is there Batak History*. In *From Distant Tale: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatera*. Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- 1997 *Inside out: The Colonial Displacement of Sumatera's Population*. In *Paper Lanscapes: Explorations in the Enviromental History of Indonesia*. (Peter Boomgaard, Freek Colombijn and David Henley, Eds). Leiden: KITLV Press.
- 1995 *Witnessess to Sumatra: A Travellers Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- 1987 *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*: Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ritzer. George dan Goodman. Douglas J.
 2008 *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Saragih. Simon,
 2014 *Elpidius Van Duijhoven, Oppung Dolok, Rasul dari Simalungun Atas*. Medan: Bina Media Perintis.
- 2016 *Biografi Taralamsyah Saragih : Jejak Sepi Seorang Komponis Legendaris*. Medan: Bina Media Perintis.

- Sinaga. Martin Lukito,
 2004 *Identitas Poskolonial Gereja Suku dalam masyarakat sipil: Studi tentang Jaulung Wismar Saragih dan Komunitas Kristen Simalungun*. Yogyakarta: LKiS.
- Sinar. T. Lukman,
 1976 *Sari Sedjarah Serdang (Jilid I)*. Medan: Ikatan Keluarga Serdang.
 2006 *Bangun dan Runtuhnya Kesultanan Melayu Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Stoler. Ann Laura,
 2006 *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Deli, 1860-1940*. Yogyakarta: Karsa.
- Schnitger. F.M.
 1989 *Forgotten Kingdoms in Sumatera*. Singapore: Oxford University Press.
- Sztompka. Piotr,
 2010 *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Taylor. Jean Gelman,
 2003 *The Social World of Batavia: Kehidupan Sosial di Batavia, Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*, (diterjemahkan Tim Komunitas Bambu). Jakarta: Komunitas Bambu.
 2008 Aceh: Narasi foto, 1873-1930, dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (eds). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV-Jakarta.
- Tideman. J.
 1922 *Simeloengen: Het Land der Timoer Bataks in Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot Een Deel van het Cultuurgebied van de Oostkust van Sumatera*. Leiden: Louis H. Becherer.
- Tim Penyusun.
 1987 *Sejarah Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Kodiklat Provsu.
- Tim Penyusun.
 1958 *Lima Puluh Tahun Kota Praja Medan*. Medan.
- Tichelman. G.L.,
 1939 "Dr P. Voorhoeve over rotsgraven in Simaloengoen (S.O.K.)" in: *Cultureel Indië*, 1, 261-264.
- Team Asistensi Pangdam II/BB.
 1977 *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II Bukit Barisan*. Medan: Dinas Sejarah Kodam II Bukit Barisan.

- Teeuw, A. and Uhlenbeck, E.,
 1997 In memoriam Dr. Petrus Voorhoeve 22 December 1899-9 February 1996, In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 153 no: 3, Leiden, 311-317
- Toer. Pramoedya Ananta,
 2005 *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Lentera.
- Van Langenberg, Michael,
 1976 *National Revolution in North Sumatera: Sumatera Timur and Tapanuli, 1942-1950*. Ph.D Thesis. Sydney, Australia.
- Van Anrooij, Francien,
 2014 *De koloniale Staat, 1854-1942: Archief van het Ministerie van Koloniën*. (Panduan Penelitian Negara Kolonial: penerjemah: Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam). Leiden: Nationaal Archief.
- Voorhoeve, P.,
 1940 "Simaloengoen Steenplastiek en Rotskamers" in: *Cultureel Indië* 2, 88-92.
- Westenberg, C.J.,
 1891 Nota over de onafhankelijke Bataklanden, *TBG XXXIV*.
 1892 Aanteekeningen omtrent de godsdientige berippen der Karo-Bataks, *BKI* 5,
 1897 Verslag van eener reis naar de onafhankelijke Bataklanden ten noorden van het Tobameer, *TNAG XIV*
 1905 Bataksche rijken Dolog en Poerba, *TNAG XXII*.
- Weber, Max
 1992 *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijanarka.
 2007 *Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Wissler, Clark.,
 1917 *The American Indian* (1st ed). New York: McMurtie.
 1923 *Man and Culture*. New York: Thomas Y Crowell Co;
 1926 *The Relation of Nature to Man in Aboriginal America*. New York: Oxford University Press.
- Wiradyana, Ketut.,
 2015 Paradigma Perubahan Evolusi pada Budaya Megalitik di Wilayah Budaya Nias. *Jurnal Kapata Arkeologi*, Volume 11 Nomor 2, November 2015, hal 87-96

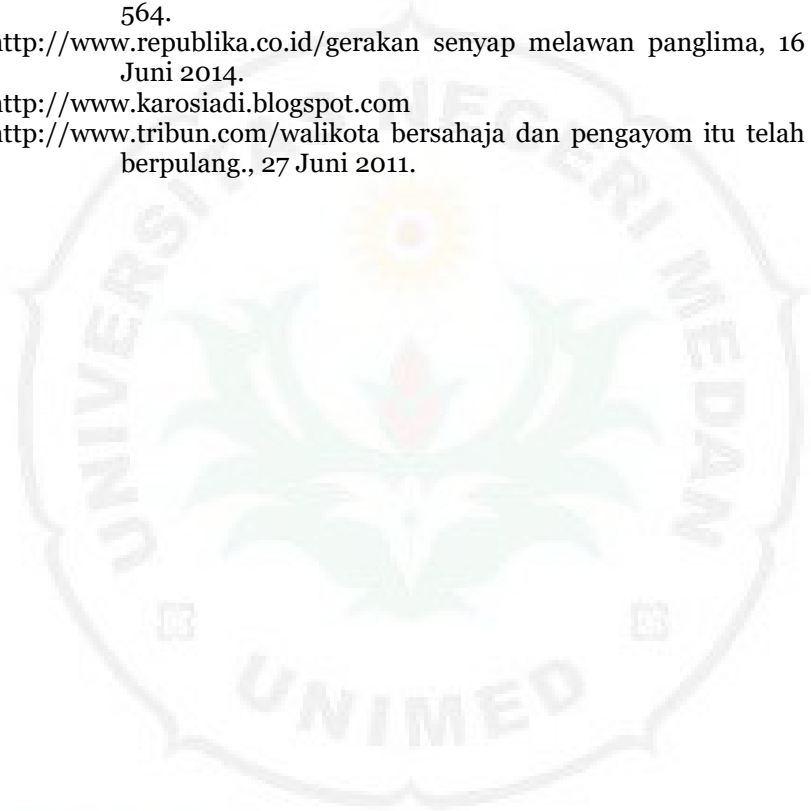
B. Naskah internet dan tidak diterbitkan

Mededelingen van Bestuur, Binnen Bestuur Seri A No. 3 Hal 549-564.

http://www.republika.co.id/gerakan_senyap_melawan_panglima, 16 Juni 2014.

<http://www.karosiadi.blogspot.com>

http://www.tribun.com/walikota_bersahaja_dan_pengayom_itu_telah_berpulang., 27 Juni 2011.



THE
Character Building
UNIVERSITY



LAMPIRAN FOTO

THE
Character Building
UNIVERSITY



Soekarno dan Agus Salim di Parapat, Simalungun, 1949
Soekarno (Presiden Republik Indonesia) dan Agus Salim (tokoh pergerakan nasional Indonesia) menjalani hukuman internir (pembuangan) selama 22 hari di Parapat, Simalungun. Menempati sebuah vila yang dibangun Marihat Estate dan terakhir menjadi markas KNIL dan kini menjadi milik Pemprov. Sumatera Utara.

Pejabat kolonial yang pernah bertugas atau melakukan kunjungan kerja ke Simalungun selama periode kolonialisme (1906-1942)



M. van Rhijn

Asisten Residen Simalungun, Jun 1934-Feb 1936

Sumber: kitlv.nl



F.J. Nieboer
Asisten Residen Simalungun, Jun 1932-Jun 1934
Sumber: kitlv.nl



W.F.G. van de Graaff.
Asisten Residen Simalungun, 1930
Sumber: kitlv.nl



H. Beeuwkes

Asisten Residen Simalungun, Mei 1926-Sept 1929

Sumber: kitlv.nl



H.E.K. Ezermann

Asisten Residen Simalungun, Des 1921-Mei 1926

Sumber: kitlv.nl



L.C. Westenek (*Gubernur Pantai Timur Sumatera*), **1922**
*Pada waktu pembukaan dan peresmian pabrik teh di
Parmonangan, afdeeling Simalungun. Sumber: kitlv.nl*



Fort de Kock (*Gubernur Jenderal Hindia Belanda*), **1925**
Mengunjungi Pematangsiantar dan Simalungun tahun 1925.
Sumber: kitlv.nl



A.C.D.de Graeff (kiri) dan J.C.F. Schor di Dolog Iilir, 1928
Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.C.D de Graef dan J.C.F. Schor meninjau perkebunan sisal, karet, teh dan kelapa sawit di Dolog Iilir, Simalungun, 1928. Sumber: kitlv.nl



J.M. Lijnkamp (Harrison and Crosfield), 1935
Makan malam di Internationale Simalungun Club, Siantar
Sumber: kitlv.nl



Upacara penanaman pinus di Bah (Aek) Nauli, 1934
Sawadim Damanik (pemangku raja Siantar) dan M. Van Rhijn (Asisten Residen Simalungun) pada penanaman pinus di Balai Penghijauan Danau Toba, di Simalungun. Sumber: kitlv.nl



Raja Simalungun pada audiensi publik di Siantar, 1937
Sumber: kitlv.nl



Tentara KNIL di Pematangsiantar, 1945

Sumber: kitlv.nl



Manghiou pejabat kolonial, 1935

Sawadim Damanik (Pemangku Raja Siantar, mengenakan peci hitam) Pada saat pembukaan dienshotel milik kerajaan Siantar di Haranggaol-Simalungun.

Sumber: kitlv.nl



**H. ter Brugge, Kepala Perusahaan Minyak Belanda
(Bataafse Petroleum Maatschappij) di Siantar, 1933**
Sumber: kitlv.nl



**M. Van Rhijn (Asisten Residen Simalungun) dan team sepak
bola Siantar Simalungun di Alun-alun Townhall, 1936**
Sumber: kitlv.nl

TENTANG PENULIS



Erond L. Damanik, adalah pengajar tetap pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Menamatkan studi Doktor (S3) Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya (2016). Menamatkan program Magister (S2) tahun 2005 dan Sarjana (S1) dari Universitas Negeri Medan (2000). Disertasi (S3) ditulis dengan judul: *Kontestasi Identitas Etnik Pada Politik Lokal: Studi Tentang Makna Etnisitas pada Politik Lokal di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*, dengan Promotor Prof. Ramlan Surbakti, dan Kopromotor Dr. Dwi Windyastuti Budi, H.

Beberapa kegiatan internasional yang sudah diikuti adalah seperti: *SSEASR International Conference ke-7* di Ho Chi Min, Vietnam (Juni, 2017), *SSEASR International Conference ke-6* di Colombo, Srilangka (Juni, 2015) *SSEASR International Conference ke-5* di Manila, Philipina (Mei, 2013), *SSEASR International Conference ke-4* di Thimpu, Bhutan (September, 2010) dan *EurASSEA International Conference ke-13* di Berlin, Jerman (September, 2009).

Karya tulis penting yang telah dimuat secara internasional adalah ‘Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Putri Hijau, Namurambe, Northeast Sumatera’, in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. 2012., edited by Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz., Singapore: NUS Press PTE. LTD. Aktif menulis di beberapa media di Medan maupun menjadi narasumber kegiatan seminar, konferensi, dialog ilmiah, wawancara televisi maupun diskusi ilmiah. Kecuali jurnal, telah menulis dan menyunting 24 (*dua puluh empat*) buku ber-ISBN.

Foto arsip kolonial tentang Simalungun memiliki fungsi: i) perekam objek dan subjek pada eranya, ii) media ekspresi subjek, iii) mengkomunikasikan ide dan gagasan, iv) kesenangan, dan v) dokumen pribadi (arsip pribadi). Sebagai alat bantu analisis sejarah tekstual dan kontekstual, maka foto arsip Simalungun membantu analisis kesejarahan tentang: pertama design dan tata ruang di era kolonial di Simalungun, kedua memahami teks dan kontekstual historis Masyarakat dan kebudayaan Simalungun di era lampau, ketiga jejak (bukti) digital peradaban manusia dan lingkungan Simalungun di masa lampau, keempat lukisan atau gambaran tentang situasi, keadaan, dan peristiwa di Simalungun pada era lampau serta kelima refleksi konstruksi kesadaran Simalungun sebagai bagian dari bangsa Indonesia guna memperkokoh identitas nasional dan kolektif Simalungun.

Foto (*beeld atau picture*) adalah catatan yang direkayasa secara canggih dan merupakan hasil hubungan sekilas antara objek foto dengan juru foto (fotografer). Karena itu, foto memperkaya kisah sejarah sosial dan etnohistori (sejarah etnik) yang menawarkan topik-topik kajian. Dalam hal ini, arsip foto tentang Simalungun selama era dan pasca kolonialisme hingga tahun 1960 adalah catatan sejarah (*history record*) yang terekam dalam bentuk visual.

Foto adalah bukti riil tentang kejadian ataupun peristiwa di masa lampau yang dapat dilihat pada masa kini (*real object can be seen*). Arsip foto berguna untuk melihat kebudayaan materil guna dapat dipahami (*to present material culture to be viewed*). Baik by design maupun alamiah ataupun di studio foto maupun in situ, foto harus melibatkan analisis tekstual dan kontekstual sehingga dapat berbicara dengan mata (*speak to the eyes*). Karena itu, foto bukanlah sekedar kenangan terhadap masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah foto menjadi alat bantu analisis kebudayaan di masa silam. Dari pemahaman terhadap tekstual dan kontekstual foto, maka kebudayaan (*culture*) maupun peradaban (*civilization*) dapat didefenisikan.



Erond L. Damanik, Pengajar di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Menamatkan studi Doktor di Universitas Airlangga Surabaya (2016), Magister (2005) dan Sarjana (2000) di Universitas Negeri Medan

